



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, mengamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 yang akan digunakan sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
 9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan di

masa transisi yang akan digunakan oleh Pj Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RPD

Pasal 2

- (1) RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Pasal 3

Sistematika RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PRIORITAS
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
BAB XI : PENUTUP

BAB III
HUBUNGAN RPD DENGAN KUA DAN PPAS

Pasal 4

RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025-2026 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.

Pasal 6

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPD ditetapkan.

Pasal 7

Uraian RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Maret 2024
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dengan ketentuan ini, maka masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2019-2024 yakni pasangan DR. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing, SH akan berakhir pada April 2024.

Pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 berdampak pada kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Dairi pada tahun 2024. Dinamika penetapan regulasi pemilihan kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengerucut pada skenario paling cepat kepala daerah dapat dilantik pada awal tahun 2025. Berakhirnya jabatan kepala daerah periode tahun 2019-2024 diikuti pula berakhirnya periode perencanaan jangka menengah daerah pada tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Terbitnya Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah daerah, sehingga nantinya daerah yang periode RPJMD telah berakhir pada tahun 2024 maka tahun perencanaan 2025 hingga tahun 2026 mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan di masa transisi yang akan digunakan oleh Pj Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026. Secara substansi, RPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perbedaan antara RPD dengan RPJMD, yakni tidak digunakannya visi dan misi kepala daerah sebagai acuan dalam penyusunan RPD, karena Pj Kepala Daerah tidak menyusun visi dan misi. RPD dengan demikian mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

RPD masih berada dalam bingkai RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025. RPD merupakan periode terakhir dan memiliki posisi penting untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan RPD harus memiliki keselarasan dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD. Visi pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 adalah : Terwujudnya masyarakat Dairi yang beriman, berdaya saing, aman, maju dan sejahtera di dalam kebhinekaan. Visi ini mengarah pada tujuan pembangunan yang selama ini dilaksanakan yaitu untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan yang dicapai melalui iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta penciptaan diri (SDM) dan produksi yang berdaya saing.

Capaian pembangunan Kabupaten Dairi dibidang sumber daya manusia mengalami banyak peningkatan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 3,76 poin dari tahun 2019 ke tahun 2023 yakni 75,18 poin (BPS Kabupaten Dairi, 2023).

Dibandingkan dengan tahun 2022, tingkat kemiskinan Kabupaten Dairi mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dimana pada tahun 2022 sebesar di 7,88% menurun menjadi 7,47% pada tahun 2023. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Sumatera Utara yakni sebesar 8,15 %. Namun demikian, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni capaian Kabupaten Dairi pada tahun 2023 sebesar 1,23 % lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 5,89 %. Demikian halnya dengan capaian PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Dairi yang

merosot secara drastis saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, di mana pada tahun 2019 sebesar Rp. 32.272.154 turun menjadi Rp. 30.271.338 namun mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir yakni Rp. 31.013.125 pada tahun 2021, tahun 2022 menjadi Rp. 33.603.654 dan naik menjadi 35.887.624 pada tahun 2023. Indeks Gini dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 sebesar 0,264 dan pada tahun 2023 menjadi 0,221. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP Kabupaten Dairi mengalami tren meningkat pada tahun 2022 berada pada 121,73 persen dan pada tahun 2023 naik menjadi 125,31 Harga produksi petani di Kabupaten Dairi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi pada tahun tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan petani di Kabupaten Dairi juga naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.

RPD 2025-2026 memiliki posisi strategis untuk menjaga efektivitas pembangunan, merespon tantangan berdasarkan kondisi eksisting capaian pembangunan daerah, upaya mencapai visi dan menjalankan misi RPJPD, dan tetap menjaga keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan antara perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten. RPD juga harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, agar terdapat sinergi antara aspek strategis di dalam RPD dengan aspek operasional yang tercantum di dalam Renstra. Operasionalisasi RPD juga harus dipastikan ke dalam dokumen perencanaan tahunan, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi 2025-2026 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
 16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170).

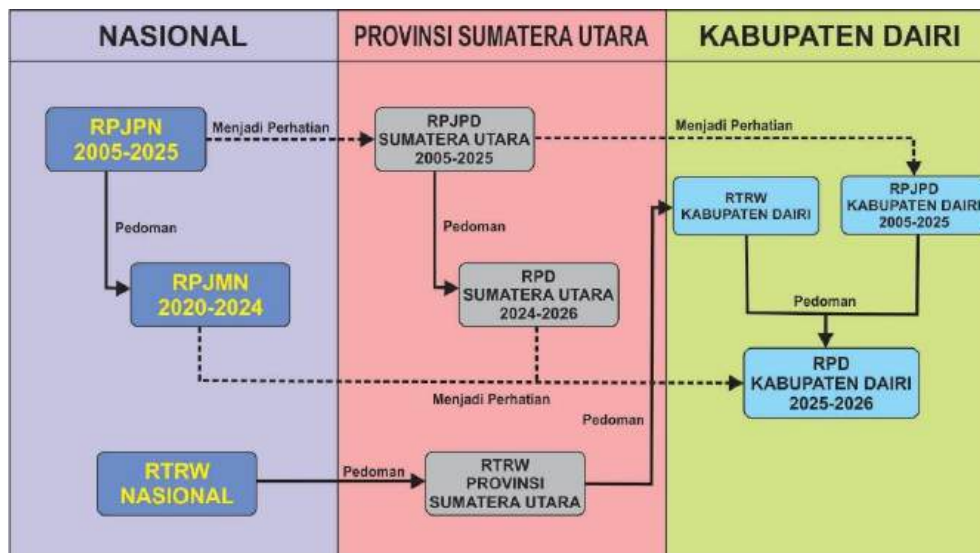
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Pada Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dijelaskan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Dairi sampai Tahun 2025
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 hingga tahun 2023;
4. RPJMD Provinsi Sumatera Utara atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

Hubungan antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan yang lainnya dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang lain



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sehingga RPJMN menjadi pedoman bagi penyusunan RPD Kabupaten Dairi dengan melihat arah pembangunan nasional 2020-2024.
2. RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Penyelarasan terhadap RPD Provinsi Sumatera Utara dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik Kota maupun Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
3. RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 Tahap IV. Dengan demikian dalam penyusunannya, juga memperhatikan arah

kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005 – 2025 Tahap IV.

4. Penyusunan RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 memperhatikan rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dairi, seperti yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Dairi. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah rencana pola dan struktur ruang sebagai acuan dalam pembangunan RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

Sejalan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, penyusunan dokumen RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025.

RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman Pejabat Bupati dalam melaksanakan pembangunan di Tahun 2025-2026.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Dairi selama kurun waktu 2025-2025.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan.
4. Menjamin terciptanya sinkronisasi, integrasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar pemerintah Kabupaten Dairi dengan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
6. Sebagai tolok ukur dalam pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 sepenuhnya mengacu kepada Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 yang terdiri dari 9 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Dairi yang meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi. Gambaran umum kondisi Kabupaten Dairi saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam dua tahun mendatang.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019-2023 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan kondisi Kabupaten Dairi dan capaian kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Dairi dalam RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026, sekaligus juga dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sebagai representasi dari tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi pada tahun 2025-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah sampai pada tahun 2026 mendatang.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Dalam memahami karakteristik kewilayahan Kabupaten Dairi, pada sub bab aspek geografi dijabarkan tentang letak geografis, kondisi fisik medan, dan penggunaan lahan. Aspek demografi terkait erat dengan informasi dinamika kependudukan di suatu wilayah. Aspek statis dan dinamis kependudukan di Kabupaten Dairi seperti jumlah penduduk, struktur penduduk, dan komposisi penduduk dideskripsikan dalam sub bab ini berdasarkan data dan informasi kependudukan pada tahun 2019 sampai dengan 2023.

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Dairi adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini memiliki berbagai aspek geografi, yang meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah serta distribusi kerawanan bencana di Kabupaten Dairi. Berikut ini uraian dari sisi aspek geografis di Kabupaten Dairi.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Dairi. Karakteristik tersebut memiliki korelasi yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Dairi. Berikut ini beberapa karakteristik lokasi dan wilayah di Kabupaten Dairi.

a. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Dairi memiliki wilayah yang berada pada pegunungan di dataran tinggi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 1.927,80 km² atau sekitar 2,69 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Dairi adalah Sidikalang, dengan 15 (lima belas) kecamatan dan 169 desa/kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan (IKK)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ² /sq.km)	Persentase Luas Kabupaten (Persen)
1.	Sidikalang	Sidikalang	11	70,67	3,67
2.	Sitinjo	Sitinjo	4	53,15	2,76
3.	Berampu	Berampu	5	40,85	2,12
4.	Parbuluan	Sigalingging	11	235,40	12,21
5.	Sumbul	Sumbul	19	192,58	9,99
6.	Silahisabungan	Silalahi	5	75,62	3,92
7.	Silima Punggapungga	Parongil	16	88,35	4,58
8.	Lae Parira	Lae Parira	9	42,75	2,22
9.	Siempat Nempu	Buntu Raja	13	60,15	3,12
10.	Siempat Nempu Hulu	Silumboyah	12	93,93	4,87
11.	Siempat Nempu Hilir	Sopobutar	10	105,62	5,48
12.	Tigalingga	Tigalingga	14	197,00	10,22
13.	Gunung Sitember	Gunung Sitember	8	77,00	3,99
14.	Pegagan Hilir	Tiga Baru	13	155,33	8,06
15.	Tanah Pinem	Kuta Buluh	19	439,40	22,79
Total			169	1.927,80	100,00

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2023

Kecamatan terluas di Kabupaten Dairi yaitu Kecamatan Tanah Pinem. Persentase luasan dari Kecamatan Tanah Pinem yaitu sebesar 22,79 persen dari total luas Kabupaten Dairi. Kecamatan dengan luasan terkecil yaitu Kecamatan Berampu, yaitu sebesar 2,12 persen dari total luas Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi



Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Provinsi Aceh

Sebelah Timur : Kabupaten Samosir

Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat

Sebelah Barat : Provinsi Aceh (Kota Subulussalam)

b. Letak dan Kondisi Geografis

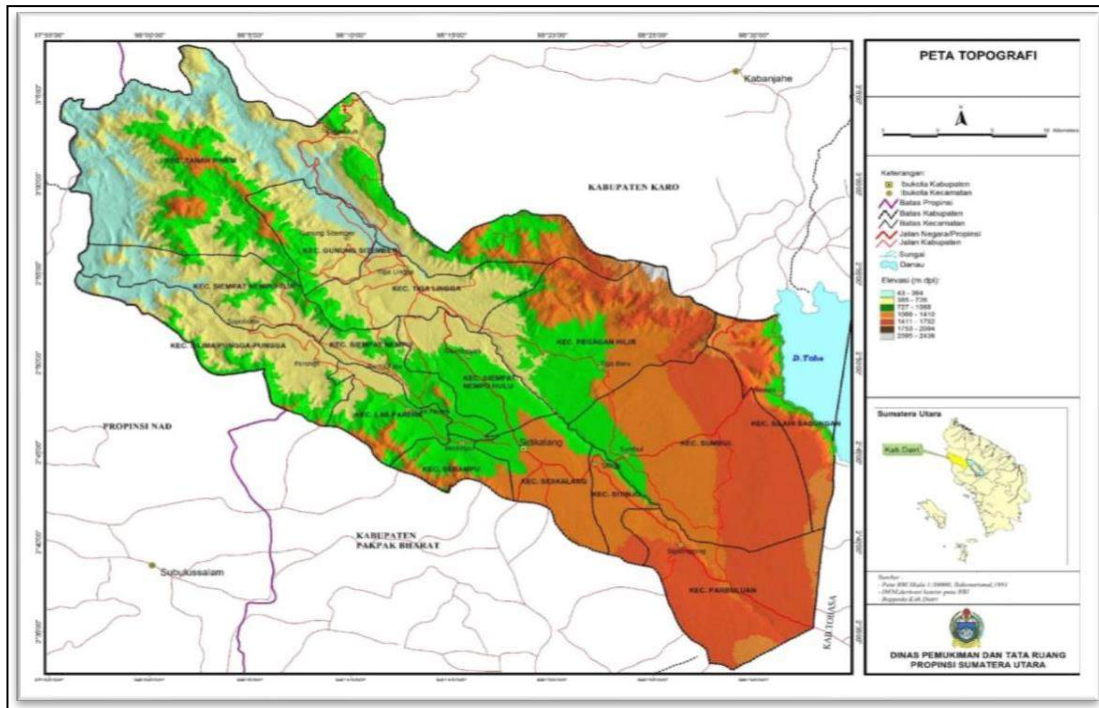
Kabupaten Dairi berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Provinsi Aceh di bagian utara, Kabupaten Samosir di sebelah timur, Kabupaten Pakpak Bharat di sisi selatan dan Provinsi Aceh (kota Subulussalam) di bagian barat. Kabupaten Dairi memiliki jarak sekitar 171 km dari Kota Medan. Kabupaten Dairi juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki kondisi cukup strategis, yakni sebagai akses menuju atau dari Kota Medan (*primary city*) dan juga salah satu jalur untuk mengakses menuju Provinsi Aceh.

c. Topografi/Kelerengan

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan, dengan ketinggian 200 – 1.431 mdpl. Secara morfologi, Kabupaten Dairi didominasi dengan kelerengan yang berombak, bergelombang,

curam sampai dengan terjal. Berikut ini disajikan distribusi topografi dari Kabupaten Dairi.

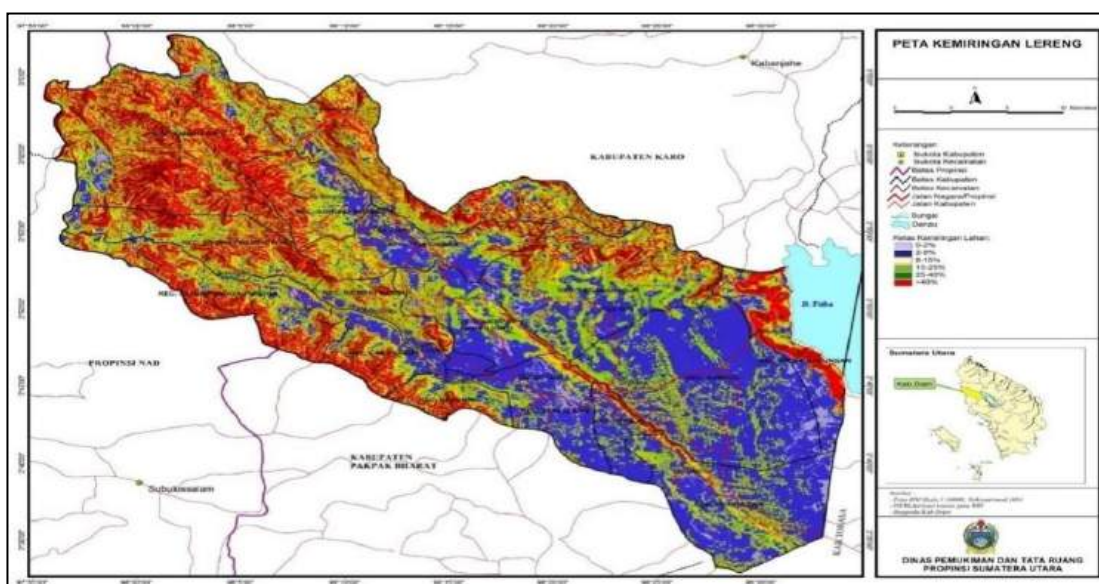
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Karakter topografi dan pola drainase alami di Kabupaten Dairi sangat rentan terhadap erosi. Wilayah yang sangat rentan terhadap erosi, khususnya terdapat di bagian tengah memanjang dari bagian Utara ke Selatan. Beberapa wilayah yang termasuk rentan terhadap erosi diantaranya yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga, Pegagan Hilir, Sidikalang, Berampu dan Lae Parira.

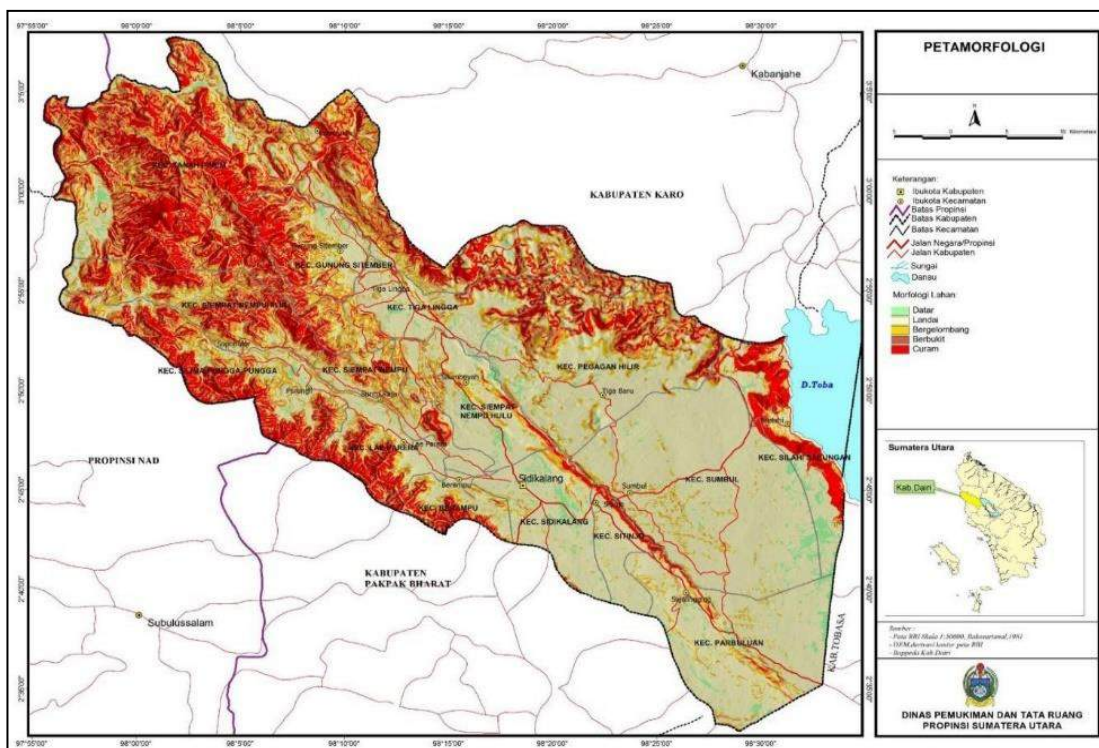
Gambar 2. 3 Peta Kelerenghan Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Pola kelerengan di Kabupaten Dairi terbagi menjadi 5 kelompok, diantaranya datar, landai, agak miring, miring hingga agak curam. Kelerengan di Kabupaten Dairi didominasi dengan kemiringan lereng 2% - 8%, yang terkategori topografi landai. Kabupaten Dairi yang terletak di Bukit Barisan, berpengaruh juga pada kemiringan yang terkategori miring hingga agak curam, dengan kisaran kemiringan sebesar 8% - 45%.

Gambar 2. 4 Peta Morfologi Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Spesifikasi dari karakter morfologi Kabupaten Dairi disajikan sebagai berikut:

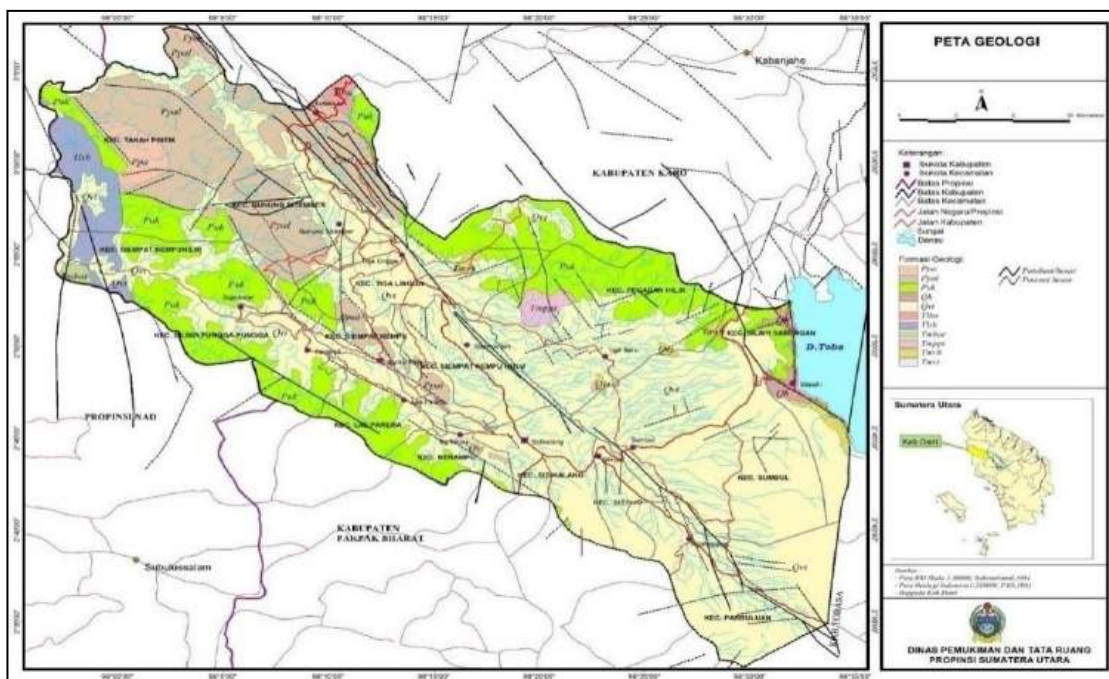
1. Kelerengan bergelombang, berombak dan sebagian kecil datar;
2. Kelerengan curam lebih kurang 27.824 ha atau sekitar 14,43 persen dari luas Kabupaten Dairi;
3. Kelerengan terjal kurang lebih 88.097 ha atau sekitar 45,70 persen dari luas Kabupaten Dairi.

d. Geologi

Kondisi geologi regional menurut peta geologi lembar Sidikalang, Kabupaten Dairi termasuk dalam zona fisiografi jajaran pegunungan Bukit Barisan Bagian Timur dan Bagian Tengah. Formasi batuan penyusun dari yang tertua sampai termuda, yaitu

Formasi Kluet (Puk) yang dicirikan oleh litologi batu sabak dan filit yang memperlihatkan sistem foliasi bersifat keras dan berwarna kehitaman yang berumur permokarbon. Satuan ini terletak tidak selaras dengan batuan yang di atasnya, yaitu Formasi Alas (Ppal) yang terdiri dari anggota Batu Gamping dengan litologi batu gamping hablur, bersifat pejal, keras dan kompak dengan warna putih keabu-abuan.

Gambar 2. 5 Peta Geologi Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

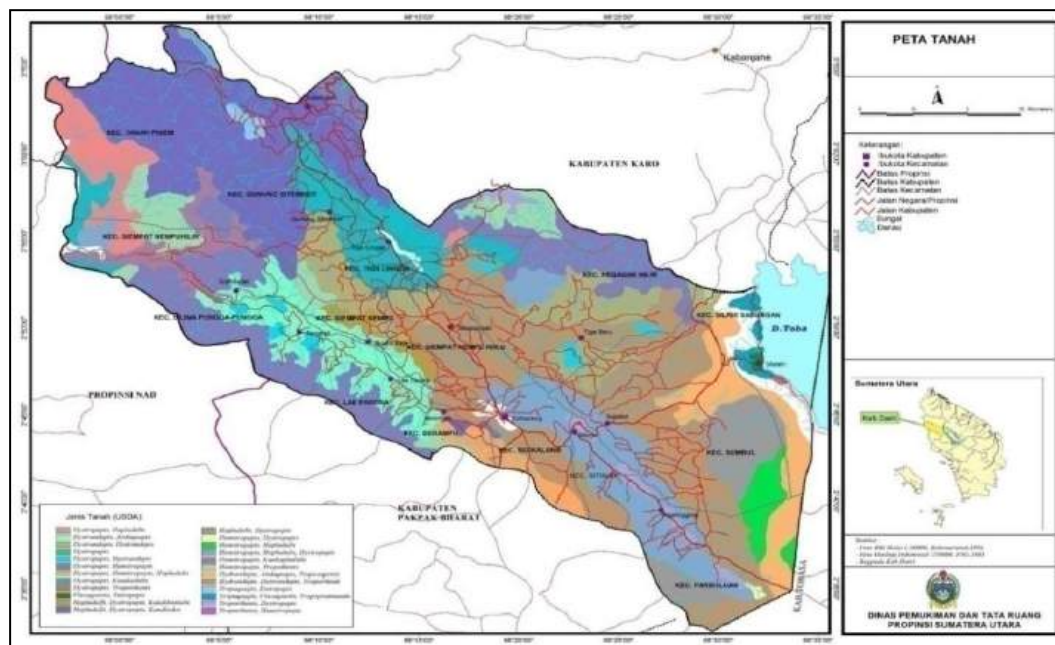
Di atas Formasi Alas diendapkan batuan dari Formasi Peutu (Tmptt) yang merupakan anggota Parapat. Formasi tersebut dicirikan dengan litologi batu pasir, konglomerat dan batu lumpur gampingan yang bersifat agak keras dan kompak, berwarna putih kecoklatan, umumnya berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Kemudian, secara tidak selaras di atasnya dijumpai Formasi Gunung Api Haranggaol (Tmvh) yang dicirikan oleh litologi andesit, dasit dan piroklastik, bersifat keras dan padat berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

e. Jenis Tanah

Kabupaten Dairi memiliki berbagai jenis tanah sebagai hasil letusan Gunung Toba dimasa lalu. Satuan jenis tanah tersebut diantaranya yaitu tanah liparit seluas kurang lebih 103.812,030 ha atau sekitar 53,85 persen dari luas total Kabupaten Dairi yang

terdistribusi di seluruh kecamatan. Tanah masa permokarbon seluas kurang lebih 62.190,83 ha atau sekitar 32,26 persen, tanah masa palaegon seluas kurang lebih 3.527,87 ha atau sekitar 1,83 persen, tanah garbo diabase sepentijin seluas 23.017,93 ha atau sekitar 11,94 persen dan sisanya jenis tanah masa jura seluas 231,34 ha.

Gambar 2. 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Kedalaman efektif tanah diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu tanah dengan kedalaman efektif < 30 cm, 30 - 60 cm, 60 - 90 cm dan > 90 cm. Kedalaman efektif tanah < 30 cm terdapat di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga, kedalaman efektif tanah 30 - 90 cm terdapat di sebelah Selatan Kecamatan Parbuluan, kedalaman efektif tanah 60 - 90 cm tersebar merata di seluruh kecamatan. Tekstur tanah apabila ditinjau dari sifat kekasarannya, dibedakan menjadi tanah bertekstur halus dan kasar. Tekstur halus menyebar di seluruh kecamatan sedangkan tekstur kasar berada di sebelah Barat Kabupaten Dairi, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga.

f. Hidrologi

Karakteristik hidrologi memiliki nilai penting dalam pengelolaan sumber daya alam, mitigasi risiko bencana, hingga perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pola hidrologi Kabupaten Dairi meliputi aliran air permukaan dan air bawah tanah. Aliran air permukaan

direpresentasikan dengan Wilayah Sungai (WS) dan aliran air bawah tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT).

1. Wilayah Sungai (WS)

Penetapan WS didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006 yang terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu:

- WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional), terdiri dari 1 (satu) DAS Danau Toba di Kabupaten Dairi seluas 110.260 ha;
- WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (NAD dan Sumatera Utara – Lintas Provinsi).

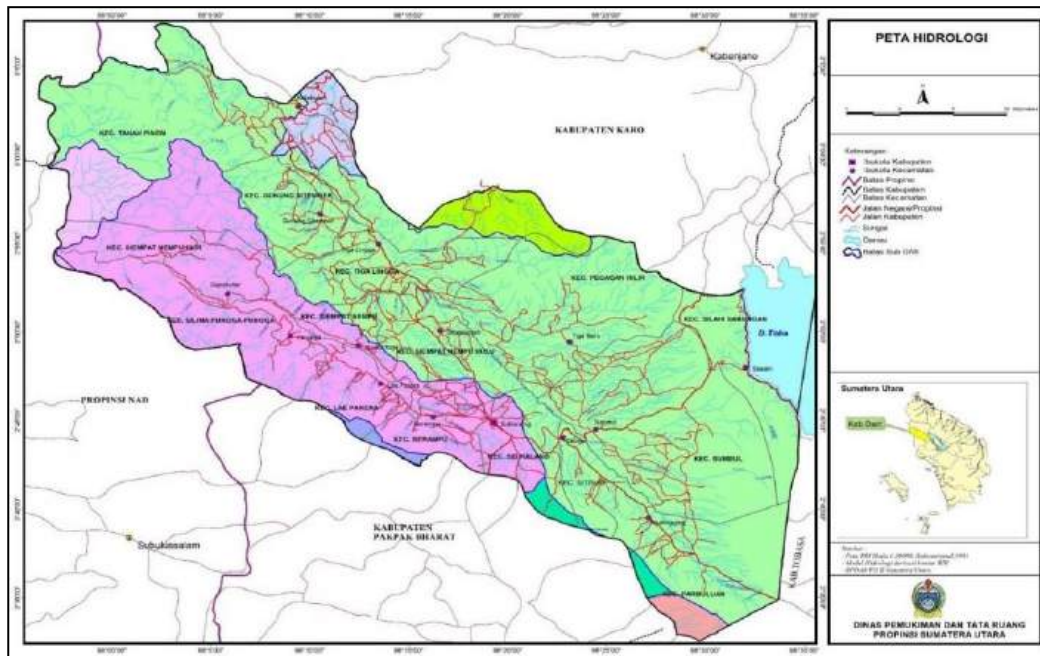
Tabel 2. 2 Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
1.	Lae Renun	Sumbul	120
2.	Lae Simbelin	Sidikalang	60
3.	Lae Simuhur	Pegagan Hilir/Tigalingga	15
4.	Lae Luhung	Siempat Nempu	25
5.	Lae Manalsal	Sumbul	20
6.	Lau Belulus	Tigalingga	7
7.	Lae Lobe	Siempat Nempu	5
8.	Lau Gunung	Tanah Pinem	10
9.	Lae Panginuman	Silima Punggapungga	4
10.	Lae Pangoroan	Silima Punggapungga	4
11.	Lae Kentara	Silima Punggapungga	10
12.	Lae Panencoh	Silima Punggapungga	8
13.	Lae Silobi	Silima Punggapungga	4
14.	Lae Pandaroh	Sitinjo	7
15.	Lae Nuaha	Sidikalang	6
16.	Lae Patulen	Sumbul	8
17.	Lae Longki	Siempat Nempu	8

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Sungai – sungai di Kabupaten Dairi dominan mengalir secara gravitasi ke arah Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara. Fungsi dari sungai-sungai di Kabupaten Dairi berfungsi sebagai saluran drainase alami yang mengalirkan air hujan diatas permukaan tanah (*surface run off*).

Gambar 2. 7 Peta Hidrologi Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Visualisi distribusi sungai di Kabupaten Dairi disajikan pada gambar 2.7. Diantara sungai-sungai yang ada, dimanfaatkan untuk irigasi sederhana maupun setengah teknis, dan kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan air minum.

2. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang di Kabupaten Dairi meliputi wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.438 km².

g. Klimatologi

Curah hujan di Kabupaten Dairi antara 2.000 – 3.500 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 181 hari/tahun. Menurut *Oldeman (1979)*, pembagian tipe iklim didasarkan atas banyaknya bulan basah (curah hujan >100 mm/bulan) dalam setahun. Tipe iklim di Kabupaten Dairi dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Iklim B1

Bulan basah antara 7 – 9 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitingjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Silima Punggapunga.

2. Iklim C1

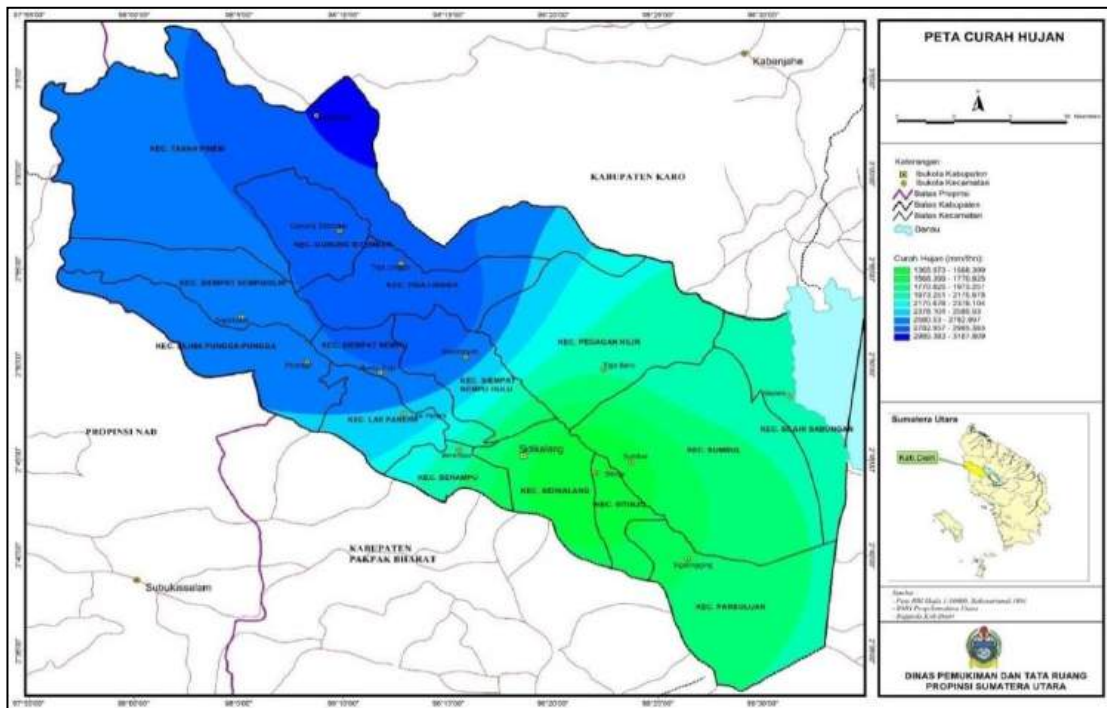
Bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sumbul, sebagian Kecamatan Siempat Nempu, Parbuluan dan Pegagan Hilir.

3. Iklim D1

Bulan basah antara 3 – 4 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Tigalingga, sebagian Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Silahisabungan.

Iklim sub tropis terjadi pada daerah ketinggian < 500 m.dpl, iklim tropis pada ketinggian antara 500 - 1.000 m. dpl, sedangkan iklim dingin pada ketinggian > 1.000 m. dpl. Lihat Gambar berikut.

Gambar 2. 8 Peta Curah Hujan Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

h. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Dairi diinventarisasi pada laporan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) tahun 2019. Berdasarkan dokumen tersebut tercatat penggunaan lahan di Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 192.780 Ha. Penggunaan lahan secara berurutan didominasi dengan hutan negara, perkebunan campuran, dan ladang.

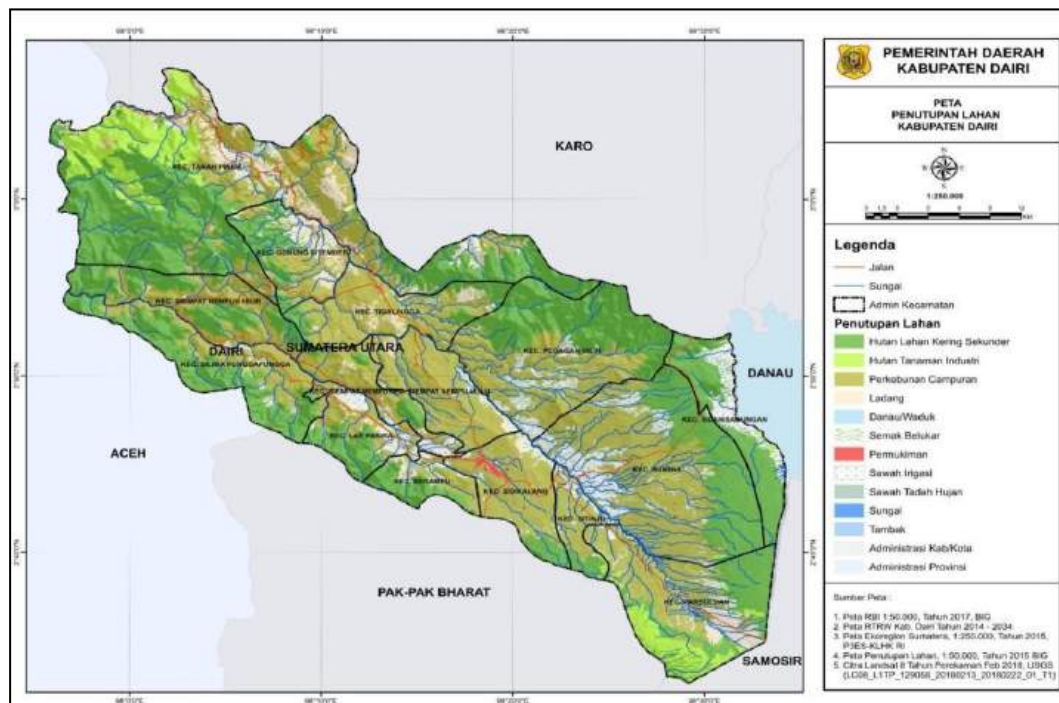
Hutan negara sebagai tutupan lahan memiliki luasan sebesar 95.603 hektar atau sekitar 49,60 persen. Perkebunan Campuran memiliki luasan penggunaan lahan terluas selanjutnya, yaitu sebesar 77.011,74 hektar atau sekitar 40,00 persen. Penggunaan lahan berupa ladang seluas 10.463 hektar atau sekitar 5,43 persen. Sedangkan luas lahan permukiman hanya seluas 1.755,99 hektar atau sekitar 0,91 persen dari luas Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		(Ha)	(Persen)
1.	Hutan	95.603,00	49,592
2.	Perkebunan Campuran	77.011,74	39,948
3.	Ladang	10.463,39	5,428
4.	Sawah Irigasi	6.802,03	3,528
5.	Permukiman	1.755,99	0,911
6.	Sungai	520,29	0,270
7.	Perkebunan Kopi	318	0,165
8.	Perkebunan Kelapa Sawit	109,63	0,057
9.	Sawah Tadah Hujan	112,26	0,058
10.	Pertambangan	43,5	0,023
11.	Danau/Waduk	24,33	0,013
13.	Tambak	15,84	0,008
14.	Lahan Terbuka	9,45	0,005
Kabupaten Dairi		192.789,45	100

Sumber: Laporan DDDTLH Kabupaten Dairi dan Hasil Analisa, 2021

Gambar 2. 9 Peta Penggunaan Lahan



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Kabupaten Dairi tentu telah mengalami perubahan penggunaan lahan setiap tahunnya. Adanya laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk, menjadi diantara komponen yang turut berkontribusi terhadap dinamika perubahan lahan di Kabupaten Dairi. Dinamika penduduk tersebut yang selanjutnya juga menuntut terhadap ketersediaan lahan yang juga semakin meningkat. Dampak selanjutnya maka pembangunan menjadi masif dan tentu berkontribusi dalam memengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Dairi.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Pertanian Lahan Basah

Peruntukan pertanian lahan basah di Kabupaten Dairi adalah sawah dengan luas kurang lebih 10.225 hektar atau setara dengan sekitar 5,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Dairi yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Gunung Sitember. Dalam rangka meningkatkan produktifitas sawah didukung dengan jaringan irigasi. Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Dairi berdasarkan aspek fungsional seluas kurang lebih 10.225 hektar, sedangkan dari aspek potensial seluas kurang lebih 21.167 hektar.

Berdasarkan pola jaringan irigasi, luasan Daerah Irigasi setengah teknis seluas kurang lebih 6.059 hektar, irigasi sederhana seluas kurang lebih 3.257 hektar dan irigasi non PU seluas kurang lebih 909 hektar dengan volume rata-rata pemakaian air sekitar 14.104 liter/detik sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Daerah Irigasi di Kabupaten Dairi

Luas DI (Ha)		Pola Jaringan (Ha)			Volume Pemakaian (Liter/Detik)	Sumber Air
Potensial	Fungsional	Setengah Teknis	Sederhana PU	Non PU		
21.167	10.225	6.059	3.257	909	14.104	Sungai
						Waduk/ Embung

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

2. Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura

Kawasan pertanian tanaman lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura ataupun tanaman pangan lainnya. Pengembangan pertanian lahan kering diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan peningkatan komoditas unggulan. Luas pertanian lahan kering di Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 28.839 hektar tersebar diseluruh kecamatan.

Prospek hortikultura akan semakin baik, selain itu tanaman ini dapat ditanam baik di lahan basah maupun lahan kering. Luas lahan peruntukan hortikultura seluas 19.500 hektar tersebar diseluruh kecamatan, meliputi tanaman jenis sayuran dan buah-buahan untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor.

3. Perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam, gambir, aren, cengkeh, kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Luas kawasan peruntukan perkebunan seluas 32.779 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.

4. Peternakan

Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan, khusus ternak lembu diarahkan di Kecamatan Tigalingga dan Siempat Nempu Hulu

sedangkan ternak kuda di Kecamatan Parbuluan. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) ataupun susu sapi dan kerbau (yoghurt).

Pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba di Kecamatan Lae Parira, Silima Punggapunga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem, sedangkan ternak babi dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini juga dibangun prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.

5. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan di Danau Toba Kecamatan Silahisabungan. Pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah, yaitu kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan.

Setiap wilayah mempunyai interaksi dengan wilayah lain yang timbul karena adanya perbedaan antar wilayah. Artinya bahwa fenomena wilayah didasarkan pada analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Suatu wilayah merupakan satu kesatuan wilayah sosial ekonomi dan sumber daya hayati perikanan. Potensi perikanan di Kabupaten Dairi diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Potensi Perikanan di Kabupaten Dairi

No	Jenis	Potensi (Ha)	Luas Areal (Ha)
I.	Budidaya		
1.	Kolam Air Tenang	400	217
2.	Mina Padi	450	391,7
3.	Jaring Apung	20	10
II.	Perairan		
1.	Sungai	234	234
2.	Danau	500	500

No	Jenis	Potensi (Ha)	Luas Areal (Ha)
3.	Bendungan	20	14,1
4.	Genangan Air	200	61
Jumlah		1.824	1.426,8

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi:

- a. Perikanan tangkap di Danau Toba (Kecamatan Silahisabungan) dan sungai-sungai di Kabupaten Dairi.
- b. Budidaya perikanan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira, meliputi ikan mas, nila, mujahir, ikan jurung (ihan batak), pora-pora, lele, gabus, belut dan sebagainya.

6. Pertambangan dan Sumber Daya Alam

Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Punggappungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa Bululaga Kecamatan Tanah Pinem; Desa Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir.

Selain itu, adanya indikasi emas (Au) di Desa Onan Lama Kecamatan Pegagan Hilir yang didulang masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Potensi Mineral Logam di Kabupaten Dairi

No	Mineral Logam	Lokasi	Cadangan	Keterangan
1.	Timah Hitam	Kecamatan Silima Punggapungga, Tanah	Tereka	Cadangan Pb dan Zn Sebesar 6,324 Juta Ton Biji.
2.	Seng	Pinem, Tigalingga,	Tereka	
3.	Perak	Siempat Nempu Hilir	Tereka	
4.	Emas	Kecamatan Pegagan Hilir	Hipotesa	

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Disamping itu, terdapat potensi bahan galian Golongan C, seperti Batu Lempung, Batu Padas, Batu Gamping, Sirtu, Pasir Kuarsa dan Marmer yang keberadaannya tersebar di kecamatan-kecamatan yang digali masyarakat secara konvensional untuk bahan-bahan konstruksi.

Potensi mineral bukan logam dan batuan serta potensi sumber daya mineral di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dairi

No.	Bahan Galian	Lokasi	Cadangan
1.	Batu Lempung	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 229,960 M ³
2.	Batu Padas/Tufa Riodasit	Tersebar di seluruh Kecamatan	Hipotesa
3.	Batu Gamping	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sidikalang • Kecamatan Siempat Nempu • Kecamatan Lae Parira • Kecamatan Siempat Nempu Hulu • Kecamatan Tigalingga • Kecamatan Tanah Pinem • Kecamatan Gunung Sitember 	Hipotesa Hipotesa Hipotesa Hipotesa Sekitar 676.312,500 M3 Sekitar 73.235.312,500 M3 Sekitar 13.169.209,375 M3
4.	Sirtu	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
5.	Pasir Kuarsa	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
6.	Marmer	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 135.576 M3

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Tabel 2. 8 Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Potensi
1.	Sidikalang	Batu Kapur, Granit, Batu Gamping, Marmer, Sirtu
2.	Sitinjo	Pasir Sedimen, Batu Padas
3.	Berampu	Sirtu
4.	Parbuluan	Radioaktif, Pasir Sedimen
5.	Sumbul	Batu Padas, Sirtu
6.	Silaxisabungan	Radioaktif, Sirtu
7.	Silima Punggapungga	Timah Hitam Pasir Kuarsa, Emas, Perak, Seng, Batu Gamping, Sirtu
8.	Lae Parira	Batu Gamping, Batu Padas, Pasir Sedimen
9.	Siempat Nempu	Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Padas,

No.	Kecamatan	Potensi
		Tanah Liat, Pasir Sedimen
10.	Siempat Nempu Hulu	Batu Gamping, Sirtu
11.	Siempat Nempu Hilir	Timah hitan, Dolomit, Perak, Seng, Perak, Sirtu
12.	Tigalingga	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Gamping, Tanah Liat, Batu Padas, Sirtu
13.	Gunung Sitember	Batu Gamping, Sirtu
14.	Pegangan Hilir	Emas, Sirtu
15.	Tanah Pinem	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Lempung, Marmer, Batu Pualam, Dolomit, Sirtu

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

7. Pariwisata

a. Pariwisata Alam

Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata, taman wisata alam, suaka alam, maupun suaka marga satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan.

b. Pariwisata Budaya

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Kabupaten Dairi seperti kawasan cagar budaya dalam bentuk situs-situs budaya utamanya ditemui hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel berikut.

Tabel 2. 9 Lokasi Obyek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Dairi

No.	Lokasi/Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
1.	Sidikalang	Puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku, Batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal, Gedung Nasional Djauli Manik

No.	Lokasi/Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
2.	Sitinjo	Taman Wisata Iman, Panorama Letter S, Air Terjun Lae Pendaroh, Monumen Liberty Manik, Monumen TB. Simatupang, Danau Sicike-cike
3.	Parbuluan	Danau Sicike-cike merupakan tempat penelitian (flora & fauna), ekowisata, berkemah
4.	Sumbul	Wisata Hutan Lae Pandom, Waduk PLTA Renun, Rumah Adat Pakpak (Sikabeng-kabeng), Lapihen/Laklak Kujur Golok, Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Partulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matahari, Mejan Palalahan
5.	Silahisabungan	Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Lae Sabungan, Aek Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turiturian, Batu Sigadap, Danau Toba (Perahu Layar, Speed Boat, Berenang), Wisata Gunung (Hiking, Gantole, Camping), Wisata Hutan (Lintas Alam, Kemah)
6.	Silima Punggapungga	Mata Air Situs Sisingamangaraja XII, Mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang
7.	Lae Parira	Bantun Kerbo (situs kerbau menjadi batu)
8.	Siempa Nempu Hulu	Letter Z (Kilometer 11), Gua Sitanduktanduk, Batu Pangulubalang Sanggapati
9.	Siempat Nempu Hilir	Air Terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panorama Tornaui, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)
10.	Tigalingga	Lau Belulus, Tank Peninggalan Sejarah, Goa (dalamnya ± 500 meter)
11.	Gunung Sitember	Kendet Liang
12.	Pegagan Hilir	Lae Simuhur, Batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan

No.	Lokasi/Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
		(tempat pemujaan)
13.	Tanah Pinem	Danau/Waduk diatas Gunung (luas ± 3 Ha), Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

8. Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Dairi meliputi industri besar, industri sedang dan industri rumah tangga dengan pengembangan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/ anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain.
- b. Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/ menengah dan kecil/ rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain.
- c. Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain.
- d. Kecamatan Silima Punggapungga, jenis industri besar, sedang/ menengah dan kecil/ rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/ anyam-anyaman dan lain-lain.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera. Ditinjau dari sisi kondisi alam dan iklim, Kabupaten Dairi berpotensi di landa berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Tidak menutup kemungkinan terjadi bencana masif karena pada jaman purbakala tercatat letusan maha dahsyat dari Gunung Toba Purba pada 72.000 SM sebagai bencana global.

Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB No. 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB sehingga RPB tingkat Kabupaten Dairi yang telah disusun ini akan diintegrasikan dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Data tentang kejadian bencana di Kabupaten Dairi diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia kurun waktu 2004 – 2015, dan data dari BPBD Kabupaten Dairi dalam bentuk catatan-catatan kejadian bencana. Berdasarkan data dari dua sumber data tersebut, kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana : Gempa bumi, Banjir, Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung), Tanah Longsor dan Kebakaran Permukiman. Data kejadian bencana di Kabupaten Dairi selengkapnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Dairi Tahun 2004-2016

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Terdampak	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
Gempa Bumi	1	1	10	-	-	-	226	1.052
Banjir	8	-	-	-	-	123	4	34

Bandang								
Tanah Longsor	86	3	5	-	-	-	2	22
Cuaca Ekstrim	42	4	8	-	-	-	397	66
Karhutla	5	-	-	-	-	-	-	-
Kekeringan	3	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran	65	2	1	-	-	121	17	86
JUMLAH	202	10	24	-	-	244	646	1.260

Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2015 dan data BPBD Kabupaten Dairi 2012–2016

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 2004 – 2016 berdasarkan data yang tercatat dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Gempa Bumi

Bencana gempa bumi yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi dan tercatat sebanyak 1 kali, yaitu kejadian gempa bumi pada tanggal 06 September 2011 berkekuatan 6,7 SR. Kejadian bencana gempa bumi ini mengakibatkan 1 orang meninggal, 10 orang luka-luka, 226 rumah rusak berat dan 1.052 rumah rusak ringan. Lokasi kejadian bencana gempa bumi ini meliputi beberapa daerah di Kabupaten Dairi (Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-Pungga, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Tanah Pinem, Gunung Sitember, dan Pegagan Hilir).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 7 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 162 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana gempa bumi.

Tabel 2. 11 Matriks Resiko Gempa Bumi Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG		Kecamatan	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
			Tigalingga: Jumagerat Kecamatan Pegagan Hilir: Laksa, Kuta Usang, Lingga Raja Ii Kecamatan Gunung Sitember: Bukit Lau Kersik Kecamatan Siempat Nempu Hilir: Lae Markelang	
	TINGGI	Kecamatan Tanah Pinem: Kuta Gamber Kecamatan Tanah Pinem:	Kecamatan Tanah Pinem: Lau Njuhar, Mangan Moli, Renun, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Tanah Pinem, Kempawa, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Gunung Tua, Suka Dame Kecamatan Sumbul: Pegagan Julu V, Pegagan Julu Iv, Pegagan Julu Ii, Pegagan Julu Iii, Pegagan Julu Vi, Pegagan Julu Vii, Pegagan Julu Viii, Pegagan Julu Ix, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin, Pargambiran,	Kecamatan Tanah Pinem: Liang Jering, Alur Subur, Sinar Pagi, Pamah, Lau Tawar Kecamatan Sumbul: Pegagan Julu I Kecamatan Sidikalang: Kota Sidikalang, Batang Beruh, Kalang Simbara, Kalang, Huta Gambir, Huta Rakyat Kecamatan Pegagan Hilir: Perik

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
			Perjuangan, Sileu- Leu Parsaoran, Pangguruan, Tanjung Beringin I, Kuta Gugung, Barisan Nauli Kecamatan Sidikalang: Bintang Hulu, Bintang, Sidiangkat, Belang Malum, Bintang Mersada Kecamatan Tigalingga: Sumbul Tengah, Ujung Teran, Sarintonu, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Bagot, Tigalingga, Lau Sireme, Lau Mil, Lau Pakpak, Palding Jaya Kecamatan Pegagan Hilir: Simanduma, Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan, Mbinanga, Bukit Baru Kecamatan	Mbue Kecamatan Siempat Nempu Hilir: Pardomuan Kecamatan Siempat Nempu Hulu: Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong Kecamatan Siempat Nempu: Sihorbo, Adian Nangka, Maju, Adian Gupa Kecamatan Silima Pungga Pungga: Lae Panginuman Kecamatan Parbuluan: Parbuluan V, Lae Hole Ii Kecamatan Lae Parira: Sumbul, Lae Parira Kecamatan Berampu: Berampu, Banjartoba Kecamatan

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
			<p>Gunung Sitember: Gunung Sitember, Lau Lebah, Batu Gungun, Rante Besi, Tupak Raja, Gundaling, Kendit Liang Kecamatan Siempat Nempu Hilir: Lae Itam, Jambur Indonesia, Simungun, Janji, Lae Luhung, Sopobutar, Lae Haporas, Lae Sering Kecamatan Siempat Nempu Hulu: Tambahan, Kuta Tengah, Lae Nuaha, Sungai Raya, Sigambir- Gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Bakal Julu, Pandan Kecamatan Siempat Nempu: Sinampang, Soban, Bunturaja, Gomit, Juma Antuang, Juma Siulok, Sosor Lontung, Huta Imbaru, Juma Teguh Kecamatan Silima</p>	<p>Silahisabunga n: Paropo Kecamatan Sitinjo: Sitinjo Ii</p>

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
			<p>Pungga Pungga: Lae Rambong, Lae Ambat, Sumbari, Bakal Gajah, Uruk Belin, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Longkotan, Parongil, Siratah, Polling Anak-Anak, Palipi, Lae Pangaroan</p> <p>Kecamatan Parbuluan: Parbuluan I, Parbuluan Iii, Parbuluan Iv, Parbuluan Vi, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Bangun I, Parbuluan Ii</p> <p>Kecamatan Lae Parira: Kentara, Bulu Duri, Sempung Polling, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kaban Julu</p> <p>Kecamatan Berampu: Karing, Pasi, Sambaliang</p> <p>Kecamatan Silahisabungan: Silalahi I, Silalahi Ii, Silalahi Iii, Paropo I</p>	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
			Kecamatan Sitinjo: Sitinjo, Sitinjo I, Panji Dabutar	

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko gempa bumi di Kabupaten Dairi, terklasifikasikan pada tingkat sedang hingga tinggi. Penilaian tersebut berdasarkan pada tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi. Tercatat bahwa terdapat kecamatan yang memiliki tingkat risiko sedang saja, dan terdapat juga kecamatan yang memiliki dua kategori risiko, yakni sedang dan tinggi.

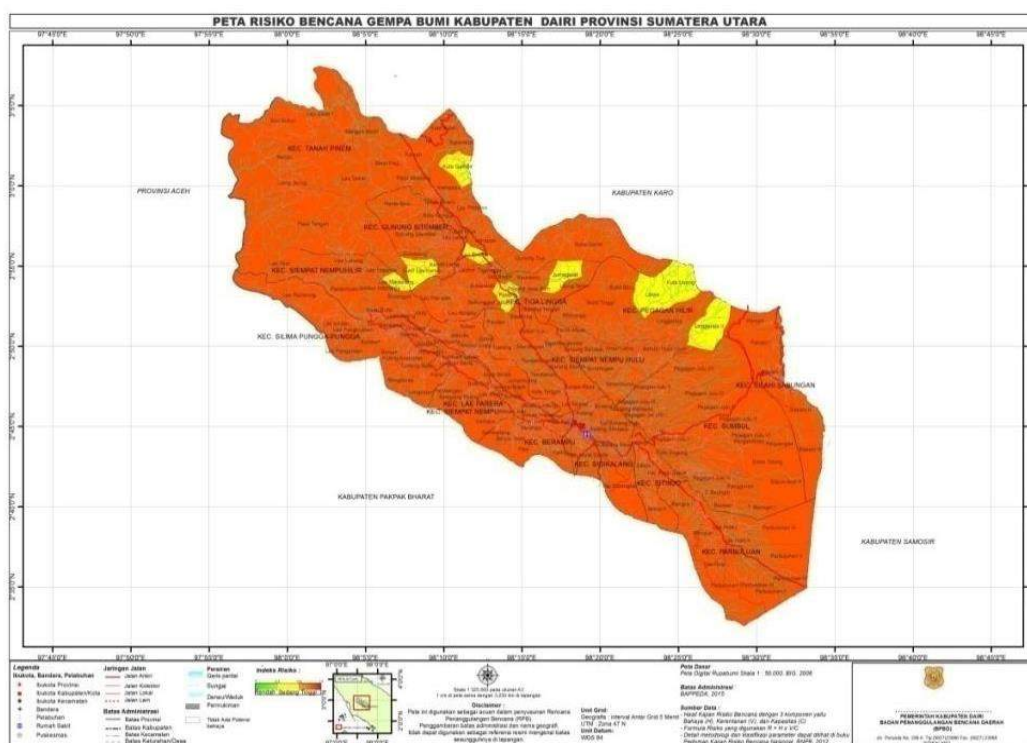
Tabel 2. 12 Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
Luas (Ha)	-	13.786	157.326
Penduduk (Jiwa)	-	9.005	269.956
Lahan Produktif (Rp)	-	3.898.272.216	215.363.355.663
Fasilitas Umum (Rp)	-	21.800.000.000	570.790.000.000
Rumah Penduduk (Rp)	-	340.600.000.000	9.597.600.000.000
		0	0
Jumlah Rumah (Unit)	-	2.421	64.169

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Kajian tingkat risiko bencana gempa bumi menyimpulkan total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi, yaitu seluas 157.326 ha 81,60 Persen dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 269.956 jiwa atau 91,81 Persen dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 64.169 unit atau 14,51 Persen dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 10 Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi gempa bumi menyeluruh di Kabupaten Dairi, dan hanya sebagian kecil saja dari wilayah Kecamatan Pegagan Hilir dan Tanah Pinem yang digolongkan risiko sedang. 9 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 160 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana gempa bumi.

Sebagai tambahan, Kajian tingkat risiko bencana gempa bumi menyimpulkan total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi, yaitu seluas 157.326 ha atau 81,60 persen dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 269.956 jiwa atau 91,81 persen dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 64.169 unit atau 96,2 persen dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

2. Banjir Bandang

Bencana banjir telah terjadi sebanyak 8 kali kejadian pada periode Tahun 2012 - 2016. Bencana banjir terbesar yang terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana pada tanggal 18 Oktober 2015 yang

mengakibatkan 123 orang menderita. Lokasi kejadian bencana banjir meliputi beberapa daerah di Kabupaten Dairi (Kecamatan Tanah Pinem, Silima Pungga-pungga, Lae Parira, dan Siempat Nempu Hulu).

Tabel 2. 13 Matriks Resiko Banjir Bandang Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH		Kecamatan Tigalingga: Lau Bagot, Tigalingga, Palding Jaya Kecamatan Lae Parira: Sumbul, Lae Parira	
	SEDANG		Kecamatan Tanah Pinem: Sinar Pagi, Harapan, Gunung Tua, Tanah Pinem Kecamatan Tigalingga: Sumbul Tengah, Sarintonu, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Sireme, Lau Pakpak Kecamatan Pegagan Hilir: Tanjung Saluksuk, Simanduma, Bandar Huta Usang, Onan Lama, Bukit Tinggi, Simartugan, Perik Mbue, Bukit Baru Kecamatan Silima Pungga -Pungga: Parongil, Palipi Kecamatan Lae Parira: Kentara, Bulu Duri, Sempung Polling, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kaban Julu Kecamatan Silahisabungan: Silalahi I, Silalahi II, Silalahi III	Kecamatan Pegagan Hilir: Laksa

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
	TINGGI		Kecamatan Tigalingga: Lau Mil Kecamatan Pegagan Hilir: Mbinanga Kecamatan Siempat Nempu Hilir: Jambur Indonesia, Sopo Butar, Lae Sering Kecamatan Silima Pungga -Pungga: Uruk Belin, Longkotan	Kecamatan Tanah Pinem: Lau Njuhar, Liang Jering, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Lau Primbon, Balandua, Lau Tawar, Suka Dame Kecamatan Tigalingga: Ujung Teran, Juma Gerat Kecamatan Pegagan Hilir: Lingga Raja, Lingga Raja II, Kuta Usang Kecamatan Siempat Nempu Hilir: Lae Itam, Pardomuan, Simungun, Janji, Lae Markelang, Lae Luhung, Lae Haporas Kecamatan Silima Pungga -Pungga: Lae Rambong, Lae Ambat, Lae

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
				Panginuman, Sumbari, Bakal Gajah, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Siratah, Polling Anak-anak, Lae Pangaroan Kecamatan Silahisabunga n: Paropo I, Paropo

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-203

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 32 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 36 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana banjir bandang.

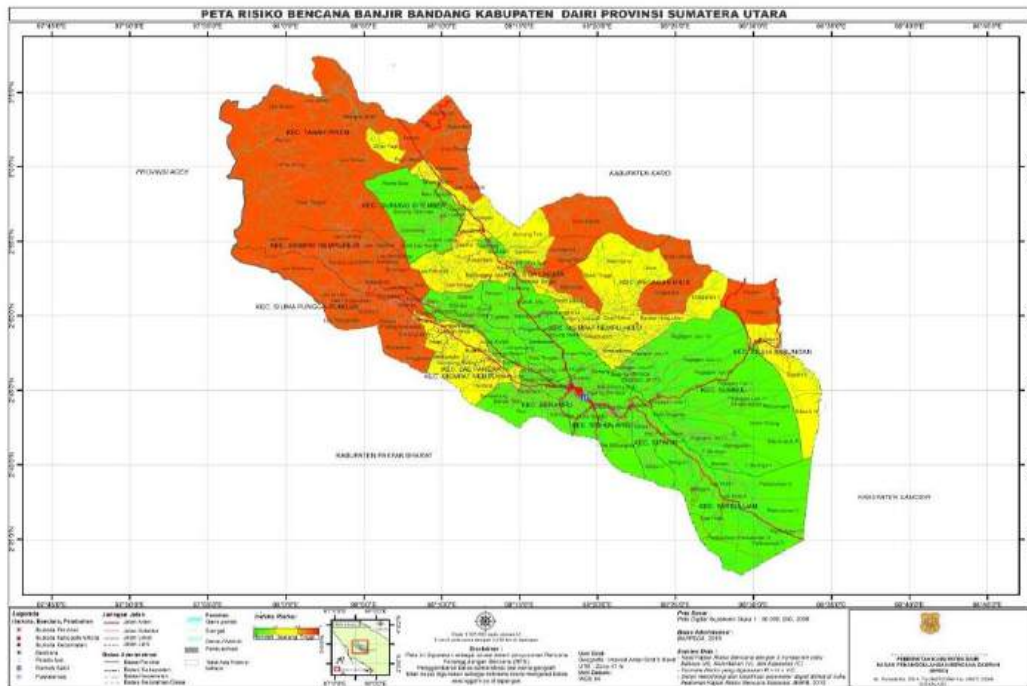
Tabel 2. 14 Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BANJIR BANDANG KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
Luas (Ha)	-	8.420	42.557
Penduduk (Jiwa)	-	7.915	30.015
Lahan Produktif (Rp)	-	23.855.969.914	59.016.084.080
Fasilitas Umum (Rp)	-	18.674.000.000	67.671.000.000
Rumah Penduduk (Rp)	-	291.656.000.000	1.106.765.000.000
Jumlah Rumah (Unit)	-	2.035	7.617

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 42.557 ha atau 22,1 Persen dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 30.015 jiwa atau 10,8 Persen dari total populasi, Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 7.617 unit atau 11,4 Persen dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 11 Peta Indeks Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko banjir bandang, bisa disimpulkan daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir dan Pegagan Hilir.

3. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di Kabupaten Dairi terjadi sebanyak 86 kali kejadian. Bencana Tanah Longsor yang sering terjadi di daerah Kecamatan Tanah Pinem.

Tabel 2. 15 Matriks Resiko Tanah Longsor Kabupaten Dairi

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH	Kecamatan Sidikalang : Kota Sidikalang, Batang Beruh, Kalang Simbara, Kalang, Sidiangkat, Belang malum, Huta Gambir, Huta Rakyat, Bintang Marsada	Kecamatan Sumbul : Pegagan Julu IV, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VII, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Pargambiran, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Tanjung Beringin I, Barisan Nauli	
	TINGGI			

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
		Kecamatan Tigalingga : Lau Bagot, Tigalingga, Lau Sireme, Palding Jaya Kecamatan Pegagan Hilir : Onan Lama Kecamatan Gunung Sitember : Batu Gun Gun Kecamatan Siempat Nempu Hulu : Tambahan, Kuta Tengah, Bakal Julu, Sipoltong Kecamatan Siempat Nempu : Adian Nangka, Buntu Raja, Sosor Lontung, Huta Imbaru Kecamatan Silima Pungga - punga : Parongil Kecamatan Parbuluan : Lae Hole I, Lae Hole II Kecamatan Lae Parira : Sumbul, Lae Parira, Kabanjulu Kecamatan Berampu : Berampu Kecamatan Sitinjo : Panji		

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
		Dabutar		
	SEDANG	Kecamatan Tigalingga : Palding Kecamatan Pegagan Hilir : Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Bukit Tinggi, Simartugan, Perik Mbue Kecamatan Parbuluan : Parbuluan III, Parbuluan VI, Bangun I	Kecamatan Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu II, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Kuta Gugung, Pangguruan Kecamatan Sidikalang : Bintang Hulu, Bintang Kecamatan Tigalingga : Sumbul Tengah, Sarintonu, Bertungen Julu, Lau Molgap Kecamatan Pegagan Hilir : Tanjung Saluksuk, Lingga Raja II, Mbinanga Kecamatan Gunung Sitember : Rante Besi, Tumpak Raja Kecamatan Siempat Nempu Hilir : Pardomuan, Jambur Indonesia, Sopo Butar Kecamatan Siempat Nempu Hulu : Lae Nuaha, Sungai Raya, Silumboyah, Pangaribuan, Tualang, Pandan Kecamatan Siempat Nempu : Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma	

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Teguh, Maju	
			Kecamatan Silima Pungga-Pungga: Lae Ambat, Bakkal Gajah, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi Kecamatan Parbuluan : Parbuluan II, Parbuluan I, Parbuluan V, Parbuluan IV, Lae Hole, Bangun Kecamatan Lae Parira : Kentara, Bulu Duri, Lumban Sihite, Lumban Toruan Kecamatan Berampu : Karing, Pasi, Sambaliang, Banjar Toba Kecamatan Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II Kecamatan Sitinjo : Sitinjo, Sitinjo I	
	TINGGI		Kecamatan Tanah Pinem : Lau Njuhar, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Tanah Pinem, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Gunung Tua, Suka dame, Liang Jering, Alur Subur, Sinar Pagi,	Kecamatan Tanah Pinem : Mangan Molih, Renun, Kempawa Kecamatan Simepat Nempu : Adian Gupa

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Pamah, Lau Tawar, Kuta Gamber Kecamatan Tigalingga : Ujung Teran, Juma Gerat, Sukandebi, Lau Mil, Lau Pakpak Kecamatan Pegagan Hilir : Simanduma, Laksa, Bukit Baru, Kuta Usang Kecamatan Gunung Sitember : Bukit lau Kersik, Gunung Sitember, Gundaling, Kendit Liang, Lau Lebah Kecamatan Siempat Nempu Hilir : Lae Itam, Simungun, Janji, Lae Luhung, Lae Haporas, Lae Sering, Lae Markelang Kecamatan Siempat Nempu Hulu : Gunung Meriah, Sigambir-gambir Kecamatan S Nempu : Sinampang, Sihorbo, Juman tuang, Kecamatan Silima Pungga - Pungga : Lae Rambong, Lae Panginuman, Sumbari, Uruk Belin, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu,	

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Longkotan, Lae Pangaroan Kecamatan Lae Parira : Sempung Polling, Pandiangan Kecamatan Silahisabungan : Silalahi III, Paropo, Paropo I Kecamatan Sitinjo : Sitinjo II	

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 57 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 54 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana tanah longsor.

Tabel 2. 16 Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Dairi

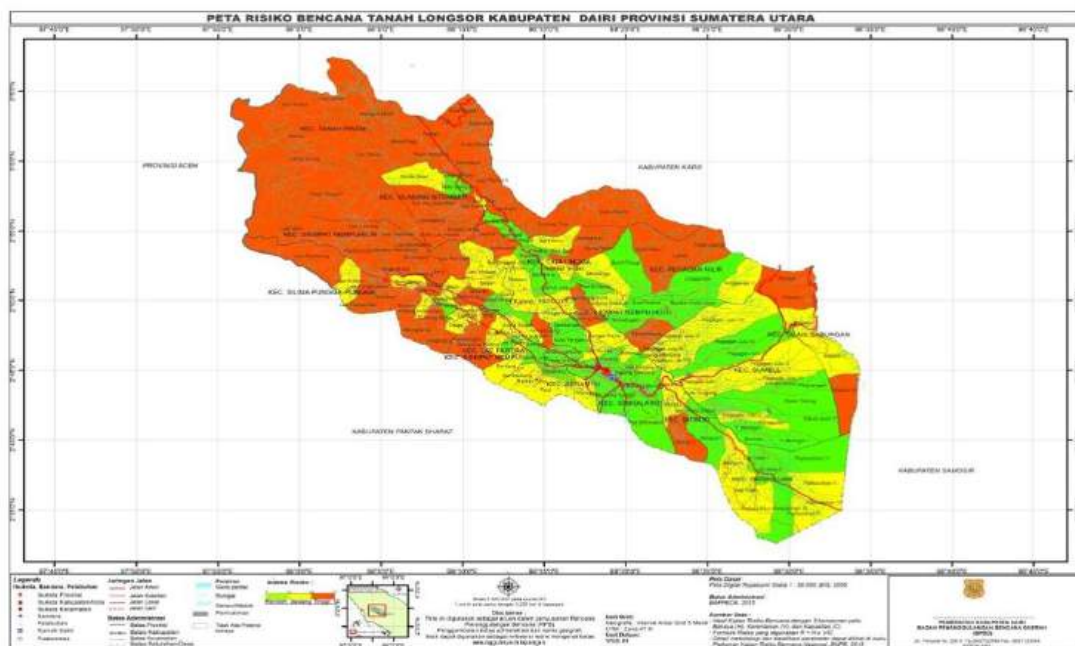
TINGKAT RISIKO TANAH LONGSOR DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
Luas (Ha)	-	10.627	35.765
Penduduk (Jiwa)	-	15.518	26.829
Lahan Produktif (Rp)	-	75.366.443.412	122.962.226.481
Fasilitas Umum (Rp)	-	12.279.000.000	39.972.000.000

Rumah Penduduk (Rp)	-	581.421.000.000	972.045.000.000
Jumlah Rumah (Unit)	-	3.910	7.517

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi seluas 35.765 ha (18,60 Persen) dari total luas wilayah dan Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 26.829 jiwa atau 9,6 Persen dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 12 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko tanah longsor, daerah dengan tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir, Silimapunggapungga dan Silahisabungan.

4. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung

Bencana cuaca ekstrim/angin puting beliung di Kabupaten Dairi terjadi sebanyak 42 kali kejadian. Kejadian bencana cuaca ekstrim terparah terjadi pada tanggal 3 April 2016 yang mengakibatkan 153 rumah rusak berat, 7 rumah rusak ringan. Lokasi kejadian cuaca ekstrim ini di beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 17 Matriks Risiko Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung Kabupaten Dairi

TINGKAT RESIKO	TINGKAT KAPASITAS
----------------	-------------------

		RENDAH	SEDANG	TINGGI
	RENDAH			
	SEDANG	<p>Kecamatan Tanah Pinem: Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Lau Perimbon, Balandua, Harapan, Sukadame.</p> <p>Kecamatan Sumbul : Pangguruan, Barisan Nauli.</p> <p>Kecamatan Pegagan Hilir : Laksa, Kuta Usang, Lingga Raja Ii.</p> <p>Kecamatan Gunung Sitember: Bukit Lau Kersik</p> <p>Kecamatan Siempat Nempu Hilir: Lae Itam, Lae Markelang, Lae Luhung, Sopo Butar.</p>	<p>Kecamatan Tanah Pinem : Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Sinar Pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Tanah Pinem, Gunung Tua.</p> <p>Kecamatan Sumbul : Kuta Gugung, Perjuangan, Sileu-Leu Parsaoran, Tanjung Beringin I, Pegagan Julu X.</p> <p>Kecamatan Sidikalang : Bintang</p> <p>Kecamatan Tigalingga : Ujung Teran, Jumagerat, Palding, Lau Sireme, Lau Pakpak.</p> <p>Kecamatan Pegagan Hilir : Simanduma, Lingga Raja, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan,</p>	
TINGKAT KERENTANAN				

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Bukit Baru. Kecamatan Gunung Sitember : Gunung Sitember, Lau Lebah, Rantai Besi, Tumpak Raja, Kendet Liang. Kecamatan Siempat Nempu Hilir : Simungun, Lae Sering, Lae Haporas. Kecamatan Siempat Nempu Hulu : Kuta Tengah, Sigambir-Gambir Kecamatan Siempat Nempu : Soban, Gomit, Juma Teguh. Kecamatan Silima Pungga-Pungga: Lae Rambong, Lae Ambat, Sumbari, Bonian, Bongkaras, Lae Pangaroan. Kecamatan Parbuluan : Parbuluan I, Parbuluan Ii, Parb. Iv.	

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Kecamatan Lae Parira : Pandiangan Kecamatan Berampu : Karing, Pasi, Sambaliang Kecamatan Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi Iii, Paropo I. Kecamatan Sitinjo : Sitinjo I	
	TINGGI		Kecamatan Tanah Pinem : Liang Jering, Lau Tawar. Kecamatan Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu Iv, Pegagan Julu Ii, Pegagan Julu Iii, Pegagan Julu Vi, Pegagan Julu Vii, Pegagan Julu Viii, Pegagan Julu Ix, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Pargambiran. Kecamatan Sidikalang : Kota Sidikalang, Bintang Hulu,	Kecamatan Sumbul : Pegagan Julu I, Kecamatan Sidikalang : Batang Beruh, Huta Rakyat Kecamatan Siempat Nempu : Adian Nangka

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Kalang Simbara, Kalang, Sidiangkat, Belang Malum, Huta Gambir, Bintang Marsada. Kecamatan Tigalingga : Sumbul Tengah, Sarintonu, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Bagot, Tigalingga, Lau Mil, Palding Jaya. Kecamatan Pegagan Hilir : B. Huta Usang, Mbinanga, Perik Mbue Kecamatan Gunung Sitember : Batu Gun-Gun, Gundaling. Kecamatan Siempat Nempu Hilir : Pardomuan, Jambur Indonesia, Janji. Kecamatan Siempat Nempu Hulu :	

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Tambahan, Lae Nuaha, Sungai Raya, Silumboyah, Pangaribuan, Tualang, Bakkal Julu, Sipoltong, Pandan. Kecamatan Siempat Nempu : Sinampang, Sihorbo, Buntu Raja, Juman Tuang, Juma Siulok, Sosor Lontung, Huta Imbaru, Maju, Adian Gupa Kecamatan Silima Pungga -Pungga : Lae Panginuman, Bakkal Gajah, Uruk Belin, Siboras, Tung- Tung Batu, Longkotan, Parongil, Siratah, Polling Anak-Anak, Palipi. Kecamatan Parbuluan : Parbuluan V, Parbuluan Iii, Parbuluan Vi, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Lae Hole	

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Ii, Bangun I. Kecamatan Lae Parira : Lae Parira, Bulu Duri, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kentara, Sumbul, Sempung Polling, Kaban Julu. Kecamatan Berampu : Berampu, Banjar Toba. Kecamatan Silahisabungan : Silalahi Ii, Paropo Kecamatan Sitinjo : Sitinjo, Sitinjo, Sitinjo Ii, Panji Dabutar.	

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 57 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 94 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana cuaca ekstrim / angin puting beliung.

Tabel 2. 18 Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung Kabupaten Dairi

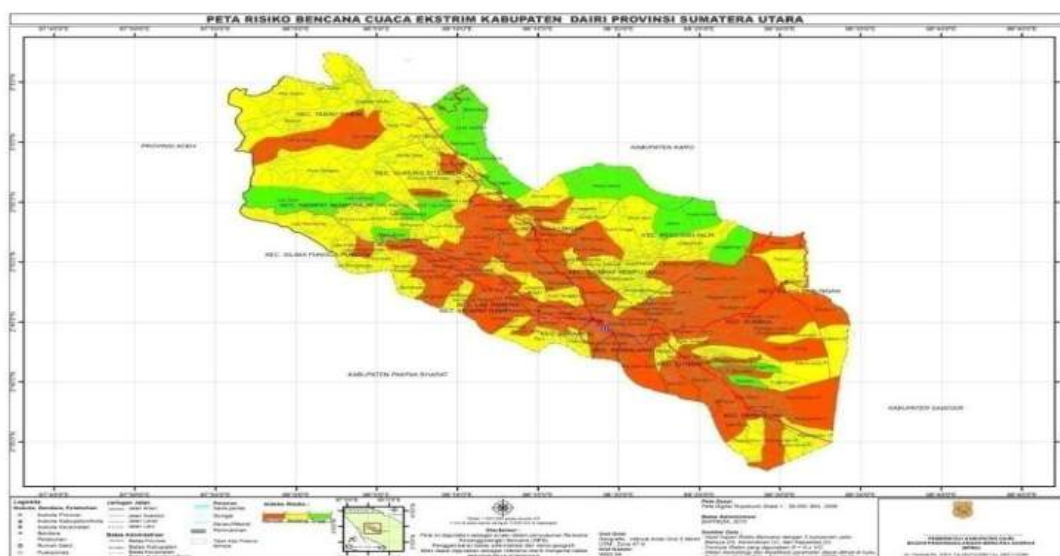
TINGKAT RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM/ ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
Luas (Ha)	35.234	79.595	77.283
Penduduk (Jiwa)	20.844	78.959	179.161

Lahan Produktif (Rp)	14.578.309.440	48.433.470.921	148.626.611.240
Fasilitas Umum (Rp)	49.950.000.000	173.900.014.950	294.350.059.800
Rumah Penduduk (Rp)	692.750.096.100	2.508.900.297.150	5.215.701.127.600
Jumlah Rumah (Unit)	4.032	10.532	25.701

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 77.283 ha atau 40,09Persen dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 179.161 jiwa atau 57,88Persen dari total populasi, Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 25.458 unit atau 38,2Persen dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 13 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko angin puting beliung, daerah dengan tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Lae Parira, Parbuluan, Sidikalang, Sumbul, Sitinjo, dan Siempat Nempu Hulu maupun Siempat Nempu.

5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Dairi selama periode 2012 – 2016 tercatat sebanyak 3 kejadian. Umumnya adalah kebakaran hutan di daerah Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Sitinjo, Kebakaran yang terjadi ini biasanya tidak menciptakan dampak yang berarti.

Tabel 2. 19 Matriks Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG	<p>Kecamatan Sidikalang : Bintang</p> <p>Kecamatan Pegagan Hilir : Laksa, Simartugan</p> <p>Kecamatan Siempat Nempu Hilir : Lae Itam, Lae Markelang</p> <p>Kecamatan Silima Pungga - Pungga : Lae Rambong</p>	<p>Kecamatan Tanah Pinem : Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Kuta Buluh, Tanah Pinem, Kempawa, Kuta gambar, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Sukadame</p> <p>Kecamatan Sumbul : Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Kuta Gugung, Pargambiran, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Pangguruan, Barisan Nauli</p> <p>Kecamatan Sidikalang : Kalang, Belang malum, Bintang Marsada</p> <p>Kecamatan Tigalingga : Ujung Teran, Sarintonu, Jua Gerat, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Palding, Lau Bagot, Tigalingga, Laun Sereme, Palding Jaya</p> <p>Kecamatan Pegagan Hilir : Simanduma, Bandar Huta Usang, Lingga raja, Onan lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Kuta</p>	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Usang, Lingga Raja II, Bukit Baru Kecamatan Gunung Sitember : Gunung Sitember, Batu Gun- Gun, Tumpak Raja, Kendit Liang Kecamatan Siempat Nempu Hilir : Lae Luhung, Sopo Butar, Lae Haporas Kecamatan Siempat Nempu Hulu : Tambahan, Kuta Tengah, Bakkal Julu, , Lae Nuaha, Sungai Raya, Sigambir-Gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Pandan Kecamatan Siempat Nempu : Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Sosor Lontung Kecamatan Silima Pungga -Pungga : Lae Ambat, Lae Panginuman, Sumbari, Siboras, Bonian, Tung- tung Batu, Bongkaras, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Lae Pangaroan Kecamatan Parbuluan : Parbuluan II, Parbuluan I, Parbuluan III, Parbuluan IV, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Bangun I Kecamatan Lae Parira : Lae Parira, Bulu Duri,	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kentara Kecamatan Berampu : Karing, Pasi, Sambaliang Kecamatan Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II, Paropo I Kecamatan Sitinjo : Panji Dabutar	
	TINGGI		Kecamatan Tanah Pinem : Liang Jering, Alur Subur, Sinar pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Lau Tawar, Gunung Tua Kecamatan Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin I Kecamatan Sidikalang : Kota Sidikalang, Bintang Hulu, Kalang Simbara, Sidiangkat, Huta Gambir, Huta Rakyat Kecamatan Tigalingga : Sumbul Tengah, Lau Mil, Lau Pakpak Kecamatan Pegagan Hilir : Mbinanga, Perik Mbue Kecamatan Gunung Sitember : Lau Lebah, Bukit Lau Kersik,	Kecamatan Sidikalang : Batang Beruh Kecamatan Siempat Nempu : Adian Gupa

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Rantai Besi, Gundaling Kecamatan Siempat Nempu Hilir : Pardomuan, Jambur Indonesia, Simungun, Janji, Lae Sering Kecamatan Siempat Nempu Hulu : Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong Kecamatan Siempat Nempu : Sinampang, Sihorbo, Adian Nangka, Buntu Raja, Juman tuang, Huta Imbaru, Maju Kecamatan Silima Pungga -Pungga : Bakkal Gajah, Uruk Belin, Longkotan Kecamatan Parbuluan : Parbuluan V, Lae Hole II Kecamatan Lae Parira : Sumbul, Sempung Polling, Kaban Julu Kecamatan Berampu : Berampu, Banjartoba Kecamatan Silahisabungan : Silalahi III, Paropo Kecamatan Sitinjo : Sitinjo, Sitinjo I, Sitinjo II	

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 101 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 62 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

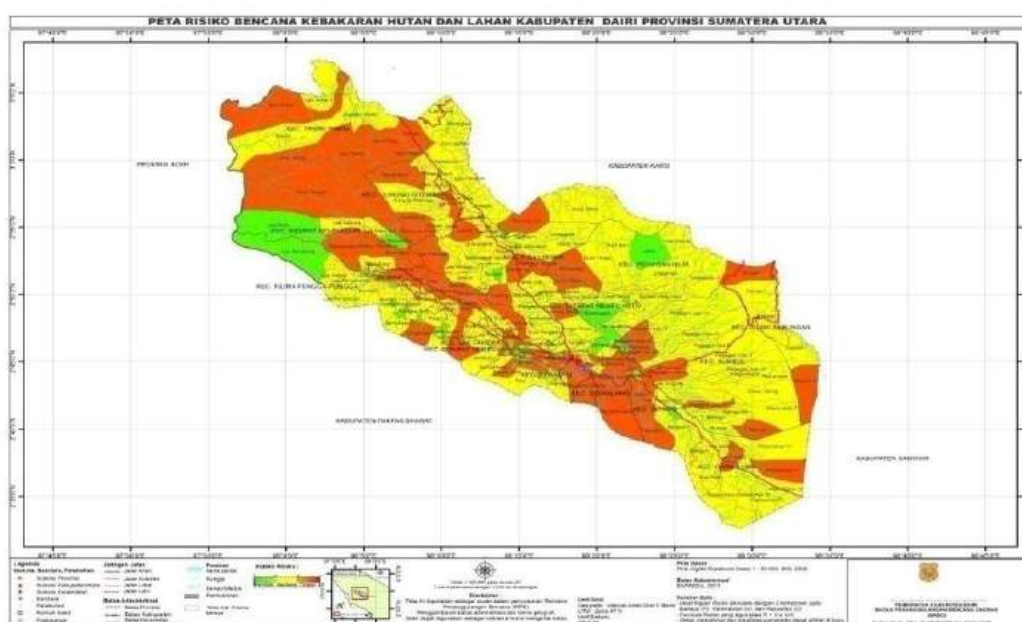
Tabel 2. 20 Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
Luas (Ha)	-	74.822	43.587
Penduduk (Jiwa)	-	143.918	116.336
Lahan Produktif (Rp)	-	69.943.046.260	130.399.124.070
Fasilitas Umum (Rp)	-	276.850.000.000	211.250.000.000
Rumah Penduduk (Rp)	-	5.187.050.000.000	4.095.650.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	62.724	3.320

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 43.587 ha atau 22,6 persen dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 116.336 jiwa atau 41,7 persen dari total populasi, Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 3.320 unit atau 5 persen dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.14 Peta Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Di sisi lain, jika melihat pada peta risiko kebakaran hutan dan lahan, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko

tinggi masih didominasi oleh Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hulu dan Sidikalang.

6. Kekeringan

Kekeringan di Kabupaten Dairi pada periode 2012 – 2016 dilaporkan terjadi sebanyak 2 kejadian. Walau belum berdampak masif, secara lokal bencana ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air dan membuat gagal panen.

Tabel 2. 21 Matriks Risiko Kekeringan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT	RENDAH			

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KERENTANAN	SEDANG		<p>Kecamatan Tanah Pinem : Lau Njuhar, Tanah Pinem, Lau Primbon</p> <p>Kecamatan Sumbul : Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Kuta Gugung, Pargambiran, Perjuangan, Sileu-leu Parsaoran, Pangguruan, Tanjung Beringin I, Barisan Nauli</p> <p>Kecamatan Sidikalang : Bintang Hulu, Bintang Sidiangkat, Belang malum, Bintang Marsada</p> <p>Kecamatan Tigalingga : Sumbul Tengah, Ujung Teran, Sarintonu, Juma Gerat, Palding,</p>	
	TINGGI		<p>Kecamatan Tanah Pinem : Liang Jering, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Sinar Pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Balandua, Lau Tawar, Harapan, Gunung Tua, Suka dame</p> <p>Kecamatan Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV,</p>	<p>Kecamatan Tanah Pinem : Mangan Molih, Renun, Kempawa Kecamatan S Nempu : Adian Gupa</p>

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Pegagan Julu I, Pegagan Julu VII Kecamatan Sidikalang : Kota Sidikalang, Kalang Simbara, Kalang, Huta Gambir, Huta Rakyat Kecamatan Tigalingga : Sukandebi, Lau Bagot, Lau Mil, Palding Jaya Kecamatan Pegagan Hilir : Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Laksa, Mbinanga, Kuta Usang, Lingga Raja II, Perik Mbue, Bukit Baru Kecamatan Gunung Sitember : Bukit lau Kersik, Batu Gungun, Rante Besi Kecamatan Siempat Nempu Hilir : Lae Itam, Pardomuan, Simungun, Lae Sering Kecamatan Siempat Nempu Hulu : Lae Nuaha, Sungai Raya, Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong Kecamatan Siempat Nempu : Sinampang, Sihorbo, Adian Nangka, Buntu Raja, Juman tuang, Huta Imbaru, Maju Kecamatan Silima Pungga - Pungga : Lae Rambong, Lae Panginuman, Kecamatan Lae Parira : Sumbul, Kentara, Lae	

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
			Parira, Sempung Polling, Lumban Sihite Kecamatan Silahisabungan : Silalahi, Silalahi II, Silalahi III, Paropo, Paropo I Kecamatan Sitinjo : Sitinjo, Sitinjo I, Panji Dabutar	

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 84 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 76 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana kekeringan.

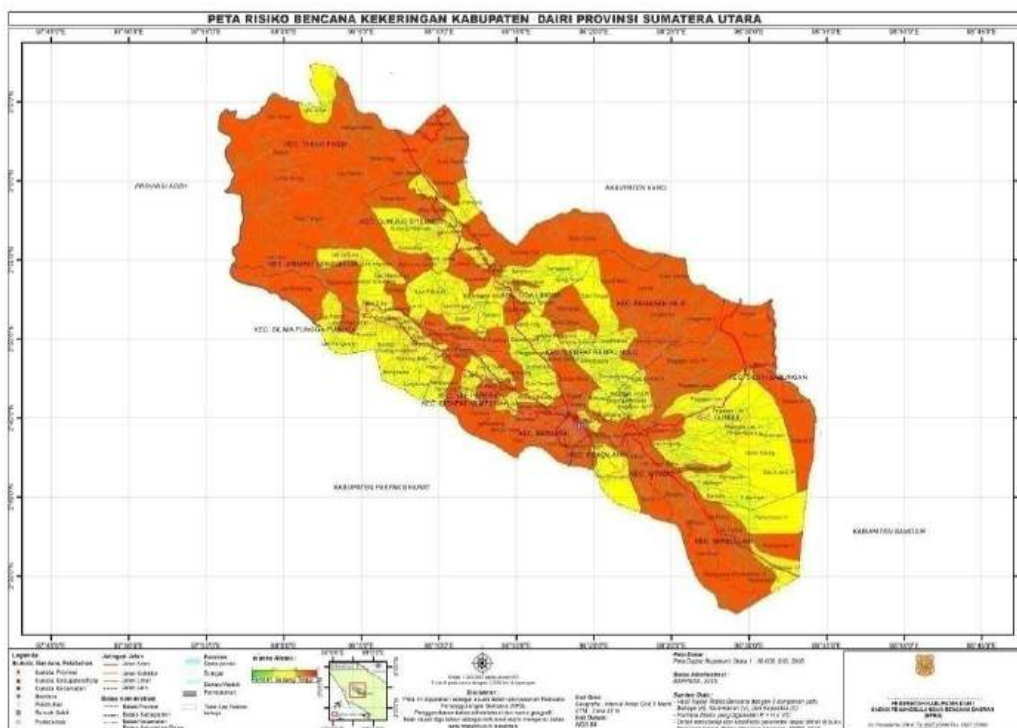
Tabel 2. 22 Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
Luas (Ha)	-	78.110	114.002
Penduduk (Jiwa)	-	117.649	161.315
Lahan Produktif (Rp)	-	68.731.519.992	150.530.107.796

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 114.002 ha atau 59,1 Persen dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 161.315 jiwa atau 57,8 Persen dari total populasi.

Gambar 2. 14 Peta Indeks Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Dairi



Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko kekeringan, bisa disimpulkan daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Sidikalang, Sumbul, dan Pegagan Hilir. Dan berdasarkan perkembangan perubahan cuaca global dan kerusakan lingkungan, maka diprediksi tingkat risiko ini akan meningkat secara cepat.

Berdasarkan data DIBI tahun 2004 – 2016 persentase kejadian bencana di Kabupaten Dairi dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah bencana tanah longsor sebesar 43 persen, Kebakaran Permukiman 32 persen, Cuaca Ekstrim sebesar 21 persen, dan banjir bandang 4 persen.

2.1.1.4 Kawasan Strategis di Kabupaten Dairi

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi, meliputi:

1. Kawasan Danau Toba

Kawasan Danau Toba di Kabupaten Dairi berada di Kecamatan Silahisabungan. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Danau Toba, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

2. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kabupaten Dairi merupakan kawasan hutan Delleng Simbelin Register 69, meliputi Kecamatan Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir dan Kecamatan Siempat Nempu. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

3. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi

Pusat Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dipusatkan di Sitingo sebagai pusat agropolitan dan terdiri dari 3 (tiga) distrik, yaitu:

- Distrik Agropolitan Sumbul
- Distrik Agropolitan Tigalingga
- Distrik Agropolitan Parongil

Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Secara lokalitas, selain Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dan terdapatnya kawasan perkotaan Siultinggil, terdapat beberapa kawasan yang dapat diusulkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (lokal), yaitu:

i. Kawasan Minapolitan Budidaya di Silahisabungan

Berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan budidaya yaitu suatu konsep perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi. Danau Toba yang luas dan banyaknya permintaan ikan air tawar bagi kota-kota di Pulau Sumatera menyebabkan prospek minapolitan budidaya cukup prospektif. Selain itu juga terdapat beberapa sungai yang cukup besar dan berair sepanjang tahun dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai areal perikanan darat.

ii. Kawasan Ekowisata Dairi

Kabupaten Dairi memiliki keindahan panorama alam, kekayaan flora dan fauna yang mampu mempesona wisatawan, namun belum dieksploitasi dengan sentuhan kaidah wisata sehingga belum banyak

mendapat kunjungan wisatawan. Kabupaten Dairi memiliki banyak lokasi pariwisata, baik yang telah dikenal oleh masyarakat maupun yang belum dikenal dan umumnya masih bersifat potensial serta belum tersentuh pembangunan sebagaimana layaknya suatu lokasi pariwisata.

Sumber daya alam kepariwisataan yang dimiliki sangat beragam, meliputi keindahan alam, pariwisata budaya, flora dan fauna sehingga diyakini berpotensi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Dairi. Dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan kecenderungan wisatawan dalam memilih objek atau lokasi wisata untuk dikunjungi. Wisatawan tidak lagi ingin sekedar datang untuk melihat dan menikmati daya tarik objek wisata tertentu dengan kekhasannya tetapi telah meningkat kearah yang dapat memberikan tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan baru. Model wisata seperti ini dikenal dengan istilah ekowisata (*ecotourism*) atau sering pula digunakan istilah wisata lingkungan, wisata konservasi, wisata eko atau wisata ekologi.

Berdasarkan sebaran lokasi berpotensi sebagai obyek ekowisata yang ditinjau dari kedekatannya dapat dikembangkan menjadi beberapa zona kawasan wisata, seperti:

- Zona kawasan wisata Sidikalang meliputi objek wisata Taman Wisata Iman, Letter S, Lae Pandaroh, Sicike-cike, Puncak Sidiangkat, Letter Z Silumboyah dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Danau Toba, meliputi Danau Toba, Kawasan Hutan, Gunung, Waduk PLTA Renun dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Tigalingga, meliputi Lau Belulus, Lae Simuhur, Danau/Waduk diatas gunung, Agrowisata dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Parongil, meliputi Air Terjun Lae Baski, Panorama Tornaui dan lain-lain.

iii. Kawasan Agropolitan Parsiul

Kawasan agropolitan Parsiul di Kabupaten Dairi meliputi Kecamatan Parbuluan, Sitingo dan Sumbul sebagai kawasan terpadu dalam pengembangan hortikultura, perkebunan jeruk dan kopi.

iv. Kawasan Perkotaan Siultinggil

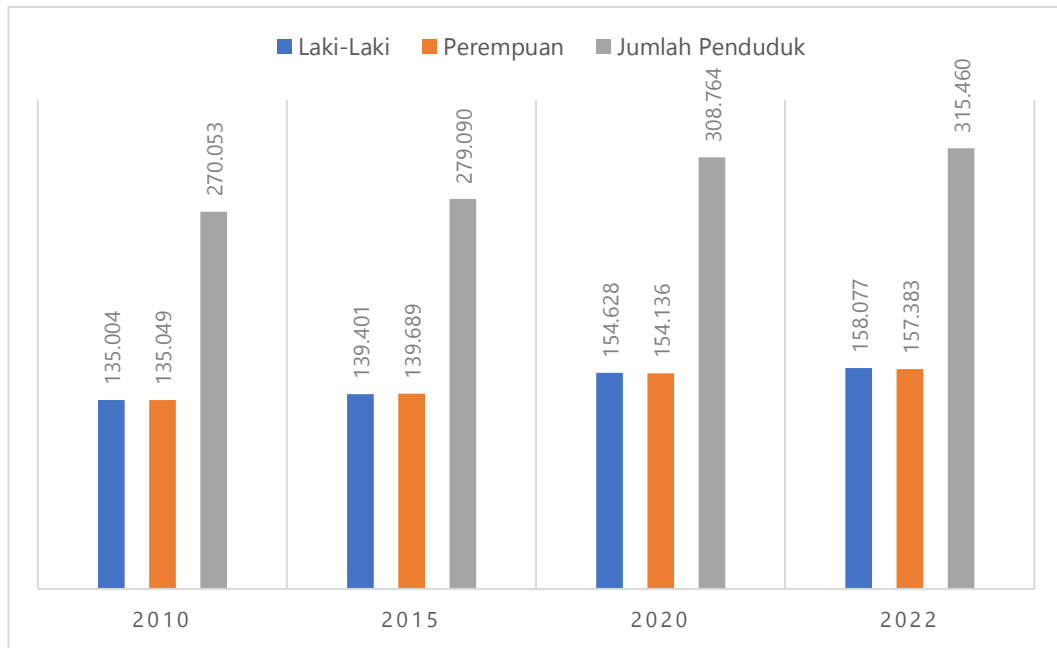
Kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil merupakan kota-kota di Kabupaten Dairi yang didorong perkembangannya mengingat letaknya yang strategis dilalui jalan nasional dan merupakan gerbang pintu keluar - masuk Provinsi Sumatera Utara dari/ke Provinsi Aceh dari arah sebelah Barat. Khusus Kota Parongil diprediksi akan berkembang pesat apabila bahan tambang seng dan timah hitam dieksploitasi sehingga diharapkan memiliki dampak ganda terhadap perkembangan Kota Parongil.

2.1.2 Aspek Demografi

Aspek demografi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Demografi atau kependudukan memiliki urgensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah karena berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Dengan mengetahui kondisi demografi suatu daerah, dapat membantu merumuskan yang berkualitas dan tepat sasaran terutama dalam penyediaan pelayanan publik.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Dairi sebanyak 315.460 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 158.077 jiwa (50,11 persen) dan jumlah penduduk perempuan, sebanyak 157.383 jiwa (49,89 persen) dengan rasio jenis kelamin 100,44 persen. Sementara rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Dairi mencapai 163,64 jiwa/km².

Gambar 2. 15 Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: BPS Kabupaten Dairi

Dari tahun 2010 hingga 2022, jumlah penduduk Kabupaten Dairi mengalami penambahan setiap periode. Penambahan jumlah penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 10,63 persen dengan komposisi penambahan penduduk laki-laki lebih besar yaitu 10,92 persen, sedangkan penduduk perempuan hanya sebesar 10,34 persen. Komposisi penduduk pada tahun 2010 hingga 2015 didominasi oleh penduduk perempuan, namun pada tahun 2015 hingga 2020 terjadi pergeseran komposisi penduduk Kabupaten Dairi dimana penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Meskipun demikian, rasio jenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda dengan rentang 99,97-100,44 persen dari tahun 2010 hingga 2022.

Tabel 2. 23 Persebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan

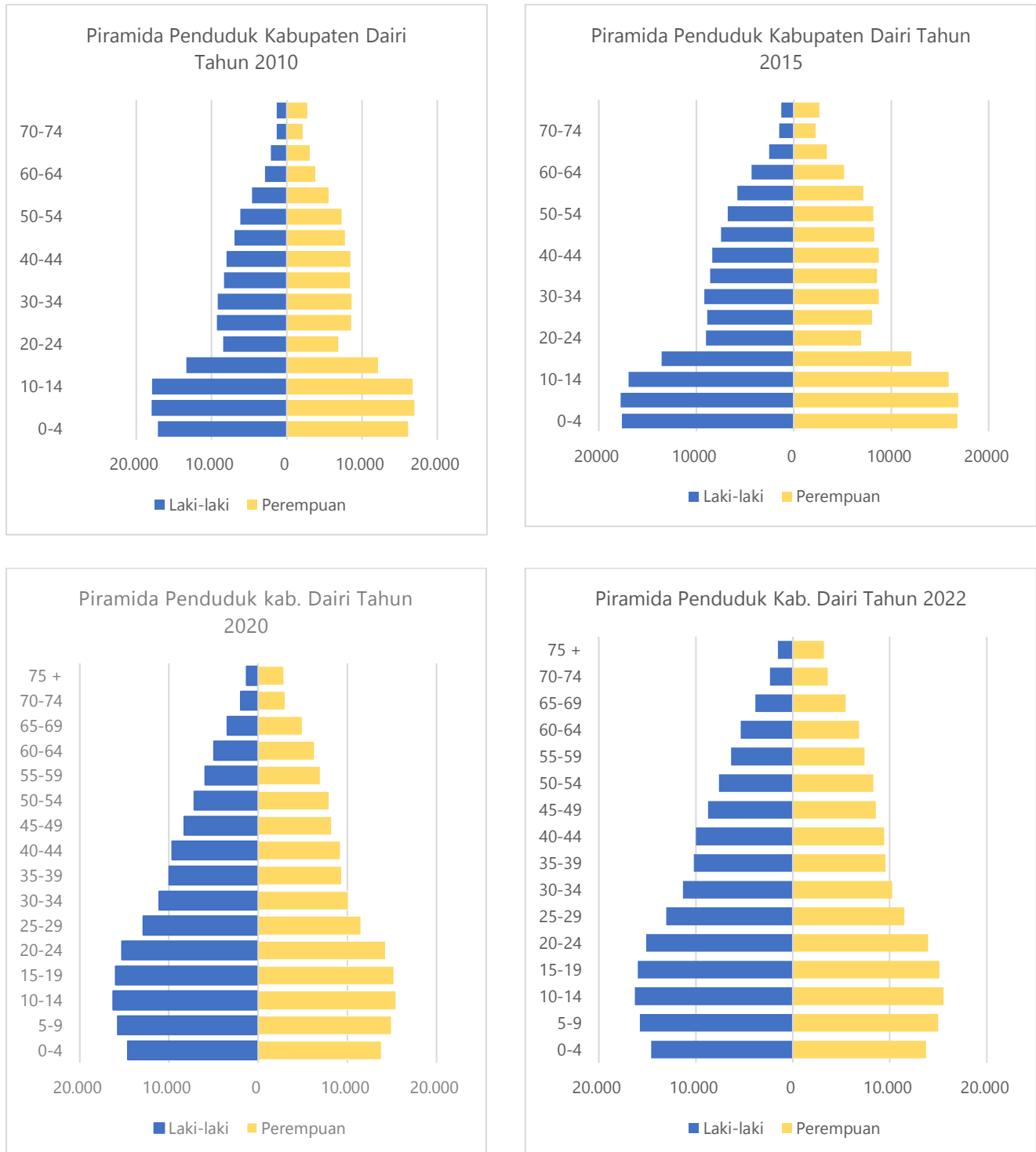
Kecamatan	2015			2020			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Sidikalang	25.142	24.908	50.050	26.815	26.618	53.433	27.178	26.982	54.160
Berampu	4.202	4.115	8.317	4.577	4.454	9.031	4.678	4.545	9.223
Sitinjo	6.310	6.080	12.390	7.279	7.150	14.429	7.591	7.484	15.075
Parbuluan	10.901	10.732	21.633	12.673	12.563	25.236	13.107	13.009	26.116
Sumbul	20.263	20.343	40.606	22.944	22.662	45.606	23.537	23.169	46.706
Silahisabungan	2.299	2.306	4.605	2.598	2.644	5.242	2.663	2.718	5.381
Silima Pungga-pungga	6.392	6.614	13.006	7.104	7.344	14.448	7.256	7.499	14.755
Lae Parira	6.895	7.017	13.912	7.178	7.348	14.526	7.236	7.415	14.651
Siempat Nempu	9.032	9.372	18.404	10.065	10.176	20.241	10.278	10.336	20.614
Siempat Nempu Hulu	9.033	9.063	18.096	10.143	10.040	20.183	10.278	10.241	20.519
Siempat Nempu Hilir	5.351	5.346	10.697	5.934	5.812	11.746	6.057	5.908	11.965
Tigalingga	10.802	11.110	21.912	12.047	12.381	24.428	12.299	12.636	24.935
Gunung Sitember	4.723	4.631	9.354	5.461	5.253	10.714	5.622	5.387	11.009
Pegagan Hilir	7.575	7.540	15.115	8.356	8.384	16.740	8.519	8.559	17.078
Tanah Pinem	10.481	10.512	20.993	11.454	11.307	22.761	11.682	11.495	23.177

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, diolah

Dari tahun 2015 hingga 2022 tingkat persebaran penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan Kecamatan Sidikalang memiliki penduduk yang paling banyak dengan rata-rata komposisi, sebesar 17 persen dan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 766,38 jiwa/km². Sementara penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Silahisabungan dengan rata-rata sebesar 1 persen dan rata-rata kepadatan penduduk hanya 71,16 jiwa/km². Kecamatan yang memiliki trend pertumbuhan penduduk semakin naik, yaitu Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Perbuluan, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Silahisabungan, dan Kecamatan Sitember. Sementara kecamatan yang cenderung menurun dan stagnan, yaitu Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Berampu, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Pegagan Hilir, dan Kecamatan Tanah Pinem.

Selain penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kecamatan di atas, penting juga dianalisis penduduk berdasarkan kelompok umur. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada piramida penduduk pada grafik berikut ini.

Gambar 2. 16 Piramida Penduduk Kabupaten Dairi berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin tahun 2010, 2015, 2020, dan 2022



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, diolah

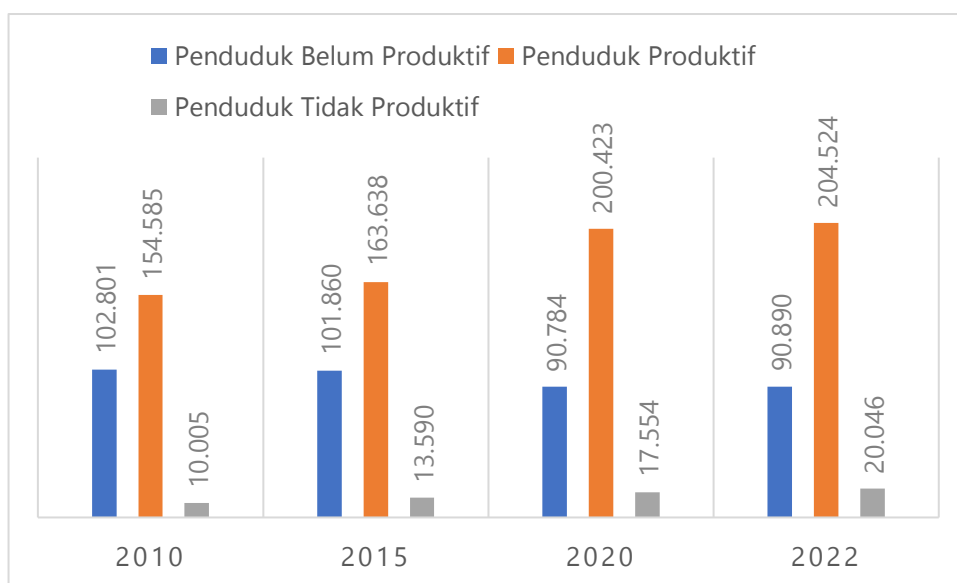
Proporsi penduduk Kabupaten Dairi berdasarkan kelompok umur didominasi oleh kelompok umum dengan rentang usia 0-4, 5-9,

dan 10-14 tahun dari tahun 2010 hingga 2022 dengan trend fluktuatif dan cenderung menurun. Sementara penduduk dengan rentang umur 35-75 tahun ke atas menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung meningkat. Penduduk dengan kelompok umur yang bertambah secara konsisten setiap periode, yaitu kelompok umur dengan rentang 50-75 tahun ke atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk yang akan dan masuk ke dalam kategori lansia semakin meningkat ke depan sehingga perlu kebijakan yang responsif terhadap kelompok masyarakat tersebut.

1. Analisis Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan kondisi atau keadaan dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan penduduk tidak produktif. Penduduk usia produktif diartikan sebagai penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun, sementara penduduk belum produktif dikelompokkan ke dalam rentang umur 0-14 dan penduduk tidak produktif dikelompokkan ke dalam rentang umur 65 ke atas. Analisis penduduk Kabupaten Dairi dalam konteks bonus demografi saat ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2. 17 Analisis Bonus Demografi Kabupaten Dairi Tahun 2010, 2015, 2020, 2022



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, diolah

Kabupaten Dairi memiliki penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk belum produktif dan tidak produktif. Secara jumlah, adanya penambahan penduduk produktif maupun penduduk

tidak produktif. Sementara penduduk belum produktif mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 mengalami penambahan namun tidak banyak atau lebih kecil dari tahun 2015.

Di satu sisi jumlah penduduk produktif mengalami penambahan, namun dari sisi trendnya mengalami pelambatan. Pada tahun 2010 ke 2015, jumlah penduduk produktif mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen dan meningkat lagi secara signifikan pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,22 persen. Namun pada tahun 2022, adanya penurunan trend penambahan penduduk produktif, yaitu hanya meningkat sebesar 0,02 persen. Sementara penduduk belum produktif memiliki trend negative pada tahun 2015 dan 2020, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan meskipun sangat kecil, yaitu sebesar 0,001 persen. Berbeda halnya dengan penduduk tidak produktif yang trend pertumbuhannya mengalami penurunan setiap periode, yaitu sebesar 0,14 persen pada tahun 2022. Meskipun penduduk tidak produktif memiliki trend penurunan, namun pada tahun 2022 trend pertumbuhan paling tinggi dipegang oleh penduduk tidak produktif (0,14 persen), diikuti penduduk produktif (0,02 persen) dan kemudian penduduk belum produktif (0,001 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran demografi di Kabupaten Dairi terutama penduduk tidak produktif yang memiliki trend peningkatan yang lebih tinggi.

Tentu saja, kondisi demografi Kabupaten Dairi di atas menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena penduduk produktif diasumsikan memiliki kemampuan untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan TIK dan sumber daya lain yang dimiliki sehingga output ekonomi daerah dapat meningkat. Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki tantangan besar dalam memberikan pelayanan dasar kepada penduduk tidak produktif dan bahkan mampu menjadikan kelompok tersebut lebih berdaya terutama dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, Pemerintah daerah juga harus mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam menundukung dinamika kependudukan di Kabupaten Dairi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Indeks Pembangunan Masyarakat

IPM pada umumnya digunakan untuk menjelaskan cara penduduk dalam mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Komponen pembentuk IPM yaitu 3 unsur yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan, dan 3) standar hidup layak. IPM dapat menentukan level atau peringkat pembangunan suatu daerah atau negara.

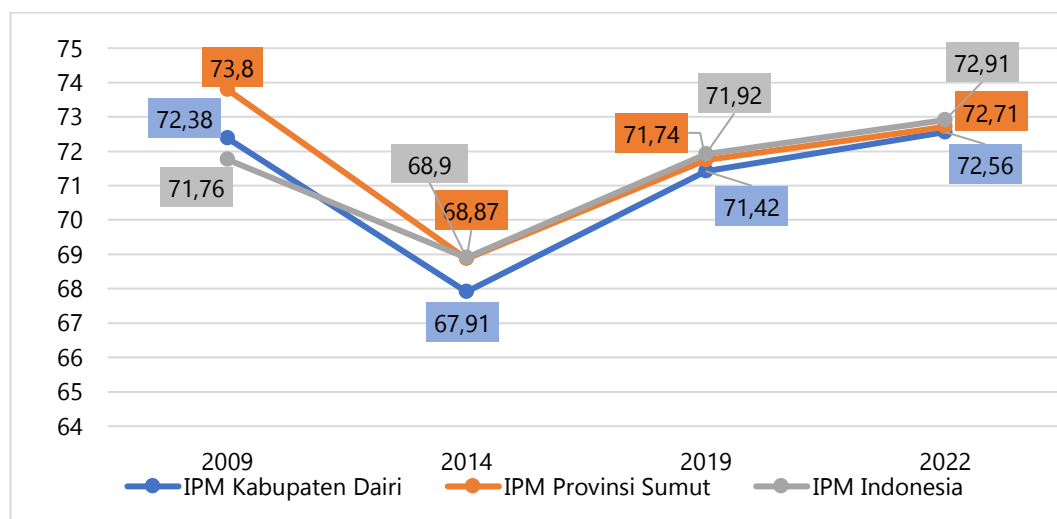
Perhitungan IPM mengalami perubahan sejak tahun 2010 di mana UNDP mengubah metodologi menjadi 1) komponen IPM yang digunakan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), PDRB per Kapita, 2) agregasi indeks menggunakan rata-rata geometrik.

Indikator komponen penyusun IPM metode baru meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran per Kapita -yang ditentukan dari nilai Pengeluaran per Kapita dan Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Capaian IPM dikategorisasikan menjadi 4 kelompok berikut:

1. Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
2. Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
3. Sedang : $60 \leq IPM < 70$
4. Rendah : $IPM < 60$

Perbandingan IPM Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 18 Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022



Sumber: BPS Indonesia dan BPS Kabupaten Dairi, 2023

Secara umum, tren pertumbuhan IPM Kabupaten Dairi naik pada tahun 2009-2022. Rata-rata pertumbuhan IPM pada periode 2009, 2014, 2019, dan 2022 yaitu sebesar 0.06 poin. IPM tahun 2009 lebih tinggi daripada IPM tahun 2014, 2019, dan 2022. Hal ini dimungkinkan karena adanya perubahan metode perhitungan IPM sejak tahun 2010 yang menyebabkan IPM Kabupaten Dairi turun pada tahun 2014, 2019, dan 2022. IPM di Kabupaten Dairi pada periode 2014, 2019, 2022 memiliki tren pertumbuhan naik, di mana kenaikan paling drastis terjadi pada tahun 2014 ke 2019 sebesar 3.51 poin. Selanjutnya, IPM Kabupaten Dairi naik kembali sebesar 1.14 poin pada tahun 2019 ke 2022.

Berdasarkan kategorisasi capaian IPM, Kabupaten Dairi secara umum termasuk dalam kategori kelompok IPM tinggi, kecuali pada tahun 2014, di mana masih termasuk dalam kategori sedang. Jika menggunakan metode perhitungan lama, IPM Kabupaten Dairi tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Namun demikian, jika menggunakan metode perhitungan baru IPM Kabupaten Dairi berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia pada tahun 2014, 2019, dan 2022. Hal ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan capaian komponen IPM diantaranya capaian Rata-rata Lama Sekolah untuk mengejar angka minimal wajib belajar 12 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMA.

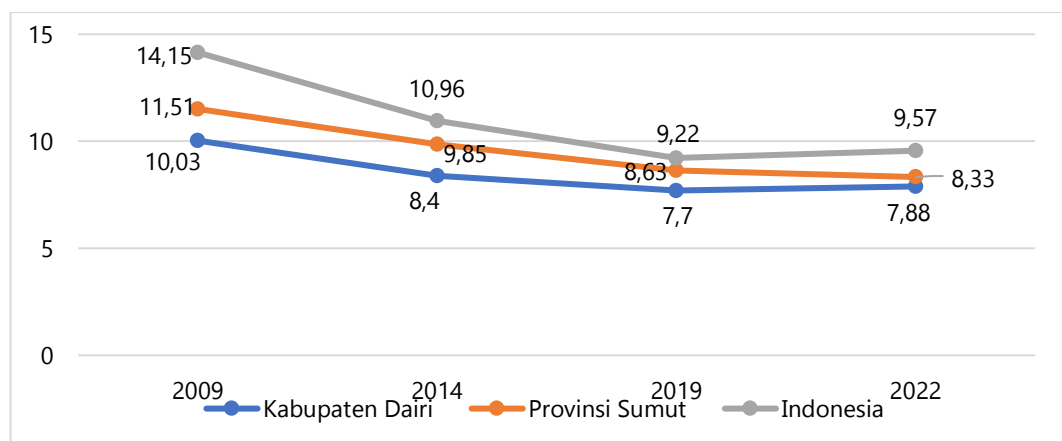
2.2.2 Kemiskinan

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dinilai sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menggambarkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok (baik makanan maupun non-makanan) selama 1 bulan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi diantaranya padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, buah-buahan.

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa pendidikan, kesehatan, sandang, dan perumahan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 19 Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022



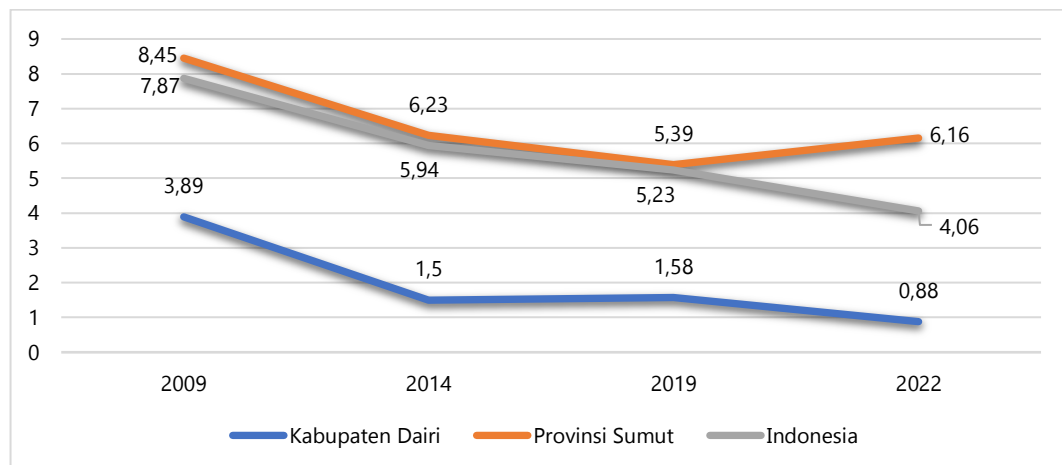
Sumber: BPS Indonesia dan BPS Kabupaten Dairi, 2023

Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022 mengalami tren turun. Tingkat kemiskinan Kabupaten Dairi berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia pada periode tersebut. Meskipun demikian, penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Dairi lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia pada periode tersebut. Tingkat kemiskinan Kabupaten Dairi turun secara rata-rata sebesar 7.42 persen pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022, sedangkan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara rata-rata turun sebesar 10.09 persen dan Indonesia rata-rata turun sebesar 11.54 persen. Tingkat kemiskinan Kabupaten Dairi naik sebesar 2.34 persen pada tahun 2019 ke 2022. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Indonesia yang naik sebesar 3.80 persen pada periode tersebut. Namun demikian, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi.

2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT biasanya digunakan untuk mengetahui angkatan kerja yang belum atau tidak bekerja di suatu daerah. Perbandingan TPT Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022 dapat diketahui melalui grafik berikut.

Gambar 2. 20 Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022



Sumber: BPS Indonesia dan BPS Kabupaten Dairi, 2023

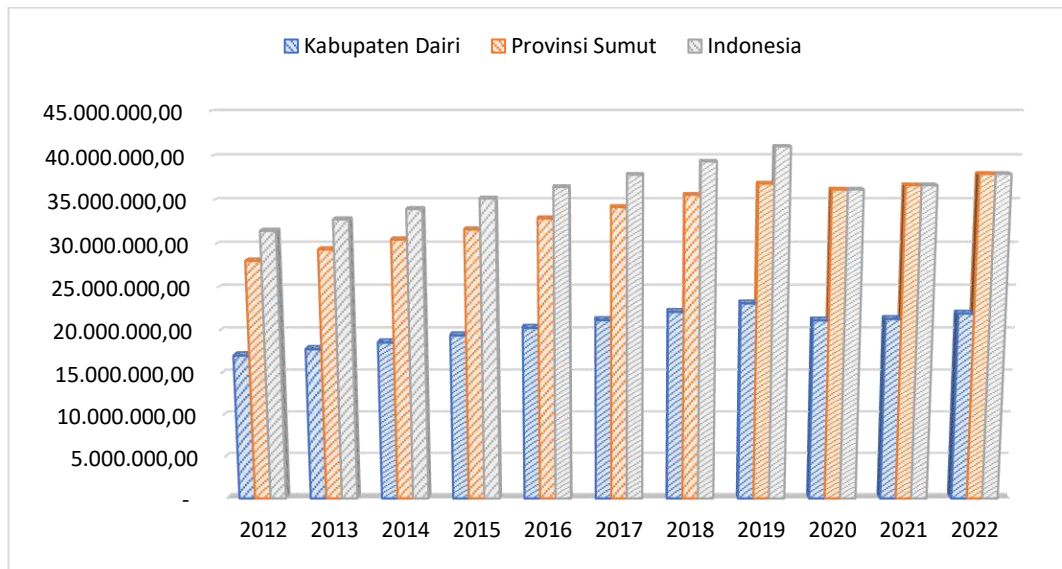
Secara umum, TPT Kabupaten Dairi lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022. Rata-rata penurunan TPT Kabupaten Dairi juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penurunan TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. TPT Kabupaten Dairi tahun 2019 ke 2014 turun rata-rata sebesar 33.47 persen. Secara kontras, TPT Provinsi Sumatera Utara secara rata-rata hanya turun sebesar 8.49 persen, sedangkan TPT Indonesia rata-rata turun sebesar 19.62 pada periode tersebut.

TPT Kabupaten Dairi turun paling drastis sebesar 61.44 persen pada tahun 2009 ke 2014. Namun demikian, TPT Kabupaten Dairi tahun 2014 naik sebesar 5.33 persen ke tahun 2019. TPT tahun 2019 turun sebesar 44.30 persen ke tahun 2022. Kondisi TPT di Kabupaten Dairi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya kompetensi angkatan kerja, sarana prasarana pelatihan kerja belum optimal, dan penyebaran informasi lowongan pekerjaan belum dilakukan secara massif.

2.2.4 PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten/kota). PDRB per Kapita adalah total penghasilan suatu wilayah dibagi dengan jumlah seluruh penduduk di wilayah tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui pendapatan rata-rata penduduk di wilayah tersebut. Semakin tinggi nilai Pendapatan per Kapita suatu wilayah, maka penduduk di wilayah tersebut dapat dianggap semakin makmur.

Gambar 2. 21 Grafik Perbandingan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan PDB Indonesia Tahun 2012-2022



Sumber: BPS Indonesia dan Kabupaten Dairi, 2023

PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Dairi tahun 2012-2022 mengalami tren pertumbuhan cenderung turun. Pertumbuhan PDRD per Kapita Kabupaten Dairi tertinggi sebesar 4.52 persen pada tahun 2017 ke 2018, di mana PDRB per Kapita dari Rp 21.175.290,46 naik menjadi Rp 22.131.904,00. Namun demikian, PDRB per Kapita Kabupaten Dairi merosot secara drastis saat pandemi COVID-19 melanda, di mana turun sebesar -8.59 persen pada tahun 2019-2020. Kondisi ini merupakan penurunan PDRB per Kapita paling tajam di Kabupaten Dairi selama tahun 2012-2022, di mana pada tahun 2019 PDRB per Kapita sebesar Rp 23.130.294,00 turun menjadi Rp 21.142.880,00 pada tahun 2020. Meskipun demikian, PDRB per Kapita berhasil dipulihkan secara perlahan pada tahun 2021 dan 2022, di mana terjadi kenaikan PDRB per Kapita sebesar 0.79 persen pada tahun 2020-2021 dan naik kembali sebesar 2.96 persen pada tahun 2021-2022. PDRB per Kapita Kabupaten Dairi sebesar Rp 21.310.297,00 pada tahun 2021 naik menjadi Rp 21.940.900,82 pada tahun 2022.

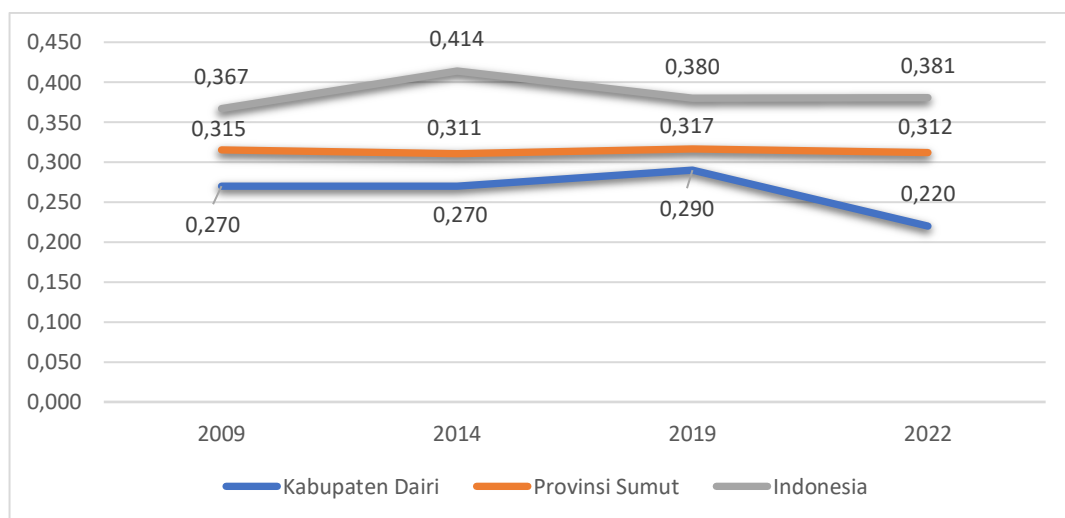
PDRB per Kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, namun lebih menggambarkan tingkat produktivitas per satu orang penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan karena dapat menggambarkan pola dan

perkembangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. PDRB per Kapita Kabupaten Dairi berada cukup jauh di bawah Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Kondisi tersebut mengindikasikan produktivitas penduduk di Kabupaten Dairi dalam menghasilkan nilai tambah dalam perekonomian masih berada di bawah provinsi maupun nasional.

2.2.5 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 1 hingga 0. Sebuah daerah akan memiliki skor 0 apabila penduduk daerah tersebut memiliki distribusi pendapatan yang merata. Sebaliknya, jika sebuah daerah memiliki skor 1 berarti bahwa 1 orang di daerah tersebut menguasai seluruh sumber pendapatan. Apabila nilai koefisien gini mendekati angka 1, maka distribusi pendapatan semakin timpang di suatu wilayah. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 22 Grafik Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022



Sumber: BPS Indonesia dan Kabupaten Dairi, 2023

Secara umum, Indeks Gini Kabupaten Dairi lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022. Indeks Gini Kabupaten Dairi turun rata-rata sebesar -0.017 poin pada periode tersebut. Indeks

Gini Kabupaten Dairi berhasil dijaga pada angka 0.270 pada tahun 2009 dan 2014. Namun demikian, Indeks Gini naik sebesar 0.020 poin pada tahun 2014 ke 2019. Indeks Gini turun paling drastis sebesar -0.070 poin pada tahun 2019 ke tahun 2022. Sementara itu, Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara mengalami tren turun rata-rata sebesar -0.001 poin pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022. Secara kontras, Indeks Gini Indonesia mengalami tren meningkat dengan rata-rata kenaikan 0.005 poin pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Dairi dapat diturunkan selama tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022. Meskipun demikian, Indeks Gini di Kabupaten Dairi masih perlu diturunkan di masa mendatang untuk memastikan ketimpangan pendapatan masyarakat juga makin berkurang.

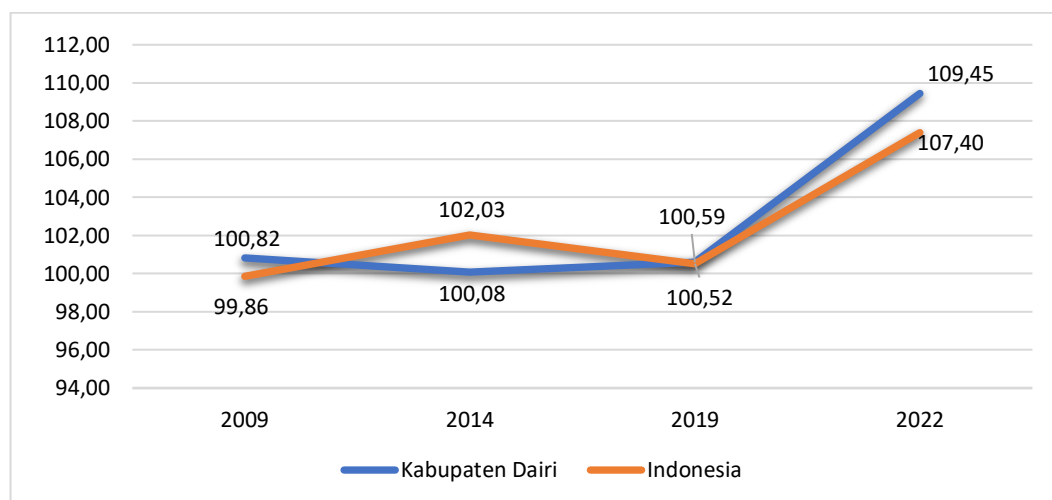
2.2.6 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Secara umum, NTP memiliki 3 interpretasi berikut:

1. $NTP > 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP tahun dasar atau dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya;
2. $NTP = 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar atau dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan kenaikan/penurunan harga konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya;
3. $NTP < 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar atau petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

NTP merupakan salah satu indikator penting bagi Kabupaten Dairi karena perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. NTP Kabupaten Dairi mengikuti NTP Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022. Perbandingan NTP Kabupaten Dairi dengan Indonesia dapat diketahui pada grafik berikut.

Gambar 2. 23 Grafik Perbandingan NTP Kabupaten Dairi dengan Indonesia Tahun 2009, 2014, 2019, 2022



Sumber: BPS Indonesia dan BPS Kabupaten Dairi, 2009-2022

NTP Kabupaten Dairi mengalami tren meningkat pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022 dan berada di atas NTP Indonesia, kecuali pada tahun 2014. NTP Kabupaten Dairi lebih dari 100 yang menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Dairi mengalami surplus pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022. Harga produksi petani di Kabupaten Dairi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi pada tahun tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan petani di Kabupaten Dairi juga naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.

NTP Kabupaten Dairi rata-rata tumbuh sebesar 2.86 persen pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan NTP Indonesia yang tumbuh secara rata-rata sebesar 2.51 persen pada periode tersebut. NTP Kabupaten Dairi tumbuh paling drastis sebesar 8.81 persen pada tahun 2019 ke 2022, sedangkan NTP Indonesia tumbuh sebesar 6.84 persen pada tahun tersebut 2019 ke 2022.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berisi tentang analisis capaian kinerja pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan. Aspek ini berhubungan erat dengan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode sebelumnya dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan untuk dua tahun mendatang. Berikut adalah deskripsi capaian kinerja aspek pelayanan umum di Kabupaten Dairi.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis pada fokus layanan urusan pemerintahan wajib terdiri atas capaian-capaian pada layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar terdiri atas enam urusan, sedangkan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar terdiri atas 18 urusan. Berikut adalah capaian layanan urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Dairi.

2.3.1.1. Urusan Wajib Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar

Pembangunan bidang sosial dan budaya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan sosial budaya meliputi beberapa urusan diantaranya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ketahanan keluarga, dan kebudayaan. Berikut beberapa capaian pembangunan sosial budaya di Kabupaten Dairi.

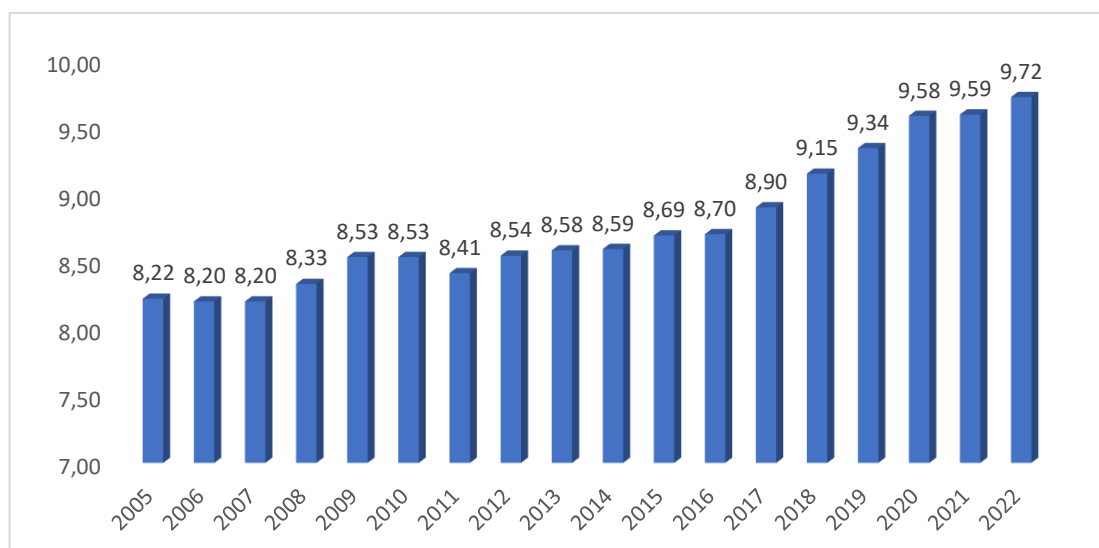
1. Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah dengan menjadi salah satu komponen pembentuk capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan, lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan, serta angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi Angka

Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat gambaran pembangunan dalam aspek pendidikan di suatu daerah.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. RLS berkaitan erat dengan kondisi pembangunan manusia sebagai bagian dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut data RLS di Kabupaten Dairi pada rentang tahun 2005 hingga 2022.

Gambar 2. 24 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Dairi Tahun 2005-2022



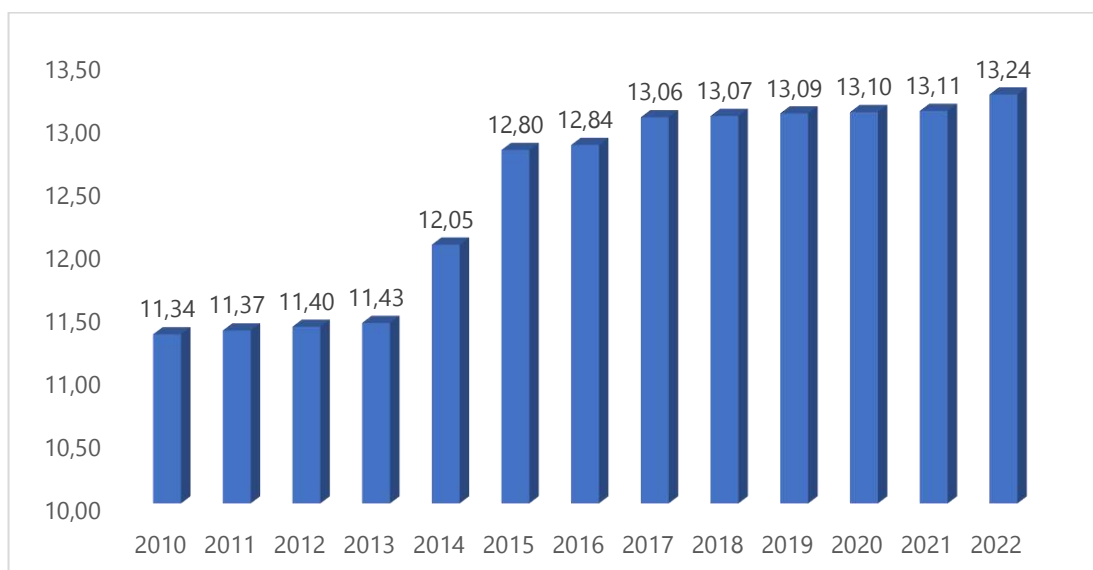
Sumber: BPS Kabupaten Dairi 2023

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Dairi menunjukkan tren peningkatan selama periode 2019 hingga 2022. Rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Dairi selama tujuh belas tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 1,5 poin. Capaian RLS yang mencapai angka 9,72 pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat usia sekolah di Kabupaten Dairi merasakan pendidikan selama 9,72 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Capaian tersebut juga telah berada di atas angka RLS Provinsi Sumatera Utara dan nasional, yakni selisih 0,01 poin di atas capaian provinsi dan 1,03 poin dibandingkan nasional. Meskipun demikian, capaian positif RLS Kabupaten Dairi masih perlu untuk ditingkatkan,

terutama untuk mengejar angka minimal wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni 12 tahun atau setara kelas 3 SMA.

Indikator lain yang menjadi tolok ukur pembangunan pada sektor pendidikan dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) di wilayah terkait. Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di wilayah terkait. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian HLS Kabupaten Dairi selama periode 2010 hingga 2022.

Gambar 2. 25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi Tahun 2010-2022



Sumber: BPS Kabupaten Dairi 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Dairi juga mengalami tren serupa dengan capaian RLS, yakni memiliki tren positif selama periode 2010 hingga 2022. Harapan lama sekolah masyarakat di Kabupaten Dairi selama 12 tahun terakhir meningkat sebanyak 1,90 poin. Kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 13,24 menunjukkan bahwa masyarakat usia sekolah di Kabupaten Dairi memiliki harapan untuk dapat merasakan pendidikan formal selama 13 tahun atau setara dengan tahun pertama di perguruan tinggi. HLS pada tahun 2022 menunjukkan bahwa secara harapan masyarakat usia sekolah,

Kabupaten Dairi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu wajib belajar 12 tahun. Namun, capaian tersebut tetap perlu untuk ditingkatkan, dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat di Kabupaten Dairi untuk 20 tahun ke depan.

Indikator selanjutnya yang dapat melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Dairi adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Berikut merupakan capaian APK di Kabupaten Dairi pada tahun 2015 hingga 2022.

Tabel 2. 24 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dairi Tahun 2015-2022

Angka Partisipasi Kasar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sekolah Dasar Sederajat	116,83	115,53	112,12	112,64	108,98	111	108,41	101,79
Sekolah Menengah Pertama Sederajat	106,42	95,26	97,33	97,62	99,66	98,24	101,06	95,82
Sekolah Menengah Atas Sederajat	81,32	94,23	99,91	90,77	90,77	91,44	91,75	104,15
Perguruan Tinggi	13,23	13,74	7,77	14,53	13,06	14,18	15,16	26,83

Sumber: BPS Kabupaten Dairi dalam Angka 2016-2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan sekolah dasar sederajat di Kabupaten Dairi telah lebih dari 100 persen. Capaian APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang telah menempuh sekolah ketika belum cukup umur atau bahkan melebihi umur yang seharusnya. Dengan kata lain Kabupaten Dairi telah mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Tren yang berbeda terjadi pada jenjang pendidikan

yang lain. Fluktuasi capaian APK di Kabupaten Dairi terjadi pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan atas. Penurunan capaian APK mengindikasikan bahwa berkurangnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada jenjang pendidikan terkait di Kabupaten Dairi. APK perguruan tinggi mendapatkan angka capaian terendah di antara jenjang pendidikan lain menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Dairi di perguruan tinggi.

Indikator lain pada sektor pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM didefinisikan sebagai proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya juga semakin tinggi. Berikut merupakan data capaian APM Kabupaten Dairi pada tahun 2014 hingga 2022.

Tabel 2. 25 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Dairi Tahun 2014-2022

Angka Partisipasi Murni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sekolah Dasar Sederajat	97	99,25	98,96	99,11	100	99,36	99,19	99,2	93,78
Sekolah Menengah Pertama Sederajat	80,27	91,42	90,43	87,05	89,17	90,53	90,21	91,24	87,7
Sekolah Menengah Atas Sederajat	69,97	71,67	80,52	82,77	80,25	80,65	81,33	88,9	90,19
Perguruan Tinggi	9,89	12,62	13,74	7,77	10,48	9,48	12,97	19,5	23,97

Sumber: BPS Kabupaten Dairi dalam Angka 2016-2023

APM di Kabupaten Dairi secara umum cenderung mengalami tren peningkatan pada rentang tahun 2014 hingga 2022 kecuali pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Sederajat. Capaian APM di Kabupaten Dairi yang meskipun berfluktuasi, namun tetap mendekati angka 100 pada jenjang sekolah dasar menunjukkan bahwa banyak penduduk usia sekolah sekolah dasar yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Peningkatan capaian APM pada jenjang pendidikan lainnya seperti Sekolah Menengah Pertama juga mengindikasikan makna serupa, yakni semakin banyak penduduk usia terkait yang dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang yang ditentukan.

Capaian APM Sekolah Menengah Atas sederajat memiliki peningkatan tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, yakni meningkat sebesar 20,22 poin selama 8 tahun terakhir. Capaian terendah APM di Kabupaten Dairi tetap ditempati oleh jenjang pendidikan perguruan tinggi. Meskipun demikian, tren peningkatan APM dari tahun 2014 hingga 2022 secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses fasilitas pendidikan sesuai dengan kelompok usianya.

Keempat indikator pada sektor pendidikan yang telah dijabarkan di atas perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan, seperti gedung sekolah, tenaga pengajar, maupun dukungan sarana lainnya. Berikut merupakan data ketersediaan gedung sekolah di Kabupaten Dairi selama periode 2009 hingga 2022 pada berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 2. 26 Jumlah Sekolah Jenjang SD-SMA di Kabupaten Dairi Tahun 2009-2022

Tahun	Jenjang		
	SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/Sederajat	SMA/SMK/MA/Sederajat
2009	289	62	38
2010	269	62	37
2011	269	62	39
2012	269	62	39
2013	274	64	39
2014	275	64	41
2015	275	64	42
2016	275	64	42
2017	278	65	43
2018	277	65	43
2019	279	66	45
2020	279	66	42
2021	270	65	43
2022	272	65	43

Sumber: BPS Kabupaten Dairi dalam Angka 2010-2023

Jumlah gedung sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sederajat di Kabupaten Dairi yang menurun cukup banyak pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 dikarenakan tidak

tersedia lagi data terkait jumlah sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), sedangkan jumlah sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah mencapai 20 unit pada tahun 2009. Hal itu kemudian mengakibatkan data jumlah sekolah SD sederajat di Kabupaten Dairi pada tahun 2010 mengalami penurunan. Meskipun demikian, secara umum jumlah gedung sekolah di setiap jenjang pendidikan cenderung mengalami peningkatan selama periode 2009 hingga 2022.

Sarana prasarana lain yang tidak kalah penting pada sektor pendidikan adalah ketersediaan sumber daya manusia, yakni dalam bentuk guru atau tenaga pendidik. Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang berperan krusial terhadap proses pembangunan di Kabupaten Dairi. Guru merupakan orang yang berperan dalam melakukan transfer ilmu dan mendorong percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia. Berikut merupakan data terkait jumlah guru di Kabupaten Dairi pada tahun 2009 hingga 2022.

Tabel 2. 27 Jumlah Guru Jenjang SD-SMA di Kabupaten Dairi Tahun 2009-2022

Tahun	Jenjang		
	SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/Sederajat	SMA/SMK/MA/Sederajat
2009	3.135	1.272	981
2010	3.265	1.402	981
2011	3.134	1.433	965
2012	2.710	1.283	999
2013	2.251	1.204	1.094
2014	2.885	1.480	1.109
2015	3.073	1.163	1.198
2016	2.931	1.163	1.169
2017	3.026	1.153	954
2018	2.694	1.167	949
2019	2.760	1.249	1.108
2020	2.806	1.271	1.126
2021	2.738	1.282	1.108
2022	2.906	1.434	1.149

Sumber: BPS Kabupaten Dairi dalam Angka 2010-2023

Jumlah guru yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Dairi pada rentang tahun 2009 hingga 2023 secara umum mengalami peningkatan, kecuali jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

Fluktuasi jumlah guru di berbagai jenjang terjadi akibat data yang digunakan termasuk diantaranya data guru tetap, guru honorer maupun guru bantu yang tidak tersebar merata di setiap tahun, sehingga seolah terdapat perubahan yang signifikan terkait jumlah guru di Kabupaten Dairi. Meskipun terus mengalami peningkatan, pemerintah Kabupaten Dairi harus tetap memperhatikan berapa banyak murid yang diajari, sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Ketercukupan guru akan murid di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio guru murid. Data terkait rasio guru murid di Kabupaten Dairi dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. 28 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD-SMA Kabupaten Dairi Tahun 2009-2023

Tahun	Jenjang		
	SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/Sederajat	SMA/SMK/MA/Sederajat
2009	0,07	0,07	0,07
2010	0,07	0,07	0,07
2011	0,07	0,07	0,06
2012	0,06	0,07	0,06
2013	0,05	0,06	0,07
2014	0,06	0,07	0,07
2015	0,07	0,06	0,07
2016	0,06	0,06	0,07
2017	0,07	0,06	0,06
2018	0,06	0,06	0,06
2019	0,06	0,06	0,06
2020	0,06	0,06	0,06
2021	0,07	0,06	0,06
2022	0,07	0,07	0,06

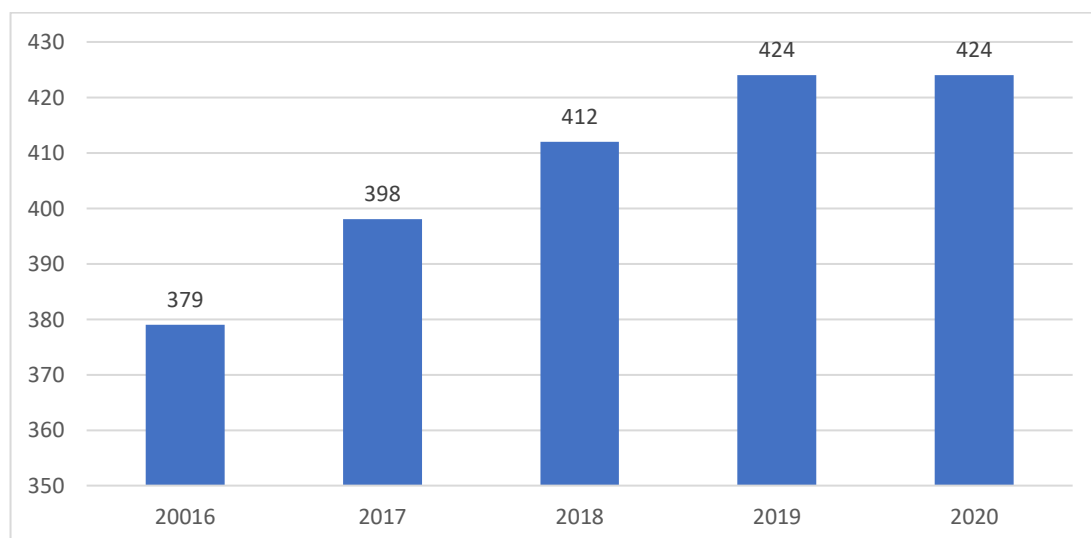
Sumber: BPS Kabupaten Dairi dalam Angka 2010-2023

Rasio guru dan murid pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Dairi pada tahun 2009 hingga 2022 dapat dikatakan cukup memadai. Hal itu sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, terkait rasio guru dan murid, yakni 1:20 untuk SD, SMP, dan SMA, serta 1:15 untuk SMK. Rasio 1:20 berarti idealnya 1 guru mengajari 20 murid, begitu pula dengan 1:15 untuk SMK. Apabila rasio tersebut diubah ke dalam desimal, maka rasio guru dan murid yang ideal adalah 0,05

untuk SD, SMP, dan SMA, sedangkan SMK menjadi 0,067. Semakin tinggi nilai rasio yang diperoleh, maka semakin baik tingkat ketercukupan guru akan murid yang ada di Kabupaten Dairi. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum rasio guru dan murid cenderung telah memenuhi tingkat ideal, meskipun pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan disetarakan dengan sekolah menengah atas sehingga perhitungan rasio juga menjadi satu.

Sarana prasarana lain yang juga dapat menunjang capaian kinerja sektor pendidikan adalah tersedianya perpustakaan di suatu wilayah. Adanya perpustakaan dapat menjadi gambaran tambahan pengetahuan dan kebiasaan penduduk terkait pendidikan, salah satunya mencakup minat baca penduduk. Data terkait jumlah perpustakaan di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 26 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Dairi Tahun 2012-2020



Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi 2016-2020

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Dairi secara umum mengalami peningkatan selama sepuluh tahun terakhir. Peningkatan jumlah perpustakaan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2016, yakni bertambah 19 unit pada tahun 2017. Peningkatan jumlah perpustakaan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dapat diakomodasi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Dairi. Stagnansi jumlah perpustakaan pada tahun 2020 salah satunya dikarenakan adanya

pandemi Covid-19 dan pembatasan aktivitas fisik juga memengaruhi kondisi ekonomi di Kabupaten Dairi.

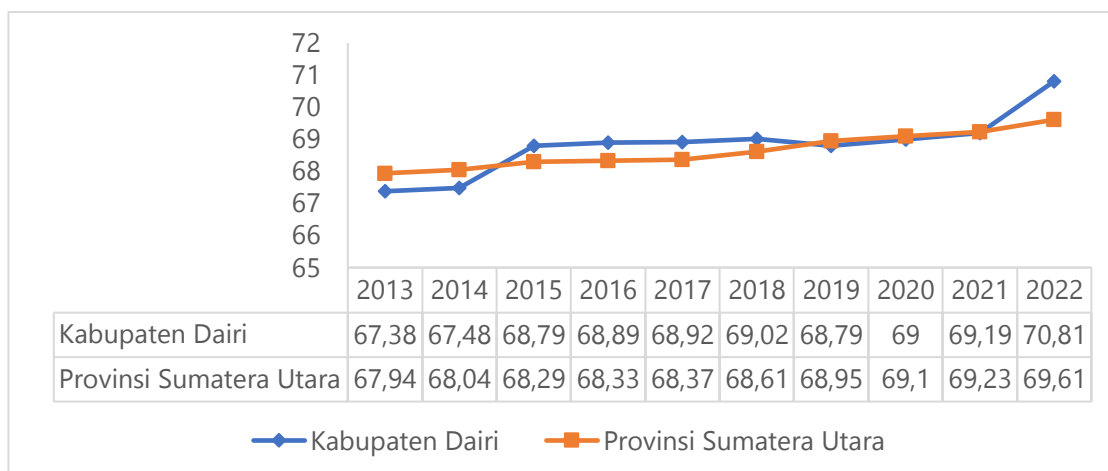
Sarana prasarana di Kabupaten Dairi secara umum dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui bangunan sekolah, tenaga pendidik, maupun sarana penunjang seperti layanan perpustakaan. Namun penyesuaian sarana prasarana di Kabupaten Dairi tetap perlu untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat usia sekolah di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk dapat menjadi salah satu acuan untuk melihat kemungkinan penambahan sarana dan prasarana pendidikan di masa yang akan datang.

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif. Secara umum, pembangunan kesehatan Kabupaten Dairi dapat dilihat dari beberapa capaian indikator makro seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Prevalensi Stunting.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalankan oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi tolak ukur kinerja pemerintah dibidang kesehatan dengan asumsi bahwa semakin tinggi AHH di suatu daerah maka semakin banyak masyarakat yang sehat dan lebih produktif. Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya akses terhadap pelayanan kesehatan, akses pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori, kesadaran masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS), serta berbagai kebijakan kesehatan yang diterapkan. Berikut capaian AHH Kabupaten Dairi selama satu dekade terakhir.

Gambar 2. 27 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2023

Selama satu dekade (2013-2022), capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Dairi menunjukkan trend yang meningkat, meskipun pernah terjadi penurunan sekali pada tahun 2019 kemudian naik kembali pada tahun berikutnya. Selama satu dekade, Kabupaten Dairi berhasil menaikan Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 3,43 poin yakni dari 67,38 di tahun 2013 menjadi 70,81 di tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Dairi.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, capaian AHH Kabupaten Dairi pada tahun 2013-2014 dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Namun, pada tahun berikutnya berhasil unggul diatas rata-rata provinsi dan naik cukup tajam pada tahun 2022 dengan selisih 1,2 poin. Pada tahun 2022, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Dairi 70,81, sedangkan Provinsi Sumatera Utara 68,65. Meskipun capaian AHH Kabupaten Dairi cukup bagus, namun dari segi fasilitasi kesehatan yang tersedia masih perlu untuk ditingkatkan.

Tabel 2. 29 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2015-2022

No	Fasilitas Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	18	18	18	18	18	18	18	18
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	122	122	122	122	125	122	122	122
4	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	512	512	469	489	489	489	489	489
5	Apotik	16	18	20	20	21	21	21	24
6	Praktik Dokter	43	34	37	36	38	38	38	30

Sumber: Dairi Dalam Angka Tahun 2015-2022

Selama satu windu (8 tahun) terakhir, jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Dairi terdiri dari satu rumah sakit yakni RSUD Sidikalang. Rumah sakit tersebut menjadi satu-satunya tempat rujukan bagi masyarakat Dairi yang tersebar di 15 kecamatan. RSUD Sidikalang masuk kategori tipe C yakni memiliki minimal 4 pelayanan medik spesialis dasar dan 4 spesialis pununjang medik. Pada tahun 2022, RSUD Sidikalang mendapatkan akreditasi paripurna yaitu lulus tingkat sempurna dari 15 standar akreditasi.

Meskipun demikian, terbatasnya jumlah dan tipe rumah sakit yang ada di Dairi mengakibatkan beberapa pasien harus dirujuk ke daerah lain seperti Medan, bahkan ke Penang Malaysia yang memiliki fasilitas kesehatan lebih memadai. Selain itu, berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa perangkat daerah dan berita di media online menyebutkan bahwa dokter spesialis di Kabupaten Dairi tergolong kurang, sehingga perlu ditambah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Gambar 2. 28 RSUD Sidikalang



Sumber: Dokumentasi Bappeda, 2023

Fasilitas kesehatan yang lainnya seperti Puskesmas dan Pustu memiliki jumlah yang cukup memadai. Namun, berdasarkan dokumen LPPD Kabupaten Dairi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana, serta alat kesehatan sesuai standar di Puskesmas dan jaringannya masih perlu ditingkatkan. Selain itu, peran posyandu perlu dioptimalkan untuk membantu meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. Sedangkan jumlah apotek di Dairi terfokus di daerah ibukota.

Tabel 2. 30 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2015-2022

No	Tenaga Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokter Umum	49	49	51	52	52	31	66	53
2	Dokter Gigi	10	10	8	9	9	6	17	16
3	Dokter Spesialis	7	7	15	6	6	-	17	21
4	Bidan	400	364	405	343	343	314	422	461
5	Perawat	322	329	352	217	215	193	323	326

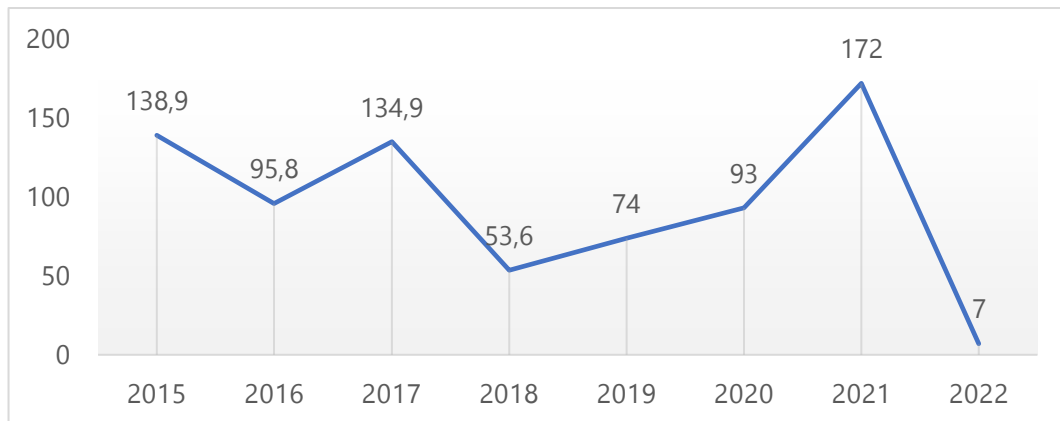
Sumber: Dairi Dalam Angka Tahun 2015-2022

Selain fasilitas kesehatan, jumlah dan sebaran tenaga kesehatan yang tersedia penting sebagai basis untuk menentukan kebijakan terkait pengembangan SDM kesehatan kedepan. Selama satu windu (8 tahun) terakhir, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Dairi cukup fluktuatif, bahkan pada tahun 2022 data dokter spesialis belum tersedia. Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam melakukan pelayanan kesehatan, sehingga dari segi jumlah maupun kualifikasi/kompetensi harus terus ditingkatkan. Berdasarkan standar WHO, standar ideal rasio dokter yakni 1 dokter per 1.000 penduduk.

Selain ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, capaian pembangunan kesehatan yang penting yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi Stunting. Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu kematian wanita yang terjadi saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan. Kematian ibu disebabkan akibat proses kehamilan maupun proses persalinan.

Berikut data Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi tahun 2015-2022.

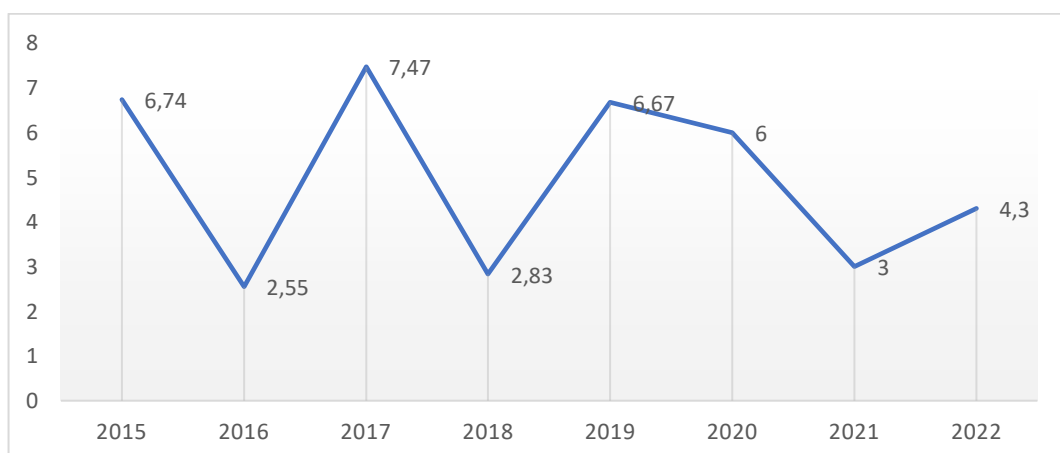
Gambar 2. 29 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Dairi Tahun 2015-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2023

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi tahun 2015-2022 sangat fluktuatif dan turun cukup tajam pada tahun 2022. AKI paling tinggi terjadi pada tahun 2021 sebanyak 172 per 100.00 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada tahun berikutnya sebanyak 7 per 10.000 kelahiran hidup. Capaian tersebut cukup baik karena sudah berada dibawah target SDGs 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian, upaya penanganan kasus kematian ibu tetap perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (*Antenatal Care*), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (*Postnatal Care*).

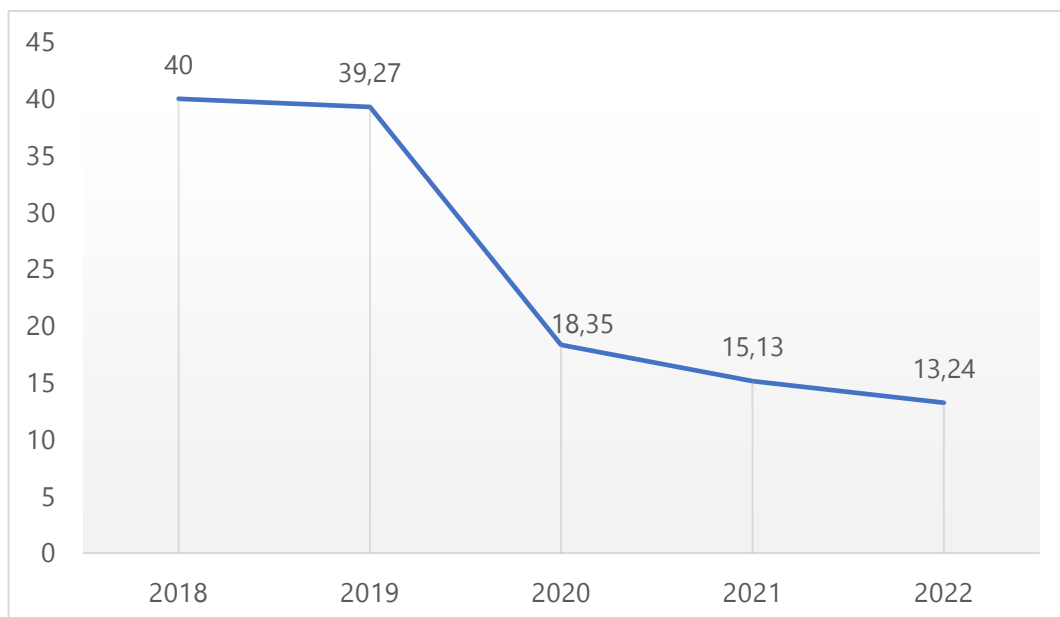
Gambar 2. 30 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Dairi Tahun 2015-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2023

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup. AKB mengindikasikan kondisi lingkungan dan kesehatan orangtua bayi yang kurang baik, sehingga memicu terjadinya kematian. Selama periode 2015-2022, AKB di Kabupaten Dairi menunjukkan trend yang sangat fluktuatif, tapi dengan jumlah yang relative kecil. AKB paling rendah pada tahun 2016 sebanyak 2,55, namun naik tajam pada tahun berikutnya 2017 sebanyak 7,47. Sedangkan pada tahun 2022, angka tersebut kembali turun menjadi 4,3. Hal tersebut merupakan capaian yang cukup positif yakni dibawah target SDGs tahun 2030 mengakhiri kematian bayi setidaknya 12 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian, angka tersebut tetap perlu diturunkan hingga mencapai 0 (nol) kasus. Upaya peningkatan kualitas kesehatan bayi dapat dilakukan dengan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap, peningkatan ketersediaan alat kesehatan, tenaga kesehatan yang kompeten, serta peningkatan informasi terkait kesehatan ibu dan anak.

Gambar 2. 31 Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi Tahun 2015-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2023

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan target 14Persen pada tahun 2024. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing bangsa. Stunting berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang

serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Untuk itu, penanganan kasus stunting di setiap daerah menjadi agenda mendesak untuk dilakukan setiap tahunnya.

Selama periode lima tahun (2018-2022), Kabupaten Dairi berhasil menurunkan prevalensi stunting yang cukup signifikan yakni sebanyak 26,76 Persen. Salah satu faktor keberhasilan dalam penurunan stunting yakni komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting melalui upaya lintas sektor dan fokus pada desa lokus stunting. Selain itu, Kemenkes menetapkan Kabupaten Dairi sebagai lokus penanganan stunting. Ada 20 desa lokus stunting yaitu di Puskesmas Sigalingging 5 desa, Puskesmas Sumbul 3 desa, Puskesmas Bakkal Gajah 2 desa, Puskesmas Sopobutar 4 desa, Puskesmas Parongil 1 desa, Puskesmas Gunung Sitembar 2 desa, Puskesmas Bunturaja 2 desa, dan puskesmas kilometer 11 ada 1 desa. Dengan demikian, upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Dairi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur wilayah memiliki peranan yang penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi infrastruktur wilayah mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha. Aspek daya saing daerah pada kondisi infrastruktur wilayah dapat dilihat dari kondisi transportasi, kelistrikan, air bersih/air minum, dan telekomunikasi.

Tabel 2. 31 Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara Pilar 2 (Infrastruktur)

No	Kabupaten/Kota	Pilar 2 (Infrastruktur)
1	Nasional*	2,91
2	Provinsi Sumatera Utara	3,42
3	Nias	2,22
4	Mandailing Natal	3,13
5	Tapanuli Selatan	1,74
6	Tapanuli Tengah	2,42
7	Tapanuli Utara	2,65
8	Toba Samosir	2,21

No	Kabupaten/Kota	Pilar 2 (Infrastruktur)
9	Labuhan Batu	1,49
10	Asahan	2,09
11	Simalungun	2,47
12	Dairi	1,94
13	Karo	1,54
14	Deli Serdang	2,91
15	Langkat	1,93
16	Nias Selatan	2,58
17	Humbang	1,76
18	Hasundutan	2,01
19	Pakpak Bharat	2,01
20	Samosir	1,87
21	Serdang Bedagai	2,19
22	Batu Bara	2,70
23	Padang Lawas Utara	1,80
24	Padang Lawas	2,62
25	Labuhan Batu Selatan	1,42
26	Labuhan Batu Utara	2,04
27	Nias Utara	1,85
28	Nias Barat	-
29	Sibolga	2,02
30	Tanjung Balai	1,67
31	Pematang Siantar	-
32	Tebing Tinggi	2,12
33	Medan	2,93
34	Binjai	-
35	Padangsidempuan	1,62
36	Gunungsitoli	1,61

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2022

Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya saing. Dimensi yang digunakan dalam pengukuran ISDS infrastruktur yaitu infrastruktur transportasi,

infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur utilitas air minum. Indikator yang digunakan pada infrastruktur transportasi yaitu konektivitas jalan, kualitas infrastruktur jalan, proporsi jumlah stasiun kereta api, proporsi jumlah bandara, dan proporsi jumlah pelabuhan.

Kabupaten Dairi pada pilar infrastruktur menurut ISDS 2022 memiliki indeks daya saing daerah 1,94. Nilai ini masih lebih rendah dibanding angka ISDS pilar 2 secara nasional dan provinsi. ISDS Kabupaten Dairi dibanding kabupaten di sekitarnya itu Kabupaten Karo 1,54, Kabupaten Samosir 1,87 dan Kabupaten Pakpak Bharat 2,01.

Sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Panjang jalan di Kabupaten Dairi yang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi 1.816,20 km. Jalan dengan status jalan kabupaten mengalami pengurangan dari tahun 2021.

Tabel 2. 32 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Dairi (Km) Tahun 2018-2022

No	Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Negara	129,76	129,76	129,76	129,76	129,41
2	Provinsi	62,70	62,70	62,70	62,70	81,50
3	Kabupaten/Kota	1.608,48	1.608,48	1.608,48	1.608,48	1.605,29
	Jumlah	1.800,94	1.800,94	1.800,94	1.800,94	1.816,20

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2021-2023

Jenis permukaan jalan kabupaten semakin berkembang selama lima tahun terakhir, hal ini terlihat dari bertambahnya panjang jalan dengan jenis permukaan aspal sebesar 1.042,21 km atau sebesar 64,92Persen pada tahun 2022.

Tabel 2. 33 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Dairi (Km) Tahun 2018-2022

No	Jenis Permukaan Jalan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aspal	954,59	1.030,61	1.047,79	1.112,58	1.042,21
2	Kerikil	390,45	339,24	531,09	473,53	523,84
3	Tanah	263,44	238,63	29,60	22,38	39,24
4	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.608,48	1.608,48	1.608,48	1.608,48	1.605,29

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2021-2023

Kondisi jalan di Kabupaten Dairi tahun 2022 menunjukkan panjang jalan dengan kondisi jalan rusak dan sangat rusak masih tinggi yaitu sebesar 41,57 persen dengan panjang jalan rusak 267,69 km dan jalan rusak berat 399,57 km. Kondisi jalan ini dapat menghambat peredaran barang dan orang di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 34 Panjang Jalan Menurut Jenis Kondisi Jalan di Kabupaten Dairi (Km) Tahun 2018-2022

No	Kondisi Jalan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	446,65	511,89	710,62	740,95	739,04
2	Sedang	467,75	447,71	198,40	198,29	199,00
3	Rusak	279,96	201,37	275,97	271,83	267,67
4	Rusak Berat	414,12	447,52	423,49	397,42	399,57
	Jumlah	1.608,48	1.608,48	1.608,48	1.608,48	1.605,29

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2021-2023

Sarana perhubungan darat yang ada di Kabupaten Dairi dilengkapi terminal tipe A yaitu Terminal Sitinjo yang berada di Kecamatan Sitinjo. Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Selain itu, terdapat Terminal Sidikalang di Kecamatan Sidikalang yang melayani kebutuhan transportasi untuk berbagai tujuan.

Tabel 2. 35 Jumlah Perusahaan dan Armada Angkutan Umum yang Memiliki Ijin Trayek di Kabupaten Dairi Tahun 2022

No	Jenis Angkutan Umum	Jumlah	Jumlah
----	---------------------	--------	--------

		Perusahaan	Armada
1	Bus Angkutan Umum Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	9	312
2	Bus Angkutan Umum Antar Pedesaan dalam Kabupaten	6	152
	Jumlah	15	464

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2021-2023

Pelayanan intra moda transportasi danau di Danau Toba melayani antar kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Simalangun, Tobasa, Tapanuli Utara, Dairi, Samosir dan Karo. Dengan adanya Danau Toba dengan luas perairan yang sangat besar maka diperlukan angkutan yang menghubungkan wilayah. Terjadi pergerakan untuk mendukung aktifitas ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pergerakan ini juga mendukung kegiatan pariwisata di kawasan Danau Toba.

Tabel 2. 36 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Dairi (Persen) Tahun 2018-2022

No	Sumber Penerangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Listrik PLN	98,72	98,84	98,29	99,54	99,50
2	Listrik Non PLN	0,12	0,36	0,33	0,14	0,00
3	Bukan Listrik	1,16	0,81	1,38	0,32	0,50
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dairi Dalam Angka 2021-2022

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022, persentase rumah tangga di Kabupaten Dairi yang sudah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama adalah 99,50 persen, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Di sisi lain sumber pengguna listrik non PLN juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja yang perlu untuk dievaluasi untuk perencanaan kedepan.

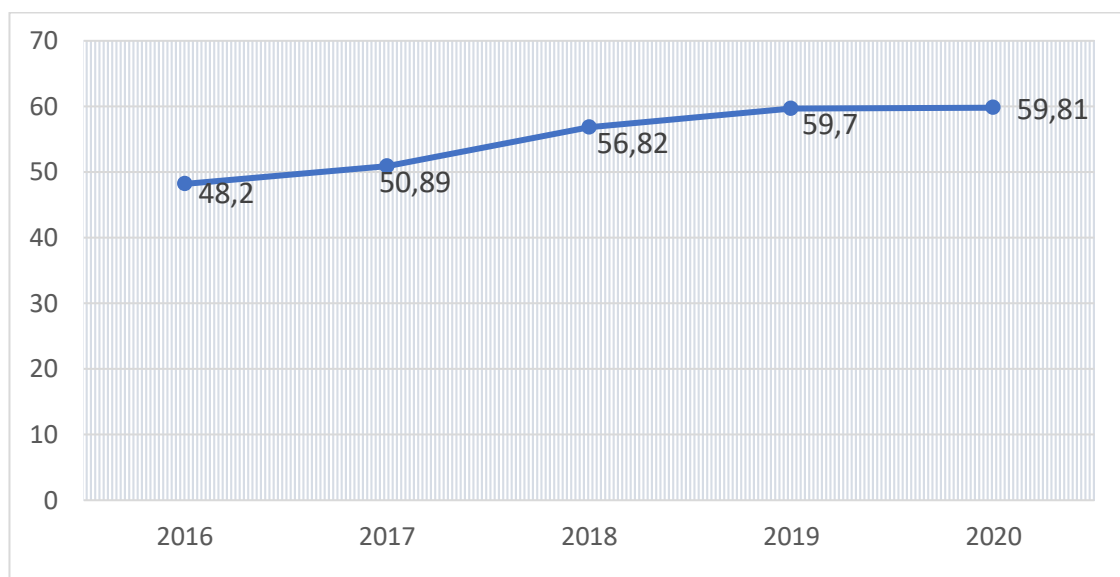
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada konteks pembangunan perumahan dan permukiman, sanitasi, serta

sumber air. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada perkembangan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, utilitas umum (PSU). PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Oleh karena itu, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 32 Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi, 2021

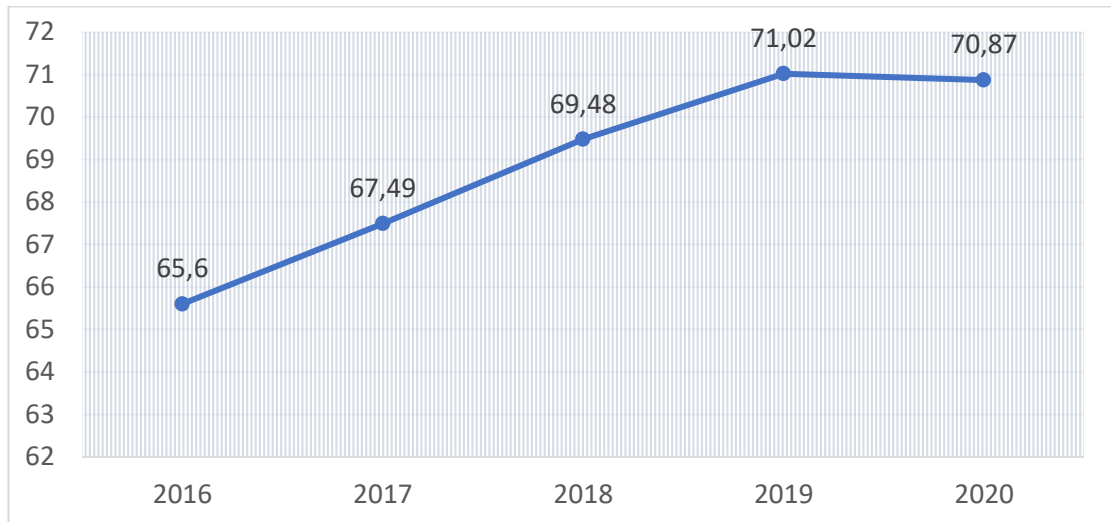
Persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2016-2020, rata-rata peningkatan sebesar 2,9 persen tiap tahun. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam upaya meningkatkan pelayanan perumahan dan permukiman. Peningkatan cakupan prasarana dan sarana utilitas umum ini bisa menjadi indikator penting dalam mengevaluasi seberapa baik suatu lingkungan dalam mendukung kesehatan masyarakat.

b. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni mengacu pada kondisi tempat tinggal atau rumah yang memenuhi standar layak untuk ditinggali. Rumah layak huni dapat dipenuhi apabila memenuhi 4 kriteria, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum, dan

akses sanitasi yang layak. Berikut capaian dari persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020.

Gambar 2. 33 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi, 2021

Capaian persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi memiliki tren yang cenderung selalu meningkat tiap tahunnya. Capaian tertinggi sebesar 71,02% pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu dengan capaian 0,15%. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi untuk penanganan rumah layak huni di Kabupaten Dairi, guna semakin meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

c. Penyediaan Air minum dan Sanitasi

Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dalam rangka mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Tabel 2. 37 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Dairi (persen) 2018-2022

No	Sumber Air Minum	2018	2019	2020	2021	2022
1	Air Kemasan Bermerk	0,43	0,64	0,47	0,27	0,07
2	Air Isi ulang	4,97	5,75	3,76	1,49	3,84
3	Air Leding	30,26	23,11	30,56	34,93	37,06
4	Sumur Bor/Pompa	5,36	9,77	8,48	9,61	4,30
5	Sumur Terlindung	1,72	6,11	1,65	3,71	6,68
6	Sumur Tidak Terlindung	1,49	3,32	0,33	0,62	0,00
7	Mata Air Terlindung	37,29	34,63	39,20	36,90	35,70
8	Mata Air Tidak Terlindung	8,24	6,08	5,37	3,39	1,29
9	Air Permukaan	3,03	5,92	6,43	4,09	1,91
10	Air Hujan	7,20	4,65	3,70	4,99	9,03
11	Lainnya	-	-	0,07	0,00	0,11
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2023

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Dairi menggunakan sumber air minum dari air leding dan mata air terlindung. Konservasi sumberdaya air diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pada tahun 2022, penggunaan air minum yang bersumber pada air kemasan bermerek terus mengalami penurunan. Demikian juga dengan penggunaan mata air terlindung dan mata air tidak terlindung yang mengalami penurunan. Peningkatan persentase rumah tangga dengan sumber air minum dari air leding mengalami peningkatan dengan persentase 37,06 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan infrastruktur instalasi berupa saluran air hingga sampai ke rumah tangga.

Kondisi air minum dan sanitasi di Kabupaten Dairi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum yang bersih/layak di Kabupaten Dairi tahun 2022 sebesar 63,81 persen dan 36,19 persen masih dalam kondisi tidak bersih. Hal ini menunjukkan kondisi air minum di

Kabupaten Dairi masih belum optimal. Perlu peningkatan infrastruktur dalam mendukung penyediaan air minum.

Tabel 2. 38 Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Dairi Tahun 2022

No	Kondisi	Bersih/Layak	Tidak Bersih/Layak	Total
1	Sumber Air Minum	63,81	36,19	100,00
2	Akses Air Minum	96,68	3,32	100,00
3	Kondisi Sanitasi	94,14	5,86	100,00

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2021-2023

Persentase rumah tangga dengan akses air minum bersih cukup baik yaitu sebesar 96,68 persen. Kondisi sanitasi di Kabupaten Dairi tahun 2022 sudah cukup baik ditunjukkan dengan persentase rumah tangga pada kondisi bersih/layak sebesar 94,14 persen. Sebagian besar rumah tangga menggunakan tangki/SPAL sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja dimana pada tahun 2022 persentasenya sebesar 92,49 persen.

Tabel 2. 39 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja di Kabupaten Dairi (persen) 2018-2022

No	Tempat Pembuangan Akhir Kotoran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tangki/SPAL	85,42	93,85	89,32	92,01	92,49
2	Kolam/Sawah/Sungai/Danau	-	0,55	0,08	0,00	0,44
3	Lainnya	14,58	5,60	10,60	7,99	7,06
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2021-2023

Beberapa capaian indikator yang telah ditampilkan menunjukkan bahwa telah terdapat upaya untuk memberikan pelayanan sanitasi kepada masyarakat. Namun lebih lanjut lagi perlu adanya mengukur kinerja dengan indikator yang lebih tinggi, yaitu dilihat dari segi kelayakan dan keamanannya. Karena saat ini tuntutan terhadap pemenuhan air bersih dan sanitasi tidak berhenti kepada aksesnya saja tetapi juga kepada kelayakan dan keamanannya.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan kenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan kondisi lingkungan yang kondusif, tenteram, dan aman. Berikut ini adalah data yang digunakan untuk menganalisis urusan tersebut.

Tabel 2. 40 Jenis Bencana di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Banjir Bandang	0	2	3	1	0	6
2	Gempa Bumi	0	0	0	1	1	2
3	Tanah Longsor	12	30	0	1	1	44
4	Angin Puting Beliung	13	12	18	12	12	67
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	1	4	5	9	19
6	Kebakaran Pemukiman	18	11	17	24	17	87
Total		43	56	42	44	40	225

Sumber: BPBD Kabupaten Dairi, 2021

Bencana yang terjadi di Kabupaten Dairi didominasi oleh bencana Kebakaran pemukiman, diikuti angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang serta gempa bumi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada risiko bencana di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 41 Jumlah Kebakaran yang Terjadi Menurut Laporan Polisi di Kabupaten Dairi Tahun 2020

Tahun	Dilaporkan	Diselesaikan	Belum Selesai
2020	12	18	-

Sumber: BPBD Kabupaten Dairi, 2021

Jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan pada tahun 2020 sebanyak 12 kejadian. Adanya kejadian kebakaran tersebut mengindikasikan masih rentannya kejadian kebakaran di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 42 Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Dairi

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (Orang)	0	90	1.732	2.116	0
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100%	100%	100%	100%	55%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Dairi, 2021

Penyelesaian terhadap pelanggaran K3 tahun 2016 – 2019 selalu dapat terselesaikan secara keseluruhan yakni 100%. Penurunan tingkat penyelesaian di tahun 2020, yakni hanya sebesar 55%, menunjukkan masih perlunya optimalisasi dalam penanganan penyelesaian pelanggaran K3.

Tabel 2. 43 Jumlah dan Presentasi Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda
2019	1.000	100%
2020	150	66%
2021	139	82,17%
2022	332	100%
2023	239	100%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Dairi, 2021

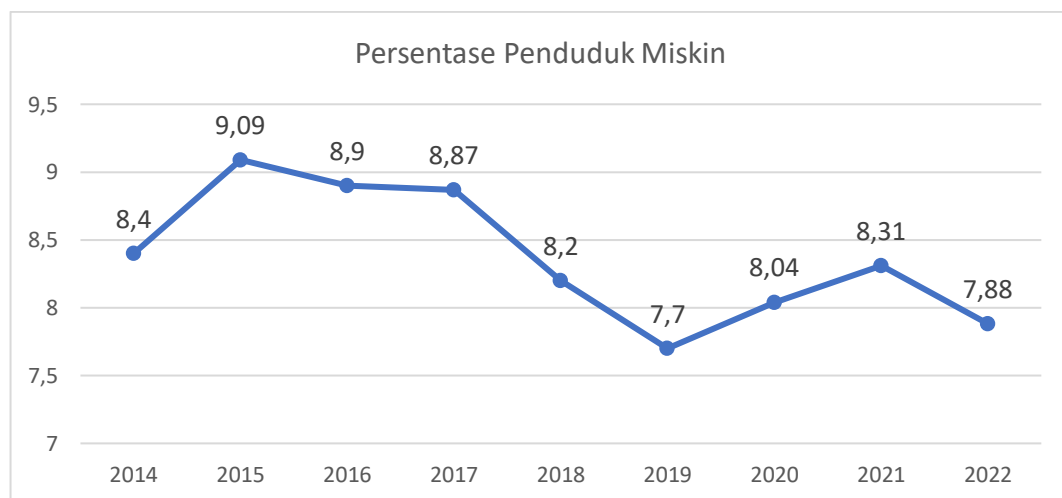
Terjadi fluktuasi jumlah pelanggaran terhadap Perda dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023. Pelanggaran tertinggi terjadi pada tahun 2019, dan dapat ditangani secara tuntas, 100%. Tahun 2020 dan 2021, terdapat penanganan yang belum tuntas terhadap pelanggar perda. Dengan demikian, optimalisasi terhadap penanganan pelanggaran perda sangat diperlukan.

6. Sosial

Pemerintah di suatu wilayah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial penduduk yang ada di wilayah tersebut. Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, berbagai layanan diberikan kepada kelompok tertentu, seperti fakir miskin. Indikator yang digunakan dalam melihat banyaknya penduduk miskin di suatu wilayah salah satunya dari persentase penduduk miskin. Indikator persentase penduduk miskin dapat menunjukkan gambaran kondisi yang lebih jelas karena membandingkan antara jumlah penduduk miskin yang terdaftar dengan jumlah penduduk pada tahun terkait di wilayah tersebut. Data terkait persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 34 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Dairi tahun 2014-2022



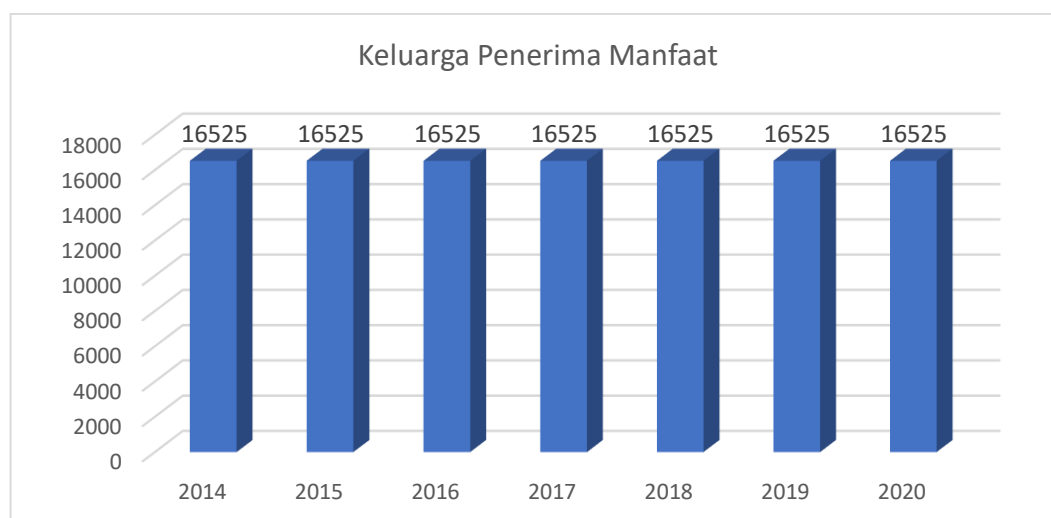
Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi selama periode 2014 hingga 2022 memiliki tren yang menurun. Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 0,52 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi sempat terjadi pada tahun 2015, 2020, dan 2021. Inflasi dan anjloknya kondisi perekonomian nasional pada tahun 2015 menjadi faktor utama yang meningkatkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi. Pola serupa terjadi pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa secara umum pemerintah Kabupaten Dairi berhasil menurunkan angka kemiskinan dari waktu ke waktu. Hanya saja berbagai kebijakan preventif tetap

perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak yang mungkin dihasilkan dari kejadian luar biasa lain di masa yang akan datang.

Pemerintah mengupayakan berbagai kebijakan untuk menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi, salah satunya dengan menjalankan kebijakan dari pusat, yakni menyalurkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dilakukan oleh Kementerian Sosial RI dalam rangka penanganan fakir miskin secara terstruktur dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data terkait jumlah keluarga penerima manfaat di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 35 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Dairi Tahun 2014-2020



Sumber: PRPJMD Kabupaten Dairi 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Dairi mengalami stagnansi pada rentang tahun 2014 hingga 2020. KPM yang tercatat menerima bantuan dari Kementerian Sosial RI di Kabupaten Dairi mencapai 16.525 keluarga. Jumlah keluarga penerima manfaat yang konsisten selama tujuh tahun berupaya untuk menurunkan persentase kemiskinan melalui pemberian bantuan pangan non tunai (BNPT) dan program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Dairi. Pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi. Hal itu tampak dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi yang cenderung

mengalami penurunan apabila tidak terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi dan anjloknya kondisi perekonomian nasional.

2.3.1.2. Urusan Pelayanan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

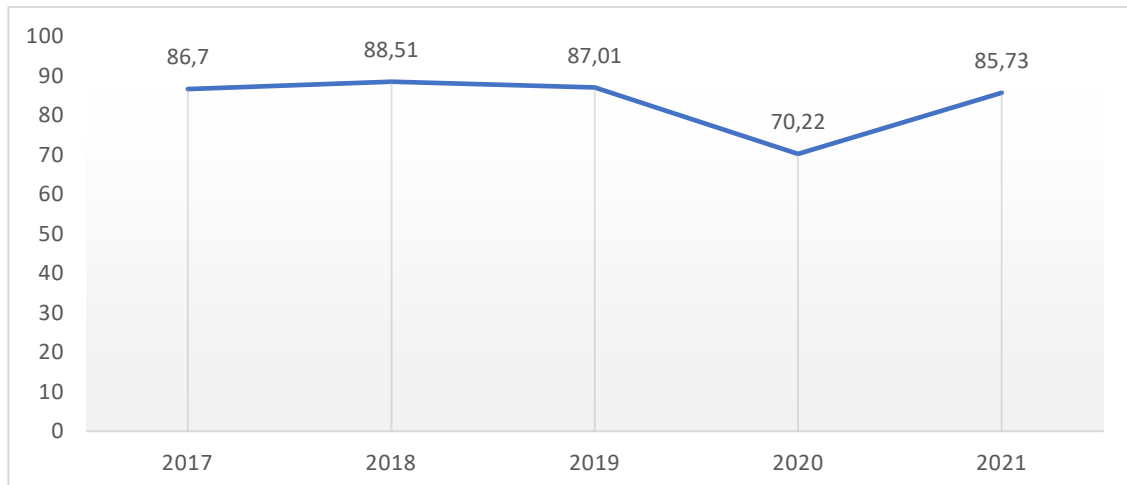
Layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi analisis capaian kinerja pada urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar:

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam menentukan produktivitas suatu daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berikut ini merupakan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dairi.

Jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jenis tenaga kerja dapat dilihat dari sebaran proporsi lapangan pekerjaan utama, serta kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari persentase Angkatan kerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan.

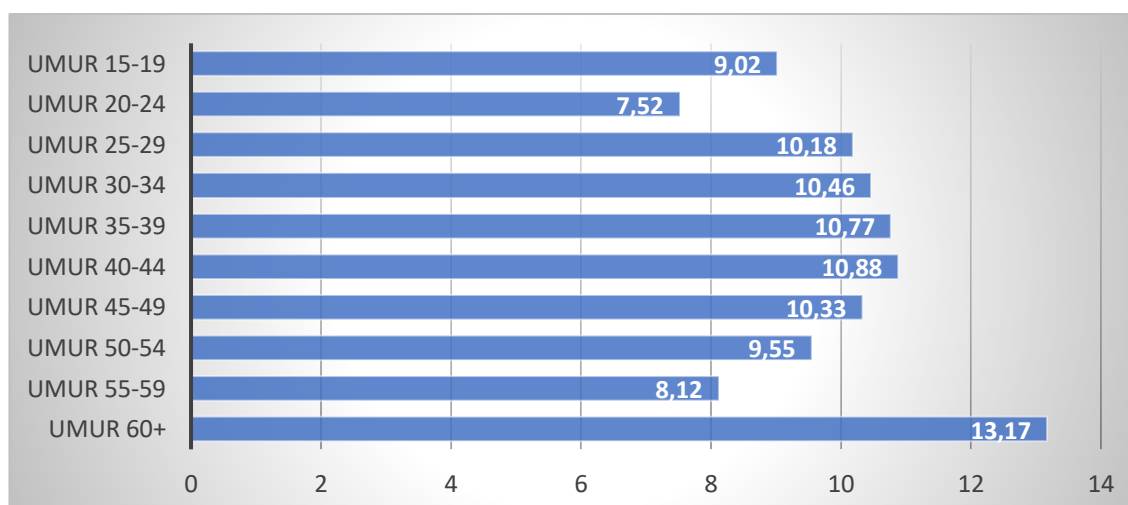
Gambar 2. 36 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dairi Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Dairi, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan banyaknya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi (bekerja). Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi ketersediaan tenaga kerja yang memproduksi barang dan jasa. Selama periode 2017-2021, TPAK Kabupaten Dairi cukup fluktuatif dengan nilai terendah 70,22 persen pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 85,73 persen di tahun 2021. Kenaikan angka tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyaknya angkatan kerja di Kabupaten Dairi yang melakukan aktivitas ekonomi (bekerja). Tingginya TPAK juga berkorelasi terhadap rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Dairi sebesar 1,49 persen pada tahun 2021. Rendahnya TPT disebabkan karena mayoritas mata pencaharian penduduk pada sektor pertanian/perkebunan, sehingga memiliki potensi PHK yang rendah. Selain itu, berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi 87,86 persen dibanding dengan TPAK perempuan sebesar 83,67 persen.

Gambar 2. 37 Grafik Persentase Angkatan Kerja Menurut Umur Kabupaten Dairi Tahun 2021



Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2021

Dilihat dari segi golongan umur, angkatan kerja di Kabupaten Dairi didominasi oleh penduduk umur 60+ yaitu sebesar 21,834 jiwa (13,17Persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa para lansia di Kabupaten Dairi masih produktif dalam menghasilkan barang dan jasa. Tingginya jumlah penduduk bekerja pada umur 60+ juga disebabkan karena banyaknya usia muda yang merantau ke luar Kabupaten Dairi untuk bersekolah maupun bekerja. Namun, penduduk umur 15-19 tahun yang bekerja memiliki presentase lebih besar dibanding penduduk umur 20-24 tahun. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengingat umur 15-19 tahun idealnya masih bersekolah tingkat atas. Apabila sudah banyak yang bekerja akan berpengaruh terhadap angka rata-rata lama sekolah.

Tabel 2. 44 Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Kabupaten Dairi Tahun 2018-2021

No	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Sekolah Dasar	29 %	29 %	28 %	24 %	24 %
2	SMP	28 %	28 %	30 %	28 %	29 %
3	SMA	26 %	26 %	24 %	24 %	24 %
4	SMK	11 %	11 %	11 %	13 %	12 %
5	DI/II/III	2 %	2 %	2 %	4 %	3 %
6	DIV/S1	4 %	4 %	4 %	8 %	7 %

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2019-2021

Selama periode 2017-2021, penduduk Kabupaten Dairi yang bekerja didominasi oleh lulusan setingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 29Persen, kemudian disusul lulusan setingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD)/belum pernah sekolah sebanyak 24Persen dan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 24Persen. Banyaknya tenaga kerja yang memiliki kualifikasi setingkat sekolah dasar mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Dairi perlu dioptimalkan. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas SDM dan tingkat produktivitas kerja.

Tabel 2. 45 Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sektor Pertanian (pertanian, perkebunan, perikanan)	71,78 %	70,95 %	70 %	73 %	70,07 %
2	Sektor Jasa (perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa kemasyarakatan)	24,04 %	25,38 %	26,09 %	23 %	26,85%
3	Sektor Manufaktur (pertambangan, industri, listrik, air)	4,18 %	3,67 %	3,92 %	3 %	3,08 %

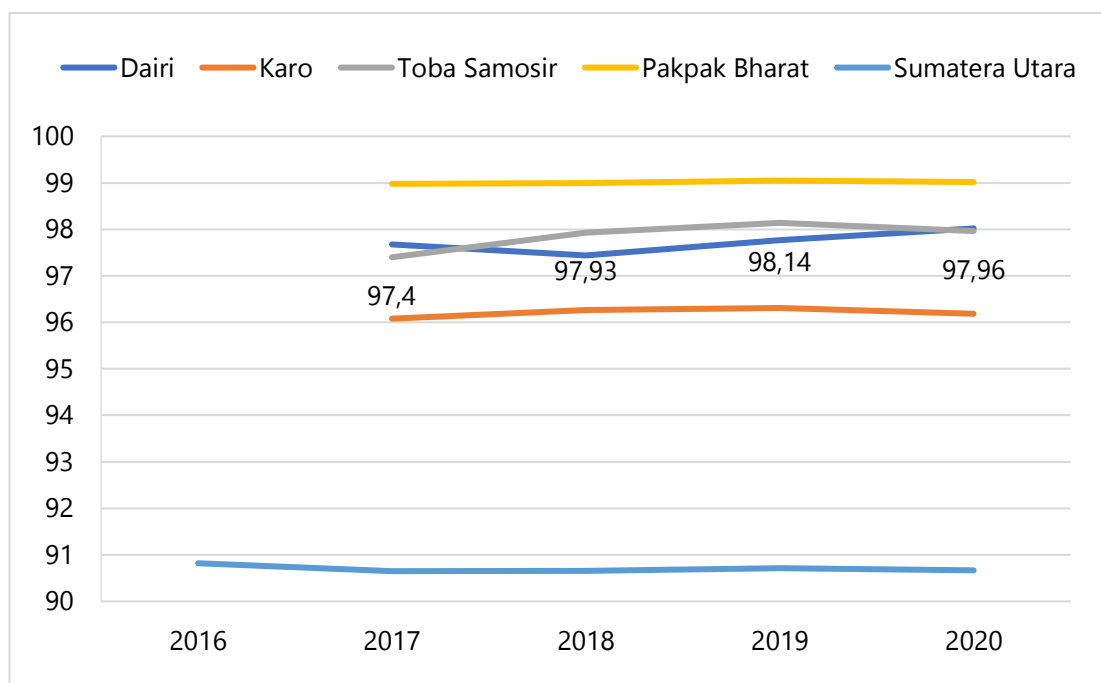
Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2019-2021

Dilihat dari persentase penduduk bekerja menurut lapangan kerja terlihat bahwa sektor pertanian menjadi lapangan pekerjaan utama bagi mayoritas penduduk Kabupaten Dairi. Belum optimalnya pendidikan tinggi yang ditamatkan mengakibatkan terbatasnya ketrampilan dalam bekerja, sehingga sektor pertanian menjadi pilihan utama seperti berkebun jagung, jeruk, durian, kopi, dan beberapa tanaman pangan yang lainnya.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memegang peranan penting dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Dairi. Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dianalisa dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berikut ini merupakan perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 38 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

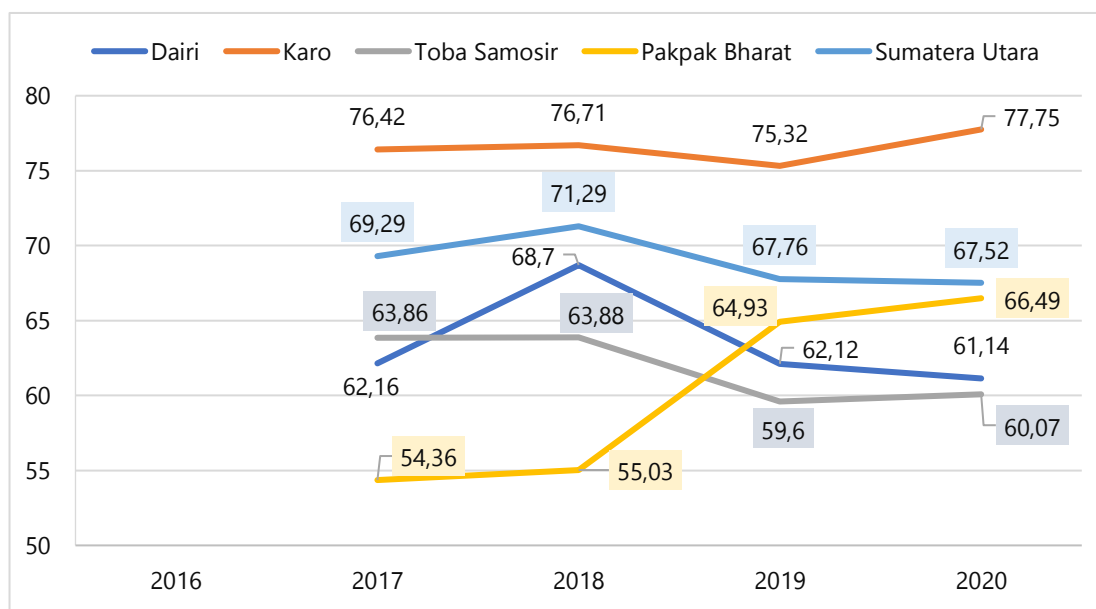


Sumber: BPS Pusat, 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan perbandingan capaian IPM antara penduduk perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Dairi fluktuatif dan cenderung naik dalam kurun waktu empat tahun. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata IPG Provinsi Sumatera Utara, IPG Kabupaten Dairi lebih tinggi. Namun, perkembangan IPG Kabupaten Dairi masih berada di bawah IPG Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perkembangan data tersebut menunjukkan kesetaraan capaian penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli di Kabupaten Dairi belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan antara lain adalah kurangnya optimalnya upaya pemberdayaan perempuan dan anak.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur tingkat keberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik. Semakin tinggi tingkat IDG menunjukkan keberdayaan perempuan yang semakin besar pada aspek perekonomian dan politik dikalangan masyarakat. Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 39 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Pusat, 2021

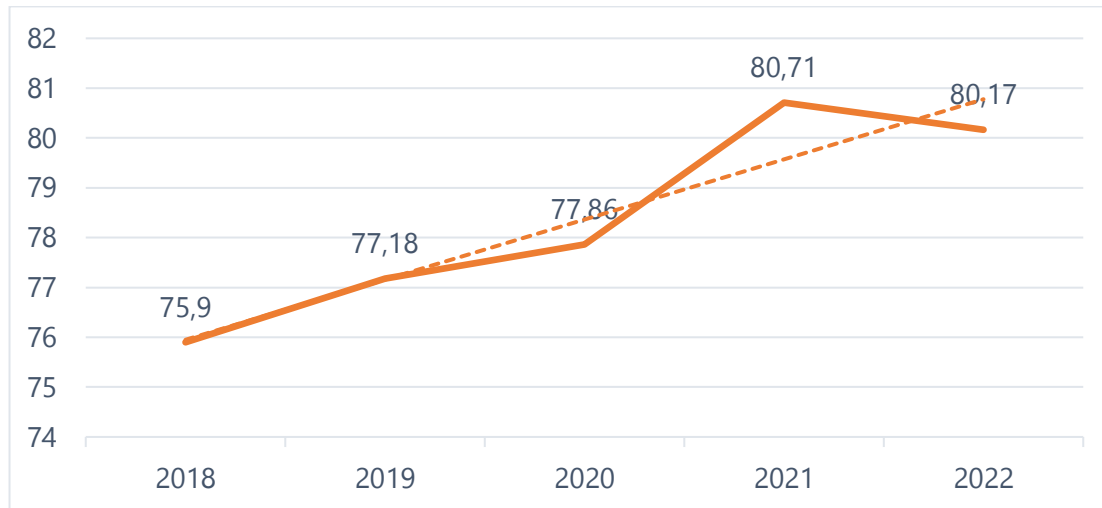
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun. Dibandingkan dengan daerah lain dan rata-rata Provinsi, IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Sama dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perbandingan ini menggambarkan keberdayaan perempuan di Kabupaten Dairi masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya keberdayaan perempuan dalam kegiatan perekonomian dan politik di Kabupaten Dairi. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa persoalan, antara lain adalah kurang optimalnya akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas publik. Kebijakan yang kurang sensitif gender juga berperan dalam menyebabkan permasalahan ini.

3. Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan berperan penting dalam memastikan kecukupan pangan daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan pangan dapat dianalisa dengan melihat perkembangan indeks ketahanan pangan daerah. Indeks ketahanan pangan merupakan ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks

ketahanan pangan terdiri dari tiga komponen utama yaitu: indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan pangan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 40 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022



Sumber: Kementerian Pertanian, 2018-2022

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Dairi menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Ketahanan pangan di Kabupaten Dairi dipengaruhi oleh dimensi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Aspek ketersediaan pangan ditunjukkan dengan produksi padi yang cukup besar di Kabupaten Dairi. Sedangkan untuk pemanfaatan pangan yang juga menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan indeks ketahanan pangan di Kabupaten Dairi ini tidak lepas dari produksi dan konsumsi protein hewani yang cukup.

4. Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib non-pelayanan dasar. Lingkup urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten mencakup pemberian izin lokasi, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penyelesaian sengketa tanah, proses ganti rugi, dan lain lain. Kinerja pelayanan pertanahan dapat dianalisis dengan melihat capaian pendaftaran tanah sistematis lengkap. Indikator ini menggambarkan cakupan masyarakat yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah. Berikut ini merupakan tabel status kepemilikan tanah yang diterbitkan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 46 Status Kepemilikan Tanah yang diterbitkan menurut Kecamatan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Hak Atas Tanah			Jumlah
	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	
2020	158	132	133	423
2019	2.966	5	29	3.000
2018	6.445	1	7	6.453
2017	2.718	1	24	2.743
2016	2.517	3	104	2.624

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2016-2021

Kinerja pelayanan pendaftaran tanah di Kabupaten Dairi fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2019 kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Pelaksanaan pelayanan pemberian izin lokasi terkendala wewenang pemberian izin lokasi yang mengakibatkan instansi daerah terkait hanya memiliki waktu terbatas untuk menerbitkan persetujuan izin lokasi. Selain itu, kualitas pelaksanaan urusan pertanahan terkendala perencanaan yang belum sistematis. Perencanaan terkait kebutuhan tanah belum tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.

5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayah Kabupaten Dairi, terlebih bagi perencanaan pembangunan 20 tahun mendatang. Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Penilaian kualitas lingkungan hidup diantaranya dapat diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (*Environmental Quality Index*). IKLH dapat dimaknai sebagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kualitas lingkungan dalam suatu daerah. Adapun cakupan dalam IKLH terdiri atas indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2. 47 Capaian parameter indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dairi Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------	------	------	------	------	------	------

Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	55,55	98,02	98,88	61,82
Indeks Kualitas Air	N/A	N/A	70	55,56	70	66,21
Indeks Tutupan lahan	N/A	N/A	46,61	42,45	79,65	79,48
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	N/A	56,31	63,05	83,81	70,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017-2022

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mencatat bahwa IKLH Kabupaten Dairi memiliki tren peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Capaian IKLH kemudian turun sebanyak 13,61 poin pada tahun 2022. Kriteria capaian IKLH Kabupaten Dairi tergolong sedang dari tahun 2019 hingga 2020, kemudian naik menjadi kategori baik pada tahun 2021 hingga 2022. Kriteria IKLH tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Ketiga indikator pembentuk IKLH Kabupaten Dairi memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2022. Capaian indeks kualitas air masih pada kategori baik pada tahun 2021, dan berkategori sedang pada tahun 2022. kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai sekaligus predikat indeks kualitas air di Kabupaten Dairi.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) menjadi salah satu aspek yang memiliki nilai paling rendah jika dibandingkan dengan indikator lainnya pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Capaian IKTL hanya pada tahun tersebut memiliki kategori kurang, karena memiliki nilai kurang dari 50. Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan belum optimalnya capaian indikator kualitas tutupan lahan diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penebangan hutan lindung dan belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis. Kedua hal tersebut diindikasikan menjadi penghambat capaian IKTL di Kabupaten Dairi, sehingga menjadi belum optimal hingga pada tahun 2022. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi perlindungan hutan dan upaya rehabilitasi lahan kritis perlu untuk dioptimalkan agar dapat lebih meningkatkan

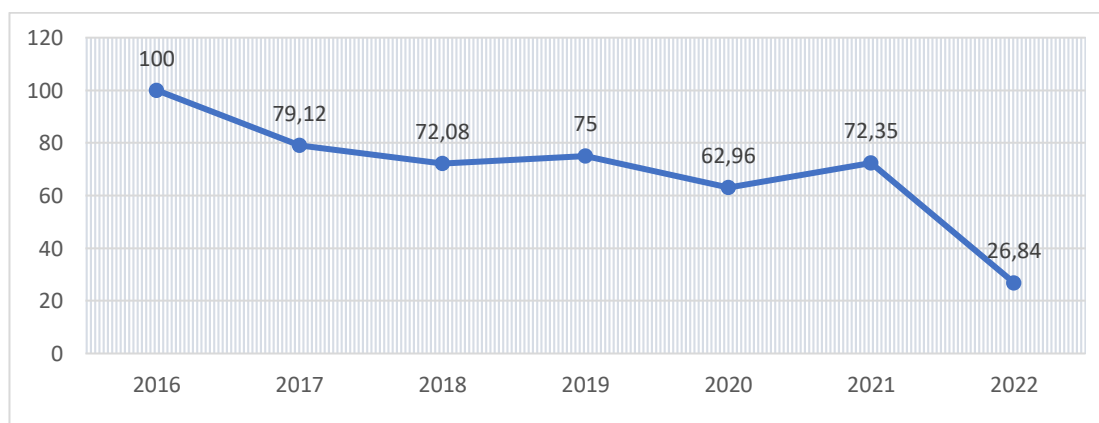
capaian dari IKTL yang sudah berkategori baik, namun masih dalam ambang batas bawah dari kategori tersebut.

Indeks kualitas udara (IKU) telah mencapai kategori sangat baik pada tahun 2020-2021. Peningkatan nilai indeks kualitas udara semakin baik dibandingkan tahun 2019, dimungkinkan karena pengawasan dan pembinaan terus menerus dilakukan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi udara. Di sisi lain, capaian IKU kembali menurun pada tahun 2022, dan berganti status menjadi kategori baik. Dengan demikian, upaya yang berkaitan untuk menjaga kualitas udara di Kabupaten Dairi perlu untuk kembali dipertahankan bahkan ditingkatkan agar tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan.

b. Persampahan

Pengelolaan sampah dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Pengelolaan sampah secara individu (mandiri) dapat diimplementasikan melalui pemilahan sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri. Adapun cara selanjutnya yaitu pengelolaan sampah secara kolektif yang dikelola oleh komunitas hingga level pemerintah. Pengelolaan ini dapat direalisasikan melalui tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berikut disajikan capaian volume sampah yang berhasil ditangani di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2022.

Gambar 2. 41 Grafik capaian volume sampah yang berhasil ditangani di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2022



Sumber: LKIP Kabupaten Dairi, 2016 – 2021; LPPD Kabupaten Dairi, 2022

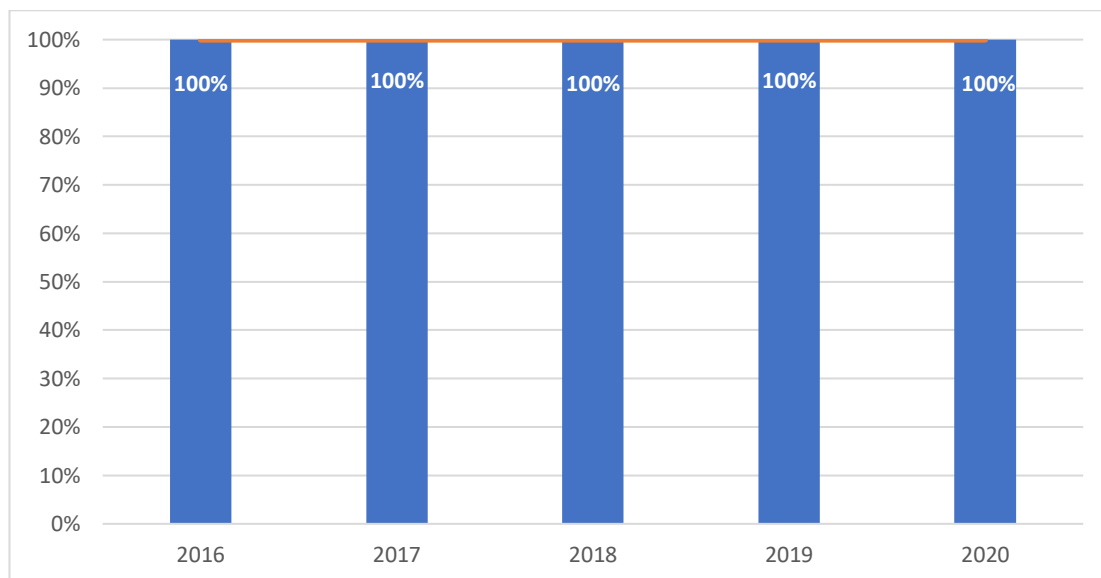
Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang masih terbatas, berimplikasi terhadap masih belum optimalnya

capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Dairi. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan capaian pengelolaan sampah hanya tercapai sebesar 26,84% (LPPD Kabupaten Dairi, 2022) pada tahun 2022. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga diindikasikan menjadi penyebab lain terhadap masih belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Dairi.

c. Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Selain soal persampahan, dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Dairi juga melaksanakan pengawasan lingkungan, konservasi lingkungan, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kepemilikan dokumen lingkungan oleh perusahaan (AMDAL/UKL/UPL) dan pemantauan pencemaran lingkungan.

Gambar 2. 42 Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Tahun 2016 – 2020



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, 2021

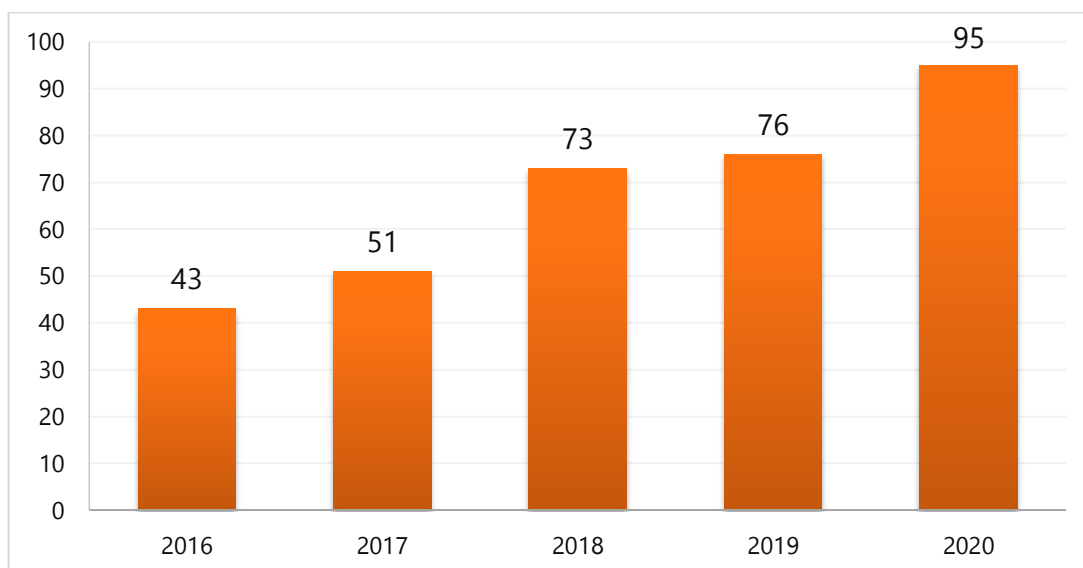
Capaian pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan di Kabupaten Dairi memenuhi target mencapai 100% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki konsentrasi yang serius dalam aspek pengawasan dokumen lingkungan, dengan tujuan untuk tetap memberikan kontrol terhadap segala pembangunan yang berpotensi

merusak lingkungan. Pencapaian tersebut perlu untuk selalu diupayakan dan dipertahankan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan yang sangat penting karena berkaitan dengan hak-hak warga negara dalam memperoleh dokumen kependudukan. Tinggi rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan sebagainya menjadi dasar untuk menilai kinerja pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun kepemilikan penduduk terhadap dokumen kependudukan dapat dilihat di grafik berikut ini.

Gambar 2. 43 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

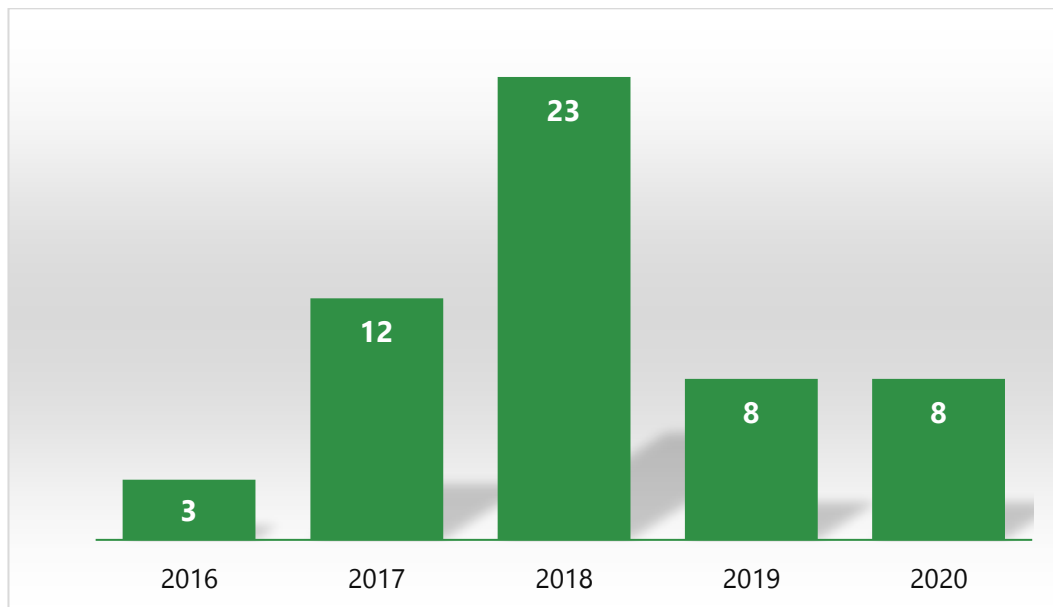
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2020 sebesar 52 persen. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 22 persen. Sementara itu, peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3 persen.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia maupun perekonomian desa sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pemberdayaan desa dapat dianalisis dengan melihat berbagai indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan desa. Salah satu indikator makro pemberdayaan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM). IDM menggambarkan keberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu desa. Selain itu, jumlah desa mandiri dalam suatu kabupaten juga merupakan salah satu indikator dalam menganalisis kinerja pemberdayaan desa. Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) dan jumlah desa mandiri di Kabupaten Dairi.

Salah satu indikator keberdayaan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah Kabupaten Dairi sendiri telah memfasilitasi pembentukan BUMDes. Berikut jumlah BUMDes di Kabupaten Dairi yang terbentuk pada tahun 2016-2020.

Gambar 2. 44 Jumlah BUMDes Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2021

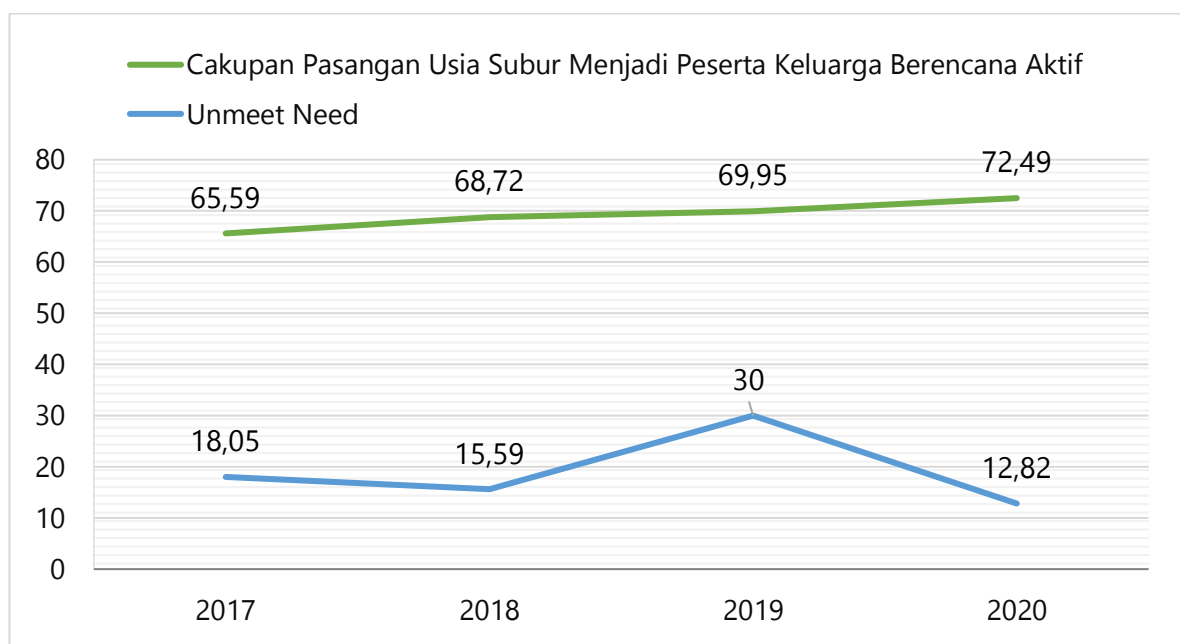
Jumlah pembentukan BUMDes di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2018 sebesar 20 desa.

Peningkatan pembentukan BUMDes tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 11 desa. Namun, peningkatan tersebut kemudian berujung pada penurunan drastis pembentukan BUMDes pada tahun 2019 sehingga hanya menjadi 8 desa. Rendahnya pembentukan BUMDes tidak terlepas dari rendahnya daya inovasi sumber daya manusia desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berperan penting dalam memastikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dairi tetap berdampak positif bagi pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dianalisa melalui perkembangan beberapa indikator kunci seperti tingkat partisipasi pasangan usia subur pada program kontrasepsi, dan tingkat *unmeet need*.

Gambar 2. 45 Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif dan *Unmet Need* Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKJiP Kabupaten Dairi 2016-2020

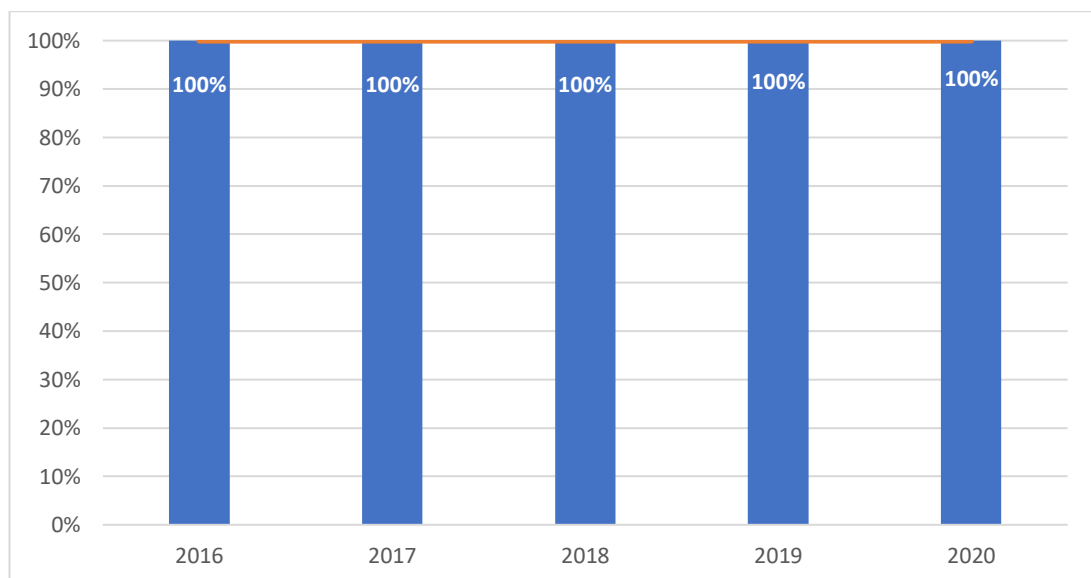
Cakupan Pasangan Usia Subur yang berpartisipasi aktif dalam program KB mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun. Peningkatan tersebut disertai dengan turunnya tingkat *Unmeet Need* di Kabupaten Dairi. Perkembangan ini menggambarkan semakin membaiknya kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian

penduduk terutama melalui intervensi program Keluarga Berencana. Namun demikian, masih terdapat sekitar 27,51 pasangan usia subur yang belum berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai persoalan terutama belum optimalnya akses program keluarga berencana yang berdampak pada belum optimalnya partisipasi pasangan usia subur.

9. Bidang Perhubungan

Fasilitas keselamatan lalu lintas sangat dibutuhkan dalam melengkapi aspek infrastruktur lalu lintas jalan. Semakin optimal dalam pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas, maka semakin memperkecil terjadinya kecelakaan ataupun hal lain yang tidak diinginkan lainnya dalam berkendara atau berlalu lintas. Fasilitas tersebut mencakup lalu lintas udara, laut dan juga daratan.

Gambar 2. 46 Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif dan *Unmet Need* Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020
Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2016 – 2020



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, 2021

Capaian penanganan fasilitas keselamatan lalu lintas di Kabupaten Dairi memenuhi target mencapai 100% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki konsentrasi yang serius dalam

pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas. Pencapaian tersebut perlu untuk selalu diupayakan dan dipertahankan.

10. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah, serta akses masyarakat terhadap informasi publik. Kinerja penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi publik dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti Persentase OPD Menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Jumlah Media Yang Digunakan dalam desiminasi informasi.

Tabel 2. 48 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

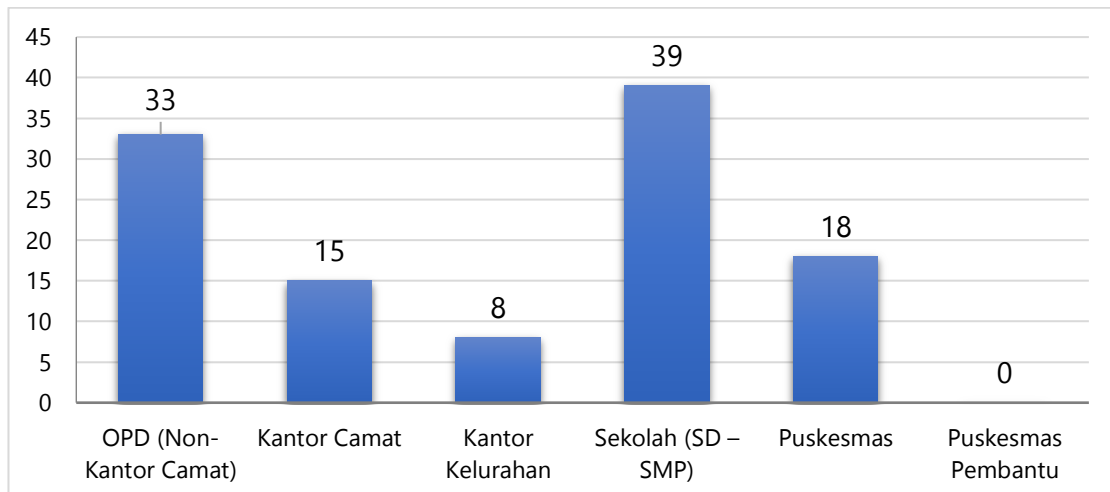
No	Jenis Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	17,5
2	Jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi	7	7	7	7	7

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2017-2020

Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektornik mencapai realisasi tahun 2020 sebesar 17,5 %, dengan target yang ditetapkan sebesar 20 %. Sehingga persentase capaian indikator tersebut mencapai 87,5 %. Sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat 7 Organisasi Perangkat Daerah dan 2 Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi yang sudah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Meskipun capaian indikator tersebut cukup tinggi, namun secara keseluruhan masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan OPD. Persoalan ini disebabkan oleh masih minimnya jumlah kapasitas *bandwidth*, kurangnya alat-alat studio. Sedangkan jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi dari tahun 2016 sampai 2020 terlihat stagnan di angka 7 media. Kondisi ini merupakan realisasi yang

dipertahankan dari tahun ke tahun mengingat jumlah media yang terbatas di Kabupaten Dairi. Gambaran kondisi komunikasi dan informatika Kabupaten Dairi juga dapat dilihat dari jumlah kantor instansi pemerintah yang menggunakan jaringan internet untuk pelayanan publik.

Grafik 2. 1 Jumlah Kantor Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi yang menggunakan Jaringan Internet Tahun 2020



Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2021

Penggunaan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan bagi setiap daerah. Jika melihat data Tabel Jaringan internet yang digunakan di Kabupaten Dairi sudah cukup merata, hal ini terlihat dari jumlah kantor camat yang menggunakan jaringan internet adalah keseluruhan kecamatan yaitu 15 kecamatan. Kondisi yang baik juga terlihat pada jumlah sekolah SD sampai SMP yang menggunakan jaringan internet, yaitu 39 sekolah. Namun, pemerataan jaringan internet di setiap kecamatan belum diikuti dengan pemenuhan jaringan internet di pedesaan. Terlihat bahwa dari 169 desa/kelurahan di Kabupaten Dairi, hanya 8 kantor yang menggunakan jaringan internet pada tahun 2020. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih mengingat kebijakan saat ini yang lebih banyak menggunakan akses internet, sehingga pemerataan pembangunan yang dilakukan perlu disertai dengan kualitas jaringan internet yang baik.

Tabel 2. 49 Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sidikalang	N/A	-	-	-	-
2	Berampu	N/A	-	-	-	-
3	Sitinjo	N/A	-	-	-	-
4	Parbuluan	N/A	-	-	-	-
5	Sumbul	N/A	1	1	1	1
6	Silahisabungan	N/A	1	1	1	1
7	Silima Punggapungga	N/A	1	1	1	1
8	Lae Parira	N/A	-	-	-	-
9	Siempat Nempu	N/A	1	1	1	1
10	Siempat Nempu Hulu	N/A	-	-	-	-
11	Siempat Nempu Hilir	N/A	-	-	-	-
12	Tigalingga	N/A	1	1	1	1
13	Gunung Sitember	N/A	-	-	-	-
14	Pegagan Hilir	N/A	-	-	-	-
15	Tanah Pinem	N/A	1	1	1	1
Total		N/A	6	6	6	6

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2021

Pelayanan pos di Kabupaten Dairi masih kurang merata di semua kecamatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Dari 15 kecamatan di Kabupaten Dairi, hanya sebanyak 6 kecamatan yang memiliki layanan pos pembantu, sehingga akses masyarakat terhadap layanan pos masih terbatas.

Secara keseluruhan, kondisi urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap komunikasi dan informatika masih belum optimal. Penyebab dari persoalan ini diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan infrastruktur teknologi dan informatika, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras dan belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti jumlah koperasi aktif dan jumlah usaha mikro berikut ini.

Tabel 2. 50 Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Usaha Kecil Mikro Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi Aktif	25	67	158	165	165
Jumlah Usaha Mikro	86	98	115	103	13.682

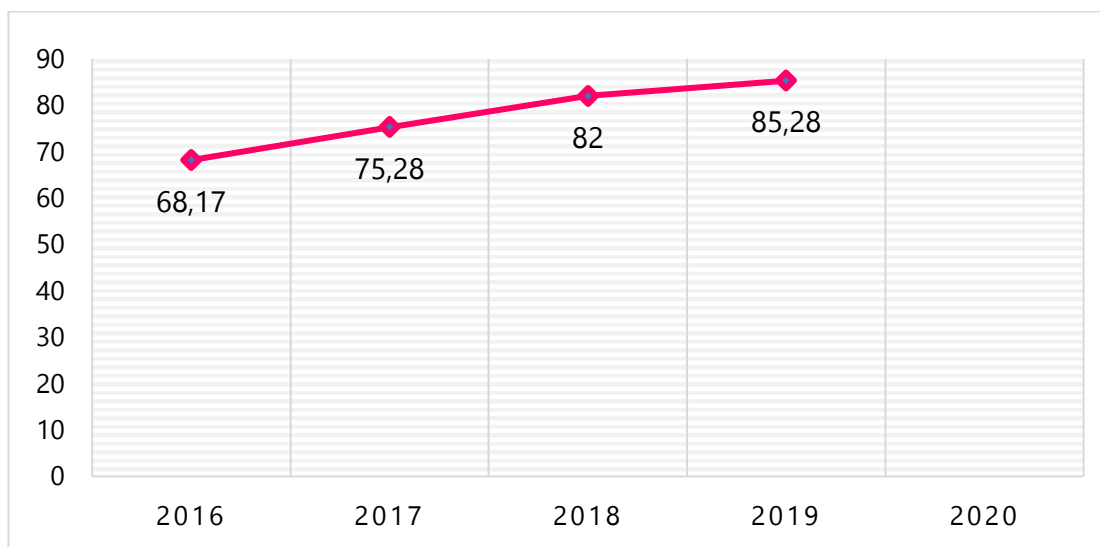
Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2016-2020

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun demikian, kinerja tersebut stagnan pada tahun 2020. Perkembangan ini menunjukkan kinerja penyelenggaraan koperasi yang baik. Disamping itu, jumlah usaha mikro di Kabupaten Dairi juga meningkat cukup besar dari tahun 2016-2018. Meskipun demikian, kinerja urusan koperasi dan UKM mengalami penurunan pada tahun 2018-2019. Namun, tahun 2020 jumlah usaha mikro melonjak drastis karena terdapat Banpres Produktif Usaha Mikro .

12. Penanaman Modal

Penanaman modal berperan penting dalam mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator utama seperti realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, Persentase Izin yang diterbitkan sesuai SOP juga berperan dalam menggambarkan kinerja pendukung pelayanan izin permodalan. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator urusan penanaman modal di Kabupaten Dairi.

Grafik 2. 2 Persentase Izin yang Terbit Sesuai SOP

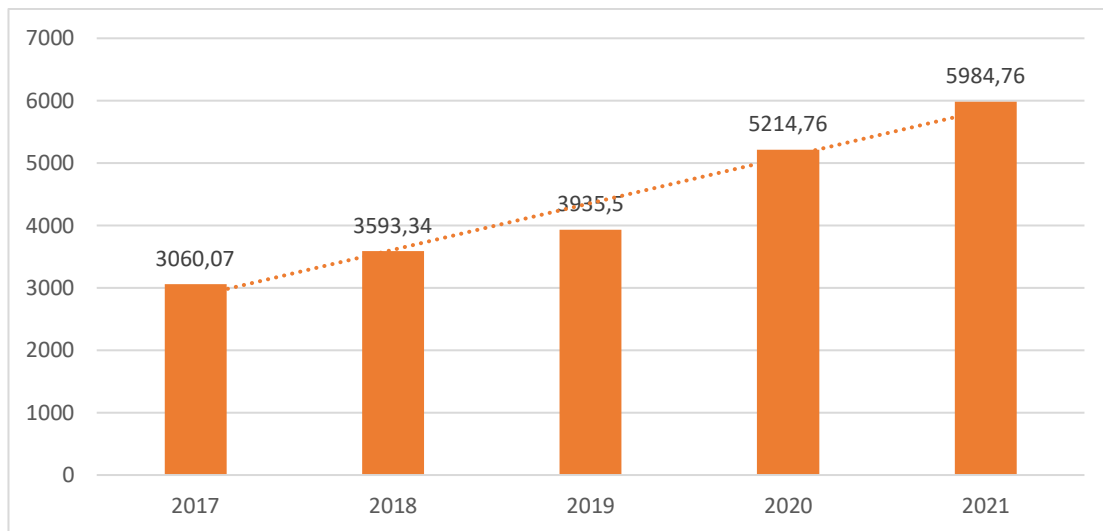


Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2017-2020

Kinerja penunjang layanan penanaman modal di Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun. Perkembangan data tersebut mengindikasikan optimalnya pelayanan perijinan pendukung penanaman modal. Namun demikian, masih terdapat sekitar 14,72% izin penanaman modal yang belum dapat diterbitkan sesuai dengan SOP. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti belum optimalnya akses dan fasilitas pendukung layanan perijinan permodalan.

Salah satu motor penggerak bagi pembangunan daerah adalah investasi daerah. Investasi daerah perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Dairi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Dairi sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dan mitra terbaik bagi investor guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Indikator realisasi investasi umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan investasi daerah. Berikut adalah data mengenai nilai realisasi investasi di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 hingga 2021.

Gambar 2. 47 Grafik Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Dairi Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)



Sumber : LKIP Kabupaten Dairi Tahun 2018-2021

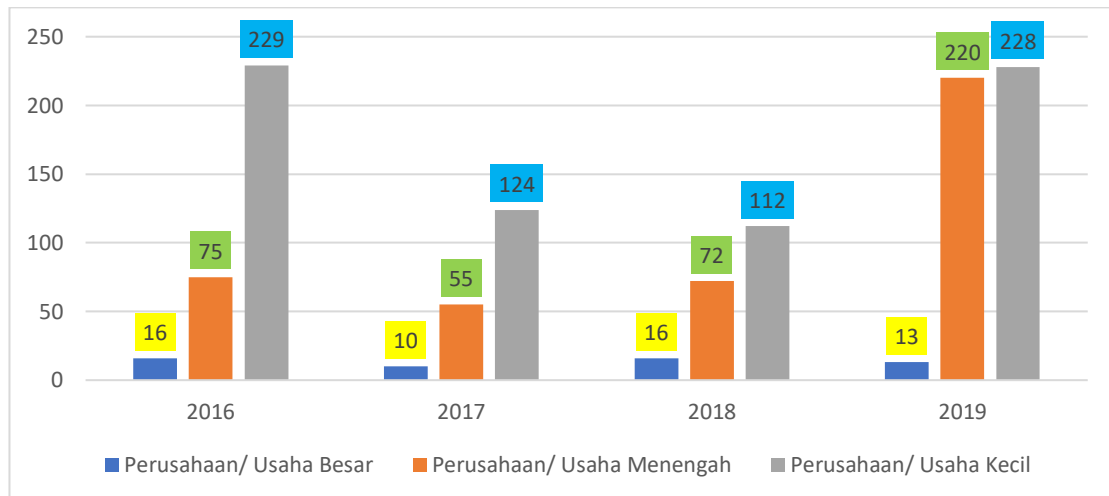
Realisasi investasi di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang positif dengan adanya kenaikan setiap tahunnya. Nilai realisasi investasi Kabupaten Dairi masih didominasi oleh investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yaitu sebesar 95 persen dibandingkan dengan investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, sektor tersier menempati urutan tertinggi dalam investasi PMDN dibandingkan sektor primer dan sekunder yang hanya mencapai 6 persen.

Realisasi investasi di Kabupaten Dairi juga saling berkaitan dengan penerapan pengelolaan perizinan yang diterapkan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat pengelolaan perizinan yaitu jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal, persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online, dan persentase peningkatan jumlah PMA dan PMDN yang diterima. Dalam kurun waktu 2016-2019, jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal terus meningkat, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan usahanya semakin meningkat setiap tahunnya.

Upaya untuk meningkatkan investasi daerah Dairi juga perlu didukung dengan adanya pelayanan investasi yang baik, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor. Bentuk dukungan

tersebut sudah diwujudkan pemerintah Kabupaten Dairi, salah satunya dengan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menurut Golongan Usaha yang ditunjukkan dengan data berikut.

Gambar 2. 48 Grafik Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2019



Sumber : Dinas DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2021

Berdasarkan golongan usahanya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dari tahun 2016 hingga 2019 masih didominasi dengan perusahaan / usaha kecil. Meskipun demikian, perusahaan/ usaha menengah pada tahun 2019 mengalami lonjakan kenaikan yang cukup tinggi. Namun, perusahaan/ usaha besar masih sangat sedikit, oleh karena itu pemerintah daerah perlu berinovasi dalam membuat kebijakan pengelolaan investasi agar mampu menarik pada investor baik dalam maupun luar negeri secara jangka panjang.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga berperan penting dalam memastikan keberdayaan pemuda dan tersedianya akses penyaluran aktivitas olahraga bagi masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti tingkat fasilitasi pemuda dan persentase penanganan gedung olahraga.

Tabel 2. 51 Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Terfasilitasinya Layanan Kepemudaan	500	667	1439	1439	25
Persentase penanganan gedung olahraga	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi Tahun 2017-2020

Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Perkembangan data tersebut menunjukkan kinerja organisasi perangkat daerah penanggungjawab sudah optimal. Namun demikian, tingkat fasilitasi layanan kepemudaan mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2020. Permasalahan ini salah satunya disebabkan oleh pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Dairi.

14. Statistik

Statistik dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian krusial sebagai sumber utama ketersediaan data-data pembangunan. Ketersediaan data yang berkualitas dan mudah diakses berpengaruh dalam perumusan masalah dan penentuan kebijakan pembangunan daerah. Urusan statistik juga berperan penting dalam proses evaluasi kinerja pembangunan pemerintah daerah. Statistik daerah Kabupaten Dairi telah dituangkan dalam berbagai laporan data daerah yang meliputi berbagai aspek seperti geografi, perekonomian, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Basis data berbentuk laporan cetak maupun *online* di Kabupaten Dairi sudah tersedia setiap tahun. Namun demikian, jika dicermati lebih detail di setiap indikator, masih terdapat laporan yang indikator tahunnya belum diperbaharui. Beberapa laporan pada tahun tertentu terkadang masih menggunakan data tahun sebelumnya. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh ketersediaan data yang kurang memadai. Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya metode dan sistem pengumpulan data di Kabupaten Dairi.

15. Persandian

Urusan persandian di kabupaten mencakup upaya pengamanan informasi daerah serta penetapan pola hubungan persandian antar perangkat daerah. Urusan persandian di Kabupaten Dairi diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Secara umum, layanan persandian sudah dapat mencukupi semua kebutuhan. Namun, terdapat beberapa persoalan dalam penyelenggaraan urusan persandian. Persoalan tersebut terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dibidang persandian yang belum memadai.

16. Kebudayaan

Lingkup urusan kebudayaan di Kabupaten Dairi mencakup pengelolaan kebudayaan daerah, pelestarian tradisi masyarakat, pembinaan kesenian masyarakat, penetapan dan pelestarian cagar budaya. Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yang terkait dengan lingkup urusan tersebut. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 49 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

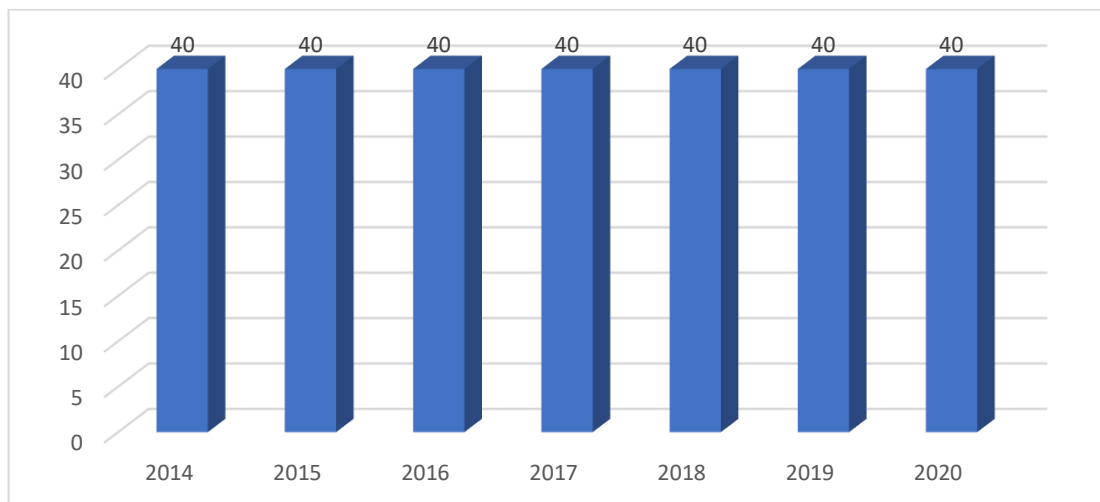


Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2017-2020

Kesejahteraan penduduk di suatu wilayah juga dapat dilihat dari aspek kebudayaan yang ada. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial berbasis kebudayaan dapat dilihat melalui pelayanan yang dilakukan

oleh pemerintah, seperti yang tertuang dalam program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Cagar Budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/Atau di air. Cagar budaya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/Atau kebudayaan di wilayah terkait. Data terkait jumlah cagar budaya di Kabupaten Dairi selama periode 2015 hingga 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 50 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Dairi Tahun 2015-2022



Sumber: PRPJMD Kabupaten Dairi 2022

Jumlah cagar budaya di Kabupaten Dairi berhasil dipertahankan selama periode 2015 hingga 2021. Jumlah cagar budaya yang konsisten menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam melakukan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dairi. Upaya pelestarian yang dilakukan dapat berupa berbagai bentuk, seperti adanya pengelolaan secara terpadu untuk mengurangi potensi kerusakan cagar budaya karena alasan biologis maupun kimiawi. Pelestarian cagar budaya penting untuk dilakukan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Dairi.

17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan guna memajukan literasi masyarakat. Selain itu, perpustakaan merupakan sarana untuk

meningkatkan kecerdasan serta menumbuhkan budaya gemar membaca dikalangan masyarakat. Perkembangan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Dairi dapat dianalisis dengan melihat capaian kinerja perpustakaan pada beberapa indikator berikut ini.

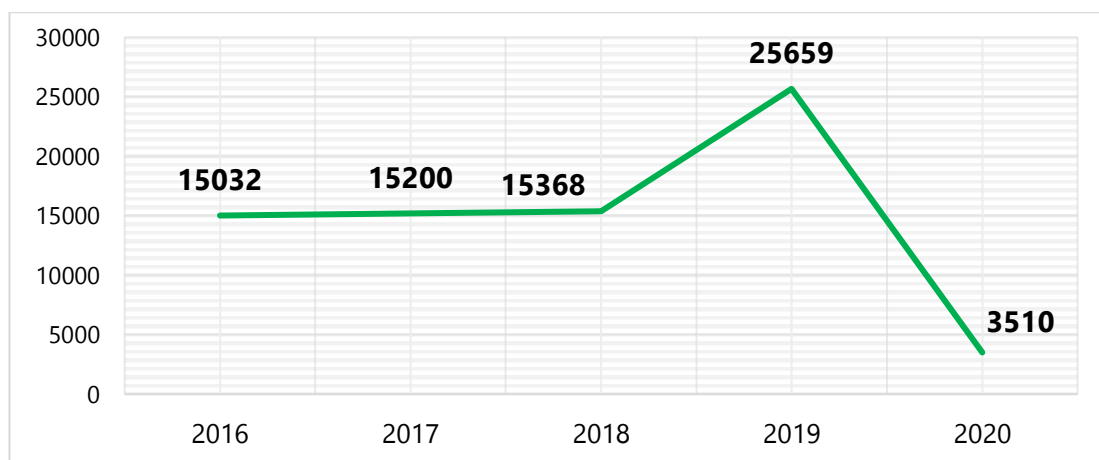
Tabel 2. 52 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Jenis Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan yang ada	379	398	412	424	424
2	Jumlah koleksi buku	49.488	55.652	55.413	60.730	61.930
3	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan/ dibina	55	53	98	30	59

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi 2016-2020

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Jumlah koleksi buku di Kabupaten Dairi juga mengalami peningkatan sejalan dengan jumlah perpustakaan. Sementara itu, jumlah perpustakaan yang dibina menunjukkan angka yang fluktuatif. Analisis terkait dengan urusan perpustakaan dapat melihat data jumlah pengunjung pada grafik berikut ini.

Gambar 2. 51 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LkjiP Kabupaten Dairi 2017-2020

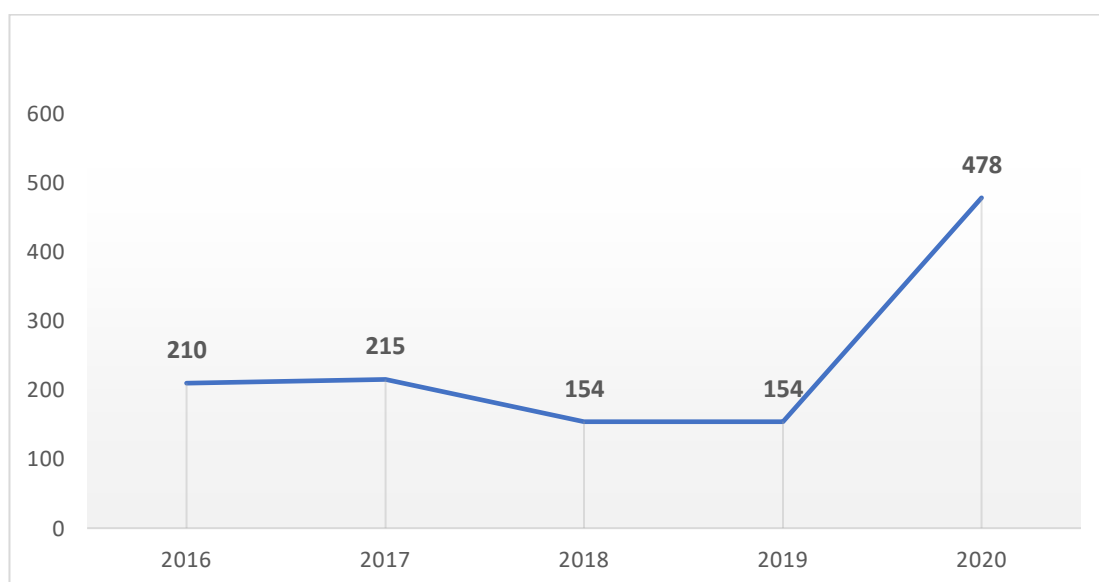
Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2018 hingga 2019, yaitu sebesar 66,9 %. Kemudian mengalami

penurunan drastis di tahun 2020 dengan hanya 3510 pengunjung. Penurunan tersebut diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang memberlakukan peraturan baru terkait pembatasan kegiatan secara luring, sehingga banyak aktivitas belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Namun, di samping hal tersebut, belum optimalnya penyelenggaraan layanan perpustakaan di Kabupaten Dairi juga perlu mendapatkan perhatian. Peningkatan jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Dairi harus diimbangi dengan peningkatan jumlah pustakawan. Selain itu, cakupan pelayanan perpustakaan Kabupaten Dairi tergolong masih belum optimal. Terlebih lagi, kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan perpustakaan juga masih terkendala jarak dan moda transportasi.

18. Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar yang mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan arsip yang baik dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pengembangan organisasi maupun pengambilan keputusan bagi pimpinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu melakukan pengelolaan arsip secara baik. Berikut ini adalah kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Dairi pada tahun 2016-2020.

Gambar 2. 52 Jumlah Arsip yang Dilestarikan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LkjIP Kabupaten Dairi 2016-2020

Persentase arsip yang dilestarikan mengalami fluktuasi dan cenderung menurun selama 2016 hingga 2019. Pada tahun 2020 data menunjukkan kenaikan yang signifikan dengan total 478 arsip. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah ada pembenahan dalam pengidentifikasian dan pengumpulan arsip. Perbaikan tersebut perlu ditingkatkan lagi dengan menyiapkan SDM kearsipan, optimalnya sarana dan prasarana kearsipan, dan optimalisasi penanganan arsip aktif dan inaktif.

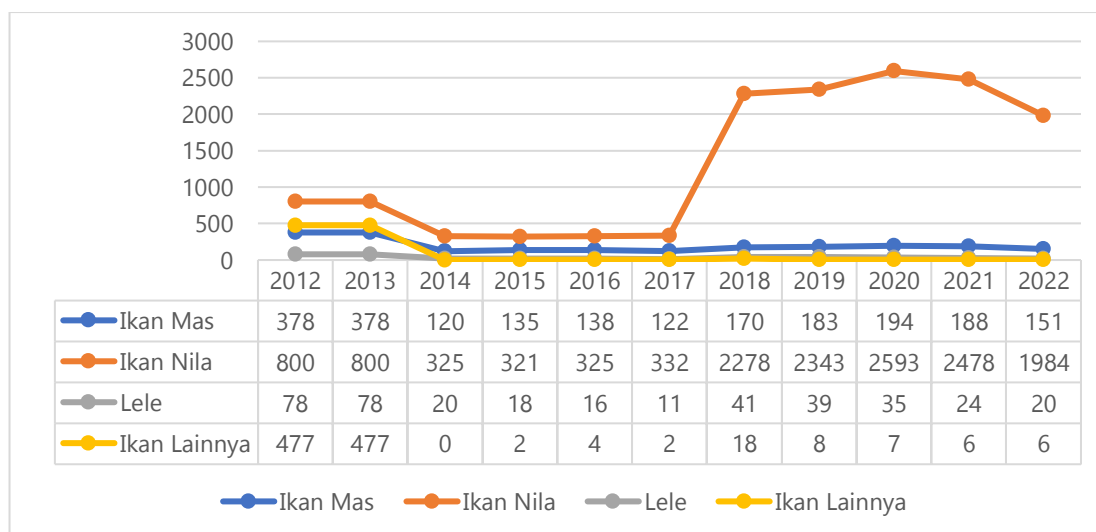
2.3.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan terdiri dari berbagai urusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah. Fokus urusan ini terdiri dari beberapa urusan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan perindustrian. Beberapa urusan di dalam fokus layanan urusan pilihan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Dairi ini didominasi oleh hasil perikanan air tawar, antara lain ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan ikan air tawar lainnya. Indikator produksi perikanan ini umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan pertanian sub-sektor perikanan. Berikut merupakan data mengenai hasil produksi ikan di Kabupaten Dairi pada tahun 2012-2022.

Gambar 2. 53 Produksi Ikan Kabupaten Dairi Tahun 2012-2022



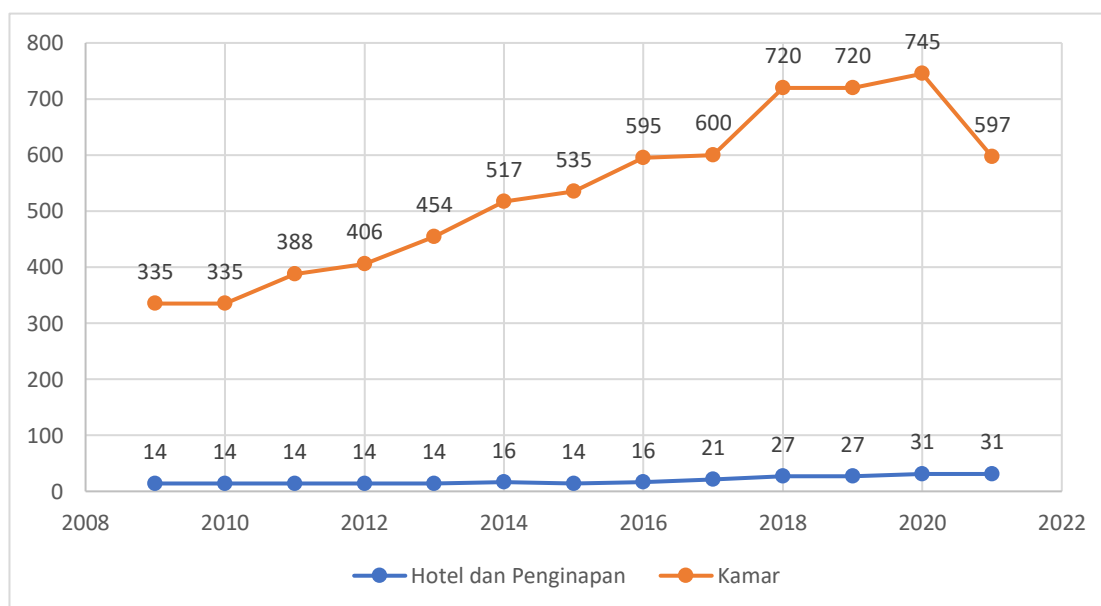
Sumber : Kabupaten Dairi dalam Angka, 2013-2022

Berdasarkan grafik tersebut, hasil produksi perikanan terbesar berasal dari ikan nila dan ikan mas. Peningkatan tertinggi produksi ikan nila terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.946 ton dari tahun 2017. Kecamatan penghasil ikan nila dan ikan mas terbesar di Kabupaten Dairi adalah Kecamatan Silahisabungan. Tren peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Dairi ini didukung oleh beberapa faktor seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pembudidaya ikan, dan akses terhadap bantuan permodalan.

2. Pariwisata

Sektor potensial lainnya yang ada di Kabupaten Dairi adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Dairi meliputi didominasi oleh wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Untuk menunjang aktivitas wisata dan menarik wisatawan asing maupun domestik, keberadaan akomodasi sebagai sarana pendukung kepariwisataan sangatlah diperlukan. Hal tersebut bisa terwujud dengan tersedianya fasilitas dukungan yang memadai seperti hotel. Wisatawan yang datang dari luar daerah tentu membutuhkan tempat untuk menginap dan alternatif yang paling diminati wisatawan adalah menginap di hotel. Jumlah hotel dan penginapan yang ada di Kabupaten Dairi pada rentang tahun 2010-2021 bisa dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 54 Jumlah Hotel dan Kamar Kabupaten Dairi Tahun 2010 – 2021

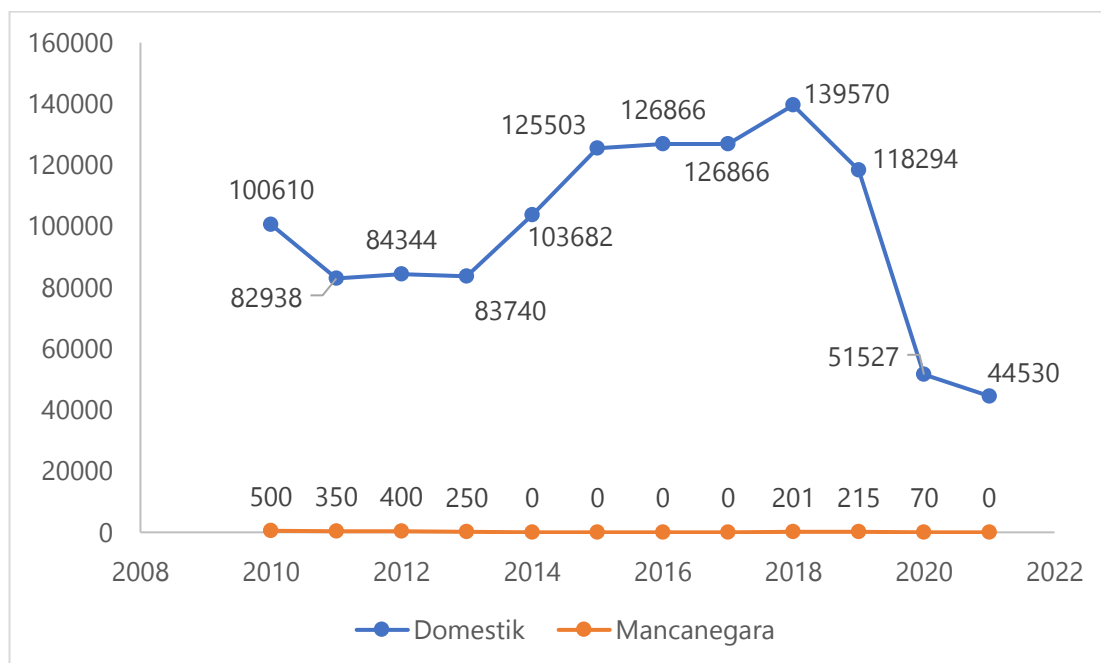


Sumber: BPS Kabupaten Dairi; Kabupaten Dairi dalam Angka Tahun 2011-2022

Berdasarkan data tersebut, jumlah hotel dan kamar di Kabupaten Dairi menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun 2010 hingga 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kondisi pariwisata di Kabupaten Dairi semakin membaik. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020 menuju 2021, justru pada saat pandemi covid-19 berlangsung. Hotel dan penginapan tersebut banyak tersebar di Kecamatan Sidikalang.

Sementara itu, guna mengetahui seberapa besar daya tarik wisata di Kabupaten Dairi bisa dilihat dari seberapa banyak wisatawan, baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung. Jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator dari salah satu penyumbang terbesar untuk kunjungan tamu hotel. Jumlah ini diharapkan bisa terus meningkat setiap tahunnya mengingat berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Gambar 2. 55 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Dairi Tahun 2010 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan domestik. Peningkatan paling signifikan ditunjukkan pada tahun 2018. Namun, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren penurunan dari tahun 2010-2021, bahkan sempat tidak ada kunjungan dari wisatawan asing alias mancanegara di tahun 2014 hingga 2017. Selain itu, pandemi covid-19 yang terjadi

di tahun 2020 turut mempunyai andil dalam penurunan yang cukup signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan. Pariwisata di Kabupaten Dairi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti amenities, atraksi, aksesibilitas dan kapasitas sumber daya manusia.

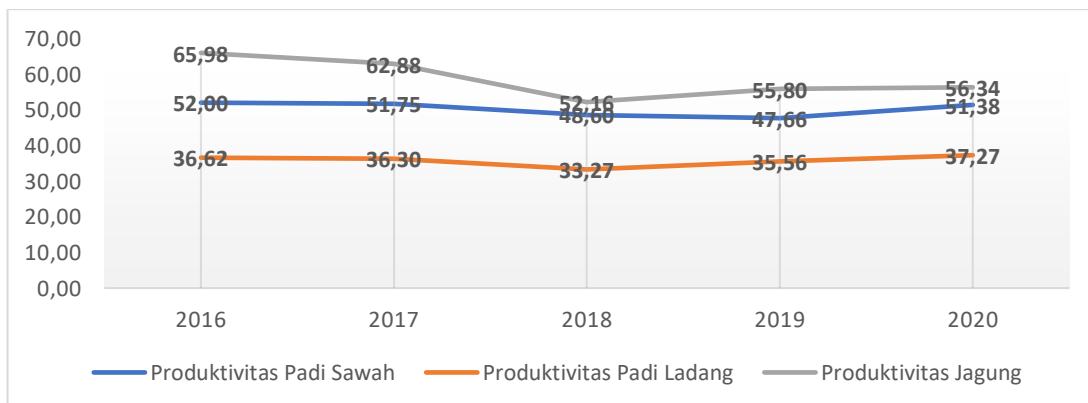
3. Pertanian

a. Tanaman Pangan

Pada sub sektor tanaman pangan, produksi tanaman pangan padi sawah, padi ladang, jagung dan ubi jalar di Kabupaten Dairi menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2012 hingga 2022. Secara kapasitas, produksi jagung paling besar dibandingkan dengan produksi tanaman pangan lainnya. Peningkatan produksi jagung tertinggi yaitu sebesar 278.495 ton pada tahun 2021. Sedangkan untuk produksi tanaman pangan lainnya, cenderung mengalami penurunan. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Dairi ini bisa ditingkatkan dengan memperhatikan berbagai faktor seperti kapasitas sumber daya manusia petani, sarana dan prasarana, penanggulangan organisme pengganggu tanaman dan kemudahan akses terhadap bantuan permodalan.

Sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan terbagi menjadi padi sawah, padi ladang dan juga jagung. Masing-masing tanaman pangan memiliki tingkat produktivitas yang berbeda-beda. Produktivitas padi sawah dari tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif tiap tahunnya, dengan kondisi akhir mencapai angka 54,18% di tahun 2020.

Gambar 2. 56 Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2016 – 2020



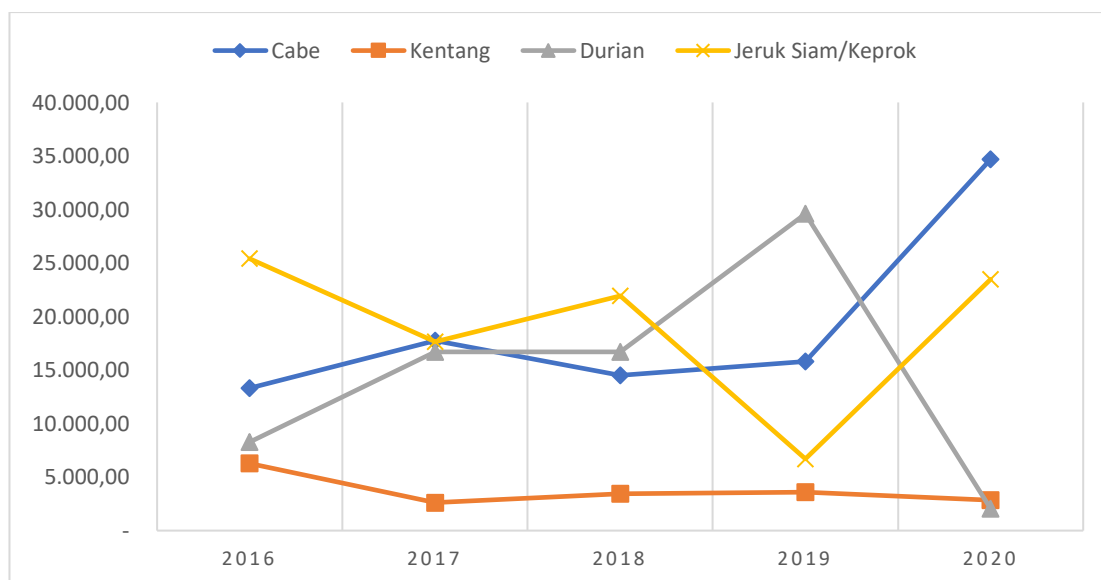
Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

Diantara ketiga jenis tanaman pangan, yang dominan memiliki produktivitas yang paling tinggi yaitu padi sawah, kemudian jagung dan selanjutnya padi ladang. Produktivitas jagung mengalami nilai paling tinggi pada tahun 2016, melebihi tingkat produktivitas padi ladang maupun padi sawah, yakni sebesar 65,98 kw/ha.

b. Hortikultura

Tanaman hortikultura berupa sayuran dan buah – buahan. Tanaman hortikultura dominan yang terdapat di Kabupaten Dairi diantaranya yaitu jeruk manis, kentang, cabe merah dan juga durian. Berikut disajikan produktivitas tanaman hortikultura Kabupaten Dairi tahun 2016 hingga tahun 2020.

Gambar 2. 57 Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

Produktivitas tanaman hortikultura di Kabupaten Dairi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Persentase produktivitas tertinggi dari tanaman hortikultura di Kabupaten Dairi yaitu durian. Produktivitas tanaman hortikultura terendah yaitu kentang dimana memiliki produktivitas cukup signifikan jika dibandingkan dengan tanaman hortikultura lainnya.

c. Tanaman Perkebunan Kopi

Salah satu sektor ekonomi yang cukup strategis di Kabupaten Dairi adalah sektor pertanian. Sektor pertanian ini juga merupakan

salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Dairi, terlihat dari sekitar 45 persen penduduk Kabupaten Dairi bekerja di sektor pertanian. Komoditas pertanian yang tumbuh dan berkembang di wilayah Dairi beragam dan mempunyai komoditas unggulan tertentu.

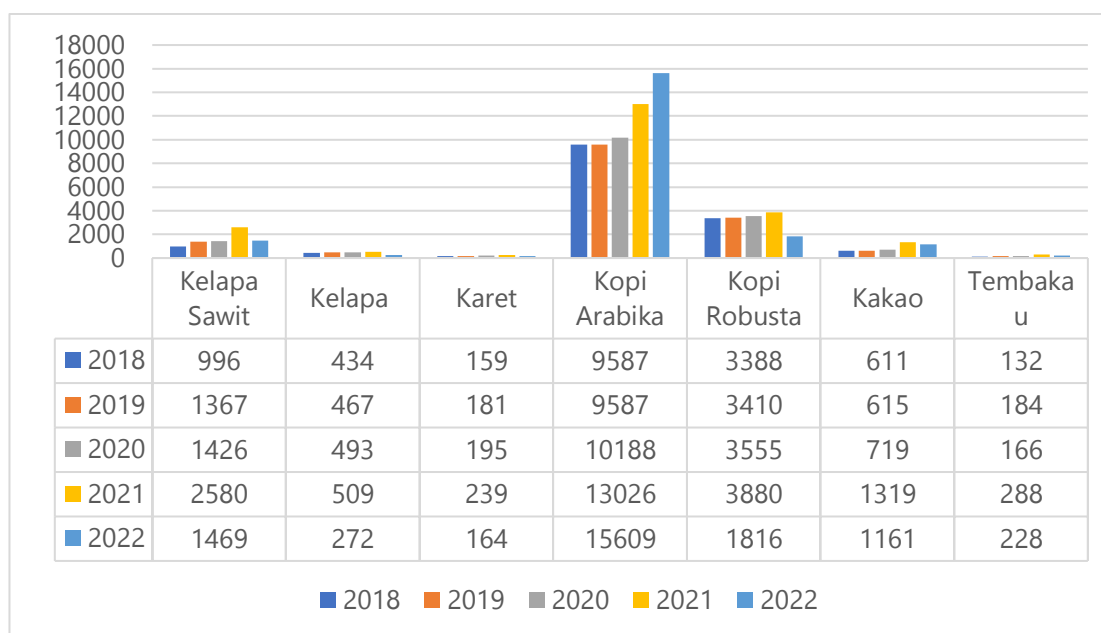
Tabel 2. 53 Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Dairi Tahun 2012-2022

Tanaman Pangan	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Ubi Jalar
2012	71.124	19.418	131.877	1.907	10.592	32.901
2013	80.953	14.870	129.613	2.604	11.073	14.855
2014	82.947	8.871	121.647	1.241	7.492	21.687
2015	91.861	24.225	259.034	997	9.304	27.818
2016	91.861	24.225	259.033	998	9.305	278.218
2017	141.955	33.792	214.506	215	4.504	28.138
2018	130.432	33.937	248.068	249	7.849	29.093
2019	69.825	24.693	259.386	142	9.554	25.081
2020	57.771	9.948	230.115	209	9.511	26.930
2021	69.675	26.133	278.495	209	22.229	25.822
2022	71.059	14.069	248.749	488	12.725	32.544

Sumber : Kabupaten Dairi dalam Angka, 2012-2022

Produksi tanaman perkebunan kopi, baik kopi arabika maupun robusta menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan tertinggi produksi kopi arabika yaitu sebesar 15.609 ton terjadi pada tahun 2022. Meskipun tidak sebesar produksi kopi arabika, kopi robusta juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Produksi tanaman perkebunan kelapa sawit walaupun menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap meningkat. Sedangkan untuk produksi tanaman perkebunan lainnya, cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Dairi berhubungan dengan berbagai faktor penentu seperti harga pasar, kapasitas sumber daya manusia petani, sarana dan prasarana perkebunan, serta akses terhadap bantuan permodalan.

Gambar 2. 58 Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022



Sumber : Kabupaten Dairi dalam Angka, 2019-2023

Produksi tanaman perkebunan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pertanian di sub-sektor perkebunan. Kabupaten Dairi memiliki produksi tanaman perkebunan yang sangat besar terutama untuk komoditas tanaman perkebunan kopi. Kabupaten Dairi juga terkenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi terbesar ke-5 di Indonesia. Berikut adalah data mengenai produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Dairi.

d. Peternakan

Kabupaten Dairi juga memiliki produksi daging ternak yang besar. Indikator produksi daging ternak umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan pertanian sub-sektor peternakan. Berikut adalah data mengenai produksi daging ternak di Kabupaten Dairi pada tahun 2012 hingga 2019.

Tabel 2. 54 Produksi Daging Ternak (Kg) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2022

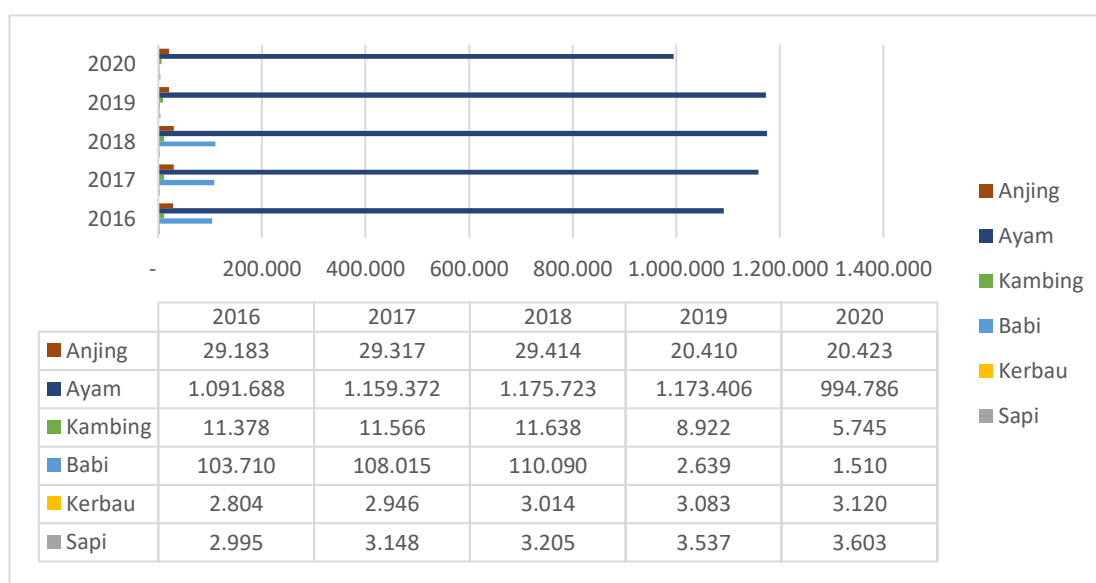
Tahun	Kuda	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi
2018	104	3.455	3.014	11.638	110.090
2019	104	3.500	3.100	11.638	110.090
2020	100	3.603	3.120	5.745	1.510
2021	93	3.622	3.175	5.825	1.764
2022	93	1.796	1.123	3.042	4.155

Sumber : Kabupaten Dairi dalam Angka, 2017-2022

Produksi daging ternak babi dan kambing menunjukkan tren yang semakin meningkat di Kabupaten Dairi. Peningkatan tertinggi untuk komoditas daging babi dan daging kambing yaitu sebesar 110090 kg dan 11638 kg pada tahun 2018 dan 2019. Peningkatan ini diikuti oleh penurunan yang cukup besar juga di tahun berikutnya. Meskipun demikian, pemeliharaan ternak di Kabupaten Dairi belum begitu berkembang secara pesat. Pengelolaan untuk produksi daging ternak ini belum menerapkan teknologi peternakan yang memadai. Selain itu, upaya untuk meningkatkan produksi ternak ini juga bisa didukung oleh beberapa faktor seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternak, sarana dan prasarana peternak, kondisi kesehatan ternak dan akses terhadap bantuan permodalan.

Salah satu sub sektor dari pertanian diantaranya yaitu peternakan. Peternakan di Kabupaten Dairi diantaranya berupa babi dan ayam. Gambar grafik menyajikan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi, khususnya untuk peternakan babi dan ayam.

Gambar 2. 59 Jumlah Populasi Peternakan Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

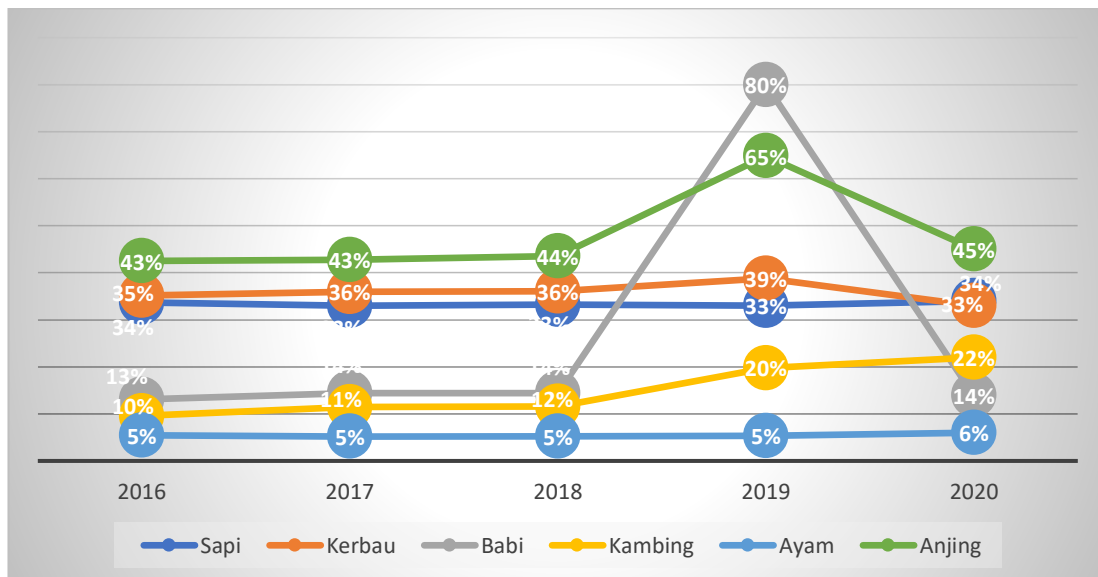
Jumlah populasi babi dan ayam setiap tahunnya mengalami jumlah peningkatan. Meskipun demikian, jumlah populasi babi dengan ayam cukup signifikan. Babi memiliki populasi yang lebih

sedikit jika dibandingkan dengan ayam. Sementara itu urutan selanjutnya adalah anjing, kambing, kerbau, dan sapi.

1) Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak di Kabupaten Dairi yang terdata terdiri dari sapi, kerbau, babi, kambing, ayam, anjing. Berdasarkan data, menunjukkan bahwa penanganan kesehatan hewan/ ternak di Kabupaten Dairi cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2014-2019. Berikut disajikan data terhadap penanganan kesehatan hewan/ ternak di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 60 Persentase Penanganan Kesehatan Hewan Tahun 2016 – 2020



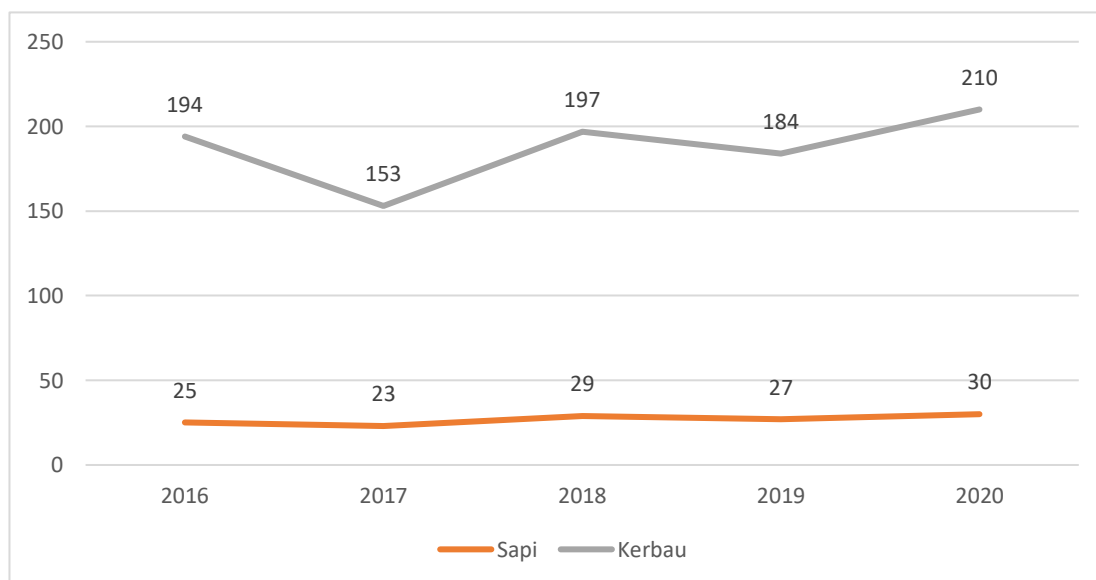
Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

Upaya terhadap penanganan terhadap kesehatan hewan/ ternak di Kabupaten Dairi perlu untuk dioptimalkan, khususnya terhadap kesehatan hewan ternak babi, kambing dan ayam. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketiga hewan ternak tersebut menunjukkan nilai yang cukup rendah jika dibandingkan pada penanganan terhadap hewan ternak lainnya. Upaya tersebut dimaksudkan selain untuk kesehatan hewan ternak itu sendiri juga untuk menghindarkan timbulnya penyakit yang dapat menular terhadap manusia.

2) Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang

Pemotongan hewan ternak besar maupun kecil cenderung mengalami kenaikan. Kondisi tersebut seperti halnya terjadi pada RPH Sidikalang. Data terkait jumlah pemotongan ternak di RPH Sidikalang tahun 2016 – tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Gambar 2. 61 Jumlah Pemotongan Ternak di RPH Sidikalang Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2016-2020

Pemotongan hewan ternak di RPH Sidikalang adalah seputar sapi dan kerbau. Pada tahun 2016 total adalah sebanyak 219 ekor, 2017 sebanyak 176 ekor, 2018 sebanyak 226 ekor, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 211 ekor, sementara itu tahun 2020 meningkat menjadi 240 ekor.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang penting dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, sektor ini juga dapat berkontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Letak Kabupaten Dairi yang berada di dataran tinggi merupakan penunjang keberadaan hutan. Berikut adalah data mengenai luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten Dairi.

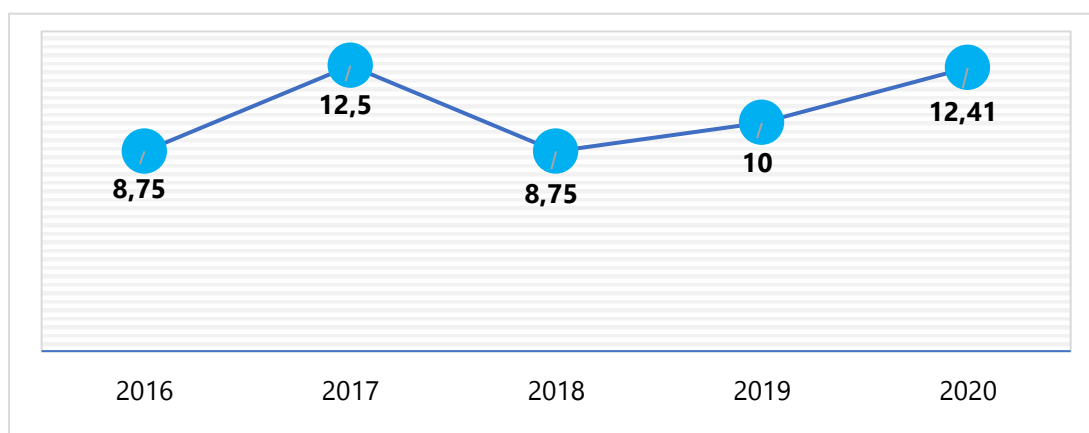
Tabel 2. 55 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Dairi (ha)

NO	Fungsi Hutan	Luas (ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hutan Suaka	289,9	289,9	289,9	289,9	289,9
2	Hutan Lindung	53.767,42	53.767,42	53.767,42	53.767,42	53.767,42
3	Hutan Produksi Terbatas	30.019,66	30.019,66	30.019,66	30.019,66	30.019,66
4	Hutan Produksi	13722,108	13722,108	13722,108	13722,108	13722,108
5	Hutan Produksi Konservasi	0	0	0	0	0
6	Area Penggunaan Lain	100678	100578	100578	104578	104578

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Kawasan hutan di Kabupaten Dairi terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain adalah hutan suaka, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konservasi, dan penggunaan lain. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 mengalami tren yang stagnan. Sementara itu, aspek penting dalam hutan dan lahan adalah rehabilitasi lahan kritis. Rehabilitasi lahan kritis bertujuan untuk mengembalikan lahan kembali seperti semula. Berikut ini adalah data mengenai rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Dairi tahun 2016-2020.

Gambar 2. 62 Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020 (ha)



Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Dairi memiliki tren yang fluktuatif dalam rentang 2016-2020. Pada tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,75 hektar, kemudian tahun 2018 kembali menurun 3,75 hektar. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 1,25 hektar dan pada tahun 2020 naik 2,41 hektar. Penanganan lahan kritis merupakan hal yang kompleks, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Salah satu sektor yang mendukung perekonomian negara dan daerah adalah energi dan sumber daya mineral. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kabupaten Dairi adalah daerah memiliki cadangan energi dan sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Berikut adalah data yang menggambarkan jumlah pelanggan energi listrik PT.PLN (Persero) di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 56 Jumlah Pelanggan Energi Listrik PT. PLN (Persero) Menurut Kategori Pelanggan di Kabupaten Dairi

No	Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	59399	67358	70427	N/A	74209
2	Komersil	1219	1629	2730	N/A	2918
3	Industri	8	15	20	N/A	20
4	Sosial	1688	1343	2252	N/A	2025
5	Pemerintah	287	408	415	N/A	399

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2017-2021

Pelanggan energi listrik dari PT.PLN (Persero) memiliki beberapa sektor, antara lain rumah tangga, komersil, sektor industri, sosial, dan pemerintah. Tren kenaikan pelanggan PT.PLN adalah pada sektor rumah tangga, komersil dan industri. Kenaikan paling banyak terjadi pada sektor rumah tangga, yaitu sebesar 3782 pelanggan pada 2019-

2020. Sementara itu penurunan jumlah pelanggan terjadi pada sosial dan pemerintah. Penurunan paling banyak adalah pada sektor sosial yang berkurang 227 pelanggan pada 2019-2020.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dairi meskipun mengalami pertumbuhan yang melambat. Berikut ini adalah data mengenai peranan sub kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Dairi (Persen) Tahun 2016-2020.

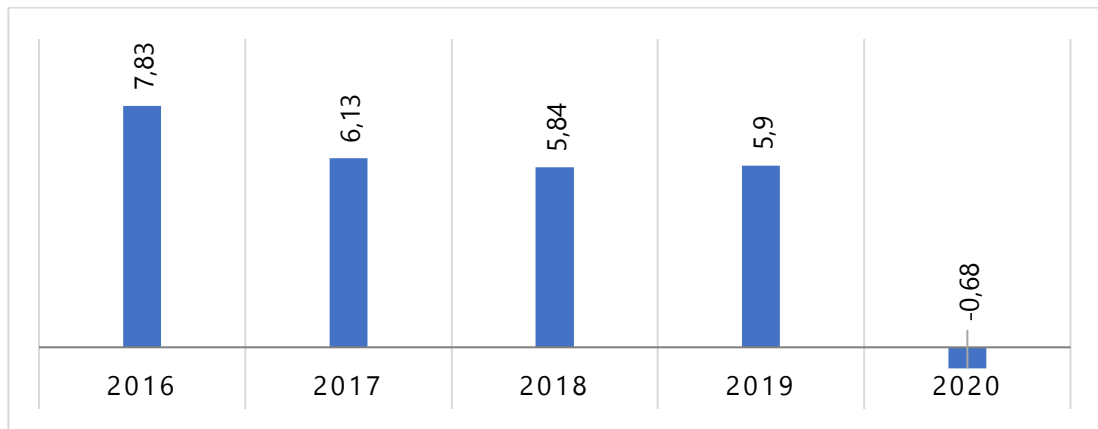
Tabel 2. 57 Peranan Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Dairi (Persen) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,08	17,10	17,07	17,21	17,22

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dairi, 2016-2020

Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor menjadi sub kategori yang mendominasi sektor perdagangan besar dan eceran. Data menunjukkan tiap tahun persentase perdagangan besar reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi adalah sebesar 0,14% pada tahun 2018 ke 2019. Sementara itu, laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor beserta sub kategorinya di Kabupaten Dairi dapat dilihat di grafik berikut.

Gambar 2. 63 Grafik Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor beserta Sub Kategorinya di Kabupaten Dairi (Persen) Tahun 2016-2020



Sumber: PDRB Kabupaten Dairi Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Pertumbuhan sektor perdagangan menunjukkan tren yang menurun selama periode 2016-2020. Penurunan paling drastis terjadi pada 2019 ke 2020, yang menunjukkan angka negatif di tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi global pandemi *covid-19*, keadaan tersebut mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat, sehingga menurunkan nilai transaksi di sektor perdagangan.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Sektor industri pengolahan menjadi sektor potensial yang diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Kabupaten Dairi. Berikut adalah gambaran peranan sub kategori industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Dairi (persen) Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 58 Peranan Sub Kategori Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Dairi (persen) Tahun 2016-2020

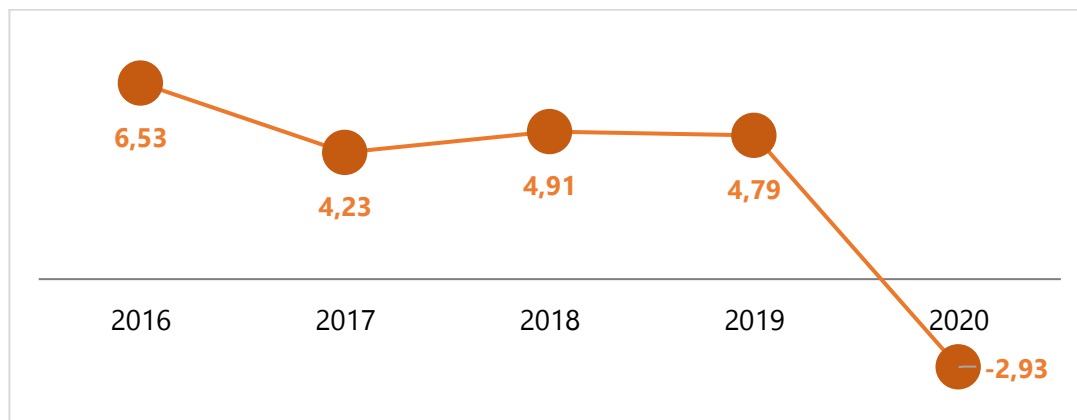
Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Pengolahan	0,37	0,38	0,39	0,39	0,39

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dairi, 2016-2020

Data yang dirilis oleh BPS tersebut menunjukkan tren kenaikan pada sub kategori pengolahan di Kabupaten Dairi. Meskipun naik, tetapi angka yang ditunjukkan stagnan. Perubahan besaran yang terjadi adalah sebesar 0,1% pada tahun 2016 ke 2017 dan 2017 ke 2018. Penting juga untuk melihat laju pertumbuhan sub

kategori pilihan sektor industri pengolahan di Kabupaten Dairi, berikut ini adalah gambarannya.

Gambar 2. 64 Grafik Laju Pertumbuhan Sub Kategori Pilihan Sektor Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2016-2020



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dairi, 2016-2020

Tren pertumbuhan sub kategori pilihan sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Penurunan paling drastis adalah sebesar 7,72% pada tahun 2019 ke 2020. Penyebab utama dari penurunan tersebut antara lain adalah situasi pandemi *covid-19*. Selain itu masalah pengembangan industri sangat berkaitan dengan kapasitas SDM, permodalan, metode pemasaran, sarana prasarana pendukung produksi, dan daya saing produk IKM. Faktor-faktor tersebut harus mendapat perhatian dan intervensi secara komprehensif pada periode perencanaan ke depan.

2.3.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di suatu daerah. Gambaran mengenai kondisi penunjang urusan dapat dilihat dari beberapa unsur, seperti perencanaan pembangunan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; pengawasan; penelitian dan pengembangan; sekretariat dewan; dan pemerintahan umum/sekretariat daerah. Secara rinci, ketujuh urusan penunjang dapat dilihat dalam deskripsi berikut.

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu unsur pendukung pemerintahan daerah. Urusan ini memiliki fungsi untuk

memfasilitasi, mengkoordinasi, pembinaan, dan pengendalian perumusan kebijakan daerah. Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah di bawah ini.

Tabel 2. 59 Predikat SAKIP Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Predikat
1	2019	C
2	2020	C
3	2021	C
4	2022	CC
5	2023	B

Sumber: LKjIP Tahun 2019-2023

Predikat SAKIP daerah Kabupaten Dairi predikat “B” dan merupakan capaian yang baik dari tahun 2019 hingga 2022. Kendati demikian SAKIP daerah masih sangat perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pendataan yang semakin baik.

Selain capaian SAKIP daerah, kinerja Sekretariat Daerah juga dapat dilihat dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Capaian kinerja tersebut dapat ditunjukkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Berikut ini LPPD Kabupaten Dairi tahun 2016-2020.

Tabel 2. 60 Predikat LPPD Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

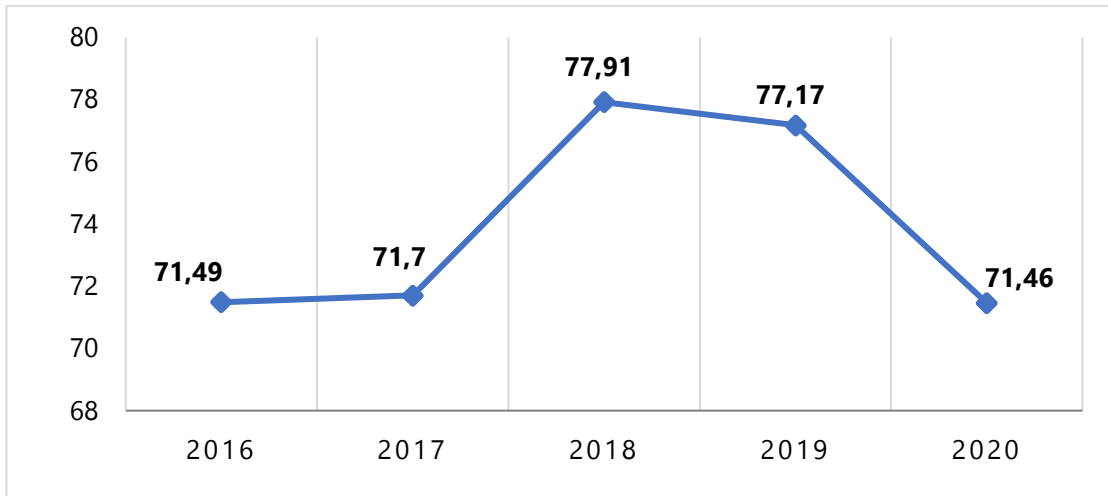
No	Tahun	Predikat LPPD
1	2016	Sedang
2	2017	Sedang
3	2018	Sedang
4	2019	Sedang
5	2020	Tinggi

Sumber: LPPD 2020; LKjIP Tahun 2016-2020

Dalam kurun 5 (lima) tahun, predikat LPPD Kabupaten Dairi menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2016 hingga 2019 predikat LPPD masih dalam kategori “Sedang”, sementara pada tahun

2020 meningkat menjadi ke dalam kategori “Tinggi”. Capaian LPPD ini sudah berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi ke kategori “Sangat Tinggi”. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan SPM.

Gambar 2. 65 Nilai IKM Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKjIP Tahun 2016-2021

Nilai IKM Kabupaten Dairi mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu sebesar 5,71 persen. Selain itu, selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai IKM paling tinggi berada pada tahun 2018, sedangkan nilai IKM paling rendah berada pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah belum berjalan optimal. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan terhadap Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan SKM.

Tabel 2. 61 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra Tahun 2016-2020

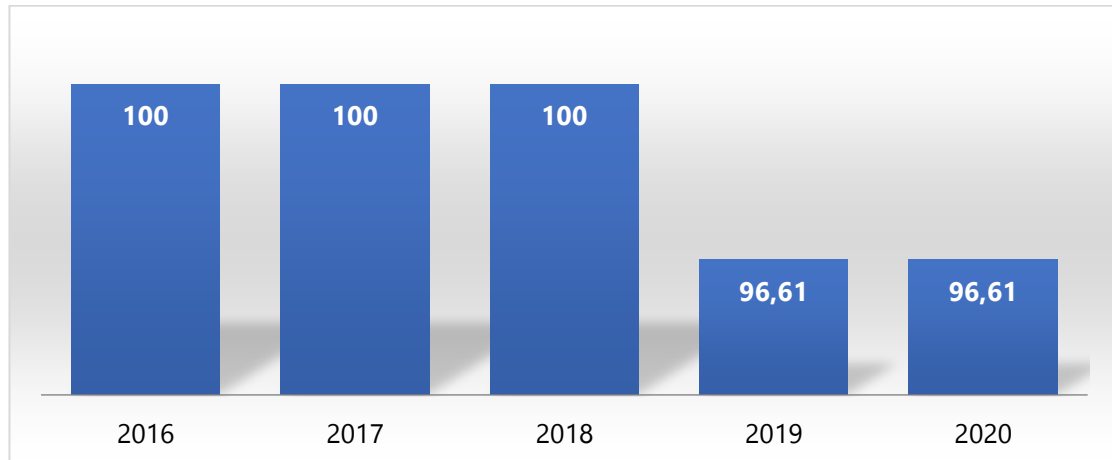
No	Tahun	Jumlah PKM (KK)
1	2016	16.525
2	2017	16.525
3	2018	16.525
4	2019	16.525
5	2020	16.525

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi Tahun 2021

Dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah kelompok penerima manfaat Raskin/ Rastra selalu tetap, yaitu sebesar 16.525 KK. Hal

yang perlu dipastikan adalah setiap pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran.

Gambar 2. 66 Persentase Paket Kegiatan yang Dilelangkan Secara Elektronik di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi Tahun 2021

Dari tahun 2016 hingga 2020, persentase paket yang dilelangkan secara elektronik berjalan fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2019 dan 2020, paket kegiatan yang dilelangkan secara elektronik mengalami penurunan kurang lebih 3 persen. Hal ini perlu ditingkatkan kinerja lelang secara elektronik karena berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah.

Tabel 2. 62 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ BUMD di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Monev Perusahaan Daerah/ BUMD	2	2	2	2	2

Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi Tahun 2021

Monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan daerah / BUMD dilakukan dalam rangka untuk memastikan kinerjanya baik. Selama 5 (lima) tahun terakhir, monev yang dilakukan sebanyak 2 kali kepada 2 BUMD.

Tabel 2. 63 Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produk Hukum Daerah yang difasilitasi	4	4	4	4	3

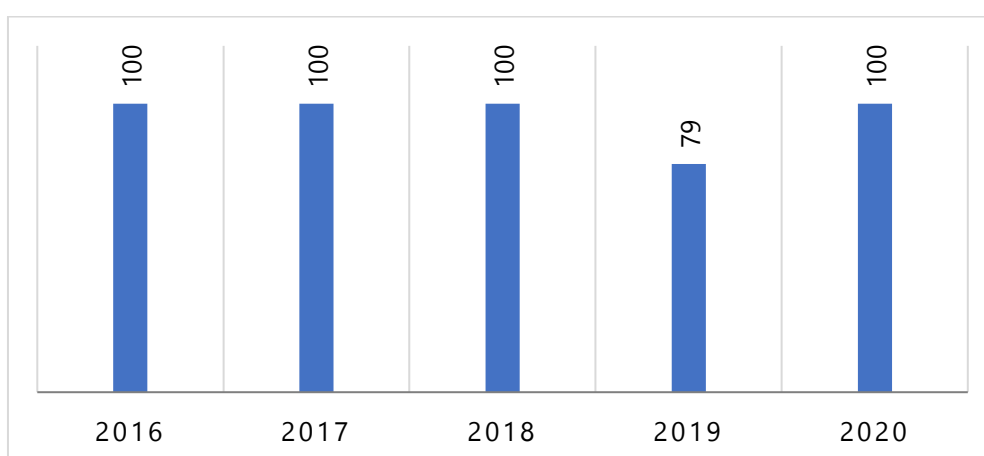
Sumber: LKjIP Kabupaten Dairi Tahun 2021

Produk hukum daerah yang difasilitasi mengalami penurunan pada tahun 2020. Dari tahun 2016 hingga 2019, produk hukum yang difasilitasi sebanyak 4 produk dan menurun menjadi 3 produk.

2. Sekretariat DPRD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sekretariat Daerah berfungsi mendukung dan memfasilitasi anggota DPRD dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut ini adalah capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 67 Terfasilitasinya Persidangan DPRD Tahun 2016-2020



Sumber: LKjIP Kab. Dairi Tahun 2016-2020

Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam hal memfasilitasi dan mendukung tugas anggota DPRD sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan persidangan DPRD yang difasilitasi mencapai 100 persen pada tahun 2020. Meskipun demikian, perlu adanya

pencapaian kinerja dari sisi tingkat kepuasan anggota DPRD ke depan.

2.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan penunjang dalam pembangunan daerah. Urusan ini sangat penting karena menjadi bahan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara pemenuhan dokumen, Pemerintah Kabupaten Dairi sudah memenuhi seluruh dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selain indikator pemenuhan dokumen perencanaan, indikator lain yang berkaitan dengan kualitas perencanaan perlu dianalisis juga. Hal ini penting dilakukan karena mempunyai pengaruh secara substantif terhadap kualitas pembangunan daerah. Berikut ini adalah beberapa capaian dalam urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 64 Predikat LPPD Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Aspek	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	89,00 %	90%	89%	N/A	N/A

Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

2. Keuangan

Urusan keuangan merupakan penunjang urusan pemerintahan yang memiliki peran yang sangat dalam memujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kinerja urusan ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. Pertama, sisi akuntabilitas keuangan dengan indikator Opini BPK/ sementara yang kedua dari sisi kapasitas keuangan dengan indikator tingkat kemandirian keuangan daerah. Berikut ini gambaran kinerja urusan keuangan daerah Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 65 Predikat LPPD Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Predikat
1	2019	WTP
2	2020	WTP
3	2021	WTP
4	2022	WTP
5	2023	WTP

Sumber: LKjIP Tahun 2016-2020

Kabupaten Dairi mampu mempertahankan Opini BPK selama 5 (lima) tahun terakhir dengan predikat WTP. Predikat WTP tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah mampu menyajikan secara wajar dalam semua hal mulai dari material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang berlaku. Dengan demikian maka, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan baik.

Selain dari sisi akuntabilitas keuangan daerah, kinerja urusan keuangan juga dapat dilihat dari tingkat kapasitas keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemandirian keuangan daerah melalui perbandingan PAD terhadap pendapatan daerah. Berikut ini adalah persentase PAD terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 66 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Persentase
1	2016	68.003.241.760,34	1.062.706.591.682,34	6,40
2	2017	128.489.751.331,88	1.133.794.210.279,88	11,33
3	2018	73.906.829.603,45	1.080.878.465.095,45	6,84
4	2019	74.360.339.717,75	1.167.522.159.073,75	6,37
5	2020	89.758.997.873,48	1.054.826.116.417,48	8,51
Rata-Rata				7,89

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,89 persen. Persentase PAD terhadap

pendapatan daerah yang paling tinggi berada pada tahun 2017, sedangkan paling rendah berada pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih belum berjalan optimal karena di satu sisi pertumbuhannya belum stabil dan di sisi lain persentasenya masih di dalam kategori sangat kurang karena berada di bawah 10 persen.

3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan termasuk ke dalam urusan penunjang. Urusan ini mempunyai peran sangat penting bagi peningkatan profesionalitas pegawai. Berikut ini adalah capaian urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 67 Capaian Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Dairi 2016-2020

Aspek	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin	100	100	100	N/A	N/A
Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan	10	5	17	N/A	N/A
Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)	60	79	38	N/A	N/A
Jumlah PNS yang Diklat Fungsional	150	160	125	N/A	N/A

Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Angka capaian urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Dairi mengalami tren stagnan pada aspek persentase penanganan kasus terhadap pelanggaran disiplin, yaitu sudah mencapai 100%. Sementara itu jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat kepemimpinan mengalami tren fluktuatif, awalnya mengalami penurunan sebanyak 5 pada 2016-2017, kemudian naik drastis sejumlah 12 pada tahun berikutnya. Tren fluktuatif juga terjadi pada jumlah PNS yang diklat fungsional, yaitu meningkat sebanyak 10 orang pada 2016-2017 dan menurun sebanyak 35 pada

2017-2018. Sementara itu, jumlah guru yang mengikuti diklat penilaian kinerja guru mengalami kenaikan sebesar 19 orang orang pada 2016-2017 lalu menurun sejumlah 38 orang pada 2017-2018. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pendidikan dan diklat adalah masih terdapat ASN yang belum memiliki kompetensi di bidangnya, masih terdapat ASN jabatan pelaksana yang berpendidikan dibawah SMA/SMK, serta belum optimalnya upaya pembinaan profesionalisme aparatur di tingkat perangkat daerah.

4. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan penunjang. Urusan ini berfungsi untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan yang baik berdasarkan hasil kajian dan mendorong adanya inovasi daerah. Berikut ini data mengenai capaian urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 68 Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Dairi 2016-2020

Aspek	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dihasilkan	0	0	3	N/A	N/A

Sumber: LKJIP Kabupaten Dairi, 2020

Data capaian urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2018 mengalami kenaikan, yaitu menjadi 3 dokumen pada tahun 2018. Beberapa penyebab indikatif kurang maksimalnya urusan kelitbangan adalah belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, belum optimalnya sumber daya manusia dalam mendukung kinerja kelitbangan serta belum optimalnya inovasi daerah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.

2.3.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Urusan inspektorat daerah merupakan urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan daerah. Pengawasan daerah yang dilaksanakan dengan baik menjadi salah satu syarat untuk

mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Adapun indicator untuk melihat kualitas penyelenggaraan pengawasan daerah adalah maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Tabel 2. 69 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Level Maturitas SPIP	Kapabilitas APIP
1	2016	0	1
2	2017	0	2
3	2018	2	2
4	2019	3	2
5	2020	3	3

Sumber: LPPD 2020; LKjIP Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 hingga 2020, maturitas SPIP dan kapabilitas APIP Kabupaten Dairi mengalami peningkatan level. Pada tahun 2018, kedua indicator tersebut masih berada pada level 2, sementara pada tahun 2019 sudah berada pada level 3 dan mampu dipertahankan di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi sudah mampu mewujudkan pengawasan daerah yang baik karena telah memenuhi standar dari pemerintah pusat, yaitu pada level 3.

Dari sisi tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) belum sejalan dengan capaian maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 70 Persentase Temuan Aparat Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	80,12	81,17	82,22	93,23	59,4

Sumber: LKjIP tahun 2016-2020

Persentase TLHP Kabupaten Dairi mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020. Sementara itu, beberapa tahun sebelumnya TLHP selalu meningkat di atas 80 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa TLHP belum dilaksanakan secara baik oleh Perangkat Daerah.

Bidang tata kelola pemerintahan berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah yang solid dan akuntabel serta tetap berpaku pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa unsur yang memegang peranan penting untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan daerah. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat capaian kinerja bidang tata kelola adalah Opini BPK dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Opini BPK digunakan untuk melihat tingkat kewajaran informasi di suatu daerah yang disajikan dalam laporan keuangan, sedangkan indeks kepuasan masyarakat merujuk pada tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap pelayanan yang diperoleh dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik.

Opini BPK menyajikan hasil temuan atas permasalahan yang ada, seperti kelemahan sistem pengendalian intern dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Opini BPK merupakan tolok ukur akuntabilitas pemerintah terkait tingkat kewajaran dalam menyajikan informasi dalam laporan keuangan. Opini tertinggi yang diberikan BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). **Berikut merupakan data terkait opini BPK Kabupaten Dairi selama periode 2016 hingga 2022.**

Tabel 2. 71 Opini BPK Kabupaten Dairi Tahun 2016-2022

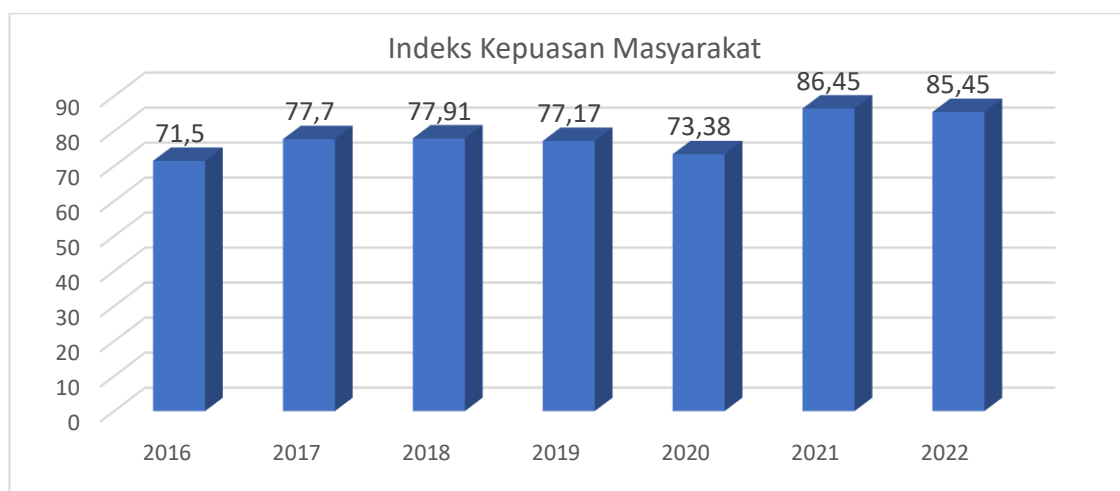
Opini BPK	
Tahun	Predikat
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP

Sumber: LKIP dan LPPD Kabupaten Dairi 2017-2022

Capaian Opini BPK Kabupaten Dairi secara konsisten mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2016 hingga 2022. Capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi tergolong akuntabel, wajar, dan transparan.

Indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi pemerintah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator ini juga dapat menjadi bahan penilaian atas unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi acuan untuk penetapan kebijakan selanjutnya. Sumber data Indeks Kepuasan Masyarakat didapat dari hasil survei berdasarkan beberapa komposisi pelayanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2. 68 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Dairi Tahun 2016-2022



Sumber: LKIP dan LPPD Kabupaten Dairi 2017-2022

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Dairi cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2022 dengan rata-rata mencapai 78,51. Capaian ini sempat menurun sebesar 3,79 poin pada tahun 2020, sebelum kembali meningkat sebesar 13,07 poin pada tahun berikutnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang memengaruhi proses pemberian pelayanan publik. Capaian kinerja yang demikian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Dairi selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka menjawab permasalahan serta dinamika kebutuhan masyarakat.

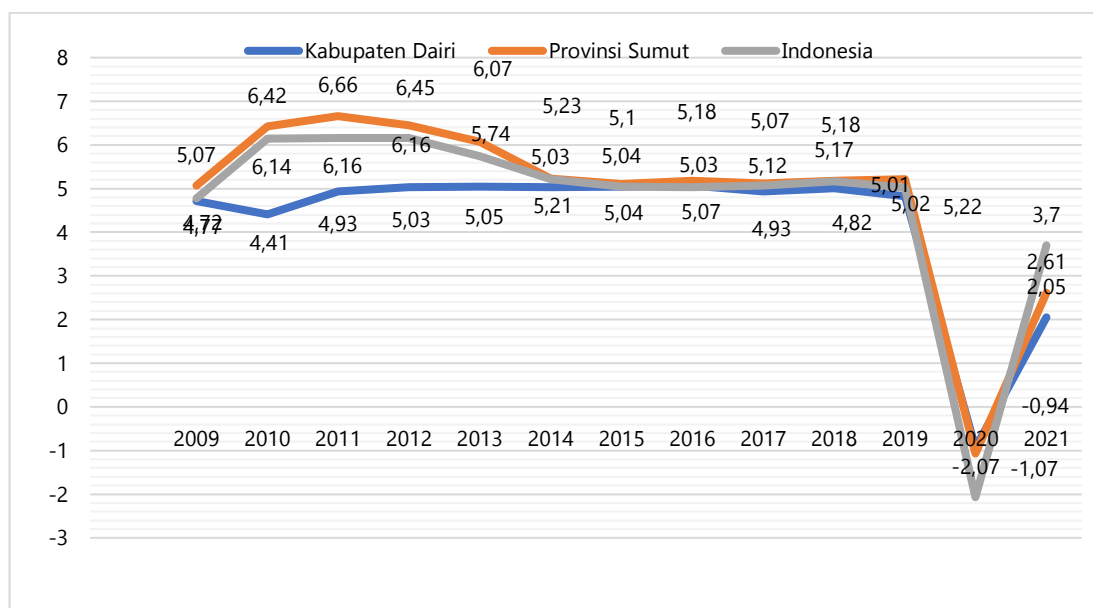
2.4 Aspek Daya Saing

2.4.1 Kondisi Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi mengalami penyesuaian dimana terdapat perubahan tahun dasar PDB dari tahun 2000 ke tahun 2010. Hal ini kemudian diikuti oleh seluruh daerah kaitannya dalam menghitung PDRB yang juga berubah menggunakan tahun 2010. Pergeseran harga tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan beberapa dampak. *Pertama*, meningkatkan nominal PDB di tingkat nasional dan PDRB di tingkat daerah, sehingga dimungkinkan menyebabkan pergeseran kelompok pendapatan dari pendapatan rendah menjadi menengah/tinggi dan pergeseran struktur perekonomian. *Kedua*, mengubah besaran beberapa indikator makro (rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan *saving*), struktur dan pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, mengubah input data untuk *modelling* atau *forecasting*. Perbandingan LPE Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022 dapat diketahui melalui grafik berikut.

Gambar 2. 69 Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2022



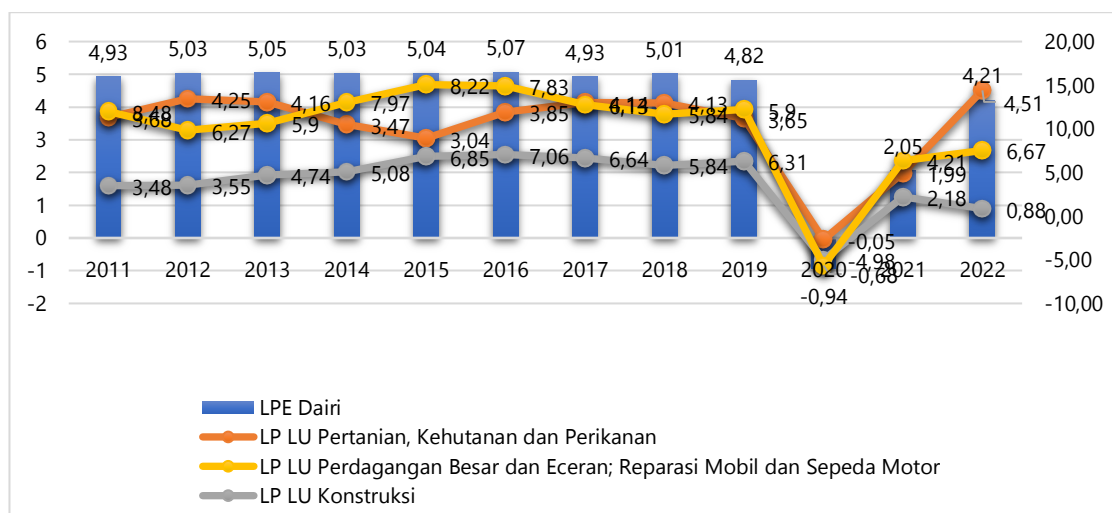
Sumber: BPS Indonesia dan BPS Kabupaten Dairi, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mengalami tren cenderung turun pada tahun 2009-2022. Kondisi ini juga dialami

oleh Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia pada periode tersebut, di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi berada di bawah Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Dalam kurun waktu 2009-2022, perekonomian Kabupaten Dairi tumbuh rata-rata sebesar -23.32 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Utara rata-rata tumbuh sebesar -28,91 persen dan Indonesia sebesar -28.91 persen.

Selama terjadi Pandemi COVID-19, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi turun secara drastis sebesar -318.09 persen pada tahun 2020. Kondisi ini juga dialami oleh Provinsi Sumatera Utara yang mengalami penurunan tajam sebesar -343.93 persen dan Indonesia sebesar -278.74 persen pada tahun 2020. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mulai membaik pada tahun 2021-2022. LPE Kabupaten Dairi naik secara drastis sebesar 105.37 persen pada tahun 2021-2022. Kondisi ini melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang meningkat sebesar 81.23 persen dan Indonesia sebesar 43.51 persen pada tahun 2021-2022. Sektor pertanian di Kabupaten Dairi merupakan sektor strategis yang mempunyai keterkaitan erat dengan pengurangan kemiskinan, upaya mengatasi pengangguran, usaha membangun ketahanan pangan, memproduksi pangan, usaha pelestarian lingkungan dan basis pembangunan ekonomi daerah.

Gambar 2. 70 Grafik Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Dairi tahun 2010-2021



Sumber: BPS Indonesia dan BPS Kabupaten Dairi, 2023

Struktur perekonomian Kabupaten Dairi tahun 2011-2022 ditopang oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Dairi rata-rata sebesar 45.12 persen. Sementara itu, sektor lain yang berkontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Dairi yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16.19 persen), dan Sektor Konstruksi (12.99 persen).

Jika dilihat dari tren laju pertumbuhan tiap tahun, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki tren fluktuatif cenderung meningkat. Sementara itu, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Sektor Konstruksi memiliki tren fluktuatif cenderung turun. Dari ketiga sektor tersebut, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki rata-rata laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6.06 persen. Sementara itu, Sektor Konstruksi rata-rata tumbuh sebesar 4.96 persen, sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki rata-rata laju pertumbuhan paling lambat sebesar 3.40 persen. Meskipun demikian, ketika Pandemi COVID-19 melanda tahun 2020, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat dipertahankan untuk memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB Kabupaten Dairi. Pada tahun 2021 dan 2022, laju pertumbuhan ketiga sektor tersebut kembali menguat kecuali Sektor Konstruksi.

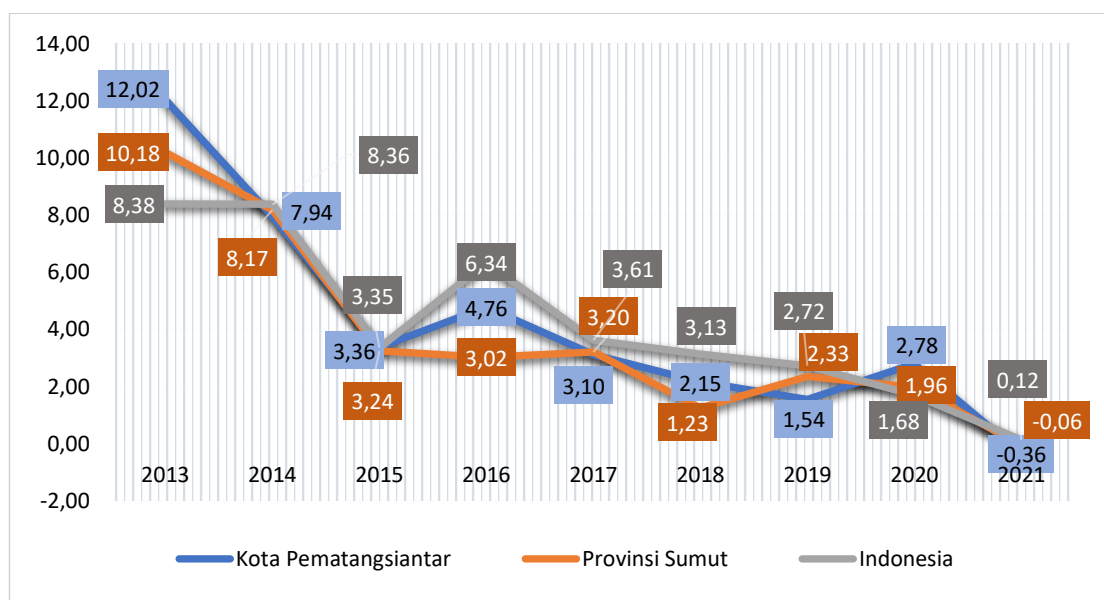
2.4.1.2. Inflasi

Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur rata-rata harga produk, baik itu barang atau jasa, yang umum dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen rumah tangga. Indeks tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat inflasi sebuah wilayah dan sebagai basis penyesuaian upah, gaji, dana pensiun, dan dana kontrak lainnya.

Inflasi rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup masyarakat dan daya beli masyarakat juga turun. Kedua, inflasi tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Lima kota IHK di Provinsi Sumatera Utara yaitu Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidempuan, dan Gunungsitoli. Tingkat inflasi Kabupaten Dairi menggunakan tingkat inflasi Kota Pematangsiantar karena memiliki jarak paling dekat dengan Kabupaten Dairi. Perbandingan tingkat inflasi Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia tahun 2013-2021 dapat diketahui pada grafik berikut.

Gambar 2. 71 Grafik Perbandingan Inflasi Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia Tahun 2013-2021



Sumber: BPS Indonesia dan BPS Kabupaten Dairi, 2023

Tingkat inflasi Kota Pematangsiantar mengalami tren fluktuatif cenderung turun dalam kurun waktu 2013-2021, demikian halnya dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Tingkat inflasi Kota Pematangsiantar secara umum lebih rendah dibandingkan dengan

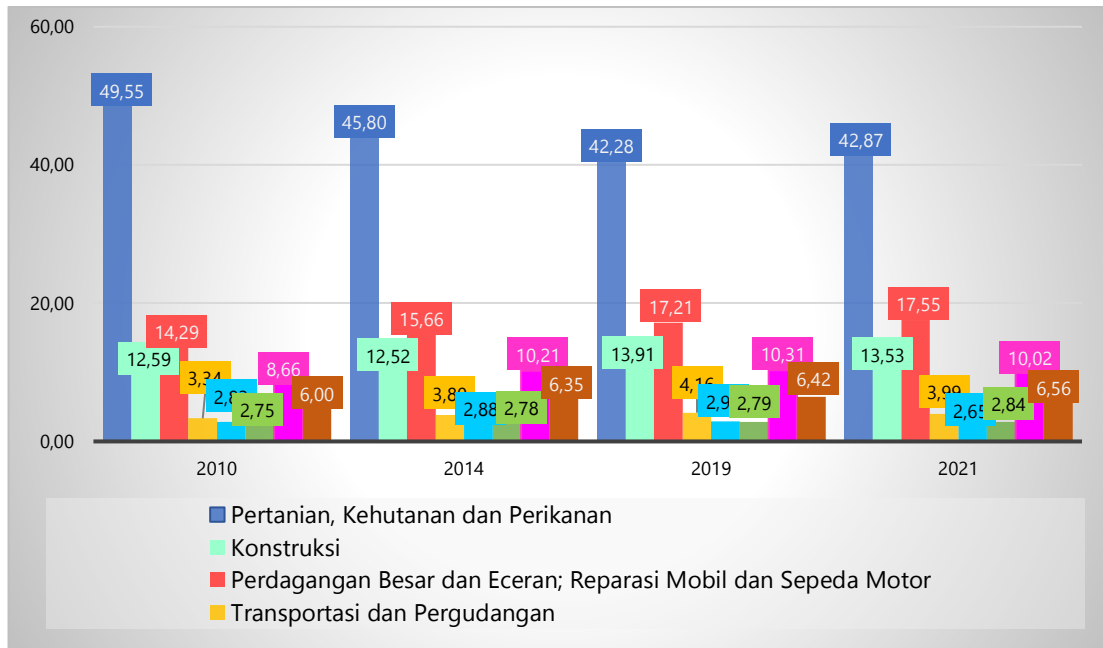
Indonesia, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Tingkat inflasi Kota Pematangsiantar rata-rata turun sebesar 22.04 persen atau sebesar 1.55 poin pada tahun 2013-2021. Kondisi ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia di mana tingkat inflasi Provinsi Sumatera Utara turun secara rata-rata 21.50 persen atau sebesar 1.28 poin, sedangkan Indonesia rata-rata turun sebesar 21.43 persen atau sebesar 1.03 poin pada kurun waktu 2013-2021.

Tingkat inflasi Kota Pematangsiantar naik secara drastis sebesar 80.52 persen pada tahun 2019-2020. Namun demikian, tingkat inflasi berhasil dikendalikan hingga turun sebesar 112,95 persen atau 3.14 poin pada tahun 2020-2021. Pengendalian tingkat inflasi ini lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara yang turun sebesar 103.06 persen atau 2.02 poin dan Indonesia turun sebesar 92.86 persen atau 1,56 poin pada tahun 2020-2021.

2.4.1.3. Struktur Perekonomian

Perubahan metode perhitungan dan klasifikasi lapangan usaha turut mempengaruhi struktur perekonomian dari yang sebelumnya dibagi ke dalam 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. Penyesuaian klasifikasi PDRB dilakukan untuk PDRB tahun 2010-2015 yang sebelumnya masih menggunakan klasifikasi 9 lapangan usaha. Oleh karena adanya perubahan klasifikasi tersebut, lebih tepat untuk membandingkan struktur perekonomian daerah pada tahun 2010 hingga tahun 2021 untuk melihat kemungkinan adanya pergeseran struktur perekonomian. Struktur perekonomian Kabupaten Dairi tahun 2010, 2014, dan 2021 dapat diketahui melalui grafik berikut.

Gambar 2. 72 Grafik Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dairi Tahun 2010, 2014, 2019, dan 2021



Sumber: BPS Indonesia dan BPS Kabupaten Dairi, 2023

Perekonomian Kabupaten Dairi didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama tahun 2010-2021 dengan kontribusi rata-rata sebesar 45.12 persen tiap tahun. Meskipun demikian, kontribusi sektor ini sebesar 49.55 persen pada tahun 2010 turun menjadi 42.87 persen pada tahun 2021. Dengan kata lain, kontribusi sektor ini mengalami penurunan sebesar 6.68 persen poin dalam kurun waktu 2010-2021. Sektor lain yang turut menopang perekonomian Kabupaten Dairi yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi per tahun rata-rata sebesar 16.19 persen selama tahun 2010-2021. Sektor ini mengalami peningkatan sebesar 3.26 persen poin, di mana sektor ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 14.29 persen pada tahun 2010 kemudian meningkat menjadi 17.55 persen pada tahun 2021. Selain itu, Sektor Konstruksi memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Dairi rata-rata sebesar 12.99 persen per tahun. Kontribusi sektor ini mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2021, di mana pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 12.59 persen lalu naik menjadi 13.53 persen pada tahun 2021.

Beberapa sektor lapangan usaha yang juga turut menopang perekonomian Kabupaten Dairi yaitu Sektor Administrasi

Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Real Estate, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Transportasi dan Pergudangan. Di antara keempat sektor tersebut, hanya Sektor Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang memiliki kontribusi terhadap PDRB di atas 5 persen, di mana rata-rata tiap tahun berkontribusi sebesar 9.93 persen, sedangkan ketiga sektor lainnya hanya memberikan kontribusi terhadap PDRB di bawah 5 persen selama tahun 2010-2021. Sementara itu, kategori Lapangan Usaha Lainnya yang meliputi 10 sektor lapangan usaha hanya memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Dairi rata-rata tiap tahun kurang dari 2 persen pada tahun 2010-2021.

Struktur perekonomian Kabupaten Dairi masih ditopang secara dominan oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, meskipun kontribusi sektor ini terhadap perekonomian cenderung menurun seiring dengan meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap perekonomian selama tahun 2010-2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum tampak adanya pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Dairi, padahal kedua sektor ini cenderung memiliki nilai tambah rendah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menggenjot kontribusi sektor unggulan dan prospektif yang dapat memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian di Kabupaten Dairi.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.4.2.1. Pekerjaan Umum

Berdasarkan data Tahun 2023, dapat diketahui kondisi jalan dan luas irigasi dalam keadaan baik sebagai berikut.

1. Panjang jalan

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Dairi pada tahun 2023 sepanjang 710,62 Km atau sebanyak 79,27%.

Tabel 2. 72 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2020

No	Keterangan	Panjang Kondisi Keadaan Baik	Persentase
1	Jalan	710,62 Km	1.275,04/1.608,48 = 79,27%

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi

2. Luas Irigasi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanaan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi tersebar pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 73 Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2023

No	Keterangan	Luas Irigasi Keadaan Baik	Persentase
1	Irigasi	7.902,96 Km	7.902,96/11.175= 70,72%

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Dairi

Luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Dairi pada tahun 2023 sesuai dengan tabel diatas sepanjang 7.902,96 Km atau sebanyak 70,72% dari seluruh luas irigasi yang ada.

3. Daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Kabupaten Dairi

Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan meliputi dari fasilitas pengangkutan (truk, gerobag dorong, gerobag motor, kontainer, TPS dan depo dan transito) sampai di TPA. Sampai dengan akhir Tahun 2023 daya tampung TPA sebanyak 120.000 M³.

2.4.2.2. Perumahan

1. Penduduk Terlayani Air Minum

Cakupan pelayanan penduduk terlayani air minum layak, dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dibanding dengan keseluruhan penduduk Kabupaten Dairi. Perkembangan cakupan pelayanan penduduk

terlayani air minum yang disalurkan oleh PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74 Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan
2019	14.432
2020	15.366
2021	16.752
2022	17.717
2023	20.817

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2019-2023

Jumlah pelanggan PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi sesuai dengan tabel diatas pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat kecuali pada tahun 2015. Jumlah pelanggan PDAM Tirta Nciho kemudian selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2023 sebanyak 20.817 pelanggan.

2. Penduduk Menggunakan Listrik PT. PLN

Perkembangan cakupan pelayanan penduduk terlayani aliran listrik, yang disalurkan oleh PT.PLN di Kabupaten Dairi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75 Jumlah Pelanggan pada PT PLN (Persero) Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan
2013	53,256
2014	53,256
2015	63,058
2016	59,399
2017	67,358
2018	75.844
2020	79.571

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2021

3. Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi

maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Faktor pendukung iklim investasi yang baik dan kondusif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah tingkat kriminalitas di suatu daerah. Angka kriminalitas Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 76 Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Dairi Tahun 2020

No	Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan	Belum Selesai
1.	Ketertiban Umum	4	4	4
2.	Perjudian	9	8	1
3.	Kejahatan Terhadap Nyawa	26	7	19
4.	Penganiayaan Berat	4	4	-
5.	Pencurian dengan Pemberatan	21	19	2
6.	Pencurian dengan kekerasan	1	1	-
7.	Narkotika	70	62	8
8.	Perkara Kehutanan (Illegal Logging)	6	4	2
9.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3	3	-
Jumlah Kasus		144	112	36

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2021

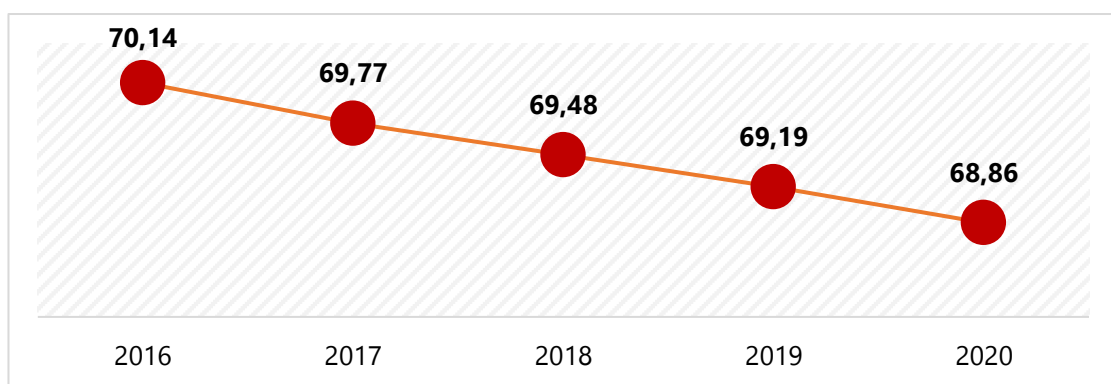
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator keadaan ekonomi suatu negara termasuk negara maju atau negara sedang berkembang.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, maka semakin tinggi pula beban yang harus

ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Kabupaten Dairi tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Gambar 2. 73 Grafik Rasio Ketergantungan Kabupaten Dairi Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Pusat, 2015

Data mengenai rasio ketergantungan di Kabupaten Dairi tersebut diambil dari hasil riset BPS mengenai proyeksi penduduk Sumatera Utara tahun 2010-2020. Rasio ketergantungan Kabupaten Dairi mengalami tren penurunan dari tahun 2016 hingga 2020. Rasio ketergantungan tertinggi di Kabupaten Dairi yaitu sebesar 70,14 pada tahun 2016. Hal tersebut merepresentasikan bahwa setiap 100 orang berusia kerja/berusia produktif memiliki tanggungan sebesar 70,14 orang yang belum produktif dan orang yang dianggap tidak produktif lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Dairi masih tergolong tinggi.

2.5 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada sub bab ini ditampilkan rangkuman hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 77 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
1	Aspek Kesejahteraan						
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1.1	Laju Pertumbuhan PDRB	5.04	5.1	5.01	4.82	-0,94	<
1.1.2	Laju Inflasi	4.76	3.1	2.15	1.54	2.78	>
1.1.3	PDRB per Kapita	26,670,723	28,312,003	30,228,407	32,241,619	32,639,340	>
1.1.4	Indeks Gini	0.301	0.24	0.26	0.29	N/A	=
1.1.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.78	1.03	1.77	0.96	1.09	>
1.1.6	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.18	0.19	0.24	0.22	0.2	<
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial						
1.2.1	IPM	69.61	70.36	70.89	71.42	71.57	>
1.2.2	Angka Melek Huruf	99.01	99.4	99.61	99.8	99.68	<
1.2.3	Rata-rata Lama Sekolah	8.7	8.9	9.15	9.34	9.58	>
1.2.5	Harapan Lama Sekolah	12.84	13.06	13.07	13.09	13.1	>
1.2.9	Angka Harapan Hidup	67.95	68.13	68.41	68.79	69	>
2	Aspek Pelayanan Umum						
2.1	Pendidikan						
2.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	115.53	113.06	112.64	108.98	111	>
2.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26	95.82	97.62	99.66	98.24	<
2.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	98.96	99.53	100	99.36	99.19	<
2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90.43	87.94	89.17	90.53	90.21	<
2.1.5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.84	13.06	13.07	13.09	13.1	>
2.1.6	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.12	0.12	0.29	0	0.55	>
2.1.7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.34	0.35	0.47	0	0.93	>
2.1.8	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	=
2.1.9	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	=
2.1.10	Angka Melanjut (AM)	95.93	97.55	99.17	-	-	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:	
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)	
							Sesuai (=)	
							Melampaui (>)	
	dari SD ke SMP							
2.1.11	Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	95.81	97.89	99.97	-	-	>	
2.2	Kesehatan							
2.2.1	Angka Kematian Bayi	2.55	7.47	2.83	6.67	6	<	
2.2.2	Angka Kematian Ibu	95.8	134.49	53.06	74	93	>	
2.2.3	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	75	85.55	81.98	81	79.95	<	
2.2.4	Usia Harapan Hidup	67.95	68.13	68.41	68.79	69	>	
2.2.5	Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	70	14.24	86.48	85	65	<	
2.2.6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	1.3	4.35	3.47	2	2.49	>	
2.2.7	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70	85.17	85.66	88.3	80	<	
2.2.8	Cakupan Penderita Diabetes Mellitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70	67.54	68.05	74.1	98.18	>	
2.2.9	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	na	96.17	100	100	79.51	<	
2.2.10	Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.98	46.28	49.29	90	61.54	<	
2.2.11	Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	70	10.19	52.05	78.86	50.46	<	
2.2.12	Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue)	46.25	47	52.5	115	59.54	<	
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.3.1	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	57%	64.45%	59.33%	59.52%	65.14%	>	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
2.3.2	Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	88%	82.56%	83.03%	89.23%	98.80%	>
2.3.3	Capaian Tersedianya Akses Air Minum yang bersih	51.92%	58.36%	62.80%	73.03%	89.72%	>
2.3.4	Capaian Terlayannya Masyarakat dalam Pengurusan IMB	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.3.5	Persentase Luas Irigasi dalam Keadaan Baik	78%	30.38%	60.13%	90.16%	145.35	>
2.3.6	Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	1.25%	2.25%	1.68%	2.50%	91.75%	>
2.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
2.4.1	Persentase Rumah Layak Huni	85,79	86,39	90,21	71,02	79,85	>
2.4.2	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	85.79%	86.39%	90.21%	71.02%	79.85%	>
2.4.3	Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	42%	59.97%	61.30%	63.30%	100%	>
2.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
2.5.1	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	100%	66%	82.17%	100%	100%	=
2.6	Sosial						
2.6.1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	3%	10%	7%	0	47.48%	>
2.7	Tenaga Kerja						
2.7.1	Tingkat pengangguran terbuka	na	1.42	1.66	1.59	70.22	<
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.8.1	Indeks Pembangunan Gender	na	97.4	97.93	98.14	97.96	>
2.8.2	Indeks Pemberdayaan gender	na	62.16	68.7	62.12	61.14	<
2.9	Pangan						
2.9.1	Skor Pola Pangan	na	76.55	77.81	71	72.3	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
	Harapan (PPH)						
2.9.2	Persentase Konsumsi Energi Per kapita	92.81	94.13	95.45	69.13	20.52	>
2.9.3	Persentase Konsumsi Protein Per kapita	65.81	79.5	93.19	81.75	59.37	>
2.10	Pertanahan						
2.10.1	Status Kepemilikan Tanah yang Diterbitkan Menurut Kecamatan	2,624	2,743	6,453	3,000	423	<
2.11	Lingkungan Hidup						
2.11.1	Luas Lahan Kritis	8.75	12.5	8.75	10	12.41	<
2.11.2	Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani	14,906	20,492	21,888	22,284	30,125	=
2.11.3	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	>
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.12.1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	43	51	73	76	95	>
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.13.1	Jumlah Bumdes	3	12	23	8	8	<
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2.14.1	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif	na	65.59	68.72	69.95	72.49	>
2.14.2	Unmet Need	na	18.05	15.59	30	12.82	<
2.15	Perhubungan						
2.15.1	Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.16	Komunikasi dan Informatika						
2.16.1	Persentase OPD menggunakan SPBE	na	na	na	na	17.5	=
2.16.2	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)	7	7	7	7	7	=
2.17	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah						
2.17.1	Jumlah Koperasi Aktif	25	67	158	165	165	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
2.17.2	Jumlah Usaha Mikro	86	98	115	103	n.a	<
2.18	Penanaman Modal						
2.18.1	Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP	68.17%	75.28%	82%	85.28%	na	>
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga						
2.19.1	Terfasilitasinya layanan kepemudaan	500	667	1439	1439	25	<
2.19.2	Persentase penanganan gedung olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.20	Kebudayaan						
2.20.1	Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan Yang Terfasilitasi	5	5	5	5	5	=
2.20.2	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya	3	3	3	3	0	<
2.20.3	Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya	1	1	1	1	1	=
2.21	Perpustakaan						
2.21.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	15,032	15,200	15,368	25,659	3,510	<
2.22	Kearsipan						
2.22.1	Jumlah Arsip yang Dilestarikan	210	215	154	154	na	=
2.23	Perikanan dan Kelautan						
2.23.1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	43.69	43.17	42.86	42.28	42.71	>
2.24	Pariwisata						
2.24.1	Jumlah kunjungan wisata	126,866	115,193	139,771	118,509	51,347	<
2.24.2	Jumlah usaha hotel	27	27	31	31	23	<
2.25	Pertanian						
2.25.1	Produktivitas Tanaman Pangan						
	- Padi Sawah	58.89	59.29	59.69	54.28	54.18	<
	- Padi Ladang	33.9	34.1	34.3	35.56	35.56	>
	- Jagung	56.72	59.8	62.28	55.8	55.8	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:	
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)	
							Sesuai (=)	
							Melampaui (>)	
2.25.2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura							
	- Jeruk Manis	4.19%	4.00%	4.12%	na	3.33%	<	
	- Kentang	4.77%	4.74%	4.76%	na	0.30%	<	
	- Cabe merah	1.68%	1.66%	1.56%	na	34.34%	>	
	- Durian	5.05%	5.17%	4.91%	na	29.14%	>	
2.25.3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat							
	- Kopi	0.98%	0.92%	1.06%	4.80%	n.a	>	
2.25.4	Jumlah Populasi Pternakan							
	- Babi	102,285	103,649	104,737	151,000	263,900	<	
	- Ayam	1,104,403	1,121,908	1,138,907	1,352,576	1,173,406	<	
2.25.5	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak							
	- Sapi	32.77%	33%	33.20%	33.81%	na	>	
	- Kerbau	31.29%	34.01%	36.10%	39.71%	na	>	
	- Babi	1.43%	1.43%	1.41%	23.32%	na	>	
	- Kambing	9.38%	11.49%	11.60%	15.30%	na	>	
	- Ayam	2.86%	5.10%	3.28%	5.35%	na	>	
	- Anjing	25.98%	27.28%	43.50%	45%	na	>	
2.25.6	Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang							
	- Ternak Besar	243	243	362	na	na	=	
	- Ternak Kecil	0	0	748	na	na	>	
2.26	Kehutanan							
2.26.1	Rehabilitasi Lahan Kritis	8.75	12.5	8.75	10	12.41	>	
2.27	Perdagangan							
2.27.1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.08	17.1	17.07	17.21	17.22	>	
2.27.2	Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran	7.83%	61.30%	5.84%	5.90%	-0.68%	<	
2.28	Perindustrian							
2.28.1	Laju pertumbuhan sektor industri	6.53%	4.23%	4.91%	4.79%	-2.93%	<	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
	pengolahan						
2.29	Sekretariat Daerah						
2.29.1	SAKIP	C	C	C	C	C	<
2.29.2	Predikat LPPD	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	>
2.29.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	71.49	71.7	77.91	77.17	71.46	<
2.29.4	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelengkan Secara Elektronik	100	100	100	96,61	96,61	=
2.29.5	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi	4	4	4	4	3	<
2.29.6	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2	2	2	2	2	=
2.29.7	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra	16,525	16,525	16,525	16,525	16,525	=
2.30	Sekretariat DPRD						
2.30.1	Terfasilitasinya Persidangan di DPRD	100	100	100	79%	100%	>
2.31	Perencanaan						
2.31.1	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	89.00%	90%	89%	N/A	N/A	<
2.31.2	Tersedianya dokumen perencanaan	2	2	2	N/A	N/A	<
2.31.3	Tersedianya dokumen pendukung perencanaan	5	5	4	N/A	N/A	<
2.31.4	Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	1	1	1	N/A	N/A	<
2.31.5	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan di Kabupaten	80.00%	80.00%	80%	N/A	N/A	<
2.32	Keuangan						
2.32.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2.32.2	Persentase PAD terhadap pendapatan	6.40%	11.33%	6.84%	6.37%	8.51%	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi:
		2016	2017	2018	2019	2020	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
	daerah						
2.33	Kepegawaian						
2.33.1	Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin	100	100	100	N/A	N/A	=
2.34	Pendidikan dan Pelatihan						
2.34.1	Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan	10	5	17	N/A	N/A	=
2.34.2	Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)	60	79	38	N/A	N/A	=
2.34.3	Jumlah PNS yang Diklat Fungsional	150	160	125	N/A	N/A	=
2.35	Penelitian dan Pengembangan						
2.35.1	Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dihasilkan	0	0	3	N/A	N/A	=
2.36	Pengawasan						
2.36.1	Peningkatan Kapabilitas APIP	1	2	2	2	3	>
2.36.2	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	80.12	81.17	82.22	93.23	59.4	<
3	Aspek Daya Saing Daerah						
3.1	Pengeluaran per kapita	10,190	10,395	10,492	10,602	10,350	<
3.2	Rasio ketergantungan	70.14	69.77	69.48	69.19	68.86	>

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi analisis keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk periode selanjutnya. Hasil analisis digunakan sebagai basis perhitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Dairi. Data bab ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023.

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah kunci utama dalam merealisasikan perencanaan dan pembangunan, dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk, besaran dana perimbangan yang diterima, serta keikutsertaan investor dan dunia usaha sebagai sumber dana perimbangan program-program yang telah ditetapkan.

Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Hasil analisis juga digunakan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi lima tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah itu sendiri.

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023

Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Secara umum komponen APBD Kabupaten Dairi terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan dan Belanja Transfer; dan 3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja APBD Kabupaten Dairi pada 2019 hingga 2023 untuk pendapatan relatif stabil berada diatas 98 persen sementara untuk belanja sangat fluktuatif berada dikisaran 82 persen sampai dengan 91 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah tercatat melebihi 100 persen. Penerimaan pembiayaan tahun 2022 tercatat 260,70 persen, hal ini menunjukkan penyerapan anggaran belanja yang belum optimal pada tahun 2021. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2019 realisasi 0 persen tetapi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tercatat di angka 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan sudah semakin membaik.

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2023

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Bertambah/ Berkurang
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Pendapatan Daerah				
2019	1.162.709.743.000,00	1.167.522.159.073,75	100,41%	4.812.416.073,75
2020	1.048.065.444.457,00	1.054.826.116.417,48	100,765%	6.760.671.960,48
2021	1.143.640.583.220,00	1.140.995.615.459,11	99,77%	-2.644.967.760,89
2022	1.144.027.253.000,00	1.156.956.282.477,79	101,13%	12.929.029.477,79
2023*)	1.213.130.927.798,00	1.192.110.051.572,23	98,27%	-21.020.876.225,77
Belanja Daerah				
2019	1.242.286.878.465,89	1.131.108.532.276,75	91,05%	- 111.178.346.189,14
2020	1.166.410.088.534,00	1.058.398.984.995,80	90,73%	- 108.011.103.538,20
2021	1.251.112.358.720,00	1.133.737.127.633,03	90,61%	117.375.231.086,97
2022	1.365.027.050.000,00	1.123.347.555.302,50	82,29%	- 241.679.494.697,50
2023*)	1.352.203.918.299,00	1.236.286.270.150,50	91,43%	- 115.917.648.148,50
Penerimaan Pembiayaan				
2019	87.947.135.465,89	-	0%	-
2020	124.360.762.262,89	124.360.762.262,89	100%	-
2021	114.771.775.500,00	114.771.775.500,00	100%	-
2022	44.000.000.000,00	114.730.263.325,65	260,70%	70.730.263.325,65
2023*)	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100%	-0,08
Pengeluaran Pembiayaan				
2019	8.370.000.000,00	-		-8.370.000.000,00
2020	6.016.118.185,89	6.016.118.185,00	100%	0,89
2021	100.000.000.000	100.000.000.000	100,00%	-
2022	6.275.000.000,00	6.275.000.000,00	100,00%	-
2023*)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100%	-

Sumber: BKAD Kabupaten Dairi, LRA Tahun 2019 – 2023 Kab.Dairi

Ket: *) LRA Sementara Tahun 2023 Un Audited

1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- b. Dana Perimbangan – Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran pertumbuhan ketiga komponen sumber pendapatan daerah tersebut dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2019–2023

No. Akun	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	1,167,522,159,073.75	1,054,826,116,417.48	1.140.995.615.459,11	1,156.956.282.477,79	1.192.110.051.572,23	0,738
4.1	Pendapatan Asli Daerah	74,360,339,717.75	89,758,997,873.48	72.268.890.301,31	84.618.675.420,79	85.084.099.559,23	4,715
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13,810,919,111.00	13,398,479,706.00	16.031.662.549,13	18.270.184.613,49	20.491.850.869,13	10,697
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4,997,441,939.57	3,310,148,797.00	3.585.707.575.00	3.406.823.472,00	3.320.064.213,00	-8,243
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,770,706,298.00	13,765,641,353.00	8.674.560.005,00	11.662.343.516,00	11.409.321.078,00	24,650
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	48,781,272,369.18	59,284,728,017.48	43.976.960.172,18	51.279.323.819,30	49.852.863.399,10	2,383
4.2	Pendapatan Transfer	1,028,117,439,372.00	907,091,166,775.00	1.004.252.574.615,00	1.058.551.026.987,00	1.094.557.567.445,00	1,937
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	643,527,342,978.00	581,181,458,518.00	583.167.942.365,00	590.642.776.017,00	614.827.177.235,00	-0,992
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0,520,264,699.00	12,699,540,754.00	26.051.743.365,00	33.977.976.433,00	11.853.447.510,00	
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	3,862,050,279.00	3,403,017,764.00			4.423.542.725,00	
4.2.1.3	Dana Bahi Hasil Lainnya					8.513.744.000,00	
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	629,145,028,000.00	565,078,900,000.00	557.116.199.000,00	556.664.799.584,00	590.036.443.000,00	

No. Akun	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus	182,980,494,845.00	140,116,339,746.00	215.391.736.533,00	298.902.966.384,00	267.766.001.163,00	14,663
4.2.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	61,396,185,975.00	48,834,992,229.00	125,818.597.998,00	153.129.471.602,00	97.765.061.442,00	
4.2.2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	28,951,416,434.00	2,886,853,778.00				
4.2.2.3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	92,632,892,436.00	88,394,493,739.00	89.573.138.535,00	145.773.494.782,00	170.000.939.721,00	
4.2.3	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	148,496,505,000.00	153,898,929,000.00	167,893,406.000,00	127.395.282.000,00	168.896.352.200,00	5,296
4.2.3.2	Pendapatan Dana Insentif Daerah	21,323,941,000.00	25,334,386,000.00	38.154.676.000,00	3.320.485.000,00	33.666.172.000,00	
4.2.3.3	Pendapatan Transfer Dana Desa	127,172,564,000.00	128,564,543,000.00	129.738.730.000,00	124.074.797.000,00	135.230.180.200,00	
4.2.4	Transfer Pemerintah Provinsi	53,113,096,549.00	31,894,439,511.00	37.799.489.717,00	41.610.002.586,00	43.068.036.847,00	-1,962
4.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53,113,096,549.00	31,894,439,511.00	37.799.489.717,00	41.610.002.586,00	43.068.036.847,00	
4.2.4.2	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	-	-				
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	65,044,379,984.00	57,975,951,769.00	64.474.150.542,80	13.786.580.070,00	12.468.384.568,00	-21,959
4.3.1	Pendapatan Hibah	65,044,379,984.00	57,975,951,769.00	64.474.150.542,80	13.786.580.070,00	12.468.384.568,00	
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera						

Sumber: BKAD Kab.Dairi – LRA Tahun 2019 - 2023; *): LRA Tahun 2023 Sementara Un Audited

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2019– 2023 rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terlihat cenderung fluktuatif. Rata rata pertumbuhan pendapatan asli daerah selama kurun waktu lima tahun sebesar 4,715 persen. Penyumbang terbesar berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 24,650 persen kemudian pendapatan pajak daerah yang relatif naik setiap tahun sebesar rata rata 10,697 persen. Kondisi fluktuatif dari pendapatan daerah selama kurun waktu 2019 sampai 2021 dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan signifikan penerimaan pada sektor Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah belum optimal yang disebabkan oleh penurunan Kontribusi beberapa komponen Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah yaitu PAD (Pendapatan Retribusi Daerah) dan Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum). Rata- rata pertumbuhan Pendapat Daerah secara umum sejak Tahun 2019 – 2023 adalah mengalami pertumbuhan sebesar 0,738 persen.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,715 persen dengan penyumbang terbesar berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar, 24,650 persen, kemudian pendapatan pajak daerah sebesar 10,697 persen tetapi pendapatan redistribusi daerah mengalami kontraksi sebesar -8,243 persen. Kondisi ini terjadi karena masih belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD dan masih belum optimalnya pendataan sumber PAD, terutama Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada berkurangnya PAD, sehingga dapat menyebabkan menurunnya Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi di masa mendatang.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada kelompok Dana Perimbangan selama Tahun Anggaran 2019 - 2023 masih bertumpu kepada Dana Alokasi Umum rata – rata sebesar 70,22 persen, kemudian besaran Dana lokasi Khusus sebesar rata-rata 25,88 persen dan selanjutnya besaran Dana Bagi Hasil sebesar 3,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer terutama transfer dari pusat masih menjadi komponen utama dalam penyusunan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer tersebut berasal dari dana perimbangan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen penerimaan yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Dana insentif daerah. Pendapatan Hibah merupakan Penyumbang terbesar dari pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah kurun waktu tahun anggaran 2019 - 2023. Adapun Komponen Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah daei Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri, sedangkan proporsi Pendapatan lain – lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

2. Belanja Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun

mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja pada periode Tahun Anggaran 2019 – 2023 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2019- 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019–2023

Kode Rekening	Belanja Daerah	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023 *)	
5.1	Belanja Operasi	737.119.024.625,75	685.541.089.052,00	757.204.880.990,42	757.712.293.113,52	844.383.588.682,73	3,74
5.1.1	Belanja Pegawai	503.235,618.415,00	471.857.855.419,00	463.718.058760,00	446.610.927.852,00	455.914.059.535,00	-2,71
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	223.009.769.210,75	208.791.968.133,00	287.330.176.730,42	203.564.192.761,52	356.833.585.847,73	7,51
5.1.5	Belanja Hibah	4.700.512.000,00	4.891.265.500,00	5.323.645.500,00	5.581.772.500,00	30.153.343.300,00	81,99
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial		-	-	1.955.400.000,00	1.482.600.000,00	-18
5.2	Belanja Modal	197.567.865.963,00	139.598.777.988,80	177.886.901.011,61	172.288.707.597,00	187.722.229.267,77	-5,28
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.883.841.988,00	44.789.791.355,00	6.591.745.631,00	10.062.757.592,00	4.700.424.800,00	333,55
5.4	Belanja Transfer	193.537.799.700,00	188.475,326.600,00	192.053.600.000,00	183.274.797.000,00	199.480.027.400,00	0,79
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	900.000.000,00	1.020.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	1.961.800.000,00	37,99
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Umum Ke Desa	192.095.650.000,00	187.455.326.600,00	190.853.600.000,00	181.574.797.000,00	197.518.227.400,00	0,73
TOTAL JUMLAH BELANJA DAERAH		1.131.108.532.276,75	1.058.398.984.995,80	1.133.737.127.633,03	1.123.347.555.302,50	1.236.286.270.150,50	-1,71

Sumber: BKAD Kab.Dairi - LRA Kab.Dairi Tahun 2019 – 2023 *) LRA Tahun 2023 Sementara Un Audited

Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023 mengalami kontraksi sebesar -1,71%. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan beberapa komponen Belanja Operasi yaitu: 1) Belanja Pegawai sebesar -2,71persen 2) Belanja Modal sebesar -5,28 persen dan 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar -18%. Pertumbuhan Belanja operasi secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 3,74 persen. Belanja Tidak Terduga tercatat mengalami peningkatan paling signifikan sebesar 333,55 persen hal ini disebabkan Alokasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan kenaikan pada komponen Belanja Tidak Terduga dari Tahun Anggaran 2019.

Tabel 3. 4 Kemampuan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023*
A	Pendapatan Umum Daerah					
1	Pendapatan Asli Daerah	74.360.339.717,75	88.860.383.527,00	72.268.890.301,00	84.618.675.421,00	85.084.099.559,23
	Pajak Daerah	13.810.919.111,00	13.473.298.813,00	16.031662.549,13	18.270.184.613,00	20.491850.869,13
	Retribusi Daerah	4.997.441.939,57	3.234.621.781,00	3.585.707.575,00	3.406.823.472,00	3.320.064.213,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.770.706.298,00	13.765.641.353,00	8.674.560.005,00	11.662.343.516,00	11.409.322.078,00
	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	48.781.272.369,18	58.386.821.580,17	43.976.960.172,00	51.279.320.819,00	49.862.863.399,10
2	Dana Bagi Hasil	14.382.314.978,00	16.102.558.518,00	26.051.743.365,00	33.977.976.433,00	16.276.990.235,00
3	Dana Alokasi Umum	629.145.028.000,00	565.078.900.000,00	557.116.199.000,00	556.664.799.584,00	590.036.443.000,00
	Jumlah A	717.887.682.695,75	670.040.842.045	655.436..832.666,00	675.261.451.438.000,00	691.397.532.794,00
B	Belanja Pegawai					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	401.143.442.569,00	387.142.507.001,00	312.530.823.538,00	309.274.893.202,00	
2	Tambahan Penghasilan PNS	55.263.722.624,00	45.550.901.678,00	49.929.135.446,00	70.424.980.867,00	
	Jumlah B	456.407.165.193,00	432.693.408.678	362.459.958.984,00	379.699.874.069,00	
	Kemampuan Keuangan Daerah	1.174.294.847.888,80	1.057.183.349.046,00	1.017.896.791.650	1.054.961.325.507	

Sumber: BKAD Kab.Dairi - LRA Kab.Dairi Tahun 2019 – 2023*): LRA Tahun 2023 Sementara Un Audited

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan tersebut dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Sedangkan, belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pada regulasi tersebut pengelompokan kemampuan keuangan daerah kabupaten dibagi kepada 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Dari tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Dairi sejak tahun 2019-2023 tercatat masuk kepada kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana

Cadangan; Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi periode 2019 -2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5 Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Periode 2019 – 2023

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Surplus/Defisit	36.413.626.797,00	(3.572.868.578,32)	7.258.487.826,08	33.617.727.175,27	(44.176.218.578,27)	-70,30
6.1	Penerimaan Pembiayaan	87.947.135.465,89	124.360.762.262,89	114.771.775.499,57	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92	14,37
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	87.947.135.465,89	124.360.762.262,89	114.771.775.499,57	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92	14,37
	Koreksi	-	-	-	-	-	
6.1.8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	6.016.118.185,00	7.300.000.000,00	6.275.000.000,00	3.000.000.000,00	-14,96
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank	-	6.016.118.185,00	7.300.000.000,00	6.275.000.000,00	3.000.000.000,00	-14,96
	Pe,mbiayaan Netto	124.360.762.262,89	118.344.644.077,89	107.471.775.499,57	108.455.263.325,65	139.072.990.500,92	3,78
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	124.360.762.262,89	114.771.775.499,57	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92	94.896.771.922,65	3,49

Sumber: BKAD Kab.Dairi - LRA Kab.Dairi Tahun 2019 – 2023; *) : LRA Tahun 2023 Sementara Un Audited

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bersifat fluktuatif yang secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 14,37 persen. Realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Dairi adalah Penyertaan Modal (Investasi) yang dilakukan kepada BUMD dan Bank Sumut. Pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata -14,96 persen, sedangkan nilai pertumbuhan rata-rata Pembiayaan (Netto) dalam kurun Tahun Anggaran 2019 – 2023 adalah 3,78 persen.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Penyusunan neraca daerah dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, neraca daerah juga memberikan informasi penting kepada masyarakat luas tentang posisi keuangan daerah. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan social bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Asset terdiri dari (1) Aset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Aset Tetap, (4) Dana Cadangan, dan (5) Aset Lainnya.

Neraca Kabupaten Dairi pada periode tahun 2019 – 2021 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total asset. Rincian Neraca Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 6 Neraca Daerah Kabupaten Dairi Periode 2019 – 2022

Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	
Kas dan Setara kas	124.414.291.698,89	115.087.129.455,73	186.613.128.659,00	1.047.654.023. 768	
Investasi Jangka Pendek					
Piutang Pendapatan	25.761.276.551,09	21.571.704.498,98			
Piutang Lainnya					
PenyisihanPiutang					
Beban Dibayar Dimuka			3.981.857.376,00		
Persediaan	18.098.432.646,64	26.561,964.491,64	34.771.042.546		
Aset Untuk Dikonsolidasikan					
Investasi Jangka Pendek					
Piutang Pajak Daerah			9.540.308.967		
Piutang Restribusi Daerah			119.338.333		

Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah			.830.627.440		
Pitang Transfer Pemerintah Pusat					
Pitang Transfer Anrat Daerah			15.644.254.703		
Piutang lainnya			959.150.720		
JUMLAH ASET LANCAR	168.274.000.896,62	163.220.798.476	186.613.128.659,00	1.745.353.381 .582	
INVESTASI JANGKA PANJANG					
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN					
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	91.517.963.450,00	96.758.574.576,00	102.160.611.940,00	-	-
Dana Bergulir	-	-	-	-	-
Dana Penjaminan	-	-	-	-	-
Penyisihan Dana Bergulir	-	-	-	-	-

Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	
Investasi Jangka Panjang Pada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN					
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				3.897.021.689. 389	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN				3.897.021.689. .389	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	91.517.963.450,00	96.758.574.576,00	102.160.611.940,00	3.897.021.689. .389	6,19
ASET TETAP					
Tanah	377.634.353.438,70	382.928.956.808,70	388.346.878.164,00	5.116.770.062. 290	1,72
Peralatan dan Mesin	297.456.680.195,81	382.928.956.808,70	428.956.153.095,00	3.248.400.304. 317	11,08
Gedung dan Bangunan	648.546.720.348,15	656.120.003.003,16	707.388.568.712,00	5.067.781.317. 057	5,88

Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	
Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.452.415.939.753,56	1.521.789.206.604,91	1.625.613.242.991,00	10.404.914.135 .610	6,14
Aset Tetap Lainnya	89.979.310.848,45	95.282.348.588,88	101.365.342.198,00	314.661.598.68 3	4,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.974.548.317,00	1.878.454.823,57	3.883.148.928	81.790.861.074	16,85
Akumulasi Penyusutan	(1.124.220.989.139,49)	(1.426.641.115.940,15)	(1.588.258.501.784)	- 13.102.157.095 .914	17,80
JUMLAH ASET TETAP	1.748.786.563.762,18	1.602.499.175.573	1.667.294.832.303	11.132.161.18 3.118	3,66
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan					
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	298.124.773,50			1.986.236.424	7,23
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga					
Aset Tak Berwujud	1.932.091.193,69	2.337.981.880,30	2.637.702.330,00	83.131.262.028	129,51
Aset Lain - Lain	33.395.074.962,25	29.651.396.053,90	31.695.004.983,00	2.009.417.758. 151	4,53

Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			2.143.306.067,00	- 44.055.425.291	
JUMLAH ASET LAINNYA	35.625.290.929,44	31.989.377.934	32.189.401.246	2.050.479.831 .313	4,98
JUMLAH ASET	2.044.203.819.038,24	1.894.467.926.529	1.988.257.974.149,00	18.825.016.08 5.401	1,81
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12.449.424.241,15	10.999.160.356		11.028.400	0,26
Utang Bunga				1.246.044.794	75,44
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				914.513.126.92 8	1.040,21
Pendapatan Diterima di Muka	40.501.375,00	97.398.000,00	205.778.425,00		
Utang Belanja	61.877.557,00	65.906.452,00	17.809.086.230,00		
Utang Jangka Pendek Lainnya				75.952.230.561	21,05

Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.551.803.173,15	10.999.160.356,00	18.014.864.655,00	991.722.430.6 83	13,34
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				536.058.148.8 81	
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	536.058.148.881	536.058.148.88 1	-
Lainnya					
Akumulasi Penyusutan					
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-				
JUMLAH KEWAJIBAN	12.551.803.173,15	10.999.160.356,00	18.014.864.655,00	1.527.780.579 .564	50,84
EKUITAS					

Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	
EKUITAS	2.031.652.015.865,09	1.883.468.766.172,99	1.970.243.109.493,00	17.297.235.505 .837	1,73
JUMLAH EKUITAS	2.031.652.015.865,09	1.883.468.766.172,99	1.970.243.109.493,00	17.297.235.50 5.837	1,73
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.044.203.819.942,24	1.894.467.926.529,99	1.988.257.974.149,00	18.825.016.08 5.401	1,81

Sumber: BKAD Kab.Dairi - Neraca Kab.Dairi 2019- 2021

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (Leverage), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

- (1) *Current Ratio* (rasio lancar), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio lancar pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan rasio diatas 1 (satu) yang artinya kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Dairi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.

- (2) *Quick Ratio* (rasio cair), yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat Tabel diatas, Rasio Cair Kabupaten Dairi capaiannya lebih dari 1 (satu) 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban- kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya
- (3) Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu antara lain:
 1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban- kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya yang menunjukkan seberapa besar pengaruh

hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kabupaten Dairi tergolong sangat kecil, hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang pemerintah daerah sangat kecil di bandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari tabel dibawah ini, diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Dairi tergolong baik dengan nilai rasio.

Tabel 3. 7 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2022

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	13,4063	14,8393	10,3588	1,75599
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	11,9644	12,4299	8.4287	1,5112
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0061	0,0058	0,0090	0,0812
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0061	0,0058	0,0091	0,0883

Sumber : BKAD Kabupaten Dairi (data diolah)

3.1.3 Penyertaan Modal di BUMD milik Pemerintah Kabupaten Dairi dan BUMD Milik Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Kabupaten Dairi dan juga pada Badan Usaha Milik Provinsi yang terdapat di Kabupaten Dairi dalam bentuk dana dan juga Non kas yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka Panjang.

Pada tabel berikut digambarkan jumlah penyetoran modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dalam kurun Tahun Anggaran 2019 – 2023 , Adapun penyetoran modal dilakukan untuk memenuhi jumlah penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3. 8 Perkembangan Pendanaan melalui Penyertaan Modal di BUMD Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dan Bank SUMUT

No	Nama BUMD	Penyertaan Modal di BUMD Milik Pemerintah Daerah				
		2019	2020	2021	2022	2023 *)
1	PT. Bank Sumut	-	6.016.118.185,00			
2	PDAM			7.300.000.000,00	6.275.000.000,00	3.000.000.000,00
TOTAL		-	6.016.118.185,00	7.300.000.000,00	6.275.000.000,00	3.000.000.000,00

Sumber: BKAD Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2023 data diolah 2023; *) : LRA Sementara Tahun 2023 Un Audited

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Belanja Daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendanaan APBD.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Dairi untuk Tahun Anggaran 2025 – 2026 harus menyesuaikan dengan kondisi nasional dan global dirasakan ditengah masyarakat, serta inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar sebagai dampak dari Konflik antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina namun tetap mendorong untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang telah ditetapkan khususnya Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kewenangan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan dilakukan upaya

- upaya sebagai berikut:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan;
- b. Menyusun regulasi terkait penataan aset daerah yang mengatur pemanfaatan aset-aset milik Kabupaten Dairi baik untuk kepentingan publik maupun untuk pemanfaatan yang berorientasi profit;
- c. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
- d. Mendorong peningkatan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- e. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- f. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dalam dana perimbangan pada alokasi Pendapatan Transfer Daerah; dan
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kabupaten.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah di atas, untuk merealisasikan target perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain sebaga berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - Melakukan inovasi dalam rangka intensifikasi pajak daerah;
 - Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama;
 - Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta penguatan peran Badan Pengawas dalam pengendalian dan evaluasi kinerja BUMD agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mampu meningkatkan profit;
 - Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; dan
2. Strategi pencapaian target Pendapatan Transfer yang mencakup Dana Perimbangan, dilakukan melalui:
 - Melakukan sosialisasi secara intensif mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, strategi yang ditempuh melalui:
 - Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah;
 - Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;

b. Kebijakan Belanja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan;
2. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% (diluar gaji), dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga;
3. Pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib pelayanan dasar urusan, wajib non pelayanan dasar dan pemerintah pilihan serta penunjang pemerintahan;

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Perkantoran Terpadu.

c. Kebijakan Pembiayaan

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja daerah Kabupaten Dairi.

Tabel 3. 9 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Dairi 2019 – 2023

Kode Rekening	Belanja Daerah	2019			2020			2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5.1	Belanja Operasi	820.055.341.934,89	737.119.024.625,75	89,88	760.850.168.827,00	685.541.089.052,00	90,10	849.140.423.957,00	757.204.880.990,42	89,15
5.1.1	Belanja Pegawai	536.195.505.361,29	503.235.618.415,00		491.087.139.422,00	471.857.855.419,00		489.679.538.698,00	463.718.058.760,00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	271.432.111.573,60	223.009.769.210,75		259.310.287.270,00	208.791.968.133,00		352.205.835.259,00	287.330.176.730,42	
5.1.5	Belanja Hibah	5.874.600.000,00	4.700.512.000,00		6.402.742.135,00	4.891.265.500,00		6.030.050.000,00	5.323.645.500,00	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.553.125.000,00	6.173.125.000,00		50.000.000,00	-		1.225.000.000,00	833.000.000,00	
5.2	Belanja Modal	217.615.886.531,00	197.567.865.963,00	90,78	154.516.988.197,00	139.598.777.988,80	90,34	201.918.334.763,00	177.886.901.011,61	88,09
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.600.000.000,00	2.883.841.988,00	27,20	62.485.160.710,00	44.783.791.355,00	71,67	8.000.000.000,00	6.591.745.631,00	82,39
5.4	Belanja Transfer	194.015.650.000,00	193.537.799.700,00	99,75	188.557.770.800,00	188.475.326.600,00	99,95	192.053.600.000,00	192.053.600.000,00	100
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	1.020.000.000,00	.015.401.000,00		1.024.599.000,00	1.020.000.000,00		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	192.995.650.000,00	192.522.398.700,00		187.533.171.800,00	187.455.326.600,00		190.853.600.000,00	190.853.600.000,00	
TOTAL JUMLAH BELANJA DAERAH		1.242.286.878.465,89	1.131.108.532.276,75	91,05	1.166.410.088.534	1.058.398.984.995,80	90,73	1.251.112.358.720,00	1.133.737.127.633,03	90,61

Lanjutan tabel 3.9

Kode Rekening	Belanja Daerah	2022			2023*)			Rata-rata Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
5.1	Belanja Operasi	792.703.704.967,00	757.712.293.113,52	95,58	939.203.246.106,00	844.383.588.682,73	89,90	90,92
5.1.1	Belanja Pegawai	491.640.282.557,00	446.610.927.852,00		499.158.500.769,00	455.914.059.535,00		
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	288.383.442.410,00	303.564.192.761,52		407.187.840.809,00	356.833.585.847,73		
5.1.5	Belanja Hibah	6.519.989.000,00	5.581.772.500,00		31.334.704.528,00	30.153.343.300,00		
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.160.000.000,00	1.955.400.000,00		1.522.200.000,00	1.482.600.000,00		
5.2	Belanja Modal	196.973.751.033,00	172.288.707.597,00	87,46	207.648.103.993,00	187.722.229.267,77	90,40	89,41
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.800.000.000,00	10.062.757.592,00	114,34	5.000.000.000,00	4.700.424.800,00	94,01	77,92
5.4.	Belanja Transfer	183.274.797.000,00	183.274.797.000,00	100	200.352.568.200,00	199.480.027.400,00	99,56	99,85
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	700.000.000,00	1.700.000.000,00		1.961.800.000,00	1.961.800.000,00		
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	181.574.797.000,00	181.574.797.000,00-	-	198.390.768.200,00	197.518.227.400,00		
TOTAL JUMLAH		1.365.027.050.000,00	1.123.347.555.302,50	82,29	1.352.203.918.299,00	1.236.286.270.150,00	91,43	89,22

Sumber: BKAD Kabupaten Dairi- LRA Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2023; *) : LRA Sementara Tahun 2023 Un Audited

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi rata-rata Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2019–2023 sebesar 89,92 persen, dengan rata-rata Belanja Operasi sebesar 90,92 persen dan Belanja Modal sebesar 89,41 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 77,92 persen dan Belanja Transfer 99,85 persen. Dari data diatas bila dibandingkan antara anggaran belanja dan realisasi belanja selama 5 tahun adalah rata-rata 89,92 menunjukkan masih kurang efektif dan efisiennya pengelolaan maupun penganggaran belanja.

2. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi ditampilkan pada tabel di bawah. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dari tabel 3.9 digambarkan adanya penurunan belanja aparatur pada tahun 2020 hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi belanja daerah yang dialokasikan untuk penanggulangan Pandemi COVID-19. Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan menjadi cukup besar, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan layanan publik.

Tabel 3. 10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023 *)
A.	Belanja Tidak Langsung	457.580.980.282,00	433.853.109.875,00	450.002.295.295,00	433.025.538.551,00	691.695.905.585
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	401.143.442.569,00	387.142.507.001,00	312.530.823.538,00	309.274.893.202,00	
2	Belanja Tambahan Penghasilan	55.263.722.624,00	45.550.901.678,00	136.960.591.757,00	123.239.765.349,00	
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	400.000.000,00	400.000.000,00	510.880.000,00	510.880.000,00	
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	490.550.000,00	578.276.196,00			
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	283.265.089,00	181.425.000,00			
B.	Belanja Langsung	166.879.242.901,27	184.332.234.030,80	260.037.940.911,42	275.993.656.622,52	455.914.059.535,00
1	Belanja Honorarium PNS	1.737.792.000,00	1.848.813.800,00			
2	Honorarium Non PNS	30.385.972.489,00	36.155.931.744,00			
3	Belanja Uang Lembur	690.918.017,00				
4	Belanja Bahan Pakai Habis	21.162.556.090,92	32.678.107.633,00	87.059.059.943,99	81.894.101.538,82	
5	Belanja Barang Tak Habis Pakai			208.512.600,00	288.549.350,00	
5	Belanja Jasa Kantor	31.571.119.131,60	48.769.436.763,40	113.079.880.683,43	121.916.462.921,70	

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023 *)
7	Belanja Premi Asuransi	8.262.957.000,00	12.102.885.000,00	18.113.998.538,00	18.597.495.463,00	
8	Belanja Perawatan Kendaraan bermotor	6.332.119.337,00	6.070.713.965,00			
9	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.968.105.345,80	11.137.770.087,40			
10	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir	869.760.515,00	276.976.125,00	334.750.000,00	330.450.000,00	
11	Belanja makan dan minum pegawai	2.734,364.643,00	1.954.233.600,00-	-		
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	762.079.235,00	608.048.000,00-	-		
13	Belanja Pakaian Kerja	498.399.400,00	589.926.000,00-	-		
14	Belanja Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	1.019.756.100,00	152.680.000,00			
15	Belanja Perjalanan Dinas	40.828.081.285,95	29.114.923.229,00	38.350.569.213,00	48.834.829.779,00	
16.	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.055.442.311,00	2.871.788.084,00	2.891.169.933,00	4.131.767.570,00	
17	Belanja Perjalanan Pindah Tugas					
TOTAL		624.460.223.183,27	618.185.343905,80	710.040.236.206,42	709.019.195.173,52	1.236.286.270.150,50

Sumber: BKAD Kabupaten Dairi, Data Diolah; *) : LRA Sementara Tahun 2023 Un Audited

3. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan berkurangnya alokasi anggaran belanja untuk pembangunan fisik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dairi. Diharapkan kedepannya hal ini bisa dikendalikan sehingga proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Tabel 3. 11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Dairi

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2019	624.460.223.183,27	1.131.108.532.276,75	55,20
2	2020	618.185.343.905,80	1.058.398.984.995,80	58,40
3	2021	710.040.236.206,42	1.133.737.127.633,03	62,62
4	2022	709.019.195.173,52	1.123.338.555.302,52	63,11

Sumber : BKAD Kabupaten Dairi, Data Diolah

*) : LRA Sementara Tahun 2023 Un Audited.

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur proporsinya lebih besar terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu perlu diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD.

4. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam setahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintahan Kabupaten Dairi.

Tabel 3. 12 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dairi

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023*)
	Belanja pegawai	503.235.618.415,00	471.857.855.419,00	463.718.058.760,00	446.610.927.852,00	455.914.059.535,00
	Belanja hibah	5.581.772.500,00	4.891.265.500,00	5.323.645.500,00	5.581.772.500,00	30.153.343.300,00
	Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	1.015.401.000,00	1.020.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	1.927.250.850,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	192.522.398.700,00	187.455.326.600,00	190.853.600.000,00	181.574.797.000,00	197.518.227.400,00
	Belanja tidak terduga	2.883.841.988,00	44.783.791.355,00	6.591.745.631,00	10.062.757.592,00	4.700.424.800,00
	Belanja Bantuan Sosial	6.173.125.000,00	-	833.000.000,00	1.955.400.000,00	1.482.600.000,00
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	711.412.157.603	710.008.238.874,00	668.520.049.891	647.485.654.944,00	691.695.905.585
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	419.963.374.673,75	348.390.746.121,80	465.217.077.742,03	475.852.900.358,52	544.590.364.565,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.131.108.532.276,75	1.058.398.984.995,80	1.133.737.127.633,03	1.123.347.555.302,50	1.236.286.270.150,50
	SURPLUS / DEFISIT	36.413.626.797,00	(3.572.868.578,32)	7.258.487.826,08	33.617.727.175,27	(44.176.218.578,27)
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	87.947.135.465,89	124.360.762.262,89	114.771.775.499,57	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	124.360.762.262,89	124.360.762.262,89	122.030.263.325,65	148.347.990.500,92	142.072.990.500,92
	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	6.016.118.185,00	7.300.000.000,00	6.275.000.000,00	3.000.000.000,00
C	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	6.016.118.185,00	7.300.000.000	6.275.000.000,00	3.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	87.947.135.465,89	118.344.644.077,89	107.471.775.499,57	108.455.263.325,65	139.072.990.500,92

Sumber : BKAD Kabupaten Dairi; *) LRA Sementara Tahun 2023 Un Audited

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

5. Proporsi Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

5.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Hasil perhitungan analisis penutup defisit tersebut menunjukkan bahwa sumber penutup defisit keuangan daerah Kabupaten Dairi masih berasal dari SiLPA. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melihat perkembangan defisit rill anggaran, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Analisis Defisit Riil Anggaran Kabupaten Dairi

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023*)
1	Pendapatan Daerah	1.167.522.159.073,75	1.054.826.116.417,48	1.140.995.615.459,11	1.156.965.282.477,79	1.192.110.051.572,23
2	Belanja Daerah	1.131.108.532.276,75	1.058.398.984.995,80	1.133.737.127.633,03	1.123.347.555.302,50	1.236.286.270.150,50
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	6.016.118.185,00	7.300.000.000,00	6.275.000.000,00	3.000.000.000
A.	Defisit Riil	36.413626.797,00	-3.572.868.578,32	7.258.487.826,08	33.617.727.175,27	-44.176.218.578,27
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	87.947.135.465,89	124.360.762.262,89	114.771.775.499,57	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92
B.	Total Realisasi Penerimaan	87.947.135.465,89	124.360.762.262,89	114.771.775.499,57	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		124.360.762.262,89	114.771.775.499,57	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92	94.896.771.922,65

Sumber: BKAD Kabupaten Dairi (data diolah); *) : LRA Sementara Tahun 2023 Un Audited

Pada tabel 3.13 diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Dairi memiliki defisit riil anggaran pada tahun 2020 dan 2023, namun demikian defisit tersebut dapat ditutupi dengan besarnya SiLPA pada tahun tersebut. Untuk tahun 2019, 2021, dan 2022 defisit riil anggaran bernilai surplus yang menjadi SiLPA pada tahun tersebut.

6. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran.

Tabel 3. 14 Rasio/Kontribusi SiLPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah
1	2019	124.360.762.262,89	1.131.108.532.276,75	10,99
2	2020	114.771.775.499,57	1.058.398.984.995,80	10,84
3	2021	114.730.263.325,65	1.133.737.127.633,03	10,11
4	2022	142.072.990.500,92	1.123.347.555.302,50	12,64
5	2023*)	94.896.771.922,65	1.236.286.270.150,50	7,67

Sumber: BKAD Kabupaten Dairi *) : LRA Sementara Tahun 2023 Un Audited

Dari tabel 3.14 di atas secara umum Rasio SiLPA kurun waktu 2019 – 2023 Kabupaten Dairi fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 10,99 persen, menurun di tahun 2020 menjadi 10,84 tahun 2021 juga menurun menjadi 10,11 persen tetapi ditahun 2022 naik menjadi 12,64 persen dan pada tahun 2023 menurun menjadi 7,67 persen.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Keuangan daerah juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dan hal yang tidak kalah pentingnya perlu dibangun kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur keuangan Kabupaten Dairi yang tertuang pada APBD Tahun Anggaran 2019 - 2023 terus meningkat dari tahun ke tahun, namun di Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana amanat

Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Beberapa komponen. Pendapatan dan Belanja terjadi pergeseran yang bertujuan untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19 tersebut.

Disisi lain, peningkatan pendapatan dilakukan melalui upaya optimalisasi potensi pendapatan. Pendapatan tersebut menjadi sumber pembiayaan program-program prioritas daerah untuk mencapai target dan sasaran, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional; Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sejalan dengan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab di atas, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah, dengan melihat performa realisasi pendapatan Tahun 2019 hingga Tahun 2023 pada masa yang akan datang. Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Pada perencanaan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dirumuskan beberapa kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

A. Peningkatan Pajak Daerah

- a. Perubahan dan Penyempurnaan peraturan-peraturan terkait Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
- c. Pemutakhiran dan penyempurnaan data potensi Pajak Daerah;
- d. Penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM;
- f. Peningkatan kelembagaan.

B. Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain:

- a. Penyusunan regulasi (Perda) terkait Retribusi Daerah;
- b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara profesional untuk peningkatan Retribusi Daerah.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari deviden atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan juga BUMN. Peningkatan fiskal daerah salah satunya adalah dengan mendorong peningkatan kontribusi BUMD pada Pendapatan Daerah.

D. Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer. Pemerintah Kabupaten Dairi memenuhi aspek kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan. Kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan tujuan Pemerintah Pusat

yaitu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.. Pemerintah Kabupaten Dairi mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Insentif Daerah (DID) diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan public dan mendukung program prioritas nasional.

Seluruh Kebijakan Pendapatan Daerah diformulasikan ke dalam target Pendapatan Daerah sehingga diperoleh proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 – 2026 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.15 Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

No	Uraian	2024	Proyeksi		Pertumbuhan	
		Anggaran APBD	2025	2026	2025	2026
4.1	Pendapatan asli daerah	87.038.825.000	129.259.000.000	135.675.500.000	48,51	4,96
4.1.1	Pajak Daerah	32.647.000.000	27.982.000.000	29.469.200.000	-14,29	5,31
4.1.2	Retribusi Daerah	4.387.500.000	49.252.000.000	54.181.300.000	1.002,55	10,01
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.400.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	-3,51	0
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	38.604.325.000	41.025.000.000	41.025.000.000	6,27	0
4.2	Pendapatan Transfer	1.120.624.864.000	1.098.457.956.000	1.098.457.956.000	-1,97	0
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.071.522.624.000	1.056.358.718.000	1.056.358.718.000		
4.2.1.1	Dana Perimbangan	924.166.251.000	924.166.251.000	924.166.251.000		
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	19.898.470.000	19.898.470.000	19.898.470.000		
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	650.948.740.000	650.948.740.000	650.948.740.000		
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	253.319.041.000	253.319.041.000	253.319.041.000		
4.2.1.5	Dana Desa	132.189.467.00	132.189.467.000	132.189.467.000		
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah (DBH Provinsi)	49.102.238.000	42.102.238.000	42.102.238.000		
4.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil	49.102.238.000	49.102.238.000	49.102.238.000		
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	13.326.637.000	13.326.637.000	13.326.637.000	0	0-
4.3.3	Lain Lain Pendapatan	13.326.637.000	13.326.637.000	13.326.637.000	-	-
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.220.990.326.000	1.241.043.593.000	1.247.460.093.000	1,64	0,51

sumber: BKAD Kabupaten Dairi

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2019-2023, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2025–2026 diatas disusun dengan berbasis pada asumsi:

- a. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat pada tahun 2025 dan tahun 2026.
- b. Dalam proyeksi pendapatan transfer tahun 2025-2026 diasumsikan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 dan 2026 dengan asumsi adanya penurunan transfer dana insentif daerah.
- c. Kondisi perekonomian yang sudah membaik pasca Pandemi Covid menyebabkan pertumbuhan ekonomi sudah mulai normal walaupun masih dipengaruhi faktor global lainnya. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi diasumsikan berkisar 4 persen– 6 persen.
- d. Asumsi Inflasi Kabupaten Dairi yang digunakan untuk proyeksi adalah 2 persen – 4 persen.
- e. Proyeksi total pendapatan menurun ke tahun 2025 dan meningkat sebesar 0, 54 persen pada tahun 2026.

Tabel 3. 15 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026*Sumber: BKAD Kabupaten Dairi*

No	Uraian	2024	2025	2026
		Anggaran	Proyeksi	Proyeksi
5.1	Belanja Operasi	927.437.749.206,00	741.096.551.000,00	743.096.551.000,00
5.1.1	Belanja pegawai	558.576.948.783,00	558.576.949.000,00	558.576.949.000,00
5.1.2	Belanja barang dan jasa	322.870.566.423,00	176.730.386.000,00	176.730.386.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	45.990.234.000,00	5.789.216.000,00	5.789.216.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
5.2	Belanja Modal	144.415.708.794,00	131.973.535.000,00	131.973.535.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	200.625.612.000,00	200.625.612.000,00	200.625.612.000,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	198.455.612.000,00	198.455.612.000,00	198.455.612.000,00
TOTAL JUMLAH BELANJA		1.276.479.070.000,00	1.079.695.698.000,00	1.081.695.698.000,00

Pada Tabel 3.16 di atas terlihat bahwa Belanja Daerah pada tahun 2025 dan 2026 diasumsikan untuk belanja operasi mengalami penurunan karena menurunnya belanja barang dan jasa, belanja hibah dibandingkan dengan tahun 2024, demikian juga halnya belanja modal, tetapi belanja tidak terduga mengalami kenaikan. Untuk belanja transfer diasumsikan ditahun 2025 dan 2026 dengan tahun 2024. Secara umum kebijakan belanja pada tahun 2025–2026 diarahkan untuk memperbesar belanja pembangunan dengan terus ditingkatkannya alokasi belanja modal.

Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
2. Pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan pemerintah pilihan serta penunjang pemerintahan ;
3. Upaya Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% (diluar gaji), dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti;
4. Bantuan sosial untuk menyentuh kaum marginal dalam rangka pembangunan modal social dengan pendekatan inklusifitas;
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.

2. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Transfer Dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

Pada jenis pengeluaran pembiayaan sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah melalui penyertaan modal (investasi daerah) kepada Badan Usaha Milik Daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diantaranya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan dalam rangka mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan laba dan/atau keuntungan diproyeksikan pemberian Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Pembiayaan Daerah untuk tahun 2025-2026 diproyeksikan menurun setiap tahunnya dengan rata-rata -24,36 persen pertahun. Pada sisi penerimaan pembiayaan dari sumber Silpa diproyeksikan menurun setiap tahun dengan rata-rata -27,47 persen dengan pertimbangan adanya kebijakan pemerintah bahwa sisa anggaran yang sudah ditentukan penggunaannya akan

diperhitungkan penyaluran tahun berikutnya. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025– 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 16 Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 s.d Tahun 2026

No.	Uraian	2024	2025	2026	Rata Rata Pertumbuhan
		Target APBD	Proyeksi	Proyeksi	%
SURPLUS / DEFISIT					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	58.513.744.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	(24,36)
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	58.513.744.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	(24,36)
3.1.2	Pinjaman	-	-	-	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.2	Pengeluaran pembiayaan	3.025.000.000 ,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3.025.000.000 ,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Bunga Pinjaman				
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
		3.025.000.000 ,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO					
		55.488.744.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(27,47)

Sumber: BKAD Kabupaten Dairi

Tabel 3. 17 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2026
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Daerah	1.241.043.593.000,00	1.247.460.093.000,00
Pendapatan Asli Daerah	129.259.000.000,00	135.675.500.000,00
Pajak Daerah	27.982.000.000,00	29.469.200.000,00
Retribusi Daerah	49.252.000.000,00	54.181.300.000,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	41.025.000.000,00	41.025.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.098.457.956.000,00	1.098.457.956.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.056.358.718.000,00	1.056.358.718.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah (DBH Provinsi)	42.102.238.000,00	42.102.238.000,00
Lain - lain pendapatan daerah yang sah	13.326.637.000,00	13.326.637.000,00
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Total Penerimaan	1.271.043.593.000,00	1.277.460.093.000,00
Dikurangi :		
Belanja Operasi	741.096.551.000,00	743.096.551.000,00
<i>Belanja pegawai</i>	558.576.949.000,00	558.576.949.000,00
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	176.730.386.000,00	176.730.386.000,00
<i>Belanja Hibah</i>	5.789.216.000,00	5.789.216.000,00
<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	-	-
Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
<i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa</i>	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00
Belanja Transfer	200.625.612.000,00	200.625.612.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Kapasitas riil kemampuan keuangan	318.321.430.000,00	322.737.930.000,00

Sumber: BKAD Kab Dairi (data diolah)

Analisis data diatas adalah untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diperlihatkan pada Tabel selanjutnya dapat ditentukan kerangka pendanaan seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 18 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

No	Uraian	2025		2026	
		%	Rp.	%	Rp.
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	100,00	318.321.430.000	100,00	322.737.930.000
1	Prioritas I	50,00	159.160.715.000	50,00	161.368.965.000
2	Prioritas II	30,00	95.496.429.000	30,00	96.821.379.000
3	Prioritas III	20,00	63.664.286.000	20,00	64.547.586.000

Sumber: Bappeda Kabupaten Dairi (data diolah)

Prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai berikut:

1. **Prioritas I.** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. **Prioritas II.** dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja mendukung keselarasan prioritas nasional dan prioritas pembangunan daerah;
3. **Prioritas III.** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan kondisi Kabupaten Dairi dan capaian kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah dan merumuskan isu strategis kabupaten.

1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Dairi diidentifikasi melalui data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Dairi dan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Dairi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup dengan layak dan memiliki pendapatan yang layak, masyarakat memerlukan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu.

Perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi SDM lokal untuk meningkatkan kemampuannya dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sebagai upaya meningkatkan kapabilitas SDM, pemerintah harus membenahi pelayanan dasar kepada masyarakat terlebih dahulu. Peningkatan kualitas SDM didukung oleh kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Dairi pada tahun 2023 mencapai angka 9,88. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat usia sekolah di Kabupaten Dairi merasakan pendidikan

selama 9,88 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Capaian tersebut juga telah berada di atas angka RLS Provinsi Sumatera Utara dan nasional, yakni selisih 0,06 poin di atas capaian provinsi dan 1,11 poin dibandingkan nasional. Dari sisi kesehatan, data pada tahun 2023 menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Dairi 74,13, bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara 73,67 capaian AHH Kabupaten Dairi dapat dikategorikan cukup bagus, namun dari segi fasilitas kesehatan yang tersedia masih perlu untuk ditingkatkan.

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dengan demikian tujuan utama dari kesejahteraan yaitu menurunnya tingkat kemiskinan. Indikatornya adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu umum baik secara global, nasional maupun daerah yang urgen untuk diselesaikan. Kemiskinan juga merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan hidup atau kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi selama periode 2019 hingga 2023 memiliki tren fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan karena dampak Covid 19. Namun pada tahun 2022 dan 2023 persentase penduduk miskin menurun di Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi terus berupaya untuk menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi dengan berbagai program dan kebijakan yang dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dairi.

3. Peningkatan kualitas infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagai langkah penting dalam memajukan sebuah daerah seperti Kabupaten Dairi. Infrastruktur yang baik membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan berbagai sektor. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan syarat penting dalam

menghubungkan masyarakat dengan pusat kegiatan. Kabupaten Dairi telah memiliki akses jalan yang menghubungkan antar kecamatan, namun mobilitas masyarakat masih terkendala karena infrastruktur jalan yang belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah terutama di wilayah pedesaan. Jaringan jalan yang mantap dan merata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mudah dalam mengakses pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.

Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar diantara yang lainnya yakni pengelolaan sumberdaya air. Kabupaten Dairi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat bahkan beberapa wilayah di Kabupaten Dairi terkategori wilayah rawan kekeringan. Selain pemenuhan air bersih untuk masyarakat, pemenuhan layanan sanitasi, jaringan drainase, persampahan, dan kebencanaan di Kabupaten Dairi saat ini juga belum terealisasi dengan optimal. Sehingga, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Dairi perlu untuk terus ditingkatkan dan perlu direspon dengan baik guna menjamin masyarakat dapat hidup dengan layak. Terlebih lagi, adanya potensi pertambahan jumlah penduduk hingga tahun 2045, juga perlu diantisipasi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai.

4. Optimalisasi manajemen ASN dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi

Optimalisasi manajemen ASN dan inovasi pelayanan publik berbasis digital menjadi isu strategis ke depan. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks ini output yang diharapkan adalah ASN yang profesional dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi manajemen ASN didasarkan pada *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK. ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core values* tersebut menjadi titik tonggak penguatan ASN di Kabupaten Dairi saat ini dan di masa mendatang.

Inovasi pelayanan publik berbasis digital menjadi tuntutan di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat dan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut supaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih berkualitas. Inovasi dalam pelayanan publik menjadi instrumen dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi dibutuhkan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berkualitas melalui ide-ide yang kreatif dari ASN. Sementara digitalisasi pemerintahan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan responsifitas terhadap pelayanan publik. Hal penting yang perlu diperhatikan dari digitalisasi, yaitu digitalisasi dilihat sebagai instrumen bukan tujuan, sehingga penerapan inovasi dan digitalisasi dalam pemerintahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

5. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Dairi yang tertuang dalam RPD Kabupaten Dairi 2025-2026 yang dituangkan dan disajikan berdasarkan masing-masing urusan, yakni sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Permasalahan Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan		
	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Pemenuhan Layanan Mutu Pendidikan Belum dilaksanakan secara maksimal	Belum meratanya pemenuhan kebutuhan guru
			Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
			Belum meratanya cakupan akses pelayanan pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Kesehatan		
	Belum optimalnya upaya pengelolaan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan kesehatan perorangan	Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan pelayanan
		Belum optimalnya mutu layanan kesehatan	Belum optimalnya sarana pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi paripurna
		Belum optimalnya upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan	Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita	Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar
			Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
			Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
			Belum optimalnya sistem drainase pada daerah genangan air
	Belum optimalnya Penyelenggaraan penataan ruang	Belum termutakhirkannya dokumen regulasi rencana tata ruang	Penyusunan regulasi perubahan rencana tata ruang dalam proses penyusunan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Belum optimalnya pemenuhan permukiman layak huni	Masih adanya rumah tidak layak huni	Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak huni miskin
		Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan
			Masih adanya permukiman kumuh

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kesadaran masyarakat akan PHBS masih rendah
			Masih adanya rumah yang belum memiliki akses sanitasi
			Masih adanya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten
			Masih adanya rumah yang belum memiliki akses air minum
		Belum optimalnya akses air minum masyarakat	Masih kurangnya infrastruktur air minum dan sanitasi
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan		
	Masih banyaknya pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya pengawasan galian C
			Belum optimalnya monitoring ijin usaha sesuai kewenangan kabupaten
			Belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait (BAPENDA, Dinas Sosial, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas PMPTSPK, Dinas Lingkungan Hidup)
			Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pemadam kebakaran	Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih
			Terbatasnya jumlah pos damkar
			Belum optimalnya penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
			Masih kurangnya Ketahanan Daerah dalam menghadapi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Bencana		tinggal di daerah rawan bencana
			Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
			Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat
			Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat
6	Sosial		
	belum optimalnya penanganan PPKS	Belum Optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	kurangnya koordinasi antara pengguna dan pengampu data PPKS dan PSKS (DTKS) kewilayahan
			Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin dan kelompok rentan
		Belum Optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial	Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
		Belum Optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Belum optimalnya Validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
		Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja belum optimal	Belum tersedianya database tenaga kerja
		Mutu tenaga kerja yang Relatif Rendah	Minimnya Ketrampilan tenaga kerja
		Kurangnya Akses Tenaga Kerja Pada Pasar Kerja	Informasi Peluang Kerja dan Mekanisme Penempatan Tenaga kerja Belum Sepenuhnya dipahami Oleh Masyarakat
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Belum optimalnya Kesetaraan Gender	belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan politik
			Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	belum optimalnya layanan perlindungan anak	Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap anak
			Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak
3	Pangan		
	Belum terpenuhinya Ketersediaan pangan yang berkualitas	Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan	Belum tersedianya data neraca bahan makanan dan data cadangan pangan
		Belum optimalnya ketersediaan pangan	Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan
			Infrastruktur lumbung pangan belum memadai
			Peningkatan Kapasitas kelompok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) belum memadai
		Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan	Kurangnya sosialisasi tentang konsumsi makanan B2SA (Berimbang, Bergizi, Sehat dan Aman)
Masih adanya pangan tidak aman	Belum optimalnya penanganan dan pengawasan		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		yang beredar di masyarakat	keamanan pangan Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan
4	Pertanahan		
	Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Belum tercapai kesepakatan dalam proses penataan tanah dan belum lengkapnya dokumen sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum
5	Lingkungan Hidup		
	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya penanganan pencemaran air, tanah dan udara	Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri, domestik dan transportasi
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya pengurangan sampah
			Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah)
		Berkurangnya tutupan lahan hijau	Kurangnya Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup alih fungsi lahan hijau Adanya eksploitasi alam yang merusak lingkungan
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum semua penduduk di Kabupaten Dairi memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap	Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya dokumen administrasi kependudukan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya pelaporan peristiwa kependudukan
		Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan
			Masih terbatasnya Perangkat Daerah yang menggunakan data kependudukan dalam pelayanan publik
7	Perhubungan		
	Belum Optimalnya Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana transportasi	Prasarana keselamatan lalu lintas yang belum memenuhi standar keselamatan
			Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas
			Belum optimalnya penataan parkir
			Belum optimalnya kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala
		Belum optimalnya pemanfaatan prasarana transportasi	Kurangnya kesadaran pengguna jalan mematuhi rambu-rambu lalu lintas
8	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Belum Optimalnya tatakelola pemerintahan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas aparatur pemerintah desa	Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa	
		belum optimalnya sarana prasarana desa	Belum optimalnya pemanfaatan dana desa
		Kurangnya peran kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan desa	kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Belum optimalnya pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE	usia perkawinan dibawah umur
		pengendalian penduduk dan KB	Masih rendahnya kesadaran untuk ber-KB
		sesuai kearifan budaya lokal	Masih rendahnya penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang
		Belum optimalnya Ketahanan keluarga	Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
10	Komunikasi dan Informatika		
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	Koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal
			Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional
			Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE
			Belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
	Keterbukaan Informasi Publik belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat
			Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik
			Belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi publik.
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
	Kontribusi sektor koperasi dan UKM belum optimal	Kualitas koperasi belum optimal	Rendahnya Kapasistas Pengelola Koperasi
		Rendahnya omzet	Kapasitas produksi usaha

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		usaha mikro	mikro masih kurang Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro
12	Penanaman Modal		
	Kurangnya daya tarik investasi	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan
			Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan
		Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal	Belum optimalnya pelaksanaan kemudahan investasi
			Ketersediaan informasi peluang potensi investasi yang belum optimal
			Belum optimalnya promosi investasi
			Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal
13	Kepemudaan dan Olahraga		
	Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Masih rendahnya partisipasi pemuda	Masih rendahnya pembinaan pemuda
		Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih rendahnya pembinaan dalam bidang olahraga
14	Statistik		
	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia	Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral
15	Persandian		
	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Tingginya risiko keamanan informasi pemerintah daerah	Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
			Belum adanya sistem kerja /

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
			kerangka kerja keamanan informasi terstandar	
16	Kebudayaan			
	Belum Optimalnya Pelestarian kebudayaan daerah	Belum Optimalnya pelestarian obyek pemajuan	Belum Optimalnya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah	
			Belum Optimalnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah	
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah	
			Belum Optimalnya Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah	
		Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Belum Optimalnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah	
			Belum optimalnya Pelindungan Cagar Budaya	
			Belum Optimalnya Pengembangan Cagar Budaya	
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Cagar Budaya	
			Belum Optimalnya Pengelolaan Permuseuman	Belum tersedianya museum
16		Perpustakaan dan Kearsipan		
	Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan	Belum optimalnya akses layanan perpustakaan	Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
			Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca	
			Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan yang berkualitas	
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan	Belum optimalnya mutu pengelolaan	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Arsip	arsip	baku
		Belum optimalnya akses layanan arsip	Belum optimalnya pemanfaatan arsip
III	Urusan Pilihan		
1	Pertanian dan Perikanan		
	Rendahnya produksi hasil pertanian	Produksi pertanian belum optimal	Sarana prasarana dan infrastruktur pertanian belum memadai
			Adanya serangan hama/ penyakit tanaman
			Kapasitas SDM dan kelembagaan petani belum memadai
	Rendahnya produksi hasil perikanan	Produksi perikanan belum optimal	Sarana perikanan budidaya dan tangkap belum memadai
2	Pariwisata		
	Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	Belum optimalnya pemasaran pariwisata
			Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata
			Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif
3	Kehutanan		
	-	-	-
4	Perdagangan dan Perindustrian		
	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Volume perdagangan bersih belum optimal	Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan
			Rendahnya pertumbuhan ekspor
			Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan
	Belum optimalnya kontribusi sektor industri	Pertumbuhan industri pengolahan belum optimal	Pertumbuhan industri kecil menengah belum optimal
IV	Penunjang Urusan		
1	Sekretariat Daerah		
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan	Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Masih terbatasnya kapasitas SDM perumus kebijakan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kinerja pembangunan daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah
			Belum optimalnya pengendalian internal pemerintah
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Masih kurangnya pelayanan yang inklusif dan partisipatif
			Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan
2	Sekretariat DPRD		
	Belum optimalnya kapasitas Lembaga DPRD dalam pelaksanaan tugas	Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas	Belum optimalnya fungsi legislasi yang menjadi mandat DPRD
			Belum optimalnya fungsi penganggaran yang menjadi mandat DPRD
			Belum optimalnya fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi mandat DPRD
3	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
	Belum optimalnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
			Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid
			Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum optimalnya sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum optimalnya integrasi antar urusan dalam penyusunan dokumen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			perencanaan
			Belum optimalnya kinerja sumberdaya yang dimiliki dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah
	Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis riset dan inovasi	Belum optimalnya tema prioritas riset dan inovasi yang disusun	Belum optimalnya sinkronisasi hasil riset dan inovasi dengan program daerah
			Belum optimalnya kontribusi stakeholders dalam riset dan inovasi daerah
4	Keuangan		
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah	Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah utamanya pada pengelola pendapatan
			Belum optimalnya kualitas data base pajak daerah/ retribusi daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan
			Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalian pendapatan daerah
			Belum efektifnya penarikan pajak pada semua obyek pajak
			Belum optimalnya kualitas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan
			Belum tersedianya data base pemanfaatan asset daerah
			Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah
5	Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan		
	Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Dairi	Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit manajemen ASN	Belum adanya kebijakan perencanaan kebutuhan ASN di tingkat Pemerintah Daerah yang valid dan konsisten.
			Belum adanya kebijakan pengembangan Karir ASN di tingkat Pemerintah Daerah
			Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian di tingkat Pemerintah Daerah dengan K/L
	Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Dairi	Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN.	Belum adanya perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas setiap ASN di tingkat Pemerintah Daerah
6	Pengawasan		
	Belum optimalnya kapabilitas APIP	Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan	Beban tugas APIP melebihi kapasitas
		Kompetensi SDM APIP belum memenuhi standar	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM APIP
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Manajemen kinerja belum terimplementasi-kan secara memadai
		Praktik pengawasan belum memenuhi	Lemahnya pengendalian internal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		standar	
		Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemerintah Daerah terhadap APIP	Kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antara manajemen Pemerintah Daerah dengan APIP
	Kurang efektifnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah	Kurang optimalnya pengawasan internal
		Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum efektifnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat
		Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi	Kurangnya internalisasi nilai-nilai anti korupsi
			Belum optimalnya budaya sadar risiko
V	Unsur Kewilayahan		
	Kurangnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Pengelolaan Administrasi Data Kinerja Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan perencanaan, evaluasi pelaporan dan keuangan Kecamatan
			Belum optimalnya pemenuhan administrasi umum perkantoran
			Belum optimalnya sarana prasarana penunjang perkantoran
	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Desa	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan Desa belum sesuai standar
			Belum optimalnya kapasitas aparat Pemerintah Desa
			Kualitas penyusunan dokumen keuangan Desa belum sesuai standar
			Belum optimalnya keterwakilan unsur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>masyarakat dalam musrenbang</p> <p>Kurangnya sinergitas kerjasama antar Desa</p>
	<p>Belum Optimalnya kualitas pembangunan di Wilayah</p>	<p>Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>Belum Optimalnya kondisivitas wilayah</p> <p>Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan</p> <p>Belum Optimalnya penyelesaian masalah-masalah aktual di wilayah kecamatan</p> <p>Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan</p> <p>Belum Optimalnya penyelesaian masalah-masalah actual di wilayah kecamatan</p> <p>Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan</p> <p>Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial di Kecamatan</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada Camat</p>
VI	Unsur Pemerintahan Umum		
	<p>Masih lemahnya harmoni sosial</p>	<p>Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik</p>	<p>Belum optimalnya pemahaman pengurus partai politik dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik</p> <p>Masih rendahnya pengetahuan masyarakat</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			tentang pendidikan, budaya politik dan etika politik
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Belum optimalnya fungsi tim pengawasan organisasi kemasyarakatan
			Masih tingginya organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami tugas dan fungsinya

4.1 Isu Strategis

Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Dairi berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia internasional, nasional maupun regional. Isu strategis bersifat penting, mendasar, dan berdampak di masa mendatang. Isu strategis merupakan potensi daerah yang belum terkelola dengan baik. Apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi suatu keuntungan bagi wilayah.

4.1.1 Isu Strategis Global

Beberapa kondisi atau isu global telah diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan di tingkat daerah, meliputi:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan isu yang berangkat dari kesepakatan internasional yang secara nasional telah direspon dengan kebijakan berupa Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi titik baru pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan sebelumnya melalui Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi

ke generasi berikutnya. TPB/SDGs memuat berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju dan negara berkembang yang meliputi berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari empat pilar yaitu ; 1) Pembangunan Sosial; 2) Pembangunan Ekonomi; 3)Pembangunan Lingkungan; 4) Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Gambar 4. 1 Tujuan dan sasaran dalam SDG's

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Pembangunan Sosial;	1 Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
		2 Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
		3 Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
		4 Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
		5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
	Pembangunan Lingkungan	6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
		11 Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
		12 Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
		13 Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
		14 Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya samudera dan pesisir untuk pembangunan yang berkelanjutan.
	15 Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	
	Pembangunan Ekonomi	7 Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
		8 Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
		9 Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
		10 Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara.
		17 Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.
	Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	16 Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Tujuh belas tujuan SDGs dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target SDGs tersebut menjadi mandat internasional yang bukan hanya harus

dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten.

2. Persaingan Sumber Daya Alam

Persaingan yang meningkat dalam mendapatkan sumber daya alam yang didukung oleh meningkatnya kekuatan ekonomi di Asia, memberikan tantangan penting bagi perencanaan jangka panjang Kabupaten Dairi. Hal ini memerlukan alokasi sumber daya yang tepat dan kebijakan berkelanjutan untuk memastikan akses yang adil dan memitigasi potensi ketegangan antar pihak masyarakat yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya. Mengintegrasikan permasalahan ini ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi perlu dilakukan guna mencegah eksploitasi berlebihan dan penipisan sumber daya primer. Selain itu, hal ini juga meningkatkan ketahanan terhadap potensi gangguan pada rantai pasokan, serta mendorong inovasi dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

3. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim sangat penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang karena hal ini berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan hidup. Mengintegrasikan isu iklim dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi mendorong terciptanya lingkungan hidup yang berketahanan dan berkelanjutan. Integrasi ini mendorong inovasi yang berkelanjutan guna mendorong kualitas hidup masyarakat, seperti terciptanya kualitas udara yang baik dan ketahanan pangan yang terjamin.

4. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan sebutan untuk perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini yang semakin massif dan memberikan dampak signifikan bagi sektor publik. Banyak pihak memprediksi bahwa kekuatan revolusi industri 4.0 akan mampu meningkatkan otonomi warga negara dan juga mereduksi praktik-praktik tradisional dalam berpemerintahan. Keterbukaan akses yang lebih luas terhadap data-data publik dan

mampu memproduksi serta menyebarkan isu-isu publik ke khalayak. Ekspektasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga semakin meningkat akibat adanya tuntutan efisiensi dan kecepatan pelayanan, otomatisasi pelayanan publik, serta penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek pembangunan.

Pada level daerah, digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi ekonomi juga memberikan tantangan dan peluang. Disektor pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan perizinan yang lebih responsif. Namun tantangan pada sisi infrastruktur dan kesiapan SDM menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Demikian halnya dengan peluang ekonomi digital yang terus tumbuh di daerah. Kendala terbesar yang dihadapi adalah kualitas SDM dan juga jaringan internet yang tidak memiliki kualitas setara di berbagai daerah. Isu ini harus menjadi pedoman bagi daerah dalam perumusan isu dan kebijakan strategis di masa yang akan datang.

5. Geopolitik dan Geoekonomi

Mengingat meningkatnya persaingan antar negara dan munculnya kekuatan global baru, serta negara-negara berkembang yang kini berkontribusi terhadap 71 persen perekonomian global, maka penting untuk mengintegrasikan geopolitik dan geoekonomi ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Jika tidak dimitigasi dengan baik, ketegangan geopolitik dan persaingan ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan, perselisihan perdagangan, dan bahkan konflik. Dinamika kedua aspek ini secara strategis dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Dairi sebagai peluang pertumbuhan ekonomi dan kerja sama. Hal ini mempertimbangkan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Kabupaten Dairi yang mampu berekspansi hingga luar negeri. Dengan memasukkan aspek geopolitik dan geoekonomi ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, arah kebijakan secara proaktif dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya lintas batas, meningkatkan hubungan perdagangan antar wilayah, dan strategi

peningkatan kualitas SDM guna menjamin produktivitas ekonomi dan perdagangan Kabupaten Dairi.

4.1.2 Isu Strategis Nasional

Pemerintah nasional telah menyusun dokumen perencanaan 20 tahun yang dinilai dari tahun 2025 hingga tahun 2045 dengan rumusan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merupakan visi Indonesia yang merangkum rencana pembangunan nasional pada rentang tahun 2025-2045. Penggunaan terminologi Negara Nusantara merujuk pada negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti rendahnya produktivitas sumber daya manusia, IPTEKIN dan riset yang lemah, adanya deindustrialisasi dini dan rendahnya produktivitas pertanian, pariwisata di bawah potensinya, ekonomi laut yang belum optimal, kecilnya kontribusi UMKM dan koperasi, rendahnya infrastruktur dan literasi digital, pembangunan yang belum berkelanjutan, terbatasnya integrasi domestik, kualitas sumber daya manusia yang makin rendah, tata kelola pemerintahan yang belum optimal, masih lemahnya kepastian dan penegakan hukum, demokratisasi yang belum optimal, dan adanya kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa.

1. Produktivitas Rendah

Indikator *Total Factor Productivity* (TFP) selama periode tahun 2005-2019 menunjukkan angka pertumbuhan negatif, yakni menurun sebesar 0,66 poin. Indikator TFP menggambarkan rata-rata tingkat produktivitas di Indonesia. Rendahnya angka produktivitas di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, seperti sumber daya manusia yang kurang berkualitas, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, tertinggalnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan belum optimalnya sistem kelembagaan meliputi penghargaan dan hukuman, serta diperparah dengan lemahnya kepastian hukum. Dampak dari rendahnya produktivitas sumber daya manusia kemudian mengakibatkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan

ekonomi Indonesia yang mulanya mencapai 5,7 persen selama periode tahun 2005 hingga 2010, kemudian menjadi hanya 4 persen pada 2015 hingga 2022. Kondisi itu diperparah dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial pada saat pandemi Covid-19 yang mencapai di bawah 5 persen. Isu ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan apabila ingin menyongsong Indonesia Emas 2045.

2. IPTEKIN dan Riset Lemah

Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) merupakan salah satu hal krusial untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. IPTEKIN berperan melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, pengembangan IPTEKIN di Indonesia selama ini terhambat oleh setidaknya dua hal, yakni rendahnya komitmen pemerintah terkait anggaran, ditambah dengan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Indonesia tercatat hanya menyediakan anggaran untuk IPTEKIN sebesar 0,28 persen dari PDB dan angka tersebut hanya 26,92 persen dari persentase anggaran yang disediakan oleh Malaysia, serta 5,82 persen dari anggaran Korea Selatan. Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk di Indonesia hanya mencapai 388 jiwa, sedangkan Singapura mencapai 7.287 jiwa.

Ekosistem riset dan inovasi di Indonesia ikut berkontribusi dalam lemahnya IPTEKIN dan riset karena cenderung kurang kondusif. Hal itu tampak dari lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, baik secara domestik maupun internasional. Kurangnya kerja sama pada ranah riset dan industri juga sedikit banyak dikarenakan tingkat kesadaran ilmiah di masyarakat yang masih lemah, sehingga keinginan untuk melakukan penelitian juga cenderung rendah.

3. Deindustrialisasi Dini dan Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian

Indonesia saat ini mengalami deindustrialisasi dini. Deindustrialisasi merupakan suatu kondisi industri yang tidak dapat lagi berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian di suatu negara. Deindustrialisasi ditandai dengan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang terus

melemah. Terdapat beberapa penyebab semakin melemahnya kontribusi manufaktur terhadap PDB, yakni adanya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, serta tingginya biaya ekonomi akibat logistik dan tingkat suku bunga.

Masalah serupa juga terjadi pada sektor pertanian. Produktivitas sektor pertanian terus mengalami penurunan, yakni dari semula Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 dan menjadi hanya 22,9 juta pada tahun 2022. Penurunan produktivitas pertanian juga memengaruhi kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, yakni mengalami penurunan sebesar 9,07 persen selama periode 2005 hingga 2022.

4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata Indonesia tersebar di banyak daerah, namun kinerja pariwisata selama ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan dari potensi pariwisata yang ada, terutama apabila dilihat melalui keterbatasan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A), serta rendahnya kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan. Pada sisi lain, adanya disrupsi digital dan teknologi juga memengaruhi proses pemanfaatan potensi pariwisata, terutama terkait promosi daya tarik wisata, sehingga perlu dilakukan proses percepatan dari pemanfaatan teknologi pada sektor pariwisata. Hal serupa juga terjadi pada industri kreatif yang menuntut adanya transformasi digital, komersialisasi, dan perluasan akses ke pasar internasional.

5. Ekonomi Biru Belum Optimal

Indonesia yang termasuk sebagai negara maritim memiliki banyak potensi dari sektor kelautan, termasuk ekonomi biru yang dapat menciptakan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Penggunaan terminologi ekonomi biru karena merujuk pada pernyataan Bank Dunia yang mendefinisikan ekonomi biru sebagai upaya pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Indonesia dengan potensi yang melimpah sampai saat ini belum dapat mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki, sehingga kontribusi sektor kelautan pada PDB hanya sebesar 7,60 persen. Terdapat beberapa hal yang memengaruhi optimalisasi dari sektor kelautan, seperti belum optimalnya proses manajemen wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, terbatasnya diversifikasi industri yang memanfaatkan kekayaan laut, serta minimnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Tantangan lainnya yang juga harus diperhatikan adalah rendahnya penanganan plastik di laut, tingginya kegiatan *illegal, unreported, dan unregulated fishing* (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

6. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi selama ini berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia, yakni mencapai 99,99 persen untuk UMKM, dan 96,92 persen untuk koperasi pada tahun 2019. Namun, penyerapan tenaga kerja yang besar tidak serta merta linier dengan kontribusi UMKM dan Koperasi pada PDB. Tercatat kontribusi UMKM pada PDB hanya mencapai 60,51 persen dan 1,07 persen untuk koperasi pada tahun 2019. Hal itu dikarenakan ada begitu banyak UMKM dan koperasi yang mempekerjakan sumber daya manusia berkeahlian rendah, bergerak di sektor dengan nilai tambah rendah, minimnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, terbatasnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan terbatasnya jumlah koperasi yang bergerak pada sektor riil.

Perekonomian Indonesia secara makro memang dapat dikatakan cukup solid di tengah ketidakpastian global saat ini, namun tetap diperlukan perencanaan terkait kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan. Selama ini ruang fiskal yang rendah dan kualitas belanja yang belum optimal mengakibatkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan. Pada sisi lain, kebijakan

moneter juga dihadapkan oleh adanya ketidakstabilan harga di tengah volatilitas harga komoditas pasar global, sehingga berdampak pada risiko tekanan inflasi di Indonesia.

7. Minimnya Infrastruktur dan Rendahnya Literasi Digital

Indonesia masih mengalami keterbatasan secara kapasitas dan kapabilitas dari sisi penawaran, permintaan dan ekosistem digital. Keterbatasan dari sisi penawaran selama ini terkait pada infrastruktur yang belum memadai, seperti terbatasnya kapasitas data center dan rendahnya penerapan kebijakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Kemudian dari sisi permintaan, literasi digital dan pemanfaatan teknologi dari luar negeri yang tidak produktif menjadi salah satu masalah utama. Hal itu menyebabkan tingginya angka penetrasi jaringan tidak serta merta mampu mendorong proses pembangunan karena penggunaannya mayoritas untuk hiburan. Kondisi ekosistem yang juga tidak mendukung proses percepatan digitalisasi, riset, dan inovasi juga memengaruhi kapasitas dan kapabilitas digital di Indonesia, ditambah dengan isu keamanan siber yang belum memadai.

8. Pembangunan Belum Berkelanjutan

Visi Indonesia Emas 2045 harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam proses pembangunan yang dicanangkan sebelumnya. Selama ini, proses pembangunan di Indonesia cenderung hanya melihat dampak jangka pendek, sehingga mengabaikan aspek keberlanjutan. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari masih tingginya penggunaan energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, yakni mencapai 87,1 persen. Ketergantungan Indonesia akan energi fosil sesungguhnya telah mengalami penurunan. Hal itu ditandai dengan peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan yang mencapai 8,06 persen selama periode 2005 hingga 2022, namun tetap belum mencukupi standar pembangunan berkelanjutan karena masih sangat bergantung dengan energi tak terbarukan.

Tingginya angka ketergantungan Indonesia akan energi fosil juga mengakibatkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif, seperti pembukaan lahan yang menyebabkan deforestasi

dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Eksploitasi sumber daya alam dapat berlangsung dari waktu ke waktu karena minimnya upaya pemerintah dalam mengimplementasikan sistem penghargaan dan hukuman terhadap para pelaku ekonomi yang patuh maupun yang bertentangan dengan ekonomi hijau. Padahal ketahanan ekonomi hijau berbasis ekologi mampu menjadi kunci dalam upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk memanfaatkan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

9. Integrasi Domestik Terbatas

Indonesia menetapkan transformasi ekonomi domestik yang terintegrasi sebagai salah satu arah kebijakan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dasar dari penetapan itu adalah terbatasnya integrasi domestik di Indonesia akibat pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa. Sistem logistik yang tangguh menjadi salah satu dasar dalam perwujudan integrasi domestik di Indonesia. Namun, selama ini sistem logistik Indonesia terkendala keterbatasan infrastruktur konektivitas antara Pulau Jawa dan luar Jawa, banyaknya regulasi yang menjadi hambatan, serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di luar Pulau Jawa, sehingga mengakibatkan tingginya biaya logistik antar wilayah.

Integrasi domestik tidak hanya terjadi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa, melainkan terjadi pula di perkotaan. Pertumbuhan ekonomi perkotaan cenderung tidak elastis karena terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan sekitarnya, sehingga pembangunan yang dilaksanakan cenderung hanya berada pada titik tertentu dan menimbulkan ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

10. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Bonus demografi yang akan dialami Indonesia selama menyongsong Indonesia Emas 2045 perlu dioptimalkan sebagai salah satu aspek utama penentu keberhasilan. Namun, selama rentang tahun 2005 hingga 2022, kualitas sumber daya manusia di Indonesia menunjukkan hasil yang semakin rendah, terutama dilihat dari sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pembangunan sektor kesehatan dari waktu ke waktu dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Transisi demografi juga mengakibatkan perubahan pola hidup dan tingkat kesehatan yang dihasilkan, seperti adanya pola penyakit baru yang mungkin terjadi di masyarakat. Saat ini, kondisi yang terjadi adalah belum meratanya akses dan kualitas kesehatan, adanya ketimpangan pada akses pangan, lingkungan sehat, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan belum adaptifnya sektor kesehatan pada perkembangan teknologi, serta belum optimalnya inovasi pembiayaan kesehatan.

Sektor kedua yang berpengaruh besar pada sumber daya manusia adalah pendidikan, terutama ketika berupaya mengoptimalkan bonus demografi. Dalam upaya mengoptimalkan bonus demografi melalui sektor pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, seperti layanan pendidikan yang belum merata, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di ranah global, dan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai pasar tenaga kerja. Layanan pendidikan yang belum merata juga dikarenakan oleh disparitas partisipasi pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi yang tinggi. Kemudian kualitas pendidikan dipengaruhi oleh terbatasnya sarana prasarana pendidikan dan persebaran guru yang tidak merata. Pada tataran yang lebih tinggi, nilai-nilai Pancasila juga belum sepenuhnya terimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, padahal hal itu mampu menjadi modal dasar pembangunan masyarakat melalui pendidikan keluarga. Berbagai kondisi tersebut kemudian secara tidak langsung menciptakan ekosistem pembelajaran yang kurang optimal, sehingga penduduk yang berpartisipasi di sektor pendidikan menjadi sumber daya yang kurang berkualitas dan tidak mampu memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan terkait sumber daya manusia adalah perlindungan sosial. Isu perlindungan sosial menjadi krusial karena proyeksi penduduk menunjukkan

bahwa struktur penduduk pada periode 2025-2045 akan berubah dan ditandai dengan bertambahnya rasio ketergantungan nasional. Oleh karena itu, isu terkait sarana prasarana maupun kebutuhan lain untuk kelompok lansia penting untuk diantisipasi sejak saat ini agar tidak menjadi beban dalam proses pembangunan kedepannya.

Tata kelola menjadi kunci dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tata kelola dapat mengintervensi melalui diadakannya kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

11. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Pada segi tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa hal yang belum dapat dioptimalkan hingga saat ini, seperti adanya regulasi yang berlebih dan ditambah dengan rendahnya kualitas regulasi, sehingga mengakibatkan terjadinya regulasi tumpang tindih pada skala nasional maupun daerah. Selain itu kelembagaan instansi publik selama ini masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif, sehingga mengakibatkan timbulnya ego sektoral dalam kerangka hubungan pemerintah. Tata kelola yang terkait proses bisnis juga belum mampu mengikuti kecepatan perubahan yang terjadi, sehingga dipandang tidak adaptif dan terkotak-kotakkan, serta menimbulkan inefisiensi. Pada problematika yang lebih tinggi, terjadi pula masalah kurang meratanya manajemen talenta di seluruh kementerian/lembaga/daerah, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, rendahnya budaya dan etos kerja, serta kuatnya mentalitas silo. Masalah manajemen talenta juga semakin rumit akibat adanya kerentanan yang dihadapi ASN terhadap intervensi politik. Meskipun pemerintah diminta untuk terbuka dalam proses penyelenggaraan kebijakan, namun selama ini prinsip keterbukaan yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Masalah tata kelola yang terjadi pada internal pemerintah secara tidak langsung berdampak pada output yang dihasilkan, seperti belum meratanya kualitas pelayanan publik, kemudian kualitas

pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan masyarakat, dan transformasi digital di tingkat pemerintahan dihadapkan masalah mendasar, seperti infrastruktur. Kurang optimalnya output yang diterima masyarakat kemudian menurunkan tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi.

12. Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Sistem hukum yang dijalankan di Indonesia belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dengan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, beberapa masalah strategis di bidang hukum yang harus dibenahi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 meliputi belum optimalnya pemulihan aset tindak pidana, masih tingginya potensi pelanggaran HAM, serta lemahnya pengawasan di internal maupun eksternal institusi penegak hukum.

13. Demokratisasi Belum Optimal

Demokratisasi secara harfiah dimaknai sebagai suatu proses dalam sistem suatu negara menuju bentuk demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi ternyata belum mampu merealisasikan dengan optimal, misalnya saja demokrasi pada aspek politik terbatas pada hal-hal yang bersifat prosedural, seperti pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Secara tidak langsung, hal itu menimbulkan adanya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers, kurangnya kebebasan sipil, dan semakin meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi. Beberapa hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

4.1.3 Isu Strategis Provinsi

Pada tingkatan regional, ditetapkan 4 isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan suatu elemen penting dalam perwujudan *Golden Generation* menuju 100 Tahun Indonesia

pada tahun 2045. Indonesia akan berada pada fase bonus demografi dimana terjadi peningkatan penduduk sebesar 70 persen pada usia produktif (16-65 tahun) sementara 30% persen merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045.

Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 14,8 juta jiwa (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022). Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan jumlah penduduk keempat tertinggi setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini menjadikan Sumatera Utara sebagai penyumbang Sumber Daya Manusia yang produktif dan melimpah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 170,9 juta jiwa dan diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 187,6 juta jiwa pada tahun 2025. Hal tersebut mempunyai konsekuensi pada pentingnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang produktif.

Dengan kuantitas penduduk yang lebih dari cukup, pembangunan yang membentuk *human capital* (modal manusia) seharusnya berjalan dengan optimal. Faktanya, kuantitas penduduk dengan peringkat keempat terbesar di Indonesia tidak menjadikan Sumatera Utara berada di jajaran provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia. Meskipun kuantitas penduduk Sumatera Utara berada di posisi keempat tertinggi, Indeks Pembangunan Manusia selama 2 tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata capaian IPM Nasional. Pada tahun 2021, IPM Sumatera Utara hanya menempati urutan ke-14 dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara itu, tahun 2022, Sumatera Utara berada pada urutan ke-15.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Untuk komponen pengetahuan yang direpresentasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Provinsi Sumatera Utara memiliki capaian indikator RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional, yaitu sebesar 9,71 tahun pada tahun 2022, dibandingkan dengan capaian Nasional

sebesar 8,54 tahun. Sedangkan untuk komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Utara juga lebih baik dibandingkan capaian Nasional yaitu sebesar 13,27 tahun pada tahun 2022 dengan capaian Nasional sebesar 13.08 tahun. Pencapaian dua komponen IPM ini memang lebih baik pada skala nasional , namun apabila dikomparasi secara relative regional, maka Provinsi Sumatera Utara masih merupakan peringkat ke -2 (dua) untuk Wilayah Sumatera, dibawah capaian Kepulauan Riau.

Optimalisasi Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan masih perlu ditingkatkan, khususnya pada indikator RLS dan HLS, yang direpresentasikan secara akumulatif pada indikator Indeks Pendidikan, melalui issue strategis antara lain pada pemerataan akses Pendidikan melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Sekolah Menengah, Kejuruan dan Khusus (Unit Sekolah Baru, Rehabilitasi sekolah dan fasilitas belajar mengajar sesuai dengan identifikasi kebutuhan daerah); peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM Guru Produktif di bidang keahliannya serta sejalan dengan kebijakan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan dan peningkatan mutu dilaksanakan melalui upaya revitalisasi SMK, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum vokasi (link and match) dengan DUDI, serta peningkatan jumlah lulusan vokasi yang diserap oleh Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara juga masih belum optimal, Derajat Kesehatan belum menjangkau seluruh penduduk. Kapasitas pelayanan kesehatan termasuk kesehatan ibu dan anak serta pelayanan reproduksi belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumatera Utara dibandingkan dengan capaian Nasional, UHH Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 69.61 th kondisi ini meningkat dibanding tahun 2021 (69.23 th), walaupun terjadi peningkatan UHH di Provinsi Sumatera Utara namun capaiannya masih lebih rendah di banding capaian nasional yaitu sebesar 71.57 pada tahun 2021 dan 71.85 pada tahun 2022.

Kesetaraan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia dan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara juga masih membutuhkan optimalisasi kesetaraan pembangunan gender dimana kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan masih relative tinggi, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, dimana IPM Perempuan pada tahun 2021 sebesar 69.08 dan Laki-laki sebesar 76.14. Selama periode 2011-2021, capaian IPM perempuan berhasil meningkat sebesar 5,21 poin, sedangkan IPM laki-laki meningkat sebesar 4,73 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Namun demikian, hingga 2021, posisi capaian IPM perempuan masih berada dibawah IPM laki-laki.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Penurunan kemiskinan adalah komponen penting dari ekonomi inklusif. Ini melibatkan pengurangan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan peluang ekonomi lainnya. Penurunan kemiskinan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial.

Arahan Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada 2024. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 (satu) pada pencapaian target global *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten agar dapat dibandingkan antar negara dan antar waktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*) di bawah US\$1,9 per hari.

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 1,41 persen atau sekitar 212. 810 jiwa, meningkat 0.02 point dibandingkan pada tahun 2021, sebesar 1,39 persen atau sekitar 208.060 jiwa. Peningkatan ini terjadi antara lain

disebabkan oleh belum mutakhirnya basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berimplikasi pada program penanggulangan kemiskinan yang belum tepat sasaran; masih dibutuhkan penguatan konvergensi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem dari seluruh Perangkat Daerah, sektor non Pemerintah serta stakeholders terkait; serta penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menjadi focus wilayah prioritas Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2024. Penetapan wilayah prioritas membantu memfokuskan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 baik dari sisi lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

Perekonomian Indonesia yang sudah mulai menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat tetapi masih ada yang belum pulih akibat dampak luka perekonomian (scaring effect) yang mengena pada sisi produksi yang mempengaruhi penurunan produktivitas tenaga kerja. Untuk itu, perlu upaya yang lebih serius khususnya pada penduduk usia kerja yang merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 11,03 juta orang, naik sebanyak 328 ribu orang dibanding Agustus 2020 dan naik sebanyak 161 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 7,67 juta orang (69,75 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 7,20 juta orang penduduk yang bekerja dan 473 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 159 ribu orang.

Penduduk bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 161 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak dua ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2021. Sementara itu, apabila dibandingkan kondisi Agustus 2020, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 320 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 355 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 35 ribu orang.

Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan solusi dalam bentuk Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Penumbuhan sektor UMKM dan IKM dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa kerja online. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani melalui produksi dan produktifitas pertanian

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pariwisata memiliki multiflyer efek ke berbagai sektor serta berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci penting dalam peningkatan daya saing sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi sektor pariwisata Sumatera Utara terhadap PDRB Sumatera Utara tercatat sebesar 6,57% pada Tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Sumatera Utara

memiliki potensi besar sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi baru badi Sumatera Utara. Namun, hal tersebut belum sejalan dengan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah merilis Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN), dimana Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi ke-14 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia dengan poin sebesar 3,548. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Utara mengupayakan untuk pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di sektor strategis Provinsi Sumut seperti sektor pariwisata maupun sektor lainnya (ekonomi kreatif, pertanian, perikanan dll).

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Penanganan permasalahan infrastruktur di Sumatera Utara pada masa pandemi tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih fokus pada kebutuhan masyarakat mengingat pada 2 (dua) tahun anggaran, pembangunan Sumatera Utara difokuskan pada penanganan Covid-19. Pada tahun-tahun berikutnya diperlukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur. Penyelesaian pertanahan dan tata ruang juga menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk diselesaikan. Selain itu, optimalisasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor Agraris, pembangunan dan pengelolaan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca serta penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi menjadi upaya pemenuhan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya penanganan risiko bencana juga menjadi fokus pemerintah Provinsi Sumatera Utara di karenakan saat ini Provinsi Sumatera Utara belum dapat meraih capaian resiko bencana yang rendah. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sumatera Utara, nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar

142,51 (sedang) dari sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 143,83 (Sedang). Ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif baik dari kesadaran masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana untuk mengurangi risiko bencana sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah Sumatera Utara memberikan fasilitasi dan kemudahan sesuai dengan kewenangannya kepada penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien. Infrastruktur dimaksud tidak terbatas pada gorong-gorong (ducting), tiang telekomunikasi (tower), tiang (pole) dan lubang kabel (manhole) untuk adapt digunakan secara bersama dengan biaya terjangkau. Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko. Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD.

Konsep pembangunan Karakter masyarakat yang tangguh juga ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana, saat ini Provinsi Sumatera Utara belum dapat meraih capaian resiko bencana yang rendah. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sumatera Utara, nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 142,51 (sedang) dari sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 143,83 (Sedang). Ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Inovatif

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah bentuk pemerintahan yang didambakan oleh setiap rakyat karena pemerintahan dijalankan secara bersih, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan melalui program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan, yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 memperoleh nilai 61,05 dengan kategori B dan pada Tahun 2021 memperoleh

nilai 62,07 dengan Kategori B. Indeks reformasi birokrasi Provinsi mengalami kenaikan 1,02 poin, namun belum sepenuhnya terinternalisasi ke seluruh Perangkat Daerah, khususnya dalam pembangunan budaya kerja.

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan opini laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 8 (delapan) kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut serta memberi dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan pencapaian kualitas pelayanan publik serta penataan kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendorong terlaksananya pemerintahan yang baik dan dipercaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan Sistem Perencanaan dan Pertanggungjawaban melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 memperoleh Nilai 62,79 dengan Predikat B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 63,89 dengan Predikat B. Hasil ini masih belum optimal yang disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Hal lain juga disebabkan karena kurangnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yang mampu menyusun laporan kinerja perangkat daerah sehingga laporan yang disusun belum dapat menyajikan laporan

kinerja yang memuat informasi atas evaluasi dan analisis capaian kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pelayanan Publik yang baik merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik harus terus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Sampai saat ini telah banyak yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun hasilnya belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan terutama teknologi dan informasi, yang memerlukan respon yang cepat. Hal ini dapat terwujud apabila aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat secara profesional melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara memuaskan. Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 memperoleh nilai 3,68 dengan Kategori B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 3,80 dengan Kategori B.

Tata kelola pemerintahan yang inovatif merupakan upaya untuk menuju keadaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik serta bermanfaat dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah 39,41 dengan kategori inovatif, dan pada tahun 2022 memperoleh skor 54,36 dengan kategori inovatif. Sedangkan persentase pemanfaatan hasil riset terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah sebesar 75%. Kurangnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan menyebabkan tidak optimalnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.

Inovasi merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Inovasi dilakukan sebagai upaya pembaruan terhadap prosedur dan birokrasi, serta kebijakan strategis dengan pendekatan yang lebih efisien, selektif, dan implementatif. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif ditinjau dari sudut pandang riset dan inovasi adalah dengan meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi melalui pelaksanaan penelitian tematik sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah (RPJMD) serta melaksanakan penelitian yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.1.4 Isu Strategis Kabupaten Dairi

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis untuk tahun perencanaan 2025 - 2026 yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan :

1. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini di daerah, salah satunya di Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi harus lebih bekerja keras untuk tetap bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Dairi. Perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan membentuk Tim Koordonasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Dairi melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 6/400.9.14/I/2023 tanggal 5 Januari 2023. Berdasarkan Permendagri nomor 53 tahun 2020 bahwasanya Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam RAT mengacu kepada Strategi Kebijakan Nasional penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Berdasarkan data

Statistik Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dairi pada tahun 2023 sebesar 7,47 lebih baik bila dibandingkan dengan data tahun 2022 yakni sebesar 7,88 dan data tingkat kemiskinan provinsi Sumatera Utara tahun 2023 sebesar 8,15

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pemetaan permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan Kabupaten Dairi telah menggambarkan berbagai permasalahan pokok. Selain itu, telaah beberapa dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menunjukkan isu strategis pembangunan Kabupaten Dairi di bidang sumber daya manusia. Secara umum, pemetaan masalah pada rumpun sumber daya manusia, sosial, dan budaya menunjukkan belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Dairi relatif dibandingkan daerah sekitar dan rata-rata provinsi.

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Dairi yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu; kualitas pendidikan yang belum optimal. Kualitas pendidikan tersebut salah satunya ditandai dengan belum optimalnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah Kabupaten Dairi pada tahun 2023 meningkat 0,08 tahun yakni dari 13,24 pada tahun 2022 menjadi 13,32, namun capaian ini masih dibawah harapan lama sekolah provinsi Sumatera Utara yakni 13,48. Kemudian rata-rata sekolah pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,16 tahun yakni dari 9,72 pada tahun 2022 menjadi 9,88 pada tahun 2023. Rata-Rata sekolah ini berada diatas rata-rata lama sekolah provinsi Sumatera Utara yakni 9,82. Sedangkan kinerja pemberdayaan perempuan juga masih relatif belum optimal dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2023 sebesar 62,57 persen. Berbagai persoalan tersebut berdampak signifikan terhadap kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, isu terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia ini layak menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi.

3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian di Kabupaten Dairi, pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan atau agenda prioritas yang dapat meningkatkan permintaan eksternal bagi daerah lain yang mengalami defisit ekonomi dan meningkatkan permintaan internal bagi daerah lain yang mengalami surplus ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi pada tahun 2023 sebesar 5,04% meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,21%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara yakni 5,01%. Pemerintah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.

Beberapa agenda prioritas daerah yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut: 1) penyediaan data dan informasi pembangunan dan statistik sektoral sebagai bahan analisis perumusan kebijakan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2) penumbuh kembangan industri kreatif Usaha Menengah dan Kecil (UMK) untuk memperluas peluang dan kesempatan kerja, 3) penumbuhkembangan inkubator bisnis dan *start up* di berbagai sektor usaha UMK diharapkan mendorong tumbuhnya sektor dan pelaku ekonomi (wirausahawan) baru melalui berbagai kegiatan 4) peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan pencapaian pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dan 5) perbaikan dan peningkatan kinerja PD Pasar dan peningkatan cakupan layanan usaha dengan menempatkan tenaga-tenaga profesional dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan agenda-agenda prioritas tersebut menjadi penentu bagi percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Dairi.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi

Isu strategis rumpun tata kelola Kabupaten Dairi yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan. Isu strategis tersebut diambil berdasarkan sinergitas kategori masalah pokok dari hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah dengan isu strategis rumpun tata kelola di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Misalnya terkait agenda pengendalian reformasi birokrasi yang belum optimal yang dapat dilihat dari belum optimalnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik, belum optimalnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah, serta belum optimalnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja.

Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi. Padahal, pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang diarahkan segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalam aspek pelayanan antar instansi pemerintah maupun dalam proses pelayanan publik. Sementara itu, realitas lapangan di Kabupaten Dairi menunjukkan belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Beberapa realitas lapangan di atas perlu direspon dalam pembangunan mendatang dengan sistem manajemen kinerja yang baik antara kepala daerah dengan perangkat daerah, pembangunan sistem pelayanan publik yang responsif serta pelaksanaan survei kepuasan layanan secara reguler. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dan inovasi antar pemangku kepentingan serta percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mengikuti tuntutan perkembangan jaman dan kebijakan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan pelayanan publik.

5. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Pembangunan Kabupaten Dairi memasuki periode akhir dari RPJPD Kabupaten Dairi. Hal ini berarti tujuan akhir pembangunan jangka panjang kabupaten harus dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Dairi yang dimuat dalam RPJPD. Perwujudan sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap dalam RPJMD memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.

Penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor pembangunan harus didukung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi yang terpadu. Mengingat pembangunan infrastruktur wilayah seringkali membutuhkan anggaran yang cukup besar, maka perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah mencakup peningkatan konektivitas baik kualitas jalan dan jembatan maupun pengelolaan perhubungan; pemenuhan standar cakupan dan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah meliputi: jalan, pengairan, bangunan gedung, air bersih, sanitasi, penataan ruang, dan PSU di kawasan permukiman; meningkatkan layanan angkutan umum penumpang dan barang untuk melayani masyarakat dan dukungan terhadap sektor usaha; sertaantisipasi potensi ancaman (rawan) bencana pada beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

Peningkatan konektivitas ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana logistik serta melayani potensi kunjungan wisatawan ke pusat-pusat wisata Dairi dalam rangka mendukung status Dairi sebagai salah satu destinasi strategis wisata nasional. Selanjutnya terkait dengan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah, hal tersebut menjadi pemegang peranan penting sebagai salah satu faktor dalam pencapaian target pembangunan baik Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Pusat. Saat ini, Pemerintah Pusat tengah fokus dalam penanganan stunting, dimana

sektor air bersih, sanitasi dan perumahan menjadi bagian dalam memerangi stunting.

Selanjutnya terkait dengan penataan ruang, pembangunan wilayah yang identik dengan aktivitas pemanfaatan ruang tentu harus mempedomani rencana tata ruang daerah, baik struktur maupun pola ruang. Pengelolaan sistem perencanaan ruang yang terpadu juga akan dapat memudahkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dampak negatif pembangunan yang mengarah kepada perusakan lingkungan akan dapat ditekan. Jika persoalan ini dapat diatasi maka keberlanjutan dan kesinambungan untuk kehidupan masyarakat Dairi pada masa yang akan datang akan dapat terjaga.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode tertentu yang ditetapkan dengan sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan merupakan pernyataan sebagai solusi terhadap isu strategis dan permasalahan yang dihadapi. Sasaran adalah target atau hasil ingin dicapai oleh suatu instansi dengan hasil yang lebih terukur dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 memperhatikan RPJPD Sumatera Utara 2005-2025, RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 dan RPD Sumatera Utara 2024-2026. RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 merupakan perencanaan pembangunan transisi karena dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 akan berakhir pada Tahun 2024 dan terjadi kekosongan kepala daerah pada periode tersebut. Sebagai akibat dari kekosongan kepala daerah, penyusunan dokumen perencanaan transisi ini tidak berdasarkan visi misi kepala daerah tetapi perwujudan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai Tahun 2025-2026.

Penyusunan RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 memperhatikan keberlanjutan pembangunan dalam dokumen perencanaan sebelumnya dan berlandaskan isu strategis aktual yang telah dirumuskan dengan memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 tahap keempat. Berlandaskan pada hal tersebut maka tujuan dan sasaran disusun sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM, dengan sasaran :
 - Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran :
 1. Menurunnya tingkat kemiskinan
 2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
 3. Meningkatnya kesejahteraan petani
 4. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan
 5. Meningkatnya Realisasi Investasi
 6. Meningkatnya kualitas sektor pariwisata
3. Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 3. Meningkatnya Ketangguhan Bencana
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif, dengan sasaran :
 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital, kolaboratif, dan akuntabel
 2. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur yang profesional

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2023)		Target Kinerja		Kondisi Akhir	
				Target	Realisasi	2025	2026	2026	
1	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	IPM	Poin	73,50	75,18	75,50	75,70	75,70	
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	54,89	54,89	60,66	64,55	64,55	
	1.1	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	69,27	70,18	70,27	70,72	70,72
	1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Tahun	0,83	0,83	0,84	0,85	0,85
			Cakupan BPJS Ketenagakerjaan	Persen	11,92	11,92	11,924	12,00	12,00
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Disektor Formal	Persen	N/A	N/A	39.522	40	40
	1.3	Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	75,18	75,18	75,25	75,30	75,30
			Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,42	0,42	0,38	0,37	0,37
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Poin	79,86	79,86	82,44-85,71	85,71-88,71	85,71-88,71
	2	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,00-4,00	5,04	5,04 - 5,25	5,25-5,50	5,25-5,50
Kontribusi PDRB Provinsi			Persen	1,11	1,11	1,11-1,41	1,41-1,71	1,41-1,71	
PDRB Per Kapita ADHB			Rp	35.877.624	35.877.624	38.324.079	41.500.000	41.500.000	
Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum			Persen	2,59	2,59	2,61-2,77	2,77-2,93	2,77-2,93	

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2023)		Target Kinerja		Kondisi Akhir
				Target	Realisasi	2025	2026	2026
		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	N/A	N/A	0,33-0,42	0,42-0,50	0,42-0,50
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	25,99	25,99	26,04-25,38	25,38-25,00	25,38-25,00
		Pengeluaran Perkapita Masyarakat	Rp. (x 1.000)	11.095,1	10.969	11.200	11.500	11.500
		PoU Rata-Rata Pengeluaran untuk makan	RP	N/A	N/A	591.183	650.000	650.000
		Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh	N/A	N/A	640-790	790-840	790-840
		Tingkat Inflasi	Poin	2,3	2,3	1,63-3,3	1,63-3,3	1,63-3,3
2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	8.00-7,80	7,47	7,47-7,37	7,37-7,27	7,37-7,27
		Gini Ratio	Poin	0,22	0,221	0,219	0,218	0,218
2.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,30-1,20	1,23	1,22	1,21	1,21
2.3	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Nilai	115,23	129,04	130,2	130,3	130,3
		Indeks Ketahanan Pangan	Poin	N/A	N/A	83,7	83,7	83,7
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	N/A	N/A	89,7	91,8	91,8
2.4	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,35	0,35	0,395-0,399	0,399-0,405	0,399-0,405
		Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Persen	17,76	17,76	17,84	17,88	17,88
2.5	Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi	Persen	13,01	13,01	13,10	13,15	13,15
2.6	Meningkatnya kualitas	Kontribusi Sub Sektor	Persen	4,57	4,57	4,75	4,9	4,9

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2023)		Target Kinerja		Kondisi Akhir	
				Target	Realisasi	2025	2026	2026	
3	sektor pariwisata	Pariwisata Terhadap PAD							
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	Orang	-	-	-	-	-	
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Persen	-	-	-	-	-	
	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		Indeks Infrastruktur	Persen	51,16	61,49	64	67	67
	3.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Persen	51,16	61,49	64	67	67
	3.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,76	78,96	76,90	77,07	77,07
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00
3.3	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,75	0,53	0,75	0,75	0,75	
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65,72	65,72	69,00	71,00	71,00
			Indek Reformasi Hukum	Nilai	-	-	-	-	-
			Survey Penilaian Integritas	Poin	69,92	69,92	74,74	74,74	74,74
			Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	-	-	-	-	-
	4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital,	Nilai SAKIP	Nilai	60,01	60,01	63,00	67,00	67,00
Indeks Pelayanan Publik			Poin	2,82	2,82	3	3,26	3,26	
Opini BPK			Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2023)		Target Kinerja		Kondisi Akhir
				Target	Realisasi	2025	2026	2026
	kolaboratif, dan akuntabel	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3
		Indeks SPBE	Poin	2,7	2,67	3	3,10	3,10
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Poin	-	-	-	-	-
		Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	75	75	75	100	100
		Indeks Desa Membangun	Poin	0,63	0,65	0,67	0,69	0,69
4.2	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur yang profesional	Indeks Sistem Merit	Poin	118	118	120	125	125

Dalam rangka efektivitas pembangunan daerah, prioritas pembangunan yang termuat dalam RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan mempedomani RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan dalam capaian indikator makro. Indikator kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Berikut penetapan target kinerja makro Pemerintah Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 5. 2 Target Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Provinsi Sumatera Utara

No	RPD SUMATERA UTARA TAHUN 2024-2026				RPD KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2026		
	Indikator	Target			Indikator	Target	
		2024	2025	2026		2025	2026
1	IPM	72,85- 73,15	73,10- 73,40	73,25- 73,75	IPM	75,50	75,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00- 5,20	5,20-5,40	5,40- 5,60	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,04- 5,25	5,25- 5,50
3	Gini Rasio	0,324	0,322	0,320	Gini Rasio	0,219	0,218
4	Persentase Kemiskinan	8,25 - 8,15	8,20 - 8,00	8,15 - 7,75	Persentase Kemiskinan	7,47- 7,37	7,37- 7,27
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,80- 5,50	5,50-5,20	5,20- 4,90	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,22	1,21
6	Inflasi	3±1%	2,75±1%	2,5±1%	Inflasi	1,63 - 3,3	2 - 2,6
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	28,61	30,16	31,64	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1	1

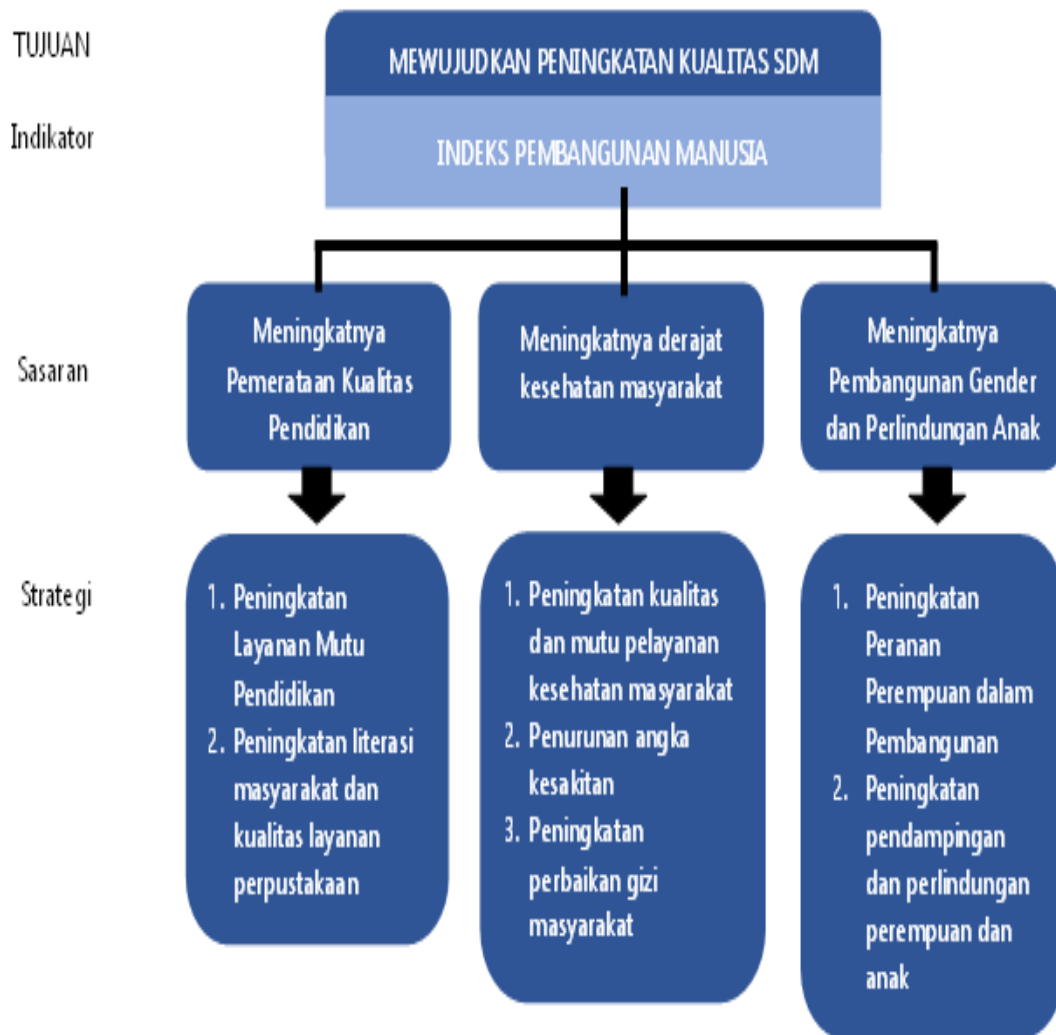
Sumber : Bappeda Kab. Dairi, data diolah

5.2 Cascading Kinerja

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah modal yang sangat penting bagi pembangunan. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Dairi berusaha menyelenggarakan layanan pendidikan yang baik bagi masyarakatnya dengan tujuan

meningkatkan kualitas hidup individu maupun kelompok masyarakat di dalamnya. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas Kesehatan serta peningkatan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak. Pencapaian tujuan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan cascading sebagaimana berikut ini:



Sumber : Bappeda Kab. Dairi

2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, upaya peningkatan ekonomi menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Dairi ke depannya. Strategi yang tepat dan efektif harus diterapkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Peningkatan sektor pertanian, industri, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan sektor pariwisata menjadi penggerak pertumbuhan perekonomian Kabupaten Dairi.

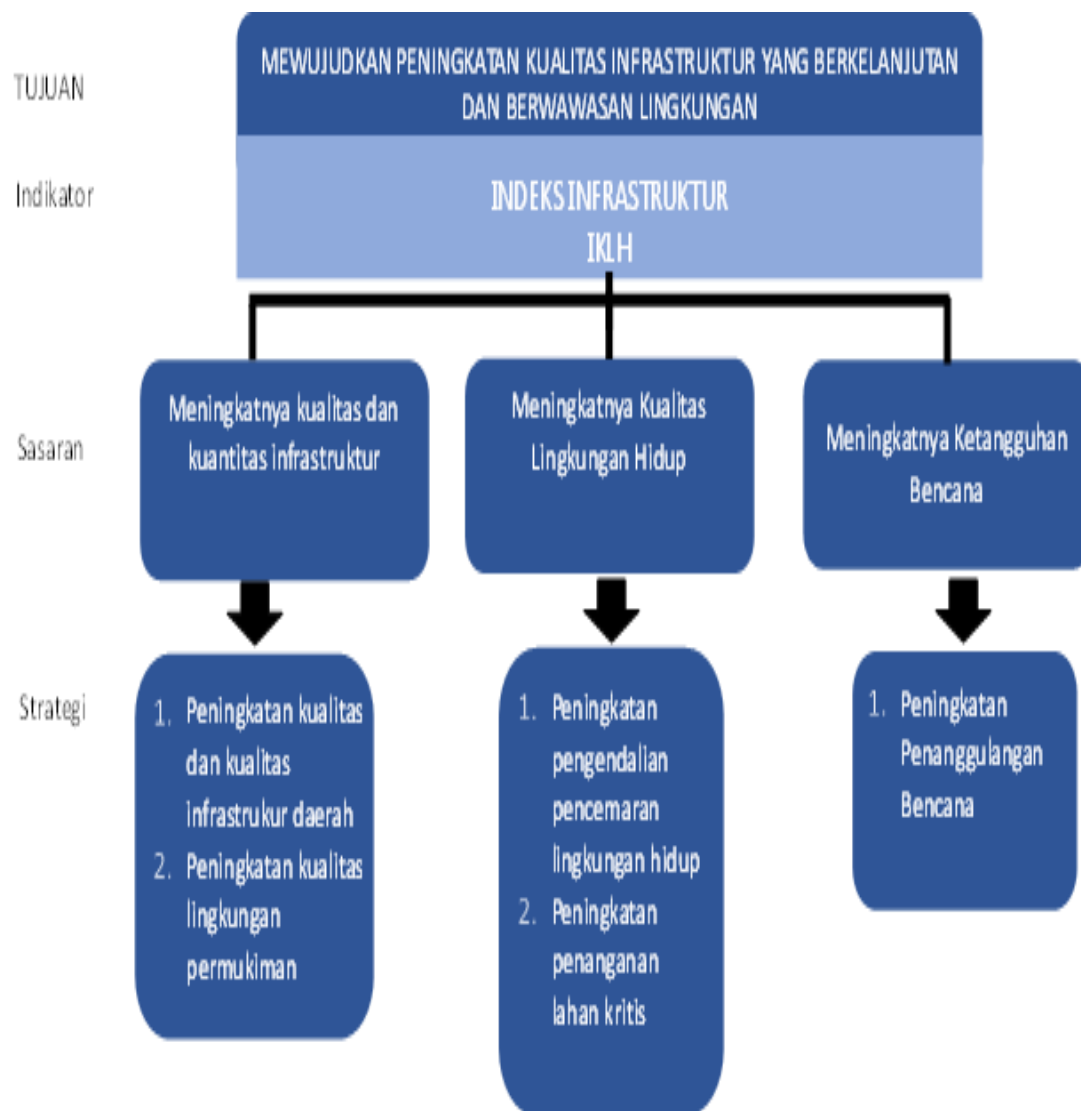


Sumber : Bappeda Kab. Dairi

3. Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Infrastruktur merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan akan mensejahterakan masyarakat.

Pencapaian tujuan peningkatan kualitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan cascading sebagaimana berikut ini:



Sumber : Bappeda Kab. Dairi

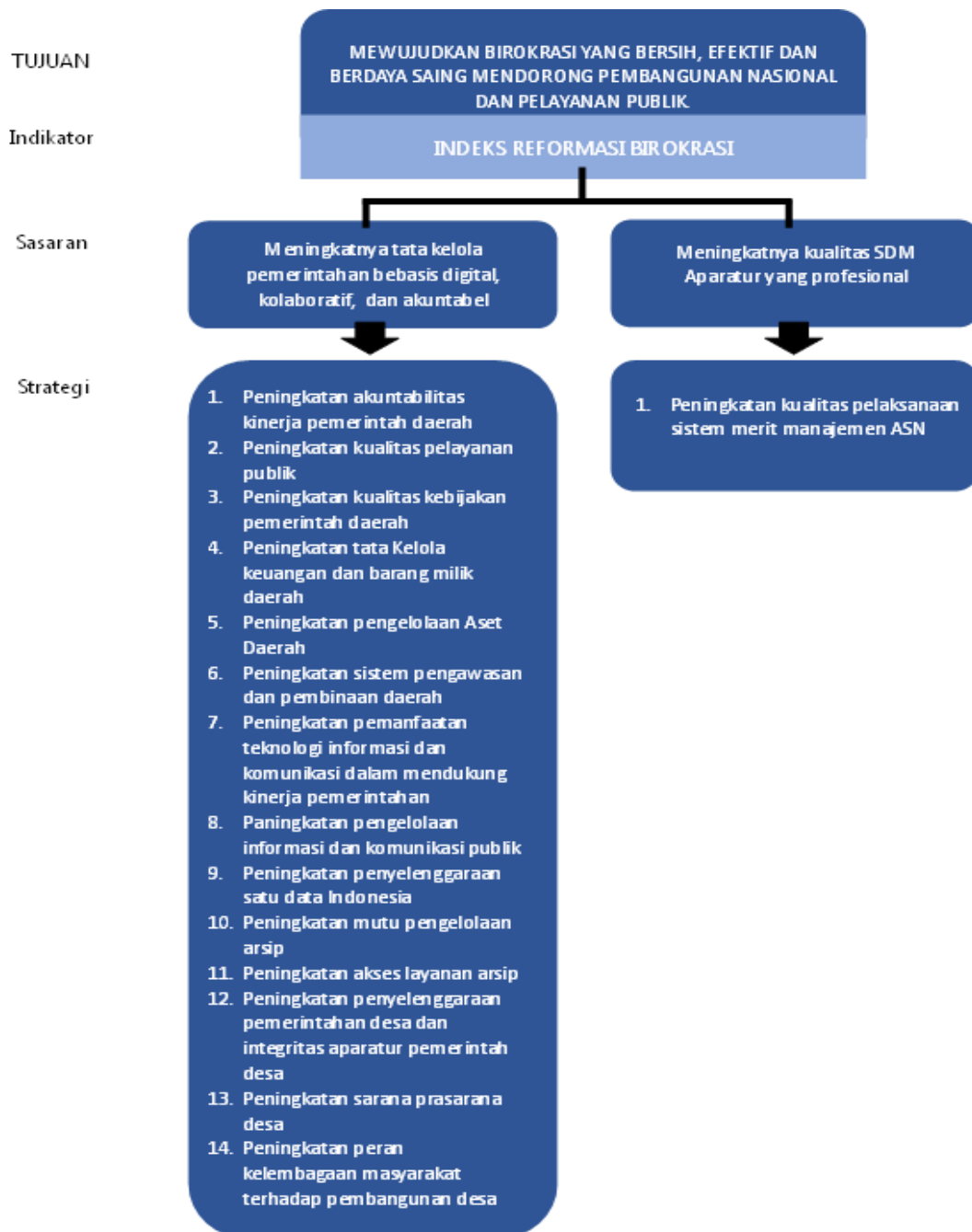
4. Mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya government menjadi governance yang menekankan kepada kolaborasi, keseimbangan dan kesetaraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*) menjadi pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih harus menjadi titik sentral perhatian segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi.

Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam administrasi dan manajemen pemerintahan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, tata kerja dan pengawasannya. Dalam rangka mengimplementasikan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan teknologi informatika untuk pelaksanaan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Setiap instansi pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan keberadaan teknologi informasi yang ada dalam menyampaikan informasi dan melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pencapaian tujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan cascading sebagaimana berikut ini :



Sumber : Bappeda Kab. Dairi

Tabel 5. 3 Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Dari Tahun 2025 -2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
1	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM	IPM	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jumlah warga negara 16-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional rerata kompetensi numerasi sekolah	Dinas Pendidikan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
					<p>menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B</p> <p>Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV</p> <p>Indeks iklim keamanan SD</p> <p>Indeks iklim keamanan SMP</p> <p>Indeks iklim kebinekaan SD</p> <p>Indeks iklim kebinekaan SMP</p> <p>Indeks iklim Inklusivitas SD</p> <p>Indeks iklim Inklusivitas SMP</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p> <p>Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Politik</p> <p>Jumlah Ormas yang terbina dan Aktif</p> <p>Jumlah Kawasan Bahaya Narkoba menjadi Kawasan Waspada</p> <p>Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik</p> <p>Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental</p>	<p>Dinas Perpustakaan dan Arsip</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>
			Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
					Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan (Morbiditas) Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Stunting Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD TFR/ Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	RSUD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
			Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) Rasio kekerasan terhadap Perempuan Rasio kekerasan terhadap Anak Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak Unmet Need	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
2	Mewujudkan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	LPE Pengeluaran Perkapita Masyarakat Gini Rasio				
			Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Dinas Sosial
			Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	DPMPSTPK
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi Tanaman Pangan 1. Padi (ton GKP) 2. Jagung (ton pipilan kering) Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
					1. Padi 2. Jagung Produksi Tanaman Hortikultura 1. Bawang Merah 2. Cabe 3. Kubis 4. Kentang 5. Durian Produktivitas Tanaman Hortikultura 1. Bawang Merah 2. Cabe (ton/ha) 3. Kubis (ton/ha) 4. Kentang (ton/ha) 5. Durian (ton/ha) Produksi tanaman perkebunan rakyat 1. Kopi Arabika Kg/ha/Tahun 2. Kopi Robusta Kg/ha/Tahun Produksi Daging Produksi Telur Ayam Buras dan Itik Produksi Perikanan Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	PPH		

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
					Persentase ketersediaan pangan Persentase Konsumsi Pangan Persentase Cadangan Pangan Daerah Persentase ketersediaan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	
			Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Kontribusi sektor industri Kontribusi sektor perdagangan	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Pertumbuhan Wirausaha Persentase Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Antar Waktu	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi	Peningkatan Investor IKM Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya Kontribusi	Kontribusi Sub		Dinas Pariwisata

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
			Sektor Pariwisata	Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Peningkatan jumlah wisatawan	Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur IKLH	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	<p>Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik</p> <p>Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap</p> <p>Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Dan Berkelanjutan</p> <p>Persentase Penyelenggaraan Bangunan/Gedung Dan Lingkungan</p> <p>Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang</p> <p>Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p>Persentase Penanganan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Persentase Ketersediaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum</p>	PUTR
			Meningkatnya Konektivitas	Rasio		Dinas Perhubungan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
			antar wilayah	Konektivitas	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lahan Penurunan emisi gas rumah kaca	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Ketangguhan Bencana	IKD	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Persentase pelayanan penanganan kebakaran	BPBD
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola	Nilai SAKIP		

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
			pemerintahan berbasis digital, kolaboratif, dan akuntabel		Nilai EPPD Indeks Reformasi Hukum Nilai Kabupaten Perduli HAM Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Perekonomian Persentase pencapaian Program Prioritas Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam mencapai AKIP Minimal B Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Hasil penilaian AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat	Setda
				Indeks Perencanaan	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Bappeda

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
					Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	
				Indeks Pelayanan Publik	<p>Persentase lokus UPP dengan predikat minimal B</p> <p>Persentase capaian Pelayanan Keprotokolan dan komunikasi pimpinan</p> <p>Persentase capaian pelayanan administrasi umum</p> <p>Level Maturitas SPIP</p> <p>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</p> <p>Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan</p> <p>Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <p>IKM Catpil</p> <p>IKM Kecamatan</p> <p>Skor Aspek Kebebasan</p> <p>Persentase tingkat kepuasan DPRD atas fasilitasi Sekretariat DPRD dalam</p>	<p>Setda</p> <p>Satpol PP</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>15 Kecamatan</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Sekretariat DPRD</p>

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
					<p>pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Persentase Realisasi Pajak Daerah Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah</p>	Badan Pendapatan Daerah
				Opini BPK	<p>Penetapan APBD Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Persentase tanah milik pemkab yang bersertifikat Kinerja Percepatan Belanja Daerah Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun</p>	BKAD
				Indeks SPBE	<p>Persentase OPD yang menggunakan Sistem Berbasis Elektronik Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
				Tingkat Ketersediaan arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah Desa Tertinggal Jumlah Desa Berkembang Jumlah Desa Maju Jumlah Desa Mandiri Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perintis Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pemula Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif Persentase Kades dan Sekdes yang dibina dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
				Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat
			Meningkatnya kualitas SDM Aparatur yang profesional	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	BKPSDM

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan yang komprehensif terkait tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi merupakan langkah-langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, sementara arah kebijakan adalah pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan strategi agar lebih terarah sehingga tujuan dan sasaran tercapai. Arah kebijakan disusun untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan agar berjalan lurus dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Penyusunan strategi pada dokumen perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makro dan capaian-capaian daerah.

Strategi dan arah kebijakan tersebut akan menjadi fokus pembangunan setiap tahunnya mulai dari tahun 2025 hingga 2026. Penjabaran strategi dan arah kebijakan dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2025 – 2026

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN	
				2025	2026
1	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Meningkat Layanan Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan guru 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 3. Pemenuhan dan pemerataan cakupan akses pelayanan pendidikan 	✓	✓
		Peningkatan literasi masyarakat dan kualitas layanan perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan 2. Peningkatan minat baca masyarakat 3. Peningkatan pengembangan perpustakaan berbasis digital 	✓	✓
		Peningkatan prestasi olahraga dan Kualitas pembangunan Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas atlet dan tenaga keolahragaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 3. Peningkatan daya saing kepemudaan 	✓	✓
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang berkualitas 2. Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita 3. Peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan yang mudah cepat dan setara 4. Peningkatan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 5. Optimalisasi advokasi, komunikasi informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 	✓	✓
		Penurunan angka kesakitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan angka kesakitan menular dan tidak menular 2. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) 	✓	✓
		Peningkatan perbaikan gizi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat 2. Peningkatan edukasi penanganan dan pencegahan stunting 	✓	✓
3	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Peningkatan Peranan Perempuan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan 2. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah 	✓	✓
		Peningkatan pendampingan dan perlindungan perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak 2. Peningkatan fasilitas penanganan dan pendampingan perempuan dan anak 	✓	✓

Tabel 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 – 2026

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN	
				2025	2026
1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Peningkatan Penanganan penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin dan kelompok rentan	✓	✓
		Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial	1. Peningkatan penyandang PMKS memperoleh jaminan dan bantuan perlindungan sosial tepat sasaran	✓	✓
		Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial	1. Peningkatan kualitas validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis	✓	✓
		Peningkatan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	1. Peningkatan perlindungan sosial pasca bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	✓	✓
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi tenaga kerja	1. Penyusunan rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar 2. Penyediaan kebutuhan sarana prasarana balai latihan kerja	✓	✓
3	Meningkatnya kesejahteraan petani	Peningkatan produktivitas pertanian	1. Peningkatan kualitas dan pembangunan infrastruktur pertanian dan jaringan irigasi pertanian 2. Peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi sektor pertanian 3. Peningkatan bantuan alsintan yang tepat sasaran dan tepat guna bagi petani 4. Peningkatan bantuan benih/bibit unggul dan pupuk pertanian 5. Peningkatan kualitas pengendalian Hama 6. Penyakit dan bencana pertanian 7. Penurunan alih fungsi lahan	✓	✓
		Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian	1. Peningkatan kualitas petani dalam penguasaan teknologi pertanian 2. Peningkatan kualitas penyuluh pertanian	✓	✓

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN	
				2025	2026
			3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan petani		
		Peningkatan nilai tambah sektor pertanian	1. Peningkatan skill petani dalam pengolahan hasil pertanian 2. Peningkatan fasilitas teknologi pengolahan hilirisasi produk pertanian	✓	✓
		Peningkatan penyelenggaraan ketahanan pangan	1. Penyediaan data neraca bahan makanan dan data cadangan pangan yang berkualitas	✓	✓
		Peningkatan ketersediaan pangan	1. Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan 2. Pembangunan Infrastruktur lumbung pangan	✓	✓
		Peningkatan penanganan kerawanan pangan	1. Peningkatan sosialisasi tentang konsumsi makanan B2SA (Berimbang, Bergizi, Sehat dan Aman) 2. Belum optimalnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan	✓	✓
4	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Peningkatan akses dan kapabilitas KUKM	1. Peningkatan pengembangan koperasi 2. Peningkatan KUKM berbasis digital	✓	✓
		Peningkatan kualitas produk IKM	1. Peningkatan sarana dan prasarana produksi IKM 2. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah 3. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas SDM IKM	✓	✓
5	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Peningkatan pelayanan perizinan berusaha	1. Peningkatan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan 2. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan	✓	✓
		Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	1. Peningkatan pelaksanaan kemudahan investasi 2. Peningkatan ketersediaan informasi peluang potensi investasi 3. Peningkatan promosi investasi	✓	✓
6	Meningkatnya kualitas sektor pariwisata	Peningkatan pengembangan destinasi wisata	1. Peningkatan pemasaran pariwisata 2. Peningkatan pengembangan ekonomi kreatif 3. Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah	✓	✓

Tabel 6. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Tahun 2025 - 2026

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN	
				2025	2026
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Peningkatan kualitas dan kualitas infrastruktur daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan 2. Peningkatan pengelolaan sumber daya air 3. Peningkatan penyediaan air minum/bersih 4. Peningkatan penyelenggaraan bangunan/gedung dan lingkungan 5. Peningkatan penyusunan dan pemanfaatan dokumen penataan ruang 6. Peningkatan penyelenggaraan bina konstruksi 7. Peningkatan akses rumah layak huni 8. Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum 9. Peningkatan pengelolaan air limbah/sanitasi 10. Peningkatan koordinasi pemanfaatan tanah/lahan 	✓	✓
		Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penanganan rumah dan kawasan permukiman kumuh 2. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak berkelanjutan 3. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi 	✓	✓
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 	✓	✓
		Peningkatan penanganan lahan kritis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya penanganan lahan kritis 	✓	✓
3	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Peningkatan Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 3. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat 4. Peningkatan Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat 5. Peningkatan penanganan pemadam kebakaran 	✓	✓

Tabel 6. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif Tahun 2025 – 2026

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN	
				2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital, kolaboratif, dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah 2. Peningkatan kualitas pengendalian internal pemerintah dalam pencapaian target yang telah ditentukan 3. Peningkatan penerapan cascading kinerja	✓	✓
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan standar pelayanan 2. Peningkatan pelayanan publik di kecamatan	✓	✓
		Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah	1. Peningkatan turunan Peraturan Pemerintah ke dalam Peraturan Daerah dan kebijakan daerah 2. Peningkatan efektifitas pengendalian kebijakan pemerintah 3. Peningkatan kapasitas SDM perumus kebijakan daerah	✓	✓
		Peningkatan tata Kelola keuangan dan barang milik daerah	1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	✓	✓
		Peningkatan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	1. Peningkatan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	✓	✓
		Peningkatan sistem pengawasan dan pembinaan daerah	1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan perangkat daerah 2. Peningkatan pendampingan dalam penegakan integritas	✓	✓
		Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	1. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 2. Penyusunan arsitektur SPBE daerah	✓	✓
		Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Peningkatan efektivitas penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat	✓	✓

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN	
				2025	2026
			2. Peningkatan pengelolaan sumber daya komunikasi publik 3. Peningkatan penyebarluasan informasi dan komunikasi publik		
		Peningkatan penyelenggaraan satu data Indonesia	1. Peningkatan kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral	✓	✓
		Peningkatan mutu pengelolaan arsip	1. Peningkatan pengelolaan arsip secara baku	✓	✓
		Peningkatan akses layanan arsip	1. Peningkatan pemanfaatan arsip	✓	✓
		Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas aparatur pemerintah desa	1. Peningkatan kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa 2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset desa	✓	✓
		Peningkatan sarana prasarana desa	1. Peningkatan pemanfaatan dana desa	✓	✓
		Peningkatan peran kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan desa	1. Peningkatan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa	✓	✓
2	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur yang profesional	Peningkatan kualitas pelaksanaan sistem merit manajemen ASN	1. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah 2. Peningkatan kualitas pengembangan kompetensi aparatur	✓	✓

6.2 ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan arah kebijakan yang merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 2 (dua) tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome. Berikut ini arah kebijakan tahunan Kabupaten Dairi dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

Tabel 6.5 Arah Kebijakan Tahunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

Tema Pembangunan	
Tahun 2025	Tahun 2026
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Infrastruktur dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Sektor Ekonomi Daerah dan Ketrampilan Berusaha

6.3 PERENCANAAN TEMATIK

6.3.1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Stunting di Kabupaten Dairi

Untuk mencegah dan menurunkan *stunting*, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan Strategi Nasional percepatan penurunan *stunting* berupa 5 (lima) pilar yang meliputi :

- (1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan
- (2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
- (3) Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitive
- (4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi
- (5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi; yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk dapat :

- (a) Menurunkan prevalensi stunting;
- (b) Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- (c) Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- (d) Memperbaiki pola aksi;
- (e) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
- (f) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dengan kelompok sasaran yang meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pemerintah Kabupaten Dairi berkomitmen tinggi terhadap percepatan penurunan *stunting* hal ini dilakukan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Dairi melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 5/400.2.4/I/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi telah menyusun berbagai kegiatan lintas sektor dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi diantaranya yaitu dalam melakukan perbaikan gizi kepada ibu hamil dan balita dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi, penyediaan jamban, peningkatan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata, Peningkatan keikutsertaan ber-KB, Edukasi pemahaman stunting pada remaja di SMP, SMA/SMK dan konsultasi calon pengantin dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam mendukung perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi percepatan penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Dairi.

Adapun peran Pemerintah Kabupaten Dairi dalam Penurunan Stunting yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan stunting;
2. Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting, termasuk peningkatan peran Camat dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan stunting di wilayahnya;

3. Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa;
4. Menganangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, desa dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting;
5. Mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan stunting di daerah dengan melibatkan perangkat daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan stunting dapat dilaksanakan secara efektif;
6. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga, provinsi, desa dan pihak lainnya yang terkait dalam aksi konvergensi pencegahan stunting;
7. Memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif hasil rembuk stunting yang telah disepakati, dimuat dalam RKPD/ Renja OPD;
8. Melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan stunting agar jenis bantuan diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan stunting;
10. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan stunting.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan penurunan Stunting dimana dalam regulasi dimaksud memuat pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Dairi dan pemangku kepentingan dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting dalam bentuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan juga memuat Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan penurun Stunting Tahun 2022-2026.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Dairi juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dimana pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2023 pada poin (3) disebutkan bahwa Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting yang dianggarkan melalui dana desa paling sedikit 10% dari total dana desa. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi yang tinggi untuk kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dairi.

Arah Kebijakan Kabupaten Dairi dalam Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan Tagging Kemendagri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

Tabel 6.6 Tagging Kegiatan Stunting Perangkat Daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan SIPD Kemendagri Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Indikator yang diintervensi
1	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gizi Spesifik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Gizi Spesifik
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Gizi Spesifik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Gizi Spesifik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Gizi Spesifik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Gizi Spesifik
			Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Gizi Spesifik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gizi Sensitif

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Indikator yang diintervensi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Gizi Sensitif
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gizi Sensitif
4	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Gizi Sensitif
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Gizi Sensitif
		Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Gizi Sensitif
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Infomasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Gizi Sensitif
7	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Gizi Sensitif
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Gizi Sensitif
9	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Gizi Sensitif
10	Dinas Sosial	Program perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Gizi Sensitif
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Gizi Sensitif

Sumber : Bappeda data diolah

Selanjutnya dukungan Perangkat Kabupaten Dairi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 6.7 Dukungan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Dairi

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Intervensi
1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sensitif
2.	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Spesifik
				Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu Bersalin	Spesifik
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Spesifik
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Spesifik
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Spesifik
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Spesifik
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Sensitif
3.	Dinas pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerwanana Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Sensitif
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik	Sensitif
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Sensitif

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Intervensi
			Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan KB	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	Sensitif
				Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai dengan kearifan local	Sensitif
				Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan, rapat koordinasi desa dan Minilokakarya	Sensitif
				Pengendalian operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Sensitif
			Pengendalian Program KKBPK	Sensitif	
			Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang	Sensitif	
			Pengendalian dan Pendistriusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota		
		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP)	Sensitif	
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Sensitif			
		Program PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan perkiraan pengendalian	Penyediaan data dan informasi keluarga	Sensitif

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Intervensi
			penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Sensitif
		Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan sarana kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,PPKS,PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sensitif
				Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,PPKS,PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sensitif
7.	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetraan	Sensitif
			Pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/kesejahteraan	Sensitif
				Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP sekolah non formal/kesetaraan	
				Penilaian kelapayakan usul perizinan PAUD	
8.	Dinas Pekerjaan umum dan Tata ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah di daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	
12.	Dinas Sosial	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	

6.3.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENURUNAN KEMISKINAN

A. Overview Kemiskinan Kabupaten Dairi

Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang. Garis kemiskinan berguna sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase dan jumlah masyarakat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan untuk menanggulangi kemiskinan, program stabilisasi harga dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya menanggulangi kondisi kemiskinan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Identifikasi Masyarakat Rentan Miskin Di Kabupaten Dairi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 67 persen dari total penduduk Indonesia yang masuk kategori rentan miskin. Masyarakat Rentan Miskin adalah kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah. Kelompok ini bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status mereka dari rentan miskin menjadi miskin. Klasifikasi rentan miskin juga termasuk mereka juga berasal dari rumah tangga dengan kepala keluarga yang sudah pensiun atau lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan berpenyakit kronis. Saat ini kelompok rentan miskin ini cukup banyak dan didominasi mereka yang usianya antara 18 hingga 35 tahun. Penyebab Masyarakat Rentan Miskin antara lain sebagai berikut:

- 1) Lonjakan inflasi yang dapat menggerus pendapatan kelompok menengah dan berpotensi menurunkan level ekonomi golongan menengah yang rentan miskin;

- 2) Potensi peningkatan masyarakat rentan miskin timbul karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan mayoritas kelas menengah. Hal itu tercermin dari rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya 1,09% dalam dua tahun terakhir. Dimana idealnya, UMP harus menyesuaikan inflasi untuk mengimbangi turunnya nilai uang akibat inflasi. Jika tidak, maka daya beli masyarakat akan terus turun;
- 3) Pandemi Covid -19 yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaannya yang berdampak pada masyarakat kelas menengahbawah bisa menuju rentan miskin dan masyarakat rentan miskin berpotensi jatuh ke kelas miskin;
- 4) Generasi muda yang baru lulus kuliah dan baru masuk kerja dan upahnya minimum, dengan ada tuntutan keluarga untuk membiayai keluarga, lalu menikah atau merawat orang tua, pernikahan muda, dan lain sebagainya yang membuat mereka tidak bisa memaksimalkan potensinya untuk membangun perekonomian.
- 5) Ketidkakmampuan masyarakat dalam mengelola keuangan/ manajemen keuangan.

Merujuk Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang merupakan database kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil), Kabupaten Dairi memiliki jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 134.171 jiwa.

Jumlah penduduk miskin ini dapat diklasifikasikan per Desil, dari Desil 1 s/d Desil 3, dengan Total Desil 1-3: 134.171 jiwa,

sebagai berikut:

- Desil 1: 32.042 jiwa;
- Desil 2: 50.740 jiwa;
- Desil 3: 51.389 jiwa.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Penurunan Kemiskinan Kabupaten Dairi

Pemerintah Kabupaten Dairi harus lebih bekerja keras untuk tetap bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Dairi. Perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan membentuk Tim Koordonasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Dairi melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 6/400.9.14/I/2023 tanggal 5 Januari 2023. Berdasarkan Permendagri nomor 53 tahun 2020 bahwasanya Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam RAT mengacu kepada Strategi Kebijakan Nasional penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

I. Kemiskinan Ekstrem

Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator PMK nomor 30 tahun 2022 tentang penetapan sumber dan jenis data P3KE upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota, Desa, dan Pemangku kepentingan lainnya, serta dalam hal pensasaran penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah mengacu pada by name by address data yang termasuk dalam DTKS dan Data P3KE yang telah di Verifikasi dan Validasi. Berdasarkan arahan dari Kementerian Koordinator PMK bahwasanya untuk Penanganan kemiskinan ekstrem prioritas sasaran adalah

jumlah penduduk miskin yang diklasifikasikan pada Desil 1.

II. Program/Kegiatan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Program/Kegiatan penanganan kemiskinan mempedomani Tagging Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam aplikasi SIPD. Program/Kegiatan penanganan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang menangani dan dilaksanakan dengan menerapkan pola pendampingan, kemitraan dan keberlanjutan sesuai dengan kewenangan daerah.

Tabel 6.8 Tagging Kegiatan Penurunan Kemiskinan Kabupaten Dairi sesuai dengan SIPD Kemendagri Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
4	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Rehabilitasi Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Penanganan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Korban	Mengurangi Beban Pengeluaran
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pendapatan
		Program Hubungan Industrial	Meningkatkan Pendapatan
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Program Pemenuhan Hak Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan Perempuan	Mengurangi Beban

No	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
			Pengeluaran
		Program Perlindungan Khusus Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Mengurangi Beban Pengeluaran
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Keluarga	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyuluhan Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatkan Pendapatan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan & kemiskinan ekstrem Kabupaten Dairi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.9 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Dairi

MATRIKS RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2024

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan Ideal	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Persentase ketersediaan pangan - Persentase skor Pola pangan Harapan (PPH) ketersediaan - Persentase skor Pola pangan Harapan (PPH) konsumsi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan	Meningkatnya Produksi dan produktivitas Pertanian dan perikanan	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Terlaksananya pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan sebagai kelompok percontohan	Pemberdayaan pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Melaksanakan Penggunaan Benih dan Bibit Unggul Bersertifikat	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase peningkatan produksi komoditas strategis	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase luas lahan pertanaman yang menggunakan pupuk bersubsidi sesuai standar	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		Menerapkan Mekanisasi				Persentase luas pertanaman yang		

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
		Pertanian				menggunakan bibit bersertifikat		
		Meningkatkan Prasarana Pertanian dan Perikanan				Cakupan luas lahan yang diolah dengan alsintan		
		Melakukan pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman, Hewan Ternak/ Ikan			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
		Mengoptimalkan Penggunaan Pupuk			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kesehatan Hewan
		Meningkatkan Keterampilan Petani			Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan penyuluhan pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pertanian
4	Pekerjaan Umum	Pelayanan penyediaan air minum	Terpenuhinya kebutuhan air minum/ bersih layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota	cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
				dan berkelanjutan				
		Pelayanan pengelolaan air limbah	Terpenuhinya pelayanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang terlayani sanitasi layak dan berkelanjutan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Pelayanan jaringan irigasi	Terpenuhinya ketersediaan jaringan irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang terlayani jaringan irigasi	Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha (1 daerah Kab./Kota)	Cakupan daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi
		Pelayanan peningkatan kualitas jalan	Terpenuhinya konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan jalan kabupaten dalam kondisi mantap
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelayanan peningkatan kualitas kawasan permukiman	Tertanganinya kawasan permukiman kumuh	Persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Cakupan penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha
6	Urusan Pemerintahan				Program Pemenuhan Upaya	Penyediaan Layanan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
	n Bidang Kesehatan				Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
					Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
					Upaya Kesehatan Masyarakat	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
					Masyarakat	Daerah Kabupaten/Kota		
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
7	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Pelatihan Pencegahan dan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi
		Peningkatan Layanan Informasi Rawan Bencana	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Ketahanan Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
							Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
							Bencana	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
							Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Korban		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
8	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Peningkatan intensitas pendampingan kelompok rentan, Peningkatan			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dibina

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
		Akurasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana layanan sosial			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan cakupan pelayanan PPKS (Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Gelandangan dan Pengemis)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Penyandang disabilitas anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis) yang mendapat fasilitas
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang diverifikasi dan divalidasi
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapat penanganan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang mendapat tali asih
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara
9	Urusan Pemerintah n Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	Pembinaan UMKM	Meningkat kan Pemahaman dan Kualitas SDM Pelaku UMKM	Meningkat nya SDM Pelaku UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatnya Pengetahuan/Pemah aman Pelaku UMKM tentang Digital marketing

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
	Menengah				(UMKM)		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Konsultasi dan Pendampingan Pelaku UMKM
10	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Jemput Bola	Masyarakat Kab. Dairi	Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan pendaftaran penduduk yang ditingkatkan
					Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Persentase Perkawinan Tercatat	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan
11	Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan klaster Las	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pelatihan
			Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Yang Ditangani	Program Hubungan Industrial	Persentase Peningkatan Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Jumlah Perselisihan HI yang ditangani

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
							Daerah Kabupaten / Kota	
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Maju	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
							Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
							Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
13	Urusan Pendidikan	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase peningkatan kinerja pada Pengelolaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
								Penambahan Ruang Kelas Baru

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
		pendukung kegiatan belajar Peningkatan ketersediaan layanan PAUD				pendidikan sekolah dasar		Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU
		Optimalisasi pemberian bantuan/apresiasi bagi siswa SD-SMP dari keluarga kurang mampu						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan kesetaraan dan formal						Pembangunan sarana, prasarana Dan utilitas sekolah
								Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
								Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana Dan utilitas sekolah
								Pengelolaan Dana BOS
								Pengadaan Mebel Sekolah
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
								Pembangunan Laboratorium
						Persentase peningkatan kinerja pada Pengelolaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
						pendidikan SMP		Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Laboratorium Pembangunan sarana, prasarana Dan utilitas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengelolaan Dana BOS SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
								Sekolah/TU
						Persentase peningkatan kinerja pada Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
								Pengelolaan Dana BOP PAUD
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa
						Persentase peningkatan kinerja pada Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP
					Program Pendidik Dan tenaga kependidikan	Persentase peningkatan kinerja pada bidang pendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
							Nonformal/Kesetaraan	
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	SK Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Dairi	Organisasi Pemerintah, Non pemerintah, media dan dunia Usaha	Pemenuhan Hak Anak 24 Indikator Kabupaten Layak anak	Program Pemenuhan Hak	Pelebagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha kewenangan kabupaten/Kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan dan penenuhan hak anak pada lembaga pemerintah , ninpemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Dairi
			Lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak (PUSPAGA)	Pemenuhan Hak Anak 24 Indikator Kabupaten Layak anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Konvensi Hak, Anak bagi lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak
			anak, orang tua dan keluarga	Pemenuhan Hak Anak 24 Indikator Kabupaten Layak anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota
					Program Perlindungan perempuan	Penyediaa layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan	Penyediaa layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan	Layanan rumah perlindungan, layanan penjangkauan,

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
						kabupaten/kota	kabupaten/kota	layanan medikolegal layanan pendampingan tenaga ahli, layanan reintegrasi sosial
					Program Perlindungan khusus anak	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Layanan rumah perlindungan, layanan penjangkauan, layanan medikolegal layanan pendampingan tenaga ahli, layanan reintegrasi sosial
			Meningkatnya partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi	Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan		Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Telaksananya pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
				Kab./Kota				Kabupaten/Kota
15	Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Keluarga beresiko Stunting (Catin/Calon PUS, Ibu Hamil,Ibu Pasca Pesalinan,Anak 0-59 bulan)	Tersedianya Laporan Pengendalian Penduduk (Audit Kasus Stunting)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Telaksananya Kajian, hasil rekomendasi Audit Kasus Stunting dan Rencana Tindak lanjut Penurunan Stunting	Pengendalian program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK
			Camat,Kepala Puskesmas,Tenaga Gizi,Dokter,Bidan ,Pengurus Tim penggerak PKK Kecamatan,Peny uluh KB,PLKB ASN,dan Non ASN,Koordinator Statistik,Penguru s IBI Ranting, Pengurus KUA,LPM,TPK,Sa tgas Stunting,Danram il,Kapolsek dan pihak pihak terkait lainnya di Tingkat	terlaksananya mekanisme Operasional program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,Kepen dudukan dan keluarga Berencana) melalui Mini Lokakarya/Mini lok	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	tersedianyan Laporan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga di desa/Kelurahan	Pelaksanaan mekanisme Operasional program bangga Kencana melalui rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan MiniLokakarya (Minilok)	Tersedianya Jumlah laporan mekanisme Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan miniLokakarya (Minilok)rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan MiniLokakarya (Minilok)

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			Kecamatan					
			Fasyankes dan TPMB yang teregister pada sistem Informasi BKKBN	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan Jaringannya		Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mengalami Stock out alokon	Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan Jaringannya
			Fasyankes , TPMB yang teregister pada sistem Informasi BKKBN,Dinas P3AP2KB,Dinkes, Pimp Fasyankes, IBI,Kelompok KB Pria,Mitra Kerja	Penguatan Komitmen dan mengidentifikasi Kendala dalam Peningkatan Pelayanan Kb di fasilitas Kesehatan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringsnya.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan Jejaringsnya
			Kelompok BKB Kit yang sudah ditetapkan	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Tersedianya BKB Kit Stunting untuk Kelompok Poktan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
				Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	(KS)		Keluarga (BKB.BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPK S,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
			Tim Pendamping Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan Jejarungnya.	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Tersedianya data dan informasi terkini tentang kondisi sasaran Keluarga Beresiko Stunting	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu hamil ,Pasca salin/Kelahiran,Badu ta/Balita	Cakupan Pemantauan data dan Informasi Keluarga Beresiko stunting (termasuk remaja,Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil,Pasca Persalinan/Kelahiran ,baduta/Balita)
			Keluarga beresiko Stunting (Catin/Calon PUS, Ibu Hamil,Ibu Pasca Pesalinan,Anak	terlaksananya Pendampingan Keluarga Keluarga Beresiko stunting	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Rekapitulasi laporan hasil Pendampingan tehadap sasaran Keluarga Beresiko Stunting	Pendampingan Keluarga Beresiko stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu hamil ,Pasca	Tersedianya Rekapitulasi laporan hasil Pendampingan tehadap sasaran Keluarga Beresiko Stunting

No.	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
			0-59 bulan)	(Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS,ibu hamil,Pasca Salin/Kelahiran ,Baduta/Balita)			salin/Kelahiran,Baduta/Balita	
			Pasangan Usia Subur	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya kesertaan berKB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Kelompok Kegiatan (BKB,BKR,BKL,PI K-R dan UPPKS)	Terlaksananya pembinaan kelompok kegiatan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Pertemuan POKja kampung KB	Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana

Sumber : Bappeda Kabupaten Dairi

6.3.3 PENINGKATAN INVESTASI

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Dairi Tahun 2021-2025. Peraturan Perundang-undangan ini dibuat dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di daerah.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu anggota North Sumatera Invest (NSI) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/167/KPTS/2020 tentang North Sumatera Invest. Merupakan tim kerja lintas lembaga di Kabupaten Dairi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Dairi melalui kegiatan promosi investasi dan perdagangan dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Dairi. Mewujudkan Kabupaten Dairi sebagai daerah tujuan investasi yang menarik serta menjadi mitra terbaik bagi investor merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Agar tujuan tersebut terlaksana perlu didukung dengan pelayanan investasi, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor.

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Pemerintah dalam rangka peningkatan investasi di Kabupaten Dairi Tahun 2024 melalui:

1. Penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi, investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
3. Penyusunan materi, saran, rekomendasi, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang investasi, industri,

perdagangan dan pariwisata.

Peta panduan (Roadmap) investasi sebagai acuan bagi pengembangan Investasi di Kabupaten Dairi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6.10 Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Dairi Tahun 2021-2025

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Kebijakan/Indikasi Program		Perangkat Daerah Terkait
		Tahun 2021-2023	Tahun 2024-2025	
I	Umum			
		1 Peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan Sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1 Menetapkan peraturan persaingan usaha yang sehat (<i>level playing Field</i>) sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi dan perorangan atau kelompok tertentu.	DPMPTSPK
		2 Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanaman modal.	2 Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing	DPMPTSPK
		3 Peningkatan fungsi DPMPTSK sebagai inisiator dan fasilitator kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Dairi.	3 Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdangan yang merugikan pembagian wilayah dagang dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing	DPMPTSPK
		4 Melakukan harmonisasi dan spesifikasi prosedur serta penyederhanaan (<i>streamlining</i>) perzinan dan nonperzinan di bidang penanaman modal mencakup penyelenggaraan sistem <i>Online Single Submission-Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)	4 Lembaga pengawas persaingan usaha	DPMPTSPK

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Kebijakan/Indikasi Program		Perangkat Daerah Terkait
		Tahun 2021-2023	Tahun 2024-2025	
		5 Peningkatan Sistem Informasi dan Promosi Penanaman Modal	5 Pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif dan efisien	DPMPTSPK
		6 Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja	6 Menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanaman modal yang melakukan kegiatan Penanaman Modal terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah.	DPMPTSPK
		7 Penetapan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik.		DPMPTSPK
		8 Fasilitasi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara buruh/pekerja dengan pengusaha		DPMPTSPK
II.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal			
A.	Pengembangan Pangan			
		1 Pemberian pelayanan dan fasilitasi serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pangan di Kabupaten Dairi.	1 Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, seperti benih dan pupuk	DPKPP, DPMPSTK
		2 Fasilitasi pendukung yang akan diberikan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan	2 Untuk jangka panjang : pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah di Kabupaten Dairi yang lahannya	DPKPP, DPUPR

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Kebijakan/Indikasi Program		Perangkat Daerah Terkait
		Tahun 2021-2023	Tahun 2024-2025	
		pasca panen yang layak dan ketersediaan infrastruktur.	masih cukup luas dan juga lahan yang tidak produktif, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak bagi petani kecil.	
		3 Peningkatan kapasitas produksi serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan pangan daerah	3 Menciptakan iklim dan perangkat peraturan yang bisa mengundang investasi usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura serta memperkuat kelembagaan	DPKPP, DPMPTSPK
		4 Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di Kabupaten Dairi yang memiliki potensi bahan baku produk pangan	4 Menumbuhkembangkan dunia usaha khususnya di hulu dan di hilir agribisnis tanaman pangan dan hortikultura serta memperkuat kelembagaan.	PERBANKAN, DPKPP, DPMPTSPK, DPUPR
		5 Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Dairi	5 Menciptakan iklim dan perangkat peraturan yang mengundang investasi usaha agribisnis tanaman pangan	DPKPP, DPMPTSPK
		6 Pengembangan sentra-sentra produksi pangan baru sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah.		DPKPP
		7 Pencegahan alih fungsi lahan		DPKPP, DPUPR
		8 Pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang berproduktivitas tinggi, bermutu baik dan sesuai keinginan pasar		DPKPP
		9 Perbaiki pola tanam dan penanganan budidaya dan pasca panen		

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Kebijakan/Indikasi Program		Perangkat Daerah Terkait
		Tahun 2021-2023	Tahun 2024-2025	
		10 Memperluas jaringan pemasaran produk pertanian		DPKPP, DPMPTSPK
		11 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang efisien secara bersama dalam kawasan yang berdaya saing serta berkerakyatan		DPKPP, DPMPTSPK
B	Pengembangan Infrastruktur			
		1 Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia	1 Perwujudan rencana struktur ruang dalam RTRW kabupaten dairi	DPUTR
		2 Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten dairi.	2 Pengembangan sistem infrastruktur yang terintegrasi, meliputi: jaringan transportasi darat, danau, jaringan, telekomunikasi, jaringan sumber daya air baku/bersih dan jaringan prasarana wilayah lainnya yang dikembangkan dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan aksesibilitas secara berkesinambungan, sinergis dan berjenjang antar PKI, PPL, PPK, hingga ke PKW yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya.	DPUTR
		3 Pengintegrasian pembangunan infrastruktur Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dairi.	3 Peningkatan infrastruktur strategis (seperti: jalan dan jembatan) pendukung sektor unggulan/potensial (seperti: pertanian dan pariwisata) dan wilayah dan persebarannya.	DPUTR
		4 Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang	4 Peningkatan dan pembangunan prasarana pertanian yang mendukung ketahanan pangan seperti: jaringan irigasi.	DPUTR

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Kebijakan/Indikasi Program		Perangkat Daerah Terkait
		Tahun 2021-2023	Tahun 2024-2025	
		5 Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).	5 Peningkatan jalan yang menghubungkan antar Pusat pusat kegiatan dan destinasi pariwisata.	DPUTR
		6 Percepatan pembangunan infrastruktur strategi yang Diharapkan sebagai prime mover seperti: jalan strategi Nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer	6 Pengembangan kerja sama pemerintah dg badan Usaha (KBPU) Dalam penyediaan infrastruktur Kawasan industri	DPUTR
			7 Pengembangan sektor strategis pendukung	DPUTR
C	Pengembangan Energi			
		1 Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan wilayah persebarannya.	1 Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik didalam negeri/nasional umumnya dan dikabupaten daira khususnya.	DPMPTSPK, DPUTR
		2 Penyiapan kebijakan pendukung, termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi	2 Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.	DPMPTSPK, DPUTR
		3 Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta penyiapan pembangunan infrastruktur dalam pendukung diversifikasi sumber energi guna mendorong tumbuhnya kawasan industri pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis	3 Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy) dan air sebagai sumber daya energi.	DPMPTSPK, DPUTR

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Kebijakan/Indikasi Program		Perangkat Daerah Terkait
		Tahun 2021-2023	Tahun 2024-2025	
		agroindustri.		
		4 Pengembangan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan energi terbarukan	4 Pemberian kemudahan dan / atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan	DPMPTSPK, DPUTR
III	Pengembangan	Sektor Unggulan / Prioritas		
A	Pariwisata			
		1 Pembangunan sebagai fasilitas pendukung pariwisata di sekitar DTW unggulan dan pengembangan kegiatan wisata.	1 Peningkatan kualitas DTW non- unggulan	DISPARBUDPORA
		2 Peningkatan dan menambah daya tarik wisata yang melakukan pencatatan jumlah kunjungan	2 Berkembangnya industri pariwisata dari berbagai jenis layanan dan kelas.	DISPARBUDPORA
		3 Pelatihan bagi para pengelola daya tarik wisata dan usaha pariwisata dalam perbaikan layanan	3 Peningkatan dan pengembangan klaster industri pariwisata melalui pembinaan dan pendampingan	DISPARBUDPORA
		4 Peningkatan promosi pariwisata internasional.	4	DISPARBUDPORA
		5 Pertumbuhan dan penyebaran fasilitas pariwisata seperti hotel, resort dan biro perjalanan wisata		DISPARBUDPORA
B	UMKM			
		1 Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKMK di daerah, klasifikasi, memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk	1 Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKMK di daerah, baik terkait dg aspek teknis, inovasi dan manajemen	DISPERINDAGKO P UKM,DPMPTSPK

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Kebijakan/Indikasi Program		Perangkat Daerah Terkait
		Tahun 2021-2023	Tahun 2024-2025	
		ditawarkan kerja sama dengan usaha besar dalam hal ini baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA);		
		2 Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKMK di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inpvasi dan manajemen;	2 Memfasilitas UMKMK dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dg mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo), temu usaha (matchmaking) dengan penanam modal (investor) potensial dll;	
		3 Memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo) temu usaha (matchmaking) dengan penanam modal (nvestor) potensial dan Lain-lain.		DISPERINDAGKO PUKM, DPMPTSPK
		4 Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah dan lain-lain.		DISPERINDAGKO PUKM, DPMPTSPK
		5 Memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada		DISPERINDAGKO PUKM, DPMPTSPK

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Kebijakan/Indikasi Program		Perangkat Daerah Terkait
		Tahun 2021-2023	Tahun 2024-2025	
		di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan.		
C	Industri			
		1 Identifikasi industri-industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan wilayah penyebarannya	1 Peningkatan penggunaan teknologi industri pengolahan barang jadi berbasis agro yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir	DISPERINDAGKO PUKM, DPMPTSPK
		2 Pengembangan industri pengolah yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan serta industri pupuk	2 Pengembangan sektor industri pengolahan barang jadi berbasis agro dengan skala besar, menghasilkan energi terbarukan.	DISPERINDAGKO PUKM, DPMPTSPK
		3 Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar berbasis pangan	3 Mengembangkan klaster industri berbasis agro yang berwawasan lingkungan dan berstandar internasional	DISPERINDAGKO PUKM, DPMPTSPK
		4 Mendorong tumbuhnya kawasan industri berbasis agroindustri terpadu		DISPERINDAGKO PUKM, DPMPTSPK

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi

6.3.4 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Arahan Bapak Presiden untuk penggunaan PDN dan UMKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pengadaan wajib menggunakan produk dengan TKDN minimal 25 % ketika sudah terdapat produk dengan akumulasi nilai TKDN dan BMP minimal 40%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 86 mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta yang Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara). Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Pasal 1 Ayat 21 PP No 29 Tahun 2018 adalah Barang dan Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja WNI, prosesnya menggunakan bahan baku/komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Adapun Tujuan Penggunaan Produk Dalam Negeri yaitu:

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
2. Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia
3. Meningkatkan kesempatan kerja
4. Penghematan devisa negara
5. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Adapun Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
2. Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 melalui aplikasi e- Katalog Bela Pengadaan Kabupaten Dairi. Adapun aplikasi ini sudah mengikuti peraturan antara lain:
 - a. wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
 - c. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
3. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan Barang/Jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.
5. Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

6.3.5. PENGENDALIAN INFLASI

Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Pada tahun 2022 dikeluarkan Surat Bupati Dairi Nomor 64/589.05/II/2022 tentang Peta Jalan (Roadmap)

Pengendalian Inflasi Kabupaten Dairi Periode Tahun 2022- 2024. Roadmap merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun.

Adapun program yang dilakukan dalam pengendalian inflasi Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disusun dalam Roadmap Pengendalian Inflasi di Kabupaten Dairi seperti pada tabel berikut :

Tabel 6.11 Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah

STRATEGI KUNCI	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIME LINE TARGET			INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
			2022	2023	2024		
KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga	Pengendalian dan Pengawasan LPG 3 KG dan BBM	Menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga	Menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga	Menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga	Terjaganya persediaan LPG 3 KG dan BBM Terjaminnya penjualan LPG 3 KG sesuai HET	Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Bagian Perekonomian
		Program Pasar Murah melalui pendistribusian barang kebutuhan pokok secara bundling, saat HBKN maupun just in time pengendalian harga	Penyediaan minimal 1.000 paket sembako	Penyediaan minimal 1.200 paket sembako	Penyediaan minimal 1.400 paket sembako	Penyediaan minimal 1.400 paket sembako	Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
KETERSEDIAAN PASOKAN	Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok	Menjaga Ketersediaan Beras dalam Jumlah yang cukup sebagai Cadangan Beras	Menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi	Menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi	Menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi	Frekuensi pelaksanaan kegiatan dan laporan	Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian, Ketahanan
		Pemerintah baik untuk kegiatan KPSH/OP-CBP dalam rangka stabilisasi harga maupun untuk penyaluran bantuan dalam kondisi darurat	harga Bahan Pokok	harga Bahan Pokok	harga Bahan Pokok		Pangan dan Perikanan bersama Perum Bulog Divre Kabanjahe
		Jaminan Usaha Tani Padi dan Usaha Ternak Sapi (Asuransi)	1500 Ha Lahan Padi 100 Ekor Ternak	2000 Ha Lahan Padi 150 Ekor Ternak	3000 Ha Lahan Padi 200 Ekor Ternak	Terjaminnya Usaha Tani Padi dan Usaha Tani Ternak	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Badan Perencanaan Pembangunan dan

STRATEGI KUNCI	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIME LINE TARGET			INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
			2022	2023	2024		
							Penelitian Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Peningkatan produktivitas sebesar 2% per tahun	Peningkatan produktivitas sebesar 3% per tahun	Peningkatan produktivitas sebesar 4% per tahun	Data peningkatan produktivitas dan laporan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Peningkatan Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Bertambah 5 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Bertambah 7 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Bertambah 9 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Data Peningkatan KRPL, Penurunan Angka Gizi Buruk dan laporan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penambahan tumbuhnya Desa Mandiri Pangan	Penambahan minimal 3 desa	Penambahan minimal 4 desa	Penambahan minimal 5 desa	Peningkatan desa mandiri pangan	Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Mengelola Permintaan	Optimalisasi KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga)	Persiapan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terjaminnya ketersediaan beras kepada masyarakat	Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Bulog Kabanjahe
		Terbentuknya Kampung Cabai dan Kampung Bawang	Persiapan dan perencanaan pembentukan kampung cabai dan kampung bawang serta rencana produk turunan	Terbentuknya Satu Kampung Cabai dan Satu Kampung Bawang dan UKM pengolahan produk turunan	Adanya penambahan jumlah Kampung Cabai dan Kampung Bawang serta industri produk turunan	Dokumen perencanaan, pembentukan kampung dimaksud, produk turunan serta laporan	Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			2 Kampung Cabai	2 Kampung Cabai	2 Kampung Cabai		Dinas Perindustrian,

STRATEGI KUNCI	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIME LINE TARGET			INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
			2022	2023	2024		
			& 1 Kampung Bawang	& 1 Kampung Bawang	& 1 Kampung Bawang		Perdagangan, Koperasi dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Camat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bagian Perekonomian
		Peningkatan infrastruktur perdagangan (digital market) bagi UMKM pangan / gapoktan	Kajian model bisnis	3 UMKM	5 UMKM		Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Produksi Domestik	Perluasan Adopsi Teknonologi (IoT) dalam budidaya perikanan, pertanian & hortikultura untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pangan melalui penguatan/replikasi pada umkm binaan	5 umkm/ petani/ pembudidaya ikan/ pelaku usaha binaan sudah mengadopsi IoT	10 umkm/ petani/ pembudidaya ikan/ pelaku usaha binaan sudah mengadopsi IoT	15 umkm/ petani/ pembudidaya ikan/ pelaku usaha binaan sudah mengadopsi IoT		Dilaksanakan Oleh Bagian Perekonomian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Sarana dan infrastruktur produksi	Pelaksanaan Pasar lelang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pasar lelang komoditi hasil pertanian	Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

STRATEGI KUNCI	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIME LINE TARGET			INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
			2022	2023	2024		
		Pembentukan bumdes pangan	5 bumdes	10 bumdes	15 bumdes	Peningkatan peran bumdes dalam menjaga ketersediaan pasokan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KELANCARAN DISTRIBUSI	Mendorong Kerjasama Antar Daerah / Desa	Pengembangan model bisnis kerjasama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerjasama antar daerah untuk komoditas bahan pangan pokok	Pengembangan business model antara daerah surplus dan daerah defisit Komoditas cabai merah, beras, dan perikanan 1 MoU Antar Daerah 2 MoU Antar Desa	Pengembangan business model antara daerah surplus dan daerah defisit Komoditas cabai merah, beras, dan perikanan 1 MoU Antar Daerah 2 MoU Antar Desa	Pengembangan business model antara daerah surplus dan daerah defisit Komoditas cabai merah, beras, dan perikanan 1 MoU Antar Daerah 2 MoU Antar Desa	Adanya MoU / kerjasama	Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bagian Perekonomian
KOMUNIKASI EFEKTIF	Memperbaiki Kualitas Data Pemantauan Harga	Penguatan kualitas statistik harga bahan makanan	Sinergi pencatatan harga	Sinergi pencatatan harga	Sinergi pencatatan harga	Laporan	Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Camat Bagian Perekonomian
		Survei data pasokan komoditi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Optimalisasi aplikasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Laporan	Dinas Perindustrian,

STRATEGI KUNCI	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIME LINE TARGET			INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
			2022	2023	2024		
		iHarapanku					Perdagangan, Koperasi & UKM Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Camat
	Memperkuat Koordinasi	Penyebaran informasi	1 pojok Informasi	1 pojok informasi	1 pojok informasi	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Camat Bagian Perekonomian
	Penguatan kelembagaan	Peningkatan pemahaman peserta capacity building melalui pre & post test	2 kali dalam setahun oleh Bank Indonesia 1 kali dalam setahun oleh bagian perekonomian 2 kali dalam satu tahun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 kali dalam satu tahun oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2 kali dalam setahun oleh Bank Indonesia 1 kali dalam setahun oleh bagian perekonomian 2 kali dalam satu tahun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 kali dalam satu tahun oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2 kali dalam setahun oleh Bank Indonesia 1 kali dalam setahun oleh bagian perekonomian 2 kali dalam satu tahun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 kali dalam satu tahun oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Laporan	Dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Dairi

6.3.6 PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM (PRKBI)

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahan Iklim (PRKBI) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penerapan pembangunan rendah karbon (PRK) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan. Pada lingkup nasional, dukungan terhadap Pembangunan Rendah Karbon terus bergulir, akan tetapi untuk Kabupaten Dairi belum optimal kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain. Pemerintah Kabupaten telah menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap penerapan pembangunan rendah karbon di daerah. Informasi mengenai berbagai dampak dan manfaat dari pembangunan rendah karbon yang belum tersampaikan secara merata kepada berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dukungan dari sektor swasta belum optimal. Komunikasi dan penjangkauan terhadap aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran (*awareness*) perlu semakin digencarkan, sehingga diharapkan keterlibatan aktor non-pemerintah terhadap agenda pembangunan rendah karbon dapat semakin ditingkatkan.

Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

Rencana Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Sumatera Utara:

1. Penyusunan mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta/BUMD untuk implementasi piloting PRKBI;
2. Implementasi kegiatan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Gunung Sitember dan Tanah Pinem;
3. Implementasi kegiatan Penerapan pertanian berketahanan iklim (Lokasi Desa Parbuluan V Kec. Parbuluan).

6.3.7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET TPB/SDGs

Strategi dan arah kebijakan pencapaian target TPB/SDGs dilaksanakan dilaksanakan pada Tahun 2025-2026 melalui :

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Dalam tujuan 1 TPB yaitu tanpa kemiskinan, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang telah tercapai yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan, Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, Persentase rumah tangga kumuh perkotaan, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat, Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial, Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Pada tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target, yaitu indikator Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta, Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek pada anak usia dibawah dua tahun dan lima tahun (baduta dan balita), Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia

kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe, Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif.

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Untuk tujuan 3 terdapat 20 indikator dan ada 14 indikator yang sudah tercapai. Indikator-indikator yang sudah mencapai target meliputi angka kematian ibu, proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup balita, Prevalensi HIV pada populasi dewasa, Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun, Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun, Prevalensi penyalahgunaan narkoba, Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR), Total Fertility Rate (TFR), Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Pada tujuan 4 yaitu Pendidikan Berkualitas, sebanyak 13 (tiga belas) indikator telah mencapai target yaitu Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i)membaca, (ii)matematika, APK SD/MI/Sederajat, APK SMP/MTs/ sederajat, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun, APK PAUD, Proporsi remaja dan dewasa dengan ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi, Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat, Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat, Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun, Proporsi sekolah dengan akses ke listrik, persentase guru TK yang bersertifikat pendidik, persentase guru SD yang bersertifikat pendidik, persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.

Tujuan 5: Kesenjangan Gender

Untuk tujuan 5, terdapat 8 (delapan) indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tersebut, 7 indikator yang sudah mencapai target, yaitu Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan mengalami kekerasan kebijakan yang mendukung responsif gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan perempuan dewasa dan anak perempuan (15-64 tahun) yang mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir, prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan, persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun, Unmet Need KB, Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern.

Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak, terdapat 8 (delapan) indikator, 6 indikator yang telah mencapai target, yaitu (1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, (2) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (3) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (4) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (5) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) (6) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.

Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau, hanya ada 1 (satu) indikator dan tercapai yaitu Rasio Elektrifikasi.

Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 5 (lima) indikator dan hanya terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target, yaitu Upah

rata-rata per jam pekerja.

Tujuan 9: Industri Inovasi dan Infrastruktur

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-9 yaitu Industri Inovasi dan Infrastruktur, hanya terdapat 5 indikator dan semuanya mencapai target yang telah ditentukan yaitu : (1) Jumlah dermaga penyeberangan, (2) Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri, (3) Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband, (4) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, (5) Proporsi individu yang menggunakan internet.

Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 yaitu Berkurangnya Kesenjangan, terdapat 5 (lima) indikator dan terdapat 2 (dua) indikator dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu (1) Jumlah Desa tertinggal, (2) Jumlah desa mandiri. Adapun indikator yang belum mencapai target untuk tujuan ke-10 SDGs adalah (1) Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas (2) Jumlah penanganan pengaduan HAM (3) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial bidang ketenagakerjaan.

Tujuan 12: pola Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12 ada 2 (dua) indikator dan keduanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu (1) Persentase sampah perkotaan yang tertangani dan (2) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-15 yaitu Ekosistem Daratan, terdapat 2 (dua) indikator dan 1 (satu) yang mencapai target yaitu Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan dan 1(satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, terdapat 13 (tiga belas) indikator.

Dari indikator tersebut, hanya sebanyak 8 (delapan) indikator telah mencapai target yaitu (1) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan; (2) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun; (3) Indeks Perilaku Anti Korupsi; (4) Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; (5) Persentase peningkatan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); (6) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif/eselon; (7) Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur; (8) Persentase anak yang memiliki akte kelahiran. Adapun indikator yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain adalah (1) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir; (2) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir (2 (dua) indikator tersebut tidak ada data karena pihak Polre Dairi tidak dapat memberikan data dimaksud); (3) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; (4) Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan; (5) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17 yaitu Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, terdapat 1 (satu) indikator yaitu Rasio penerimaan pajak terhadap PDB dan target indikator dimaksud sudah tercapai.

6.4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 – 2026

Program pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu global, isu-isu nasional dan isu-isu daerah. Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPD 2025-2026 Kabupaten Dairi adalah pendekatan perencanaan pembangunan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial . Pendekatan ini pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daera. Inilah titik pusat dari perencanaan berbasis pendekatan ini. Dalam hal ini perangkat daerah yang terlibat tersebut kita namakan integratif. Kemudian program program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah yang terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan Holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang diintervensi oleh banyak Perangkat Daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik. Penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.32 Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026

NO	TEMA PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Tema Pembangunan Tahun 2025 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Infrastruktur dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas dan kualitas infrastruktur daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan 2. Peningkatan pengelolaan sumber daya air 3. Peningkatan penyediaan air minum/bersih 4. Peningkatan penyelenggaraan bangunan/gedung dan lingkungan 5. Peningkatan penyusunan dan pemanfaatan dokumen penataan ruang 6. Peningkatan penyelenggaraan bina konstruksi 7. Peningkatan akses rumah layak huni 8. Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum 9. Peningkatan pengelolaan air limbah/sanitasi 10. Peningkatan koordinasi pemanfaatan tanah/lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Penataan Ruang 5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 11. Peningkatan penanganan rumah dan kawasan permukiman kumuh 12. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak berkelanjutan 13. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum 3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 14. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

NO	TEMA PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		Peningkatan penanganan lahan kritis	15. Peningkatan upaya penanganan lahan kritis	
		Peningkatan Penanggulangan Bencana	16. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 17. Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 18. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat 19. Peningkatan Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat 20. Peningkatan penanganan pemadam kebakaran	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	21. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah 22. Peningkatan kualitas pengendalian internal pemerintah dalam pencapaian target yang telah ditentukan 23. Peningkatan penerapan cascading kinerja	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	24. Peningkatan efektifitas pelaksanaan standar pelayanan 25. Peningkatan pelayanan publik di kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah	26. Peningkatan turunan Peraturan Pemerintah ke dalam Peraturan Daerah dan kebijakan daerah 27. Peningkatan efektifitas pengendalian kebijakan pemerintah 28. Peningkatan kapasitas SDM perumus	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	TEMA PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			kebijakan daerah	
		Peningkatan tata Kelola keuangan dan barang milik daerah	29. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 30. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Peningkatan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	31. Peningkatan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Peningkatan sistem pengawasan dan pembinaan daerah	32. Peningkatan pengawasan dan pembinaan perangkat daerah 33. Peningkatan pendampingan dalam penegakan integritas	1. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
		Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	34. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 35. Penyusunan arsitektur SPBE daerah	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	36. Peningkatan efektivitas penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat 37. Peningkatan pengelolaan sumber daya komunikasi publik 38. Peningkatan penyebaran informasi dan komunikasi publik	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Peningkatan penyelenggaraan satu data Indonesia	39. Peningkatan kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral	1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Peningkatan mutu	40. Peningkatan pengelolaan arsip secara baku	1. Program Pengelolaan Arsip

NO	TEMA PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		pengelolaan arsip		
		Peningkatan akses layanan arsip	41. Peningkatan pemanfaatan arsip	
		Peningkatan sarana prasarana desa	42. Peningkatan pemanfaatan dana desa	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2	Tema Pembangunan Tahun 2026 Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Sektor Ekonomi Daerah dan Ketrampilan Berusaha	Peningkatan kualitas pelaksanaan sistem merit manajemen ASN	1. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah 2. Peningkatan kualitas pengembangan kompetensi aparatur	1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas aparatur pemerintah desa	3. Peningkatan kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa 4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset desa	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Peningkatan peran kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan desa	5. Peningkatan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Meningkat Layanan Mutu Pendidikan	6. Memenuhkan dan pemerataan kebutuhan guru 7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 8. Memenuhkan dan pemerataan cakupan akses pelayanan pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan literasi masyarakat dan kualitas layanan perpustakaan	9. Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan 10. Peningkatan minat baca masyarakat 11. Peningkatan pengembangan perpustakaan berbasis digital	1. Program Pembinaan Perpustakaan

NO	TEMA PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		Peningkatan prestasi olahraga dan Kualitas pembangunan Kepemudaan	12. Peningkatan kualitas atlet dan tenaga keolahragaan 13. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 14. Peningkatan daya saing kepemudaan	1. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	15. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang berkualitas 16. Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita 17. Peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan yang mudah cepat dan setara 18. Peningkatan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 19. Optimalisasi advokasi, komunikasi informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penurunan angka kesakitan	20. Penurunan angka kesakitan menular dan tidak menular 21. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	
		Peningkatan perbaikan gizi masyarakat	22. Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat 23. Peningkatan edukasi penanganan dan pencegahan stunting	
		Peningkatan Peranan Perempuan dalam pembangunan	24. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan 25. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah	1. Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Peningkatan pendampingan dan	26. Peningkatan kapasitas SDM lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak	1. Program Perlindungan Perempuan 2. Program Perlindungan Khusus

NO	TEMA PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		perlindungan perempuan dan anak	27. Peningkatan fasilitas penanganan dan pendampingan perempuan dan anak	Anak
		Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	28. Peningkatan Penanganan penanggulangan kemiskinan 29. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin dan kelompok rentan	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial	30. Peningkatan penyandang PMKS memperoleh jaminan dan bantuan perlindungan sosial tepat sasaran	1, Program Pemberdayaan Sosial
		Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial	31. Peningkatan kualitas validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis	1. Program Rehabilitasi Sosial
		Peningkatan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	32. Peningkatan perlindungan sosial pasca bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	1. Program Penanganan Bencana
		Peningkatan Kualitas dan Kompetensi tenaga kerja	33. Penyusunan rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar 34. Penyediaan kebutuhan sarana prasarana balai latihan kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Peningkatan produktivitas pertanian	35. Peningkatan kualitas dan pembangunan infrastruktur pertanian dan jaringan irigasi pertanian 36. Peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi sektor pertanian 37. Peningkatan bantuan alsintan yang tepat sasaran dan tepat guna bagi petani 38. Peningkatan bantuan benih/bibit unggul dan pupuk pertanian	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 2. Program Penyediaan Dan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian. 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencaca Pertanian

NO	TEMA PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			39. eningkatan kualitas pengendalian Hama 40. Penyakit dan bencana pertanian Penurunan alih fungsi lahan	
		Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian	41. Peningkatan kualitas petani dalam penguasaan teknologi pertanian 42. Peningkatan kualitas penyuluh pertanian 43. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan petani	1. Program Penyuluhan Pertanian
		Peningkatan nilai tambah sektor pertanian	44. Peningkatan skill petani dalam pengolahan hasil pertanian 45. Peningkatan fasilitas teknologi pengolahan hilirisasi produk pertanian	2. Program Perencanaan Pembangunan Industri
		Peningkatan penyelenggaraan ketahanan pangan	46. Penyediaan data neraca bahan makanan dan data cadangan pangan yang berkualitas	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Yntuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Peningkatan ketersediaan pangan	47. Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan 48. Pembangunan Infrastruktur lumbung pangan	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan penanganan kerawanan pangan	49. Peningkatan sosialisasi tentang konsumsi makanan B2SA (Berimbang, Bergizi, Sehat dan Aman) 50. Optimalisasi penanganan dan pengawasan keamanan pangan	1. Peningkatan penanganan kerawanan pangan
		Peningkatan akses dan kapabilitas KUKM	51. Peningkatan pengembangan koperasi 52. Peningkatan KUKM berbasis digital 53. Peningkatan sarana dan prasarana produksi IKM	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi
		Peningkatan kualitas produk IKM	54. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah 55. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas	3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha

NO	TEMA PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			SDM IKM	Mikro (UMKM)
		Peningkatan pelayanan perizinan berusaha	56. Peningkatan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan 57. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal
		Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	58. Peningkatan pelaksanaan kemudahan investasi 59. Peningkatan ketersediaan informasi peluang potensi investasi 60. Peningkatan promosi investasi	4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan dan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
		Peningkatan pengembangan destinasi wisata	61. Peningkatan pemasaran pariwisata 62. Peningkatan pengembangan ekonomi kreatif 63. Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Dairi, baik program-program yang mendukung pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun untuk memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatifnya. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan.

Pada dasarnya ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi saja, melainkan bisa dari berbagai sumber pendanaan lain, seperti APBN maupun pendanaan lainnya. Namun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah dalam bab ini hanya mencantumkan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi. Kerangka pendanaan ini akan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya kemudian menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Dairi 2025-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Keterpenuhan SPM Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan	88,08 Persen	100 Persen	136.287.299,70	100 Persen	147.644.574.682,00	100 Persen	Dinas Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Tersedia	- Persen	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	220.000.000,00	100 Persen	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terpetakan	37,69 Persen	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	275.000.000,00	100 Persen	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar	1:15 Rasio	1:15 Rasio	0,00	1:15 Rasio	0,00	1:15 Rasio	Dinas Pendidikan
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal Dalam Penilaian Kelayakan Usul Perizinan yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	23,25 Persen	100 Persen	107.545.400,00	100 Persen	116.550.850,00	100 Persen	Dinas Pendidikan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan balita gizi kurang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan balita stunting yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	- Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada bayi	79,60 Persen	90 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan masyarakat menjadi anggota JKN	89,92 Persen	96 Persen	0,00	98 Persen	0,00	98 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan	100 Persen	100 Persen	335.730.000.000,00	100 Persen	401.195.000.000,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	85,52 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	- Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persenstase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	53,34 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81,70 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	68,39 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	71,24 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	71,32 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	75,56 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	58,40 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC Sesuai standar	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penanganan kejadian gawat darurat sesuai standar	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56,10 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan BMHP esensial	94,40 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	11 Persen	56 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	84,83 Persen	89 Persen	0,00	94 Persen	0,00	94 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,23 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Pemenuhan Peningkatan Kapasitas SDM RSUD	97,59 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan ketersediaan SDM sesuai standar	50 Persen	72,22 Persen	0,00	83,33 Persen	0,00	83,33 Persen	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TTU/TPM, IRT, DAM yang memenuhi syarat kesehatan	70 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga aktif	71,01 Persen	77 Persen	0,00	89 Persen	0,00	89 Persen	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga aktif Persentase Posyandu Aktif	97,96 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pengelolaan sumber daya air	93,61 Persen	90 Persen	9.000.000.000,00	93 Persen	10.000.000.000,00	93 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan pengelola dan pengembangan sistem penyediaan air minum	79,54 Persen	75 Persen	12.000.000.000,00	80 Persen	13.000.000.000,00	80 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	85,71 Persen	85,79 Persen	5.000.000.000,00	86 Persen	5.000.000.000,00	86 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	61,27 Persen	61,46 Persen	2.000.000.000,00	62 Persen	2.000.000.000,00	62 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung	100 Persen	100 Persen	2.100.000.000,00	100 Persen	2.520.000.000,00	100 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya	60 Persen	65 Persen	1.750.000.000,00	70 Persen	2.100.000.000,00	70 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan penyelenggaraan jalan kabupaten	58,43 Persen	58,60 Persen	100.000.000.000,00	58,80 Persen	125.000.000.000,00	58,80 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi	31,20 Persen	32 Persen	450.000.000,00	32,50 Persen	540.000.000,00	32,50 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan penyelenggaraan penataan ruang	50 Persen	60 Persen	2.000.000.000,00	70 Persen	2.000.000.000,00	70 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan	100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	300.000.000,00	100 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	71,02 Persen	72,66 Persen	2.000.000.000,00	73,53 Persen	2.000.000.000,00	73,53 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	64,18 Persen	66,00 Persen	9.000.000.000,00	68,00 Persen	10.000.000.000,00	68,00 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 Persen	100 Persen	480.000.000,00	100 Persen	550.000.000,00	100 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	100 Persen	100 Persen	650.000.000,00	100 Persen	880.000.000,00	100 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen	960.000.000,00	100 Persen	1.230.000.000,00	100 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	100 Persen	100 Persen	1.150.000.000,00	100 Persen	1.400.000.000,00	100 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100 Persen	100 Persen	900.000.000,00	100 Persen	1.150.000.000,00	100 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	60 Persen	70 Persen	2.765.861.470,00	75 Persen	3.042.447.617,00	75 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan	42,62 Persen	43,22 Persen	995.500.000,00	43,83 Persen	1.095.050.000,00	43,83 Persen	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan cakupan pelayanan PPKS (Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia, gelandangan dan pengemis)	4,80 Persen	5,50 Persen	1.070.000.000,00	6 Persen	1.120.200.000,00	6 Persen	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial	43,83 Persen	43,95 Persen	2.858.528.210,00	44,02 Persen	3.220.481.031,00	44,02 Persen	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapat penanganan	100 Persen	100 Persen	553.000.000,00	100 Persen	602.300.000,00	100 Persen	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPN Kabupaten yang dikelola	100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	100 Persen	385.000.000,00	100 Persen	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
					K	Rp	K	Rp	K		
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang ditetapkan	0 Persen	100 Persen	360.000.000,00	100 Persen	360.000.000,00	100 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	0,12 Persen	0,13 Persen	1.700.000.000,00	0,14 Persen	1.970.000.000,00	0,14 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	25,05 Persen	25,10 Persen	100.000.000,00	25,15 Persen	110.000.000,00	25,15 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	1,58 Persen	1,58 Persen	501.550.000,00	1,58 Persen	551.705.000,00	1,58 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	98,15 Poin	98,20 Poin	685.000.000,00	98,22 Poin	685.000.000,00	98,22 Poin	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	62,57 Poin	66,15 Poin	0,00	66,15 Poin	0,00	66,15 Poin	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Perempuan mendapat pelatihan dan peningkatan kapasitas	0,73 Persen	1,1 Persen	0,00	1,3 Persen	0,00	1,3 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRD	72,7 Persen	77,5 Persen	0,00	80 Persen	0,00	80 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	20,83 Persen	62,5 Persen	0,00	76,92 Persen	0,00	76,92 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan dalam organisasi Publik	5,7 Persen	5,9 Persen	0,00	6 Persen	0,00	6 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	68 Persen	72 Persen	0,00	75 Persen	0,00	75 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan dalam Politik	0,20 Persen	0,25 Persen	0,00	0,27 Persen	0,00	0,27 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat penanganan	100 Persen	100 Persen	690.000.000,00	100 Persen	900.000.000,00	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,91 Angka	0,3 Angka	0,00	0,3 Angka	0,00	0,3 Angka	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	N/A Persen	100 Persen	139.000.000,00	100 Persen	139.000.000,00	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender Data dan anak yang dikelola	N/A Persen	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan Keterpenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak/ Status Kabupaten Layak Anak	63 Persen	67 Persen	245.000.000,00	70 Persen	250.000.000,00	70 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak pemerlu perlindungan yang mendapatkan pelayanan	25 Persen	100 Persen	330.000.000,00	100 Persen	350.000.000,00	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan infrastruktur pendukung kedaulatan dan kemandirian pangan	70 Persen	90 Persen	297.000.000,00	100 Persen	326.700.000,00	100 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan	0,38 Persen	0,40 Persen	385.000.000,00	0,41 Persen	423.500.000,00	0,41 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	78 Persen	84 Persen	0,00	87 Persen	0,00	87 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	75 Persen	81 Persen	0,00	84 Persen	0,00	84 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rawan pangan	62 Persen	65 Persen	590.000.000,00	70 Persen	649.000.000,00	70 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	100 Persen	100 Persen	330.000.000,00	100 Persen	330.000.000,00	100 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	3,37 Persen	3,47 Persen	660.000.000,00	3,60 Persen	660.000.000,00	3,60 Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang sesuai standar	100 Persen	100 Persen	1.000.000.000,00	100 Persen	1.350.000.000,00	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas air, udara yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	1.310.000.000,00	100 Persen	1.371.000.000,00	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola di Kabupaten Dairi	100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	100 Persen	940.000.000,00	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen pengendalian B3 dan limbah B3	0 Persen	100 Persen	115.000.000,00	100 Persen	125.000.000,00	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	110.000.000,00	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	0 Persen	100 Persen	77.000.000,00	100 Persen	84.700.000,00	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	0 Persen	100 Persen	300.000.000,00	100 Persen	330.000.000,00	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	0 Persen	100 Persen	110.000.000,00	100 Persen	120.000.000,00	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah	68 Persen	72 Persen	11.030.000.000,00	71 Persen	9.860.000.000,00	71 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	24 Persen	40 Persen	0,00	45 Persen	0,00	45 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	98,42 Persen	99,50 Persen	575.130.000,00	100 Persen	575.130.000,00	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KIA	63,66 Persen	70 Persen	0,00	75 Persen	0,00	75 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-17 tahun	99,23 Persen	99,50 Persen	100.000.000,00	100 Persen	110.000.000,00	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Perkawinan Tercatat	40,11 Persen	45 Persen	0,00	50 Persen	0,00	50 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yg menandatangani kerjasama Pemanfaat an data kependudukan berbasis NIK	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengolahan dan penyajian data kependudukan	100 Persen	100 Persen	1.375.000.000,00	100 Persen	1.512.500.000,00	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase tingkat Pelayanan administrasi Pemerintahan Desa	66,67 Persen	72,22 Persen	5.697.000.000,00	77,78 Persen	4.460.000.000,00	77,78 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	18,18 Persen	27,27 Persen	660.000.000,00	36,36 Persen	730.000.000,00	36,36 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	1,82 Persen	1,61 Persen	203.439.445,00	1,51 Persen	223.783.390,00	1,51 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Total Fertility Rate) (Angka kelahiratan total)	3,13 Persen	3,56 Persen	203.000.000,00	3,54 Persen	230.000.000,00	3,54 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Unmet-Need	27,2 Persen	20,50 Persen	0,00	18,50 Persen	0,00	18,50 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	63,13 Persen	72,53 Persen	150.000.000,00	75,73 Persen	180.000.000,00	75,73 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan fungsi kampung berkualitas	48,14 Persen	62,96 Persen	0,00	70,37 Persen	0,00	70,37 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota kelompok kegiatan /POKTAN (Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia) ber-KB	70,25 Persen	72,52 Persen	3.257.800.000,00	73,25 Persen	3.267.800.000,00	73,25 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Jalan	55,00 Persen	70 Persen	2.600.000.000,00	70 Persen	3.000.000.000,00	70 Persen	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas	87,50 Persen	87,60 Persen	0,00	87,70 Persen	0,00	87,70 Persen	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi/ berita yang dipublikasikan di mas media dan radio	100 Persen	100 Persen	2.985.375.161,00	100 Persen	3.920.000.000,00	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	65 Persen	92 Persen	3.233.158.658,00	95 Persen	4.079.069.078,00	95 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	16 Persen	16 Persen	180.000.000,00	18 Persen	180.000.000,00	18 Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi yang terlatih	0 Persen	16 Persen	175.000.000,00	18 Persen	180.800.000,00	18 Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0 Satuan	0 Satuan	0,00	0 Satuan	0,00	0 Satuan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM dengan peningkatan volume usaha	20 Persen	11 Persen	363.000.000,00	12 Persen	399.300.000,00	12 Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan UMKM	0 Satuan	0 Satuan	0,00	0 Satuan	0,00	0 Satuan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal	13,01 Persen	13,10 Persen	200.000.000,00	13,15 Persen	640.000.000,00	13,15 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah penanam modal	23,19 Persen	23,30 Persen	500.000.000,00	23,50 Persen	550.000.000,00	23,50 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Perizinan	78,366 Indeks	79,00 Indeks	0,00	79,50 Indeks	0,00	79,50 Indeks	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan melalui aplikasi	99,79 Persen	100 Persen	700.000.000,00	100 Persen	850.000.000,00	100 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	99,19 Persen	99,25 Persen	0,00	99,30 Persen	0,00	99,30 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara online	3,45 Persen	3,50 Persen	650.000.000,00	3,60 Persen	715.000.000,00	3,60 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan Perizinan	0 Persen	50 Persen	100.000.000,00	60 Persen	110.000.000,00	60 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,94 Persen	1,1 Persen	900.000.000,00	1,2 Persen	990.000.000,00	1,2 Persen	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	25 Persen	30 Persen	7.770.000.000,00	40 Persen	5.147.000.000,00	40 Persen	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	N/A Persen	70 Persen	150.000.000,00	80 Persen	161.295.904,00	80 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menerapkan pengamanan informasi dan persandian	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	75.000.000,00	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	100 Persen	100 Persen	1.500.000.000,00	100 Persen	1.650.000.000,00	100 Persen	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	220.000.000,00	100 Persen	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Situs dan beda cagar budaya yang dilestarikan	0 Persen	5 Persen	600.000.000,00	10 Persen	660.000.000,00	10 Persen	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Dengan Satuan: Poin)	17,45 Poin	17,75 Poin	500.000.000,00	18,22 Poin	550.000.000,00	18,22 Poin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	41,35 Persen	60 Persen	0,00	65 Persen	0,00	65 Persen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75 Persen	75 Persen	160.000.000,00	75 Persen	190.000.000,00	75 Persen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16 Persen	75 Persen	50.000.000,00	75 Persen	60.500.000,00	75 Persen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase produksi perikanan	10 Persen	14 Persen	440.000.000,00	16 Persen	484.000.000,00	16 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	100 Persen	100 Persen	3.450.000.000,00	100 Persen	3.795.000.000,00	100 Persen	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kerja sama dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	700.000.000,00	100 Persen	770.000.000,00	100 Persen	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisata	100 Persen	100 Persen	600.000.000,00	100 Persen	660.000.000,00	100 Persen	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan yang diolah dengan alsintan	40,41 Persen	43,14 Persen	0,00	46,52 Persen	0,00	46,52 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanaman yang menggunakan pupuk bersubsidi sesuai standar	46,82 Persen	42,35 Persen	0,00	42,22 Persen	0,00	42,22 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luas pertanaman yang menggunakan bibit bersertifikat	0,87 Persen	0,91 Persen	3.613.500.000,00	0,93 Persen	3.974.850.000,00	0,93 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase BPP Kecamatan dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase embung pertanian yang dibangun/ diperbaiki	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Panjang Irigasi tersier dalam kondisi baik	46,82 Persen	49,38 Persen	1.100.000.000,00	50,66 Persen	1.210.000.000,00	50,66 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana penunjang produksi pertanian yang dibangun	100 Persen	60 Persen	0,00	63 Persen	0,00	63 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Panjang Jalan usaha tani dan jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan Ternak	59,93 Persen	100 Persen	600.000.000,00	100 Persen	650.000.000,00	100 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanaman yang menggunakan pupuk bersubsidi sesuai standar	100 Persen	100 Persen	495.000.000,00	100 Persen	544.500.000,00	100 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase fasilitasi kerjasama Kelompok Tani/Gapoktan	0 Persen	0,20 Persen	0,00	0,30 Persen	0,00	0,30 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani yang naik kelas	13,79 Persen	26,47 Persen	550.000.000,00	30,68 Persen	605.000.000,00	30,68 Persen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar	9 (1Pasar) Persen	27 (1Pasar) Persen	449.032.760,00	37 (1Pasar) Persen	493.936.036,00	37 (1Pasar) Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau	100 Persen	100 Persen	326.472.300,00	100 Persen	359.119.530,00	100 Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi Perdagangan	5 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	350.000.000,00	15 Pelaku Usaha	375.000.000,00	15 Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	100 Persen	100 Persen	344.567.300,00	100 Persen	379.024.030,00	100 Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase kerjasama pemasaran produk lokal yang dijalankan	33 (4 Kerjasama) Persen	33 (4 Kerjasama) Persen	176.000.000,00	33 (4 Kerjasama) Persen	193.600.000,00	33 (4 Kerjasama) Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal yang dipasarkan secara online	0 Persen	15 Persen	0,00	20 Persen	0,00	20 Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat produksi dan kualitasnya	20 Persen	40 Persen	1.308.054.440,00	60 Persen	1.438.859.884,00	60 Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang terfasilitasi permodalannya	20 Persen	20 Persen	0,00	20 Persen	0,00	20 Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata pada SIINas	20 Persen	40 Persen	50.000.000,00	50 Persen	55.000.000,00	50 Persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01		SEKRETARIAT DAERAH								
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Bahan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	0 Persen	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	670.000.000,00	100 Persen	710.000.000,00	100 Persen	Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD								

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	100 Persen	100 Persen	14.948.707.950,00	100 Persen	14.948.707.950,00	100 Persen	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01		PERENCANAAN								
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pemenuhan Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	110.000.000,00	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan program RKPD terhadap RPJMD/RPD	100 Persen	100 Persen	1.000.000.000,00	100 Persen	1.100.000.000,00	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				0,00		0,00		-
5	02		KEUANGAN								
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan dan Penetapan APBD Tepat Waktu	31 Desember Tepat Waktu	31 Desember Tepat Waktu	0,00	31 Desember Tepat Waktu	0,00	31 Desember Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar	100 Persen	100 Persen	220.474.831.500,00	100 Persen	242.522.314.650,00	100 Persen	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Layanan Penatausahaan Keuangan Sesuai Standar	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD Yang realisasi Belanja Minimal 95%	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Daerah Yang diinventarisasi	65 Persen	75 Persen	892.100.000,00	76 Persen	981.310.000,00	76 Persen	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
					K	Rp	K	Rp	K		
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentasi Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	0 Persen	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentasi Realisasi Pajak Daerah	0 Persen	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	0 Persen	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00	0 Persen	Badan Pendapatan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN								
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP Minimal baik	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian jabatan sesuai kebutuhan	83,97 Persen	74,34 Persen	1.630.882.000,00	71,43 Persen	1.793.970.200,00	71,43 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penurunan disiplin pegawai	0,04 Persen	0,17 Persen	0,00	0,13 Persen	0,00	0,13 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki pendidikan tinggi	61,32 Persen	52,50 Persen	0,00	52,92 Persen	0,00	52,92 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	71,44 Persen	79,00 Persen	1.826.842.142,00	79,13 Persen	2.009.526.357,00	79,13 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase usulan kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	1.000.000.000,00	100 Persen	1.100.000.000,00	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
					K	Rp	K	Rp	K		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH								
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan keuangan pemerintah daerah	90 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Inspektorat
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan kinerja pemerintah daerah	90 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Inspektorat
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	Inspektorat
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal	90 Persen	90 Persen	2.327.600.000,00	90 Persen	2.560.360.000,00	90 Persen	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dalam penerapan reformasi birokrasi	0 OPD	10 OPD	0,00	15 OPD	0,00	15 OPD	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dalam penegakan integritas	0 OPD	10 OPD	200.000.000,00	15 OPD	200.000.000,00	15 OPD	Inspektorat
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01		KECAMATAN								
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Sitinjo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	70.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	95.151.000,00	100 Persen	104.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Lae Parira
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	80.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	105.000.000,00	100 Persen	120.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	72.254.700,00	100 Persen	82.780.100,00	100 Persen	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	90.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Tiga Lingga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	85.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	80.000.000,00	100 Persen	95.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Berampu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	95.151.000,00	100 Persen	114.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Parbuluan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	65.000.000,00	100 Persen	80.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Silahisabungan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	280.733.993,00	100 Persen	302.500.000,00	100 Persen	Kecamatan Silima Pungga punga
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	400.063.670,00	100 Persen	440.070.037,00	100 Persen	Kecamatan Sumbul

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	26.138.132,00	100 Persen	79.113.660,00	100 Persen	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	6.410.549.000,00	100 Persen	7.051.603.900,00	100 Persen	Kecamatan Sidikalang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 Persen	100 Persen	180.000.000,00	100 Persen	195.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Sitinjo
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	190.000.000,00	100 Persen	210.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Sitinjo
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	115.000.000,00	100 Persen	140.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Berampu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	150.193.300,00	100 Persen	200.831.500,00	100 Persen	Kecamatan Silima Pungga punga
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	115.000.000,00	100 Persen	130.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	122.731.360,00	100 Persen	135.004.496,00	100 Persen	Kecamatan Sumbul

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	180.877.100,00	100 Persen	198.964.800,00	100 Persen	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	65.000.000,00	100 Persen	80.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	280.000.000,00	100 Persen	310.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	95.000.000,00	100 Persen	104.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Lae Parira
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	232.531.500,00	100 Persen	255.784.650,00	100 Persen	Kecamatan Sidikalang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	103.528.800,00	100 Persen	141.078.080,00	100 Persen	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	240.000.000,00	100 Persen	270.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	115.000.000,00	100 Persen	128.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Silahisabungan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	140.000.000,00	100 Persen	160.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Parbuluan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	100 Persen	90.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	38.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Sitinjo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	100 Persen	90.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Silima Pungga punga
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	35.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	30.200.280,00	100 Persen	32.709.387,00	100 Persen	Kecamatan Sumbul
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	45.200.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Parbuluan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	45.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Berampu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	35.000.000,00	100 Persen	48.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Lae Parira

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	112.000.000,00	100 Persen	135.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	68.000.000,00	100 Persen	82.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	80.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	100 Persen	102.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	28.000.000,00	100 Persen	32.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Silahisabungan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	19.622.900,00	100 Persen	28.785.130,00	100 Persen	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	100 Persen	100 Persen	28.238.000,00	100 Persen	31.061.800,00	100 Persen	Kecamatan Sidikalang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
					K	Rp	K	Rp	K		
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	100 Persen	100 Persen	165.986.000,00	100 Persen	182.585.941,00	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 Persen	100 Persen	525.000.000,00	100 Persen	925.000.000,00	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina	100 Persen	100 Persen	370.000.000,00	100 Persen	375.000.000,00	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang sesuai peraturan	100 Persen	100 Persen	809.000.000,00	100 Persen	1.000.000.000,00	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan pencegahan dini potensi konflik masyarakat	100 Persen	100 Persen	1.450.000.000,00	100 Persen	1.550.000.000,00	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menunjukkan keberhasilan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah Tahun 2025-2026 selain mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu, kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu tiga tahun mendatang. Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa rencana pembangunan daerah. Indikator kinerja makro menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Dairi , sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Dairi .

1. Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026.

Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2026

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Tahun ke	
				2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,18	75,50	75,70
2	Tingkat Kemiskinan	Angka	7,47	7,47-7,37	7,37-7,27
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	1,23	1,22	1,21
4	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	5,04	5,04-,5,25	5,25-5,50
5	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,221	0,219	0,218

Bab ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Dairi untuk dua tahun ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2025-2026, yang diturunkan dari RPJPD tahun 2005-2025 dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta program unggulan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator Makro Sebagian juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran. IKU pemerintah daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026**

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja		Kondisi Akhir 2026
				2025	2026	
1.	IPM	Poin	73,50	75,18	75,50	75,70
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	54,89	60,66	64,55	64,55
3	Indeks Pendidikan	Poin	70,18	70,27	70,72	70,72
4	Indeks Kesehatan	Tahun	0,83	0,84	0,85	0,85
5	Cakupan BPJS Ketenagakerjaan	Persen	11,92	11,924	12,00	12,00
6	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Disektor Formal	Persen	N/A	39.522	40	40
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	75,18	75,25	75,30	75,30
8	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,42	0,38	0,37	0,37
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Poin	79,86	82,44- 85,71	85,71- 88,71	85,71-88,71
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,04	5,04 - 5,25	5,25-5,50	5,25-5,50
11	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	1,11	1,11-1,41	1,41-1,71	1,41-1,71
12	PDRB Per Kapita ADHB	RP	35.877.624	38.324.079	41.500.000	41.500.000
13	Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	Persen	2,59	2,61-2,77	2,77-2,93	2,77-2,93
14	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	N/A	0,33-0,42	0,42-0,50	0,42-0,50
15	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	25,99	26,04- 25,38	25,38- 25,00	25,38-25,00
16	Pengeluaran Perkapita Masyarakat	Rp. (x 1.000)	10.969	11.200	11.500	11.500
17	PoU Rata-Rata Pengeluaran untuk makan	RP	N/A	591.183	650.000	650.000
18	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh	N/A	640-790	790-840	790-840
19	Tingkat Inflasi	Poin	2,3	1,63-3,3	1,63-3,3	1,63-3,3
20	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,47	7,47-7,37	7,37-7,27	7,37-7,27

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja		Kondisi Akhir 2026
				2025	2026	
21	Gini Ratio	Poin	0,221	0,219	0,218	0,218
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,23	1,22	1,21	1,21
23	Nilai Tukar Petani	Nilai	129,04	130,2	130,3	130,3
24	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	N/A	83,7	83,7	83,7
25	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	N/A	89,7	91,8	91,8
26	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,35	0,395-0,399	0,399-0,405	0,399-0,405
27	Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Persen	17,76	17,84	17,88	17,88
28	Pertumbuhan Investasi	Persen	13,01	13,10	13,15	13,15
29	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Persen	4,57	4,75	4,9	4,9
30	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	Orang	-	-	-	-
31	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Persen	-	-	-	-
32	Indeks Infrastruktur	Persen	61,49	64	67	67
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	78,96	76,90	77,07	77,07
34	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	N/A	1,00	1,00	1,00
35	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,53	0,75	0,75	0,75
36	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65,72	69,00	71,00	71,00
37	Indek Reformasi Hukum	Nilai	-	-	-	-
38	Survey Penilaian Integritas	Poin	69,92	74,74	74,74	74,74
39	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	-	-	-	-
40	Nilai SAKIP	Nilai	60,01	63,00	67,00	67,00
41	Indeks Pelayanan Publik	Poin	2,82	3	3,26	3,26
42	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
43	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3
44	Indeks SPBE	Poin	2,7	2,67	3	3,10
45	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Poin	-	-	-	-
46	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	75	75	100	100
47	Indeks Desa Membangun	Poin	0,65	0,67	0,69	0,69
48	Indeks Sistem Merit	Poin	118	120	125	125

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU OPD secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Berikut adalah IKU dari masing – masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2026

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	69,27	69,93	70,27	70,72
		Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Poin	N/A	0,65	0,67	0,69
		Indeks Harapan Lama Sekolah	Poin	N/A	0,74	0,76	0,78
		Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	N/A	49,76	50,26	50,76
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	N/A	99,49	99,79	100
		jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	N/A	1,57	1,96	2,35
		rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	skor	N/A	66,74	89,96	100
		Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	skor	N/A	66,98	85,49	100

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional	skor	N/A	57,44	91,55	100
		rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	skor	N/A	45,63	58,72	71,81
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	N/A	14,92	18,66	22,39
		Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV	Persen	N/A	40,13	40,81	41,49
		Indeks iklim keamanan SD	skor	N/A	72,57	81,23	89,89
		Indeks iklim keamanan SMP	skor	N/A	67,58	68,3	69,02
		Indeks iklim kebinekaan SD	skor	N/A	69,91	81,04	92,17
		Indeks iklim kebinekaan SMP	skor	N/A	66,8	74,17	81,54
		Indeks iklim Inklusivitas SD	skor	N/A	68,71	75,77	82,83
		Indeks iklim Inklusivitas SMP	skor	N/A	56,1	59,49	62,88
2	Dinas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Nilai	N/A	-	-	-
3	RSUD Sidikalang	Indeks Kepuasan Layanan PSC 119	Kategori	N/A	Baik	Baik	Baik
		Indeks Kepuasan Layanan RSUD	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD	%	N/A	85	90	90
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	93,61	90	95	95
		Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	62,48	62	65	65
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	71	75	80	80
		Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Persen	6,25	8	12	12
		Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	Persen	100	100%	100	100
		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	Persen	100	100%	100	100
		Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	Persen	25,04	25	28	28
		Cakupan ketersediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum	Persen	64,96	100	100	100
5	Satpol PP	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Persen	70	85	90	90
6	Badan Penanggulangan	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,53	0,70	0,75	0,75

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bencana Daerah	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	-	100	100	100
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	-	100	100	100
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persen	-	100	100	100
		Persentase Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persen	-	100	100	100
7	Dinas Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	6,20%	6,30%	6,40%	6,40%
		Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	Persen	59,80	59,85	59,95	59,95
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	100	100	100	100
8	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,23	1,22	1,21	1,21
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	98,77	99,00	99,10	99,10
		Pertumbuhan Investasi	Persen	13,01	13,10	13,15	13,15

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan Investor	Persen	23,19	23,30	23,50	23,50
		IKM Perijinan	Poin	78,366	79,00	79,50	79,50
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	TFR/ Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Poin	98,15	3,56	3,54	3,54
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	62,57	98,20	98,22	98,22
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	72,7	66,15	66,14	66,14
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	Persen	0,91	77,5	80	80
		Rasio kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,55	0,3	0,3	0,3
		Rasio kekerasan terhadap Anak (per 10.000 Anak)	Persen	75	0,67	0,67	0,67
		Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	27,2	76	80	80
		Unmet Need	Poin	98,15	20,50	18,50	18,50
10	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	130,1	130,2	130,3	130,3
11	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	78,96	76,90	77,07	77,07
		Indeks kualitas air (IKA)	Poin	60,7	74,61	74,81	74,81

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	96,52	83,79	83,99	83,99
		Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Poin	79,48	68,08	68,15	68,15
		Angka Gas Rumah Kaca	Persen	1	1	1	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	75,36	78,50	81,75	81,75
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Poin	0,65	0,67	0,69	0,69
		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	21	14	8	8
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	121	117	119	115
		Jumlah Desa Maju	Desa	19	29	32	32
		Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	1	2	3
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perintis	Unit	0	5	5	10
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pemula	Unit	13	2	2	17
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	Unit	7	1	1	9
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	Unit	0	1	1	2
14	Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas	Persen	87,50	87,60	87,70	87,70

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase ketersediaan Fasilitas Jalan	Persen	55	70	70,10	70,10
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Angka	2,67	3	3,10	3,10
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Menengah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persen	n/a	0,35	0,395-0,399	0,399-0,405
		Kontribusi Sektor Industri Perdagangan	Persen	17,76	17,84	17,88	17,88
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	4,57	4,75	4,90	4,90
		Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	29,32	32,00	34,00	34,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	17,45	17,75	18,22	18,22
19	Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	60,01 (Baik)	63	67	67
		Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,82	3,2	3,4	3,4
		Nilai EPPD	Nilai	2,2	3,01	3,1	3,1
		Indeks Reformasi Hukum	Poin	NA	70	75	75
		Nilai Kabupaten Peduli HAM	Nilai		89	90	90

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Persen	NA	100	100	100
		Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Perekonomian	Persen	NA	5	7	7
		Persentase program prioritas pembangunan yang dikendalikan, dievaluasi dan dilaporkan	Persen	NA	100	100	100
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	35,5	Skor 50,0 (Cukup)	Skor 50,0 (Cukup)	Skor 50,0 (Cukup)
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Persen		70	80	80
		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	2,7	2,8	2,9	2,9
		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Tepat Struktur	Persen		90	95	95
		Persentase Lokus UPP dengan Predikat Minimal B	Persen	NA	50	60	60
		Persentase capaian Pelayanan Keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	NA	100	100	100
		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	Persen	NA	100	100	100

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2026
					2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan DPRD atas fasilitasi sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100
		Persentase penetapan ranperda yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam inovasi daerah	%	N/A	100%	100%	100%
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Penyusunandan Penyampain Laporan Keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	0	100%	100%	100%
		Persentase Tanah Milik Pemkab Yang Bersertifikat	Persen	80%	80%	80%	80%
		Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Daeerah Yang Disusun	Persen	100%	100%	100%	100%
23	Badan Pengelola Pendapatan daerah	Persentase peningkatan Pajak dan Restribusi Daerah	Persen	22,43	22,43	22,43	22,43

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	Persen	n/a	2,59	2,61-2,77	2,77-2,93
		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen			0,33-0,42	0,42-0,50
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Poin	118,5	120)	125	125
25	Inspektorat Daerah	Tingkat kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persen	90	88,1	90	90
26	Kecamatan Sidikalang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Indeks	79,00	79,24	79,40	79,40
27	Kecamatan Sumbul	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Indeks	78,00	78,24	78,40	78,40
28	Kecamatan Silima Punggapungga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-pungga	Indeks	77,60	77,84	78,00	78,00
29	Kecamatan Siempat Nempu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Indeks	77,40	77,64	77,80	77,80
30	Kecamatan Tingalingga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tingalingga	Indeks	78,20	78,44	78,60	78,60
31	Kecamatan Tanah Pinem	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tanah	Indeks	77,80	78,04	78,20	78,20

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pinem					
32	Kecamatan Pegagan Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Indeks	76,80	77,04	77,20	77,20
33	Kecamatan Parbuluan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Parbuluan	Indeks	77,20	77,44	77,60	77,60
34	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Indeks	76,60	76,84	77,00	77,00
35	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Indeks	77,00	77,24	77,40	77,40
36	Kecamatan Lae Parira	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Lae Parira	Indeks	75,60	75,84	76,00	76,00
37	Kecamatan Gunung Sitember	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gunung Sitember	Indeks	75,40	75,64	75,80	75,80
38	Kecamatan Berampu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	Indeks	75,80	76,04	76,20	76,20
39	Kecamatan Silahsabungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silahsabungan	Indeks	76,40	76,64	76,80	76,80

No	OPD	IKU OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir
					2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Kecamatan Sitinjo	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sitinjo	Indeks	76,20	76,44	76,60	76,60
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik	orang	300	300	300	300
		Persentase potenssi gangguan/konflik yang teratasi	Persen	100	100	100	100

Tabel 8. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Laku Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	5.04-,5,25	5,25-5,50	Semua OPD/BPS
2	PDRB per kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	35.877.624	38.324.079	41.500.000	
3	Laju inflasi	%	2,30	2 -2,6	2 – 2,6	
4	Indeks Gini	indeks	0,221	0,219	0,218	
5	Tingkat Kemiskinan	%	7,47	7,47-7,37	7,37-7,27	
6	Indeks pembangunan manusia	indeks	75,18	75,50	75,70	
7	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,23	1,22	1,21	
Kesejahteraan Sosial						
	Pendidikan					Dinas Pendidikan
1	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Poin	0,65	0,67	0,69	
2	Indeks Harapan Lama Sekolah	Poin	0,74	0,76	0,78	
3	Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	49,76	50,26	50,76	
4	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,49	99,79	100	
5	jumlah warga negara 16-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	87,61	88,11	88,61	
6	rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	skor	66,74	89,96	100	
7	Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	skor	66,98	85,49	100	
8	rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen nasional	skor	57,44	91,55	100	
9	rerata kompetensi	skor	45,63	58,72	71,81	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional					
10	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	14,92	18,66	22,39	
11	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV	Persen	40,13	40,81	41,49	
12	Indeks iklim keamanan SD	skor	72,57	81,23	89,89	
13	Indeks iklim keamanan SMP	skor	67,58	68,3	69,02	
14	Indeks iklim kebinekaan SD	skor	69,91	81,04	92,17	
15	Indeks iklim kebinekaan SMP	skor	66,8	74,17	81,54	
16	Indeks iklim Inklusivitas SD	skor	68,71	75,77	82,83	
17	Indeks iklim Inklusivitas SMP	skor	56,1	59,49	62,88	
18	AKIP	Nilai	B	63	67	
	Ketenagakerjaan	%	98,77	99,00	99,10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	0,12	0,13	0,14	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,12	0,13	0,14	
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS,Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	8,70	8,70	8,70	
4	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Pelayanan Urusan Wajib						
Terkait Pelayanan Dasar						
	Kesehatan					Dinas Kesehatan
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	Per 100.000 KH	77,00	13,00	26,00	
2	Jumlah Kematian Bayi	orang	33	20	20	
3	Angka Kesakitan (Morbilitas)	%	11,3	9,30	8,30	
4	Prevalensi Stunting	%	25,37	18,73	16,24	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data	
				2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	
5	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskemas	Kategori	N/A	Baik	Baik		
6	Indeks Kepuasan Layanan PSC 119	Kategori	N/A	Baik	Baik		
7	Indeks Kepuasan Layanan RSUD	Kategori	Baik	Baik	Baik		
8	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD	%	N/A	85	90		
9	Angka Morbilitas	%	N/A	40	38		
10	Cakupan Rumah Tangga ber PHBS	%	79	100	100		
11	AKIP	Nilai	N/A	63	67		
Pekerjaan Umum							
1	Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	93,61	90	95		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	62,48	62	65		
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	71	75	80		
4	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Persen	6,25	8	12		
5	Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	Persen	100	100%	100		
6	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	Persen	100	100%	100		
7	AKIP	Nilai	N/A	63	67		
Perumahan							
1	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	Persen	25,04	25	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Perencanaan Pembangunan							
1	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100%	100%	100%	Bappeda	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100%	100%	100%	
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam inovasi daerah	%	N/A	100%	100%	
4	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Perhubungan					
1	Rasio Konektivitas	Persen	87,50	87,60	87,70	Dinas Perhubungan
2	Persentase ketersediaan Fasilitas Jalan	Persen	55	70	70,10	
3	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Lingkungan Hidup					Dinas Lingkungan Hidup
1	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	60,7	74,61	74,81	
2	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	96,52	83,79	83,99	
3	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Poin	79,48	68,08	68,15	
4	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
	Penanaman Modal					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1	Pertumbuhan Investasi	%	13,01	13,10	13,15	
2	Peningkatan Investasi	%	23,19	23,30	23,50	
3	IKM Perijinan	indeks	78,366	79	79,50	
	Koperasi dan UKM					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Manangah, Perindustrian dan Perdagangan
1	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	unit	45	45	50	
2	Jumlah Koperasi Sehat	unit	25 koperasi	35 koperasi	40 koperasi	
3	Jumlah usaha kecil menengah yang bertumbuh	unit	1.744	1.859	1.914	
4	Jumlah UMKM yang terfasilitasi	unit	70	90	100	
5	AKIP	Nilai	B	63	67	
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Persentase Kepemilikan KTP	%	98,42%	99,50%	100%	
2	Persentase Kepemilikan KIA	%	63,66%	70,00%	75,00%	
3	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-17 tahun	%	99,23%	99,50%	100%	
4	Persentase Perkawinan Tercatat	%	40,11%	45%	50%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
5	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Ketenagakerjaan					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompeten	%	0,12	0,13	0,14	
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	8,70	8,70	8,70	
3	Persentase Peningkatan Investasi	%	13,01	13,10	13,15	
	Pemberdayaan Perempuan dan Anak					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Persentase perangkat daerah yang melakukan analisis ARG dalam penyusunan program / kegiatan	%	72,7	77,5	80	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,21	1,11	1,01	
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	53,77	63,77	73,77	
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	Angka	14,1	10,1	6,1	
3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	%	47,28	57,28	67,28	
4	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	100	100	100	
5	Persentase peserta KB aktif MKJP	%	47,28	57,28	67,28	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
6	Persentasae pelayanan KB pasca persalinan	%	3,68	18,68	33,68	
7	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	0,14	1,14	2,14	
8	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	%	16,18	46,18	76,18	
9	AKP	Nilai	N/A	63	67	
	Komunikasi dan Informatika					Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	65	92	95	
2	Persentase informasi/berita yang dipublikasikan di mas media dan radio	%	NA	100 %	100 %	
3	Persentase Khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	%	NA	75%	80%	
4	AKIP	AKIP	N/A	B	B	
	Pertanahan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Cakupan ketersediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum	Persen	64,96	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	21	14	8	
3	Jumlah Desa Berkembang	Desa	121	117	119	
4	Jumlah Desa Maju	Desa	19	29	32	
5	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	1	2	
6	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perintis	Unit	0	5	5	
7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pemula	Unit	13	2	2	
8	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	Unit	7	1	1	
9	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	Unit	0	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
10	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Orang	27	27	27	
11	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	5	5	5	
12	AKIP	Predikat	N/A	63	67	
	Perpustakaan					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	17,45	17,75	18,22	
2	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	41,35	60	65	
3	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	%	75	75	100	
4	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik	%	16	75	100	
5	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					Satuan Polisi Pamong Praja
1	Persentase danguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	100%	100%	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan)	%	80%	85%	90%	
3	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Kepemudaan dan Olah Raga					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	0,94	1,1	1,2	
2	Persentase Cabang Olahraga yang	%	25	30	40	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Berprestasi					
3	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Sosial					Dinas Sosial
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	10,20	10,30	10,40	
2	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	5,20	5,30	5,40	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	5,20	5,30	5,40	
4	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	5,20	5,30	5,40	
5	Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	Persen	59,80	59,85	59,95	
6	Persentase korban bencana alam dan sosial tingkat kabupaten yang mendapatkan penanganan pada saat bencana dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Persen	100	100	100	
7	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Kebudayaan					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
1	Persentase Kebudayaan Daerah yang Dikembangkan	%	100	100	100	
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	100	100	100	
3	Persentase Situs dan Benda Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	0	5	10	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah ormas yang terbina dan aktif	orang	147	147	147	
2	Jumlah kawasan bahaya narkoba menjadi kawasan waspada	kawasan	5	6	7	
3	Jumlah masyarakat yang menerima pendidikan wawasan kebangsaan	orang	100	100	200	
Ketahanan Pangan						
1	Skor Pola Pangan	skor	85,6	89,7	91,8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1	Persentase Konsumsi Energi Per kapita	%	92,32%	92,62%	92,77%	
2	Persentase Konsumsi Protein Per kapita	%	97,00%	98,00%	98,50%	
3	Ketersediaan pangan utama (produksi/tahun)	ton/tahun	43.276,26	43.325	43.923	
4	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita/hari	4.169	4.285	4.343	
5	Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita/hari	98,84	101,64	103,04	
6	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	%	N/A	70	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian						
1	Penerapan Pengamanan Informasi Persandian	jumlah	2	2	2	
Kearsipan						
1	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	%	75	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan	%	16	75	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Kesejahteraan Rakyat					
3	Meningkatnya SDM kearsipan terlatih	orang	100	100	100	
PELAYANAN URUSAN PILIHAN						
	Pertanian					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	129,04	130,1	130,3	
2	Produksi Tanaman Pangan					
	- Padi Sawah	Ton	85.215,18	86.196,00	86.685,75	
	- Jagung (ton pipilan kering)	Ton	296.941,02	297.384,68	297.482,52	
3	Produktivitas Tanaman Pangan					
	- Padi (ton/ha)	Ton/ha	5,22	5,28	5,31	
	- Jagung	Ton/Ha	6,07	6,08	6,08	
4	Produksi Tanaman Hortikultura					
	- Bawang Merah	Ton	5.402,50	5.404,93	5.406,35	
	- Cabe	Ton	8.995,15	8.937,51	8.944,91	
	- Kubis	Ton	4.394,80	4.396,82	4.398,74	
	- Kentang	Ton	9.428,40	9.570,30	9.855,00	
	- Durian	Ton	12.934,70	13.153,14	13.169,52	
5	Produktivitas Tanaman Hortikultura					
	- Bawang Merah	Ton/Ha	11,44	11,44	11,44	
	- Cabe	Ton/Ha	72,42	72,42	72,48	
	- Kubis	Ton/Ha	91,58	91,58	91,61	
	- Kentang	Ton/Ha	12,99	12,99	13,11	
	- Durian	Ton/Ha	16,04	16,04	16,06	
6	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) % (Tahun					
	- Kopi Arabika	Kg/ha/ Tahun	1.421,70	1.765,38	1.865,88	
	- Kopi Robusta	Kg/ha/ Tahun	899,77	1.103,94	1.154,69	
7	Produksi Daging	Ton	1971,84	2.081	2160,7	
8	Produksi Telur Ayam Buras dan Itik	Kg	828.370,00	870.285,52	896.394,09	
	Pariwisata					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
1	Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	%	100	100	100	
2	Persentase Kerjasama dan Promosi Kepariwisataaan yang Dilaksanakan	%	100	100	100	
3	Persentase Peningkatan	%	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Kapasitas SDM Keparisataan					
	Kelautan dan Perikanan					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1	Produksi Perikanan	Ton	3613,94	3613,94	3975,34	
2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	86,61	86,61	95,27	
3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.527,33	3.527,33	3.880,07	
	Perdagangan					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Manangah, Perindustrian dan Perdagangan
1	pengembangan sistem perdagangan secara elektronik/ <i>e-commerce</i>	system	1	1	1	
2	Jumlah pasar yang representatif	pasar	9	10	11	
3	Pengawasan penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar kemetrolgian	unit	600	600	600	
4	Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	unit	500	500	500	
	Perindustrian					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Manangah, Perindustrian dan Perdagangan
1	Jumlah pameran/promosi produk daerah	pamera n	12	12	12	
2	Jumlah IKM yang tersertifikasi	IKM	16	20	22	
3	Jumlah unit usaha industri kecil menengah (IKM)	unit	748	758	763	
4	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM	orang	100	110	120	
5	Jumlah sentra IKM potensial	sentra	2	3	3	
6	Jumlah IKM yang meningkat teknologi industrianya	IKM	10	12	12	
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Kemampuan Ekonomi Daerah						
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian					Badan Pengelola Pendapatan Daerah
1	Persentase realisasi pajak daerah	%	90%	90%	90%	
2	Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah	%	2,50%	2,50%	2,50%	
3	Rasio pajak daerah terhadap pendapatan	%	13,5%	13,5%	13,5%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	asli daerah					
4	Cakupan monitoring dan evaluasi retribusi daerah	%	100%	100%	100%	
5	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	9,87	9,85	9	BPKAD
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurang transfer expenditures)	%	88,54	89,90	90	
3	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	110,05	110,05	110,05	
4	Deviasi realisasi terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100,55	100,55	100,55	
5	Persentase asset yang terinventarisasi	%	75	75	76	
6	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8,45	8,30	8.30	
7	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Nilai	N/A	11	11,5	Sekretariat Daerah
2	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Nilai	N/A	3,1	3,2	
3	Nilai AKIP	Nilai	-	63	65	
4	Persentase Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Struktur	%	85%	90%	95%	
5	Persentase Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Yang Difasilitasi	%	100%	100%	100%	
6	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Nilai	N/A	11	11,5	
7	Persentase bahan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Persentase bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Persentase Produk hukum yang	%	100,00%	100,00%	100,00%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	diharmonisasi					
10	Persentase bahan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100,00%	100,00%	100,00%	
11	Persentase kegiatan fisik yang dimonitoring dan dievaluasi	%		80%	85,00%	
12	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	%	100,00%	70,00%	75,00%	
Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur						
1	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang	829	1000	1100	BPBD
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	829	1000	1100	
3	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100%	100%	100%	
4	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100%	100%	100%	
5	Persentase Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Persen	73,07%	80%	85%	
6	AKIP	Nilai	B	63	67	
Fokus Iklim Berinvestasi						
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawian					Sekretariat Daerah
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	B	CC	B	
2	Penerapan replikasi jejaring inovasi daerah	%	100%	100%	100%	
3	Dokumen pemetaan produk unggulan	dokumen	4	6	7	
4	Dokumen kajian penelitian dan pengembangan	dokumen	5	5,8	6,2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab / Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
5	Terbangunnya penerapan sistem manajemen berbasis e-kelitbangan	%	100%	100%	100%	
1	Opini laporan keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	BKAD
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
3	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
4	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	%	50	75	80	
5	Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	%	100	100	100	
6	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	88,1	90	90	Inspektorat
7	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	
8	AKIP	Predikat	N/A	63	67	
1	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,82	3,2	3,4	Sekretariat Daerah
2	Nilai EPPD	Nilai	2,2	3,01	3,1	
3	Indeks Reformasi Hukum	Poin	N/A	70	75	
4	Nilai Kabupaten peduli HAM	Nilai		89	90	
5	Persentase Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Persen	N/A	100	100	
6	Persentase Penigkatan Kapasitas Pelaku Perekonomian	Persen	N/A	5	7	
7	Persentase Program Prioritas Pembangunan yang dikendalikan, dievaluasi dan dilaporkan	Persen	N/A	100	100	
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	35,5	50	50	
9	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Persen		70	80	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
10	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	2,7	2,8	2,9	
11	Persentase Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Struktur					
12	Persentase Lokus UPP dengan predikat minimal B	Persen	N/A	50	60	
13	Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Persen	N/A	100	100	
14	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	N/A	100	100	
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Setwan
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3	Persentase Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	Persen	47	57	67	
4	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
Sumber Daya Manusia						
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian					BKPSDM
1	Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal Baik	Persen	100	100	100	
2	Persentase penurunan disiplin pegawai	Persen	0,04	0,17	0,13	
3	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Persen	71,44	79,13	79,24	
4	Persentase ASN yang	Persen	61,32	52,92	53,34	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	memiliki pendidikan tinggi					
5	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Indeks	79,00	79,24	79,40	Kecamatan/Kelurahan
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kelurahan di Kecamatan Sidikalang	Indeks	79,00	79,24	79,40	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Indeks	78,00	78,24	78,40	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Pegagan Julu I	Indeks	78,00	78,24	78,40	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-pungga	Indeks	77,60	77,84	78,00	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Parongil	Indeks	77,60	77,84	78,00	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Indeks	77,40	77,64	77,80	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tigalingga	Indeks	78,20	78,44	78,60	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tanah Pinem	Indeks	77,80	78,04	78,20	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Indeks	76,80	77,04	77,20	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun		OPD Penanggungjawab /Sumber Data
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Parbuluan	Indeks	77,20	77,44	77,60	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Indeks	76,60	76,84	77,00	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Indeks	77,00	77,24	77,40	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
16	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Lae Parira	Indeks	75,60	75,84	76,00	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gunung Sitember	Indeks	75,40	75,64	75,80	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
18	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	Indeks	75,80	76,04	76,20	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
19	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silahisabungan	Indeks	76,40	76,64	76,80	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
20	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sitinjo	Indeks	76,20	76,44	76,60	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Panji Dabutar	Indeks	76,20	76,44	76,60	
	AKIP	Nilai	N/A	63	67	

BAB IX

PENUTUP

Bab Penutup menjelaskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah agar dapat berfungsi sebagai panduan dalam mengelola kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasi antara Kabupaten Dairi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.

Kabupaten Dairi memiliki kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2024. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2024 akan diisi oleh pejabat sampai pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 kemudian dikeluarkan sebagai panduan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024. Tujuan dari aturan ini adalah memberikan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan bagi daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Dairi yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi pada periode 2025-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Dairi, serta memerhatikan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RPJMN.

9.1 Pedoman Transisi

Untuk menjaga keselarasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2025-2026, diperlukan panduan transisi.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun

terkait (2025-2026), arah kebijakan, dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi, serta mengikuti RPD Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan keselarasan program pembangunan Kabupaten dengan pembangunan provinsi. Panduan transisi juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah berakhirnya RPD. Sebagai langkah menuju kelanjutan pembangunan Kabupaten Dairi, pedoman transisi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2025 akan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yang saat ini masih dalam proses untuk di-Perkadakan. Meskipun demikian, rancangan RPD tersebut sudah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD 2025 sembari menunggu penetapan dokumen resmi RPD Kabupaten Dairi. Pentingnya RKPD Tahun 2025 adalah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas yang terdapat dalam RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

2. RKPD Tahun 2026

RKPD tahun 2026 akan disusun bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penyusunan RKPD 2025 dan 2026 selain memedomani RPD Kabupaten Dairi 2025-2026, juga perlu memperhatikan rancangan RPJPD 2025-2045, mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Utara untuk keselarasan program pembangunan kabupaten dengan pembangunan provinsi. serta visi, misi, dan program prioritas Kepala daerah terpilih hasil Pilkada tahun 2024. Pedoman transisi di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi/peraturan atau kebijakan yang berlaku.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merujuk pada peraturan yang mengatur eksekusi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2025-2026. Tujuan dari penyusunan kaidah pelaksanaan ini adalah untuk memastikan terciptanya koordinasi dan kelangsungan program, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas baik dalam aspek pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Selain itu, penyusunan kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berikut adalah kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2025-2026:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Dairi tahun 2025-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2025 hingga 2026;
3. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas;
4. Pemerintah Kabupaten Dairi wajib menyebarluaskan Perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Mengingat tanggung jawab yang sangat besar, kita bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap agar tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah ini dapat dijalankan dengan sukses, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELLENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010